

LANDASAN ILMU PENDIDIKAN

MATRIKULASI 2022

Dosen Pengampu: Prof. Dr. Neti Karnati, M.Pd



OLEH :

9917922005-Yakub Hendrawan Perangin Angin
9917922013-Ramsan Sinaga
9917922004-Tri Astuti Yeniretnowati
9917922025-Beni Aminulah
9911922003-Muhammad Arjul
9911922008-Zulaika
9904922004-Andi Amry Yahya
9904922010-Bambang Supriyanto
9908922003-Hery Susanto
9913922003-Stefanus Timonora Wahyu Ariyanto
9913922004-Ardiansyahroni
9913922005-Helvy Yunida
9902922001-Andi Anugrah
9913921016-Besse Arnawisuda Ningsi
9913921018-Candra
9904920007-Bayu Prasetio
9904921038 - Faridah Ismiyati
9904921037 - Sri Wahyuni
9908922005 - Titus Pekei
9902921032 - Jannus Maurits Nainggolan
9904922019 - Putu Citra Pernama Dewi



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



KATA PENGANTAR

*P*uji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya sehingga buku Landasan Ilmu Pendidikan ini dapat diselesaikan. Buku ini sangat tepat untuk dipakai sebagai referensi bagi mahasiswa perguruan tinggi khususnya mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap Ilmu Pendidikan.

Semula Buku teks ini merupakan bahan paparan dalam kuliah matrikulasi Pascasarjana Universeitas Negeri Jakarta tahun 2022. Karena materi yang dipaparkan sangat bermanfaat dan sudah melalui perbaikan bersama dosen pengampu mata kuliah, maka diterbitkan secara nasional supaya dapat dinikmati oleh berbagai pihak khususnya para mahasiswa jurusan Pendidikan.

Isi buku ini terdiri dari 13 Bab, yaitu Bab 1 membahas tentang landasan pendidikan; Bab 2 komponen pendidikan; Bab 3 ontologi, epistemologi dan axiologi pendidikan; Bab 4 aliran baru pendidikan; Bab 5 hakekat dan esensi manusia; Bab 6 sejarah pendidikan di Indonesia; Bab 7 masalah-masalah pendidikan di Indonesia; Bab 8 landasan filsafat, psikologis dalam pendidikan; Bab 9 landasan yuridis, ekonomis dan religis pendidikan; Bab 10 konsep pengembangan karir tenaga pendidik; Bab 11 problematika tunjangan sertifikasi guru; Bab 12 pendidikan inklusi; Bab 13 pendidikan karakter dan pendidikan berbasis masyarakat.

Buku ini tidak dapat terwujud jika tidak ada dorongan dari berbagai pihak. Kami menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan yaitu **Prof. Dr. Neti Karnati, M.Pd** atas arahan dan masukan sehingga buku ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Buku ini tidak luput dari factor kesalahan baik tampilan maupun kata dalam kalimat EYD yang memenuhi standar tulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para ahli sangat diperlukan dalam menyempurnakan buku ini. Semoga bermanfaat. Amin.

Jakarta, september 2022
penulis



DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
BAB 1. LANDASAN PENDIDIKAN	1
A. Hakikat Pendidikan.....	1
B. Pendidikan Sebagai Suatu Sistem	7
C. Komponen – Komponen Pendidikan	8
D. Hakikat Manusia dan Pengembangannya.....	10
E. Pilar – Pilar Pendidikan UNESCO.....	15
F. Pendidikan Sepanjang Hayat	22
G. Landasan – Landasan Pendidikan	25
BAB 2. KOMPONEN PENDIDIKAN.....	36
A. Komponen Tujuan	36
B. Komponen Siswa	36
C. Komponen Pendidik	37
D. Komponen Materi.....	38
E. Komponen Lingkungan Pendidikan.....	39
F. Komponen Alat.....	39
G. Landasan – Landasan Pendidikan	
BAB 3. ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AXIOLOGI.....	40
A. Ontologi Ilmu Pendidikan.....	40
B. Ontologi Ilmu Pendidikan	45
C. Axiologi Ilmu Pendidikan.....	51
BAB 4. ALIRAN BARU PENDIDIKAN	57
A. Aliran-aliran Baru dalam Pendidikan dan Pengajaran	57
B. Aliran Gerakan Baru Pendidikan	57
C. Pengaruh Gerakan Baru Dalam Pendidikan	61
D. Tokoh-Tokoh Pelopor Aliran Baru Dalam Pendidikan	62
BAB 5. HAKEKAT DAN ESSENSI MANUSIA	64
A. Mengetahui Manusia Sebagai Makhluk Ciptaan Tuhan	64
B. Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial	66
C. Konsep Antropologi	69
D. Hakekat manusia dan sesi sosiologi	72
E. Mengetahui hakekat manusia dari segi psikologi	78
F. Manusia menurut pola pemikiran sosial-budaya	79
G. Hakekat Manusia Dari Segi Dimensiologi	80
BAB 6. SEJARAH PENDIDIKAN DI INDONESIA	83



A. Kondisi Pendidikan Pada Zaman Kolonial	83
B. Kondisi Pendidikan Pada Zaman Jepang	87
C. Kondisi Pendidikan Zaman Pergerakan Kemerdekaan	88
D. Kondisi Pendidikan Pada Zaman Orde Baru	89
E. Kondisi Pendidikan Pada Masa Reformasi	91
BAB 7. MASALAH-MASALAH PENDIDIKAN DI INDONESIA	95
A. Masalah Pemerataan Pendidikan	95
B. Masalah Mutu Pendidikan	101
C. Masalah Efisiensi Pendidikan	107
D. Masalah Relevansi Pendidikan	110
BAB 8. LANDASAN Filsafat, PSIKOLOGI, DAN SOSIOLOGI DALAM PENDIDIKAN	112
A. Filsafat	112
B. Objek Material Filsafat	114
C. Psikologi	129
D. Sosiologi	144
BAB 9. LANDASAN YURIDIS, EKONOMIS DAN RELIGIS DALAM PENDIDIKAN	161
A. Landasan Yuridis Dalam Pendidikan	161
B. Landasan Ekonomi Pendidikan	183
C. Landasan Religius Dalam Pendidikan	186
BAB 10. KONSEP PENGEMBANGAN KARIR TENAGA PENDIDIK.....	189
A. Konsep Pengembangan Karir	189
B. Konsep Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	193
C. Pengembangan Karir bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	195
BAB 11. PROBLEMATIKA TUNJANGAN SERTIFIKASI PROFESI BAGI GURU PNS	202
A. Definisi dan Hakikat Sertifikasi Guru	202
B. Problematika Sertifikasi Guru	203
C. Kebijakan Sertifikasi Guru PNS	206
D. Perspektif Pelayanan Publik	207
BAB 12. PENDIDIKAN INKLUSIF	211
A. Pendidikan Inklusif	211
B. Pendidikan Multikultural	222
BAB 13. PENDIDIKAN KARAKTER DAN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT	234
A. Konsep Pendidikan, Karakter Dan Masyarakat Secara Umum	234
B. Definisi Konseptual Tentang Pendidikan Karakter	242
DAFTAR PUSTAKA.....	243



DAFTAR TABEL

Tabel 9.1 Pasal Pendidikan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945	168
Tabel 13.1 Nilai-Nilai Karakter	238



BAB 1

LANDASAN PENDIDIKAN

A. Hakikat Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan sebagai upaya manusia untuk manusia adalah aspek dan hasil budaya terbaik yang mampu disediakan setiap generasi komunitas manusia untuk kepentingan generasi manusia muda agar dapat melanjutkan kehidupan dan cara hidup mereka dalam konteks sosio-budaya mereka pula. Setiap masyarakat pluralistic di zaman modern soyogiyannya berharap menugaskan kelompok warganya yang terplih sebagai pendidik, untuk melaksanakan tugas pembinaan pribadi manusia dari generasi peserta didik bag kepentingan kelanjutan dari masing-masing masyarakat yang bersangkutan (Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2007). Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kribadianya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau pedagogie, berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar dia menjadi orang dewasa. Selanjutnya, pendidikan di artikan sebagai usaha yang dijalankan seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental (Sudirman, 1992).

Kenyataannya, pengertian pendidikan ini selalu mengalami perkembangan, meskipun secara essential tidak jauh berbeda. Berikut ini akan dikemukakan sejumlah pengertian pendidikan.

a) Ki Hajar Dewantara

Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidupnya yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

b) Langeveld

Pendidikan ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datang dari orang dewasa.

c) John Dewey

Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.



d) J.J Rousseau

Pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masakanak-kanak, akan tetapi kita membutukannya pada waktu dewasa.

Carter V. Gooda. menyatakan :

“Pedagogy is the art, practice or profession of teaching. The systematized learning or instruction concerning principles and methods of teaching and of student control and guidance, largely replaced by the term education”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendidikan ialah:

- a) Seni, praktik, atau profesi sebagai pengajar
- b) Ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan dan bimbingan murid, dalam arti luas digantikan dengan istilah pendidikan (Hasbullah, 1999).

Dari beberapa pengertian pendidikan yang diberikan oleh para ahli tersebut, berbeda secara redaksional, namun secara esensial terdapat kesatuan unsur-unsur atau faktor-faktor yang terdapat didalamnya.

Unsur-unsur esensial didalam pengertian pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Pembinaan (kepribadian), pengembangan (kemampuan atau potensi diri), peningkatan (pengetahuan) serta tujuan (kearah mana peserta didik akan diharapkan akan mengaktualisasikan dirinya seoptimal mungkin.
- b) Ada hubungan antara kedua belah pihak (pendidik dan peserta didik)
- c) Aktifitas pendidikan berlangsung dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Pendidikan merupakan fenomena manusia yang fundamental yang juga mempunyai sifat konstruktif dalam hidup manusia. Karena itulah kita dituntut untuk mampu mengadakan refleksi ilmiah tentang pendidikan tersebut, sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan, yaitu mendidik dan dididik. Dalam konteks ini kita tidak boleh mencampuradukkan antara pengertian pendidikan sebagai tindakan manusia dalam usahanya membimbing manusia yang lain, dengan pengertian ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Secara historis, pendidikan jauh lebih tua dari ilmu pendidikan, sebab pendidikan telah ada sejak adanya manusia. Sedangkan ilmu pendidikan baru lahir kira-kira pada abad ke-19. Sebelum adanya ilmu pendidikan, manusia melakukan tindakan mendidik didasarkan atas pengalaman, intuisi dan kebijaksanaan (Hasbullah, 1999).



2. Tujuan Pendidikan

Ilmu pendidikan bertujuan memberikan informasi atau keterangan tentang dasar-dasar pendidikan dalam berbagai situasi atau interaksi pendidikan, jalur dan jenis jenjang pendidikan untuk membekali peserta didik mencapai kehidupan yang berbudaya dan mandiri yang lebih baik di masa depannya. Memberikan informasi dalam arti menjelaskan permasalahan, sebab-sebab dan kemungkinan mengupayakan dan pembekalan bagi pendidik dalam mendidik putra putrinya atau generasi berikutnya (Tim pengembangan Ilmu Pendidikan FIP-UPI, Bag 4, 2007). Dari penjelasan di atas jelas ada sebuah perbedaan yang mendasar antara tujuan ilmu pendidikan dan tujuan pendidikan. Tujuan ilmu pendidik ditujukan untuk mempersiapkan para pendidik-pendidik yang profesional. Sedangkan tujuan pendidikan ditujukan untuk mengembangkan peserta didik untuk mencapai pengembangan diri secara optimal.

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional terdapat dalam pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 yang berbunyi:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

3. Fungsi Pendidikan

Ilmu pendidikan yang sering juga disebut yang sering juga disebut sebagai pedagogik merupakan suatu disiplin ilmu yang terkait dengan proses peradaban, pemberdayaan dan pendewasaan manusia. Dalam konteks ini pendidikan mempunyai tiga fungsi utama yaitu fungsi integrative, fungsi egalitarian, dan pengembangan. Ketiga fungsi pendidikan ini harus menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan secara nasional. Ini sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan FIP-UPI Bag 1, 2007)

Fungsi pendidikan nasional memang sangat menjadi perhatian utama. Tidak hanya untuk pemerintah saja, saat musim pencalonan diri, pendidikan pun dijadikan salah satu alat untuk mengumbar janji ke masyarakat, agar di pilih. Darisini menunjukkan bahwa pendidikan masih menjadi poin penting dan kesadaran masyarakat terhadap dunia pendidikan pun juga sudah baik.

a) Menciptakan Generasi Penerus Bangsa

Fungsi pendidikan nasional tentu saja menciptakan generasi penerus bangsa. Tanpa generasi muda saat ini, maka tidak ada harapan yang bisa di estafetkan. Itu sebabnya, generasi anak-anak yang sekarang ada, penting sekali diberikan pendidikan yang layak. Kelayakan dalam arti ini tidak melulu secara sarana saja, tetapi secara psikologis mempersiapkan dan meletakkan calon penerus agar bisa berfikir berfikir kritis. Salah satu upaya menciptakan



generasi penerus bangsa ini sudah dilakukan oleh pahlawan. Salah satunya Ki Hajar Dewantara. Saat beliau di buru Belanda dan hendak di hukum, Ki Hajar memilih diasingkan ke Belanda. Dari pengasingan itulah, beliau belajar dan menimba ilmu. Sepulang dari pengasingan, beliau pun menularkan ilmu pendidikan berbasis pendidikan lokal.

Dari situlah beliau mulai fokus pada dunia pendidikan. Beliau pun mendirikan sekolah taman peserta didik yang melahirkan banyak penerus bangsa yang mendunia. Tidak heran jika beliau dinobatkan sebagai bapak pendidikan yang pemikirannya pun cemerlang. Dari secuil cerita ini, menunjukkan bahwa fungsi pendidikan nasional itu seperti pendidikan yang ada saat ini. dimana, hanya belajar dan belajar saja. Ada banyak perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan bangsa kita, salah satunya menegakan hak belajar bagi kaum Wanita yang diperjuangkan RA Kartini.

b) Dapat dijadikan Untuk Mengukur Kepedulian terhadap generasi bangsa

Fungsi pendidikan ternyata juga dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kepedulian terhadap generasi bangsa. Kemudian diatur dalam Undang-undang no. 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 6 yang berisi bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab akan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Secara tidak langsung, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peranan besar untuk mengawal pendidikan. Jadi posisi masyarakat selain sebagai pelaksana pendidikan, juga sebagai control. Misalnya, di lembaga pendidikan terjadi penyelewengan wewenang, maka masyarakat secara tidak langsung membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan.

c) Media transformasi nilai dan transformasi ilmu pengetahuan

Seperti yang disebutkan di bab sebelumnya, bahwasanya fungsi dari pendidikan nasional tidak lain dan tidak bukan sebagai media transformasi. Mulai dari transformasi kepemimpinan, transformasi ilmu pengetahuan dan transformasi kreativitas dan inovasi. Tanpa adanya transformasi, tidak bisa dibayangkan betapa berantakan tatanan masyarakat karena tidak memiliki aturan, tidak memiliki sopan santun dan tidak memiliki moral. Ironisnya, jika tidak terjadi transformasi, ilmu pengetahuan akan terputus. Saat ilmu pengetahuan terputus, maka banyak pemikiran sumbu pendek yang mengancam tatanan masyarakat. Misalnya, mudah berkelahi, hilang rasa kemanusiaan, hilang integritas dan masih banyak lagi. Dengan kata lain, dengan adanya transformasi, segala ilmu pengetahuan akan tetap langgeng dan akan terus berkembang. Semakin berkembang ilmu pengetahuan, semakin cemerlang perspektif atau pemikiran masyarakat terhadap persoalan dan permasalahan hidup. Sehingga hidup lebih damai, dan tentu saja mengurangi terjadinya ketimpangan dan kesenjangan. Jadi, fungsi pendidikan nasional itu memang sangat berpengaruh besar di segala sektor. Termasuk pula dapat dimanfaatkan untuk transformasi nilai-nilai budaya. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia sebagai Negara kepulauan yang memiliki beragam budaya, suku dan ras yang jika kita jaga, sangat luar biasa asset yang menjanjikan. Ditengah arus globalisasi



seperti ini, penting sekali mentransformasikan nilai budaya agar nilai- nilai budayanya tidak hilang begitu saja.

d) **Membentuk Karakter Bangsa**

Fungsi lain dari pendidikan nasional adalah membentuk karakter bangsa. Semakin maju dunia pendidikan, maka semakin melek masyarakat. Ketika masyarakat sudah melek, maka sedikit permasalahan dan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit pula terjadi pertentangan atau permasalahan di bidang psikososial. Di ranah yang lain, semakin baik karakter semakin banyak generasi muda yang memiliki pemikiran brilian. Dimana mereka tidak hanya memiliki otak yang cerdas dan cemerlang, tetapi juga memiliki moral, martabat dan integritas yang baik.

4. Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat diketahui bahwa terdapat jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai berikut:

a. **Jalur Pendidikan**

1) **Pendidikan Formal**

Pendidikan formal adalah sebuah zona pengetahuan yang tersusun serta bertingkat berlaku dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Triyanto, 2014).

2) **Pendidikan Nonformal**

Pendidikan nonformal yaitu garis pendidikan di luar pendidikan formal yang mampu dilaksanakan dengan tersusun serta juga bertingkat. Pendidikan nonformal berguna supaya dapat menumbuhkan kecakapan seorang murid dengan pemusatan terhadap penguasaan wawasan, keterampilan praktis, dan pertumbuhan perilaku serta karakter berpengalaman. (Triyanto, 2014).

Efek dari pendidikan ini bisa diibaratkan sejajar dengan efek rencana pendidikan formal sesudah melewati metode pertimbangan penyetaraan oleh badan yang dipilih pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang berkaitan dengan ketentuannya (Triyanto, 2014)

3) **Pendidikan Informal**

Pendidikan informal merupakan garis pendidikan keluarga dan lingkungan. Aktivitas pendidikan informal dilaksanakan sama keluarga dan lingkungan bisa berupa aktivitas menuntut ilmu dengan individu. Efek yang diterimanya dinyatakan serupa dengan pendidikan formal dan nonformal sesudah murid lolos tes sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Triyanto, 2014)

b. **Jenjang Pendidikan**

Jenjang pendidikan merupakan sebuah proses pendidikan berkesinambungan yang



disahkan beralaskan jenjang pertumbuhan seorang murid, kelonggaran serta ketajaman materi pendidikan (Tirtarahardja, Umar dan Sulo, 2012).

1) Jenjang Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar diadakan supaya dapat mewariskan persiapan awal yang dibutuhkan agar bisa bersosialisasi di lingkungannya baik berbentuk pertumbuhan karakter, wawasan, dan sifat. Selain itu berguna untuk menyiapkan seorang murid dalam mencukupi kualifikasi agar bisa ke jenjang berikutnya (Tirtarahardja, Umar dan Sulo, 2012).

2) Jenjang Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah dengan masa sekolahnya enam semester setelah pendidikan dasar, diadakan pada SLTA atau Satuan Pendidikan yang sederajat. Pendidikan menengah pada ikatan ke bawah berguna untuk terusan serta pengembangan dari pendidikan dasar, serta pada berhubungan ke atas menyiapkan seorang murid supaya dapat meneruskan ke pendidikan tinggi maupun merambah ke dunia pekerjaan (Tirtarahardja, Umar dan Sulo, 2012)

3) Jenjang Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah kesinambungan pendidikan menengah, diadakan supaya dapat mempersiapkan seorang murid menjadi bagian masyarakat yang memiliki keahlian teoretis serta profesional yang bisa mempraktikkan, menumbuhkan, dan membuat sebuah materi di bidang wawasan, riset, serta keindahan (Tirtarahardja, Umar dan Sulo, 2012)

c. Jenis Pendidikan

Terdapat beberapa jenis dalam dunia pendidikan yaitu meliputi:

1) Pendidikan Umum

Pendidikan umum adalah pemahaman dengan memprioritaskan penambahan wawasan serta kecakapan seorang murid terhadap pengutamaan yang diibaratkan ketika waktu selesai pendidikan. Pendidikan umum berguna untuk tumpuan universal bagi pendidikan lainnya. Yang terlibat pada kategori ini yaitu SD, SMP, SMA, dan Universitas (Tirtarahardja, Umar dan Sulo, 2012)

2) Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan merupakan pemahaman dengan menyiapkan seorang murid supaya siap bertugas sesuai keahliannya masing-masing. Badan pendidikannya seperti STM, SMTK, SMIP, SMIK, SMEA (Tirtarahardja, Umar dan Sulo, 2012)

3) Pendidikan Luar Biasa

Pendidikan luar biasa adalah pemahaman tertentu yang diadakan buat seorang murid yang mempunyai gangguan jasmani dan rohani. Yang tergolong pendidikan luar biasa yaitu SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) untuk jenjang pendidikan menengah serta



mempunyai strategi tertentu adalah strategi yang dibuat untuk murid yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak memiliki badan yang sempurna serta murid yang mempunyai daya pikir lambat (Tirtarahardja, Umar dan Sulo, 2012)

4) Pendidikan Kedinasan

Pendidikan kedinasan adalah pemahaman terpilih yang diadakan supaya dapat memajukan keahlian pada perwujudan kewajiban kedinasan buat taruna personel suatu departemen pemerintah (Tirtarahardja, Umar dan Sulo, 2012)

5) Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan adalah pemahaman terpilih yang menyiapkan seorang murid supaya bisa melakukan kewajiban yang memaksa untuk menguasai wawasan berkaitan dengan keagamaan (Tirtarahardja, Umar dan Sulo, 2012)

B. Pendidikan Sebagai Suatu Sistem

Pendidikan sebagai sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Dalam proses atau kegiatan pendidikan terdapat beberapa komponen yang harus dimiliki seperti tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, metode, media dan alat pendidikan, materi pendidikan, serta lingkungan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari suatu pendidikan.

Pada saat sekarang ini sistem pendidikan di Indonesia masih menganut sistem pendidikan nasional yang mana pemerintah lebih memiliki peran yang paling banyak dalam menjalankan sistem pendidikan. Sistem pendidikan dikelola secara sentralistik dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, yang mana semua komponen pendidikan dan proses pendidikannya diatur oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk semua sekolah di Indonesia termasuk sekolah yang di pelosok tanah air. Komponen merupakan sektor dari sebuah sistem yang melakukan tugasnya supaya dapat membantu upaya dalam memperoleh maksud dari sistem. Semua sistem memiliki sebuah misi agar bisa menggapai sebuah wujud tersebut. Maka dari itu dibutuhkan suatu metode supaya bisa menggantikan masukan (*input*) menjadi hasil (*output*). Sebuah metode akan dilaksanakan oleh pendidik dengan harapan dapat mengubah tingkah laku seorang murid. Sehingga pendidik membagikan tugas yang begitu utama agar bisa menggapai sesuatu hal yang paling tinggi. Contohnya, semula murid menjalani metode pendidikan, mereka tidak akan mengetahui rancangan mengenai , tapi setelah mereka menjalani metode belajar, mereka akan bisa mengetahui mengenai rancangan , maka dari itu bisa disebutkan bahwa seorang murid tersebut sudah belajar. Hingga akhirnya dalam proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari beberapa hal yaitu: input, proses, dan *output* (Qomarudin, 2021).

Selanjutnya ada *outcome* yang di suatu metode pengkajian yaitu kebergunaan dari *output* pada suatu metode yang begitu besar atau metode sejenisnya yang istimewa. Bukan hanya itu, *outcome* bisa



dimaknai dengan pengaruh yang dihasilkan oleh *output*, yang secara sederhana bahwa *outcome* adalah patokan kebergunaan *output*.

Outcome pengkajian bisa bersifat segimana tinggi skor atau kemahiran belajar yang dicapai pada pengkajian yang mempunyai maksud atau bisa menunjang kesuksesan pengkajian sejenisnya yang istimewa (Qomarudin, 2021).

C. Komponen – Komponen Pendidikan

Terdapat beberapa komponen pendidikan (Qomarudin, 2021), antara lain sebagai berikut:

- a) Tujuan, yaitu elemen paling utama pada metode pengkajian yang menjadi arah dalam melangkah, yang disesuaikan pada ketentuan kapasitas kurikulum yang ditetapkan pada seluruh satuan pendidikan.
- b) Peserta didik (murid), merupakan organisme spesifik yang tumbuh berdasarkan pada tingkat pertumbuhannya. Pertumbuhan seorang murid merupakan pertumbuhan semua sudut pandang individunya, namun jangka serta ketanggapan pertumbuhannya akan selalu berbeda pada setiap murid. Metode pengkajian bisa didorong sesuai pertumbuhan murid yang berbeda, selain dengan sikap sejenisnya yang terpaku pada individu murid.
- c) Pendidik, merupakan elemen yang dapat menetapkan pada pelaksanaan sebuah metode pengkajian. Kesuksesan dalam pelaksanaan sebuah metode pengkajian bisa terkait dengan keahlian pendidik dalam memakai cara, gaya, dan strategi pada pengajarannya. Pada metode pengajaran, pendidik tidak selalu bertugas sebagai figur atau contoh untuk seorang murid yang di didiknya, namun bisa juga sebagai pemimpin pengkajian. Daripada itu, keefektifan metode pengkajian berada pada bahu seorang pendidik. Dari sebab itu, kesuksesan sebuah metode pengkajian begitu ditetapkan dari bobot serta kemahiran pendidik.
- d) Materi, adalah pusat sebuah metode pengkajian yang nantinya untuk diberikan pada murid.
- e) Interaksi edukatif, yaitu metode hubungan antara seorang murid dan pendidik serta materi dalam sebuah pendidikan.
- f) Metode pendidikan, merupakan komponen yang bisa membuktikan kesuksesan dalam penggapaian suatu maksud. Sebab betapa komplis serta nyatanya elemen sejenisnya dengan minus dilaksanakan melewati metode atau prosedur yang benar, daripada itu elemen-elemen lain tidak ada artinya dalam metode penggapaian maksud.
- g) Penilaian, yaitu metode penyatuan serta pengerjaan data supaya dapat melihat penggapaian dari pendidikan seorang peserta didik.
- h) Alat Pendidikan, adalah semua sarana yang digunakan untuk menunjang proses Pendidikan. Terbagi menjadi dua jenis yaitu alat bersifat spriritual dan material.

Lingkungan merupakan sebuah ruang serta waktu yang bisa mendorong acara pendidikan. komponen ini terbagi dalam tiga macam yaitu:

1) Keluarga

Keluarga adalah lingkungan asli kawasan berkembangnya pertalian yang khusus terkait bagiannya. Pertalian yang terdapat di keluarga akan meninggalkan dampak pada anak yang bisa diperhatikan dalam pertalian yang bukan lingkungannya. Anak adalah gambaran kecil dalam suatu keluarga. Contohnya anak yang tidak baik di lingkungan pendidikan dasarnya di rumah atau di keluarganya mendapatkan bimbingan yang tidak baik dan minus perhatian. Di sekolah dia tidak baik supaya bisa mendapatkan simpati dari pendidik dan kawan-kawannya (Bafadhol, 2017)

Badan pendidikan keluarga yaitu pelopor awal kehidupan melewati tindakan wali murid. Dari itulah diletakan rasa perhatian, ketaatan, kekharismaan, etika, kewajaran, kebaikan, menghormati orang lain dan lain- lain. Kebalikannya tentang yang berwatak jelek pun bisa didapatkan anak melewati sebuah tindakan dalam keluarga, contoh egois, kotor, ngomong tidak baik, dan lain-lain (Bafadhol, 2017).

Zakiah Daradjat berpendapat tentang pergaulan keluarga yang berdampak pada kelangsungan yang bersifat individu serta sesuai, maka perlakuan kepadanya mempunyai makna yang begitu serius. Sebuah aktivitas keluarga yang benar, adalah perencanaan yang tepat dalam menjalani pelajaran di sekolah. Pada sebuah keluarga nantinya akan menimbulkan pertumbuhan anak yang benar. Anak nantinya dapat hidup serta bertumbuh dengan lazim. Urusan utama yang harus dibangun adalah kedamaian orang tua yang termasuk elemen utama dalam keluarga (Bafadhol, 2017).

2) Sekolah

Sekolah merupakan zona pendidikan yang begitu berdampak pada murid. Zona pendidikan sangat berselisih dengan zona sekolah, berupa keadaan, kewajiban, keleluasaan, serta pertemanan (Bafadhol, 2017).

Awalnya, sekolah selalu menjadi sebuah tempat yang dapat mendukung tergapainya masa depan keluarga dan masyarakat. Pada lingkungan sekolah murid belajar tentang materi yang tidak diberikan oleh orang tuanya. Di sini seorang murid dididik untuk menuruti perintah-perintah yang sudah diberlakukan dan dilaksanakan dengan erat ditambah dengan hukuman kepada murid yang melanggarnya. Kegiatan seperti itu tidak diterapkan di dalam keluarga (Bafadhol, 2017).

Kejadian tersebut membuat adanya ikatan pada keluarga dan sekolah sebagai zona serta badan akademi demi menjamin ikatan kerja sama. Wali murid mengetahui anak, tempatnya, serta pendidik anaknya. Situasi seperti itu akan dilihat wali murid dari rapor dan undangan pertemuan (Bafadhol, 2017).



3) Masyarakat

Pendidikan pada masyarakat bisa disebut dengan pendidikan secara tidak disengaja, sebab pendidikannya dilaksanakan dengan secara tidak sadar. Seorang murid harus mencari materi pendidikan dari pengalaman di lingkungannya. Ahmad D. Marimba berkata bahwa separuh pengalaman yang didapatkan di masyarakat tidak bisa disertakan pada golongan pendidikan, tetapi hanya bisa dimasukan kepada golongan pergaulan. Hal tersebut bisa dimengerti jika pendidikan dimaknai dengan cara nyata. Akibat di masyarakat, biasanya dirasakan dengan tidak nyata serta terlaksana tanpa adanya persiapan serta maksud yang tegas (Bafadhol, 2017).

D. Hakikat Manusia dan Pengembangannya

1. Sifat Hakikat Manusia

Ketika kita akan membicarakan tentang sifat hakikat manusia alangkah baiknya terlebih dahulu kita memahami arti dari kata manusia. Diambil dari bahasa sansekerta kata manusia terdiri dari “manu” dalam bahasa latin “mens” yang berarti berpikir dan memiliki akal. Harus disadari bagi pendidik betapa pentingnya memahami tentang hakikat manusia hal ini dapat diartikan sebagai sifat ataupun karakter dari setiap manusia tentunya yang beraneka ragam. Dengan kata lain manusia yaitu ciptaan Sang Pencipta dengan berbagai macam karakter yang dimiliki manusia satu dengan manusialainnya. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk dengan keadaan yang sempurna memiliki akal dan kecerdasan untuk berpikir sehingga dapat menunjukkan tentang hakikat dari manusia yaitu ciptaan Sang Khalik dengan berbagai kelebihan (Iswadi, 2019).

Berikut adalah hakikat manusia antara lain:

- a. Manusia dikatakan sebagai makhluk jasmani karena memiliki bentuk jasad yang tentunya ciri khasnya dapat dibedakan setiap individu masing-masing, walaupun pada hakikatnya sama. Dengan kata lain manusia memiliki unsur jasmaniyah yang tentunya dapat dirasakan atau disentuh jelas dan konkret keadaannya contohnya kepala, tangan, perut, kaki, serta masih banyak lagi. Unsur secara jasmani dan dapat terlihat jelas oleh mata. Manusia juga memiliki unsur tubuh yang tidak kasat mata, antara lain: organ dalam manusia yang tidak dapat terlihat, dan masih banyak lainnya.
- b. Manusia dikatakan sebagai makhluk berpikir. Hal ini dikarenakan setiap manusia dilahirkan ke dunia disertai dengan potensi untuk berpikir. Potensi inilah yang dapat membedakan setiap individu yang satu dengan yang lainnya ataupun dengan hewan. Memiliki akal dan pikiran dapat membuat, manusia berpikir yang terbaik dalam kehidupannya.
- c. Berpotensi bertumbuh kembang. Tentunya setiap individu diciptakan oleh sang

pencipta dengan potensi perkembangan yang berbeda-beda. Potensi tumbuh dan berkembang ialah karakter yang dimiliki setiap insan. Hal ini dikarenakan setiap manusia memiliki pertumbuhan dan perkembangan masing-masing, tetapi setiap proses dari pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia tentunya berbeda-beda. Hal ini tergantung dari dalam diri setiap manusia itu sendiri.

- d. Manusia adalah makhluk individu dikarenakan setiap manusia memiliki sifat perseorangan. Setiap makhluk hidup mempunyai potensi yang berbeda-beda.
- e. Manusia juga disebut makhluk sosial karena setiap manusia semenjak dilahirkan membutuhkan bantuan manusia lain supaya manusia tersebut mampu untuk melanjutkan kehidupannya. Begitupun setiap individu memerlukan bantuan dari individu yang lainnya supaya terpenuhi setiap kebutuhan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Sebagai contoh ketika seorang bayi dilahirkan pertama kali di dunia pastinya membutuhkan bantuan orang lain. Jika tidak, bayi tersebut dapat meninggal dunia. Sehingga dapat dikatakan setiap individu mempunyai kaitan erat dengan individu lainnya. Saling memiliki keterikatan, setiap individu membutuhkan bantuan dari individu yang lainnya.
- f. Manusia disebut sebagai makhluk susila. Dikatakan makhluk susila, karena manusia harus taat dan patuh terhadap aturan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dimana saja manusia tersebut berada selalu bertingkah laku sesuai tata nilai dan norma-norma yang ada, Hal ini membuat manusia adalah makhluk yang bersusila atau bermoral. Namun sayangnya tidak setiap manusia memiliki sifat tersebut, manusia yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku disebut sebagai manusia yang tidak bermoral.

2. Dimensi-dimensi Hakikat Manusia serta Potensi, Keunikan, dan Dinamikanya
Manusia dapat disebut sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk individu.

Terdapat empat dimensi dalam hakikat manusia (Ikhsan, 2018) empat dimensi tersebut yaitu antara lain: dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dimensi keberagamaan. Pembahasan dari empat dimensi tersebut antara yaitu:

a. Dimensi Keindividualan

Semenjak dilahirkan di dunia manusia telah diberikan potensi masing-masing oleh Sang Pencipta yang tentunya berbeda dari setiap manusia yang lain. Sejatinya tidak ada satupun manusia individu di dunia ini yang identik dengan yang lainnya sekalipun dengan kembarannya sendiri. Dimensi keindividualan adalah kesatuan pribadi yang di dalamnya terdapat unsur jasmaniah dan rohaniah. Setiap individu dapat dikatakan unik karena pasti memiliki perbedaan dengan individu yang lainnya.

Menyanggapi untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri adalah salah satu ciri



khas yang menandakan adanya individualitas yang tertanam di diri setiap manusia. Karakter tersebut tergambar jelas dari bakat dan potensi yang dibawa semenjak manusia tersebut terlahir di dunia tentunya sangat perlu untuk dikembangkan. Perkembangan hal tersebut didapatkan dari pendidikan. Karena tanpa adanya pembinaan dalam pendidikan tersebut, bibit-bibit individualitas dapat menyebabkan karakter atau pribadi dari seseorang tidak terbentuk secara optimal. Sejatinya pendidikan memiliki peranan penting dalam terbentuknya suatu karakter pribadi dari setiap peserta didiknya. Jika metode pendidikan yang diterapkan cocok terhadap peserta didik maka dapat mengembangkan bakat-bakat dari setiap individu. Pola pendidikan yang perlu dihindari yaitu pendidikan yang bersifat otoriter. Hal tersebut dapat membuat perkembangan dari bakat yang ada dalam individu tersebut menjadi terhambat. Oleh sebab itu, penting sekali memilih pola pendidikan yang benar agar supaya dapat mendukung pertumbuhan potensi setiap individu dapat berjalan secara optimal.

b. Dimensi Kesosialan

Sejak dilahirkan, setiap individu diberikan anugerah untuk dapat bersosialisasi dengan individu lainnya. Hal ini dapat diartikan bahwa masing-masing individu berkomunikasi satu sama lain agar dapat saling memberi dan menerima. Karena terdapat dimensi kesosialan pada setiap diri individu, tampak terlihat jelas mendorong manusia untuk saling bersosialisasi. Karena adanya dorongan tersebut, maka setiap orang terdorong untuk saling berkomunikasi dengan individu lain, dapat meningkatkan hobi dan minatnya, mampu mengoptimalkan karakter dan mimpi-mimpinya, yang dituangkan dalam pergaulannya dengan individu yang lain. Selanjutnya, manusia juga memiliki peluang mengidentifikasi karakter yang ada pada seseorang yang diidolakan untuk dipelajari dan sebaliknya untuk karakter seseorang yang dirasa tidak cocok baginya. Untuk berinteraksi antar individu yang satu dengan yang lainnya, seorang individu mampu memahami dan merasakan perikemanusiaan hal ini terjadi karena adanya saling memberikan serta menerima antar sesamanya.

c. Dimensi Kesusilaan

Asal kata susila yaitu dari kata “sila” yang berarti suatu kehormatan yang letaknya lebih tinggi. Namun jika kita menelisik ke dalam kehidupan bermasyarakat, seorang individu tidak bisa dikatakan bersusila jika melakukan sesuatu sesuai norma namun di dalam perbuatan yang baik tersebut terdapat maksud dan tujuan yang kurang pantas atau terdapat unsur nilai kejahatan di dalamnya. Oleh sebab itu jika kita menelaah dalam bahasa yang ilmiah terdapat dua jenis istilah di dalamnya memiliki makna yang tidak sama satu sama lain. Etik artinya tentang soal nilai sopan santun yang kedua ialah etika yang berarti berbicara soal nilai kebajikan. Jika berbicara soal nilai susila itu sendiri erat



kaitannya jika disandingkan dengan norma-norma, yang pada dasarnya setiap individu tentunya mempunyai daya dan upaya dalam pengambilan keputusan yang bersifat susila, dan juga menjalankan jadi dengan demikian seorang individu atau manusia ialah makhluk susila.

d. Dimensi Keberagamaan

Dasar dari seorang manusia ialah makhluk yang beragama, memiliki agama merupakan suatu yang sifatnya sebuah kebutuhan, kenapa? karena manusia ialah makhluk yang memerlukan sandaran. Agama sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Karena agama mampu menyelamatkan kehidupan seseorang, maka dari itu agama ialah sentral dari kehidupan manusia.

Seorang individu mampu merasakan agama itu sendiri dari berbagai proses yang telah dilaluinya. Di dalam pendidikan agama di dalamnya tidak hanya diajarkan tentang agama saja namun di dalamnya juga diberikan ilmu yang di dalamnya juga terdapat segi afektif yang dikedepankan. Selain itu membangun nilai toleransi saling menghargai antara individu satu dengan individu yang lainnya sehingga tercapai kedamaian antar umat beragama yang dianut masing-masing individu.

3. Pengembangan Dimensi Hakikat Manusia Sosok Manusia Indonesia Seutuhnya

Sosok manusia Indonesia seutuhnya ialah manusia sebagai makhluk yang berbeda-beda namun sama. Berbeda-beda hal ini dikarenakan manusia terdiri dari fisik dan jiwa namun tetaplah sama karena jiwa dan raga ialah kesatuan dari manusia itu sendiri (Ikhsan, 2018). Selanjutnya manusia dikatakan manusia sosial hal ini dikarenakan setiap individu sejak lahir memerlukan individu lainnya di dalam kehidupannya. Manusia juga dikatakan manusia yang bertuhan karena setiap manusia diciptakan atau berasal dari Sang Khalik hal inilah yang membuat manusia disebut juga sebagai makhluk individu, sehingga manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial.

Pada dasarnya manusia memiliki karakteristik sebagai makhluk pribadi serta makhluk sosial karena hal ini telah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan agar nantinya mampu dimaksimalkan dalam pengembangannya dengan sejalan serta berimbang. Perlunya menyadari manusia mempunyai satu arti yang tentunya berkaitan erat dengan manusia yang lainnya hal ini tertuang di kehidupan bermasyarakat. Umumnya pengelompokan setiap individu dibedakan atas gender yaitu laki-laki dan perempuan selanjutnya pengelompokan berdasarkan umur, individu yang satu dengan individu yang lainnya mempunyai karakteristik yang tentunya tidak sama hal tersebut ditinjau dari jasmaniyah maupun rohaniyahnya.

Arti sosok manusia Indonesia seutuhnya tertuang di GBHN 1995 yang berisi tentang Tujuan Pendidikan Nasional, serta tujuan dari pendidikan nasional secara lebih detail antara lain mengoptimalkan mutu setiap individu Indonesia, yang berarti setiap individu percaya



akan Tuhan dan menjalankan ajaran-ajaran-Nya serta menjauhi larangan-larangan-Nya. Arti dari sosok manusia Indonesia seutuhnya ialah terpadunya ketiga ranah yakni jiwa dan raga, serta ditinjau dari dimensi perseorangan, sosial, kesucilaan, keagamaan dari ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik (Tilaar, 2016).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia seutuhnya ialah manusia Indonesia dengan keadaan yang sempurna memiliki akal dan kecerdasan untuk berfikir; dapat diartikan keterpaduan ditinjau dari fisik dan psikis. Setiap individu mempunyai kepercayaan akan adanya sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan perintah-Nya serta menjauhi setiap larangan-Nya.

Manusia yang berintelektual dan bertanggung jawab atas kehidupannya dan tentunya mempunyai rasa cinta tanah air, hal ini tentunya Indonesia. Hakikat manusia yang utuh itu sendiri adalah cita-cita yang akan dicapai melalui *value education* atau bisa disebut juga *General Education* yaitu:

- a) Manusia mempunyai pengalaman yang mendalam dari setiap tinjauan kehidupannya.
- b) Kepribadian yang dimiliki manusia tersebut utuh.

Arti dari kata mendalam serta menyeluruh ialah dua terminologi yang membutuhkan kandungan sesuai bentuknya, dikaitkan dalam sosial budaya dan keyakinan dari negara itu sendiri. Jika kita terjemahkan dalam bahasa pendidikan yang mampu menjadikan individu tersebut mampu bertakwa kepada Sang Khalik serta individu tersebut pantas memperoleh kehidupannya sebagai manusia.

Selanjutnya agar mendapatkan manusia seutuhnya, tentunya dibutuhkan percontohan yang baik, serta disini terdapat peran besar yang mewakili suatu pemerintahan yaitu seorang pendidik. Perlu diingat kembali untuk membentuk karakteristik dari setiap individu dapat dilakukan dengan memberi suri tauladan yang baik sebagai percontohan yang kemudian akan dengan sendirinya akan menjadi sebuah kebiasaan setiap harinya oleh setiap individu. Rumusan manusia Indonesia seutuhnya telah tertuang pada Undang-undang Pendidikan, yang di dalamnya menyatakan di dalam pelaksanaan pembangunannya pada pembangunan manusia seutuhnya serta dalam mengoptimalkan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Kebenaran akan pengoptimalan bukan sebatas yang terlihat saja atau secara lahir namun secara psikologisnya juga harus terpenuhi contohnya antara lain; pendidikan, kebebasan dalam berpendapat, hak atas keamanan, serta mendapatkan keadilan, hal ini harus sejalan dan berimbang. Perlu digaris bawahi bahwa dalam pelaksanaannya haruslah menyeluruh setanah air Indonesia. Adapun pengoptimalan itu sendiri memiliki arti keseimbangan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Sosok manusia Indonesia yaitu setiap individu yang memiliki kodratnya menjadi manusia yang bermartabat dan memiliki bakat-bakat yang mendasar, dalam hal ini dikarenakan manusia itu sendiri ialah ciptaan Sang Khalik yang sifatnya



individual. Selain itu manusia juga membutuhkan manusia lainnya, manusia juga merupakan makhluk yang memiliki moralitas.

Dari ketiganya terkandung makna bahwa manusia yang bermartabat ialah manusia yang memenuhi ketiganya dan dalam pelaksanaannya di kehidupan, manusia tersebut memegang teguh prinsip tersebut dan menjalankan secara sama rata dan terus berkelanjutan. Pada hakikatnya inti dari jiwa dan jasmani setiap individu. Pada kenyataannya manusia dapat menampakkan tentang kepribadiannya dari manusia itu sendiri ialah gabungan dari bakat-bakat serta sadar akan kejiwaannya dari segi psikologi, perasaan, dan hati nurani dari manusia tersebut. Selain itu manusia Indonesia seutuhnya memegang erat nilai-nilai sosial budaya di dalam kehidupannya memiliki tatanan nilai sosial budaya masing-masing, walaupun pada dasarnya manusia ialah makhluk ciptaan Sang Khalik. Karenahal tersebutlah pendidikan dapat memperlihatkan nilai-nilai budaya dan sosial dari setiap bangsanya. Adapun landasan nilai-nilai sosial budaya tersebut adalah tatanan dari aspek turun temurun budaya bangsa nantinya dapat dijadikan untuk pedoman kehidupan rakyat.

Nilai dari filsafat tersebut ialah Pancasila yang di dalamnya terkandung arti budaya bangsa. Dalam hal ini tatanan lembaga untuk hidup dalam bermasyarakat sertaberbangsa yang sifatnya resmi ataupun yang tidak resmi.

E. Pilar – Pilar Pendidikan UNESCO

Dalam kamus umum, pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan atau penguat dari beton dan sebagainya, juga sekaligus dipakai untuk keindahan atau keserasian, penunjang untuk kegiatan. M.J. Langelveld (1967:21) mengatakan bahwa “Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan secara sadar dan sengaja kepada anak (yang belum dewasa) dalam pertumbuhannya menuju ke arah kedewasaan dalam arti dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas segala tindakannya menurut pilihannya sendiri. Hoogveld, pakar pendidikan lain juga menyatakan bahwa mendidik ialah membantu anak supaya anak itu kelak cakap menyelesaikan tugas hidupnya atas tanggungan sendiri.

Pendidikan harus dibawa dalam rangka mengoptimalkan kemampuan peserta didik untuk memiliki sifat kreatif, kritis dan tanggap terhadap masalah kehidupan. UNESCO sebagai lembaga yang menpendikisi masalah pendidikan di bawah naungan PBB dalam Sindhunata, mengemukakan keberhasilan pendidikan diukur dari hasil empat pilar pengalaman belajar (empat pilar pendidikan dalam rangka pelaksanaan pendidikan untuk masa sekarang dan masa depan) yang diorientasikan pada pencapaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, yakni belajar mengetahui (*learning to know*), belajar berbuat (*learning to do*), belajar menjadi seseorang (*learning to be*) dan belajar hidup bersama (*learning to live together*) (Sindhunata., 2001). Dengan diterapkannya empat pilar pendidikan ini diharapkan para pendidik mampu mendampingi peserta didiknya agar menjadi manusia yang berkualitas di kemudian hari. Untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas yang



bermuara padapenciptaan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Penerapan empat pilar pendidikan menuntut kemampuan profesional pendidik dan dosen sejalan diberlakukannya otonomi daerah, khususnya bidang pendidikan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan UNESCO adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan padapendewasaan anak dalam rangka pelaksanaan pendidikan untuk masa sekarang dan masa depan yang didasarkan pada pengalaman belajar anak; yang berarti keberhasilan pendidikan diukur dari hasil empat pilar pengalaman belajar anak dan direkomendasikan oleh UNESCO agar tercipta pembelajaran yang berkualitas yang bermuara pada penciptaan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Empat pilar tersebut mensyaratkan bahwa pembelajaran merupakan bagian dari konsep membangun ilmu pengetahuan, meningkatkan keterampilan melakukan kegiatan meningkatkan kecerdasan sosial yang mendukung konsep bahwa belajar itu merupakan proses interaksi sosial dan pembelajaran adalah upaya untuk menjadikan peserta didik sebagai dirinya sendiri, menjadi manusia yang berilmu dan bermartabat.

1) Macam-Macam dan Makna Empat Pilar Pendidikan Menurut UNESCO

Pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis dalam melestarikan sistem nilai yang berkembang dalam kehidupan. Proses pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan pemahaman peserta didik, namun lebih diarahkan pada pembentukan sikap, perilaku dan kepribadian peserta didik. Hal ini dikarenakan perkembangan komunikasi, informasi (baik melalui media cetak maupun elektronik) tidak selalu membawa pengaruh positif bagi peserta didik. Pendidikan diarahkan pada upaya memanusiakan manusia, atau membantu proses hominisasi dan humanisasi, maksudnya pelaksanaan dan proses pendidikan harus mampu membantu peserta didik agar menjadi manusia yang berbudaya tinggi dan bernilai tinggi (bermoral, berwatak, bertanggungjawab dan bersosialitas). Untuk mewujudkan pencapaian tersebut, maka pengimplementasian pendidikan harus didasarkan pada empat pilar pendidikan UNESCO yang memiliki prinsip *learning to know*, *learning to do*, *learning to live together* dan *learning to be*.

a) *Learning to know* (Belajar Untuk Tahu)

Dalam pilar ini, belajar dimaknai sebagai upaya hanya sebatas untuk mengetahui. Belajar ini termasuk dalam kategori belajar pada tingkat yang rendah, yakni belajar yang lebih menekankan pada ranah kognitif. *Learning to know* atau *learning to learn* mengandung pengertian bahwa belajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi kepada produk atau hasil belajar, akan tetapi juga harus berorientasi kepada proses belajar. Dengan proses belajar, peserta didik bukan hanya sadar akan apa yang harus dipelajari, akan tetapi juga memiliki kesadaran dan kemampuan bagaimana cara mempelajari yang harus dipelajari itu. Pada proses pembelajaran melalui penerapan



learning to know ini, peserta didik akan dapat memahami dan menghayati bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya. Melalui proses pendidikan seperti ini mulai sekolah dasar sampai dengan pendidikan tinggi, diharapkan lahir generasi yang memiliki kepercayaan bahwa manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk mengelola dan mendayagunakan alam. Untuk mengkondisikan masyarakat. Belajar yang efektif dewasa ini, diperlukan pemahaman yang jelas tentang “apa” yang perlu diketahui, “bagaimana” mendapatkan ilmu pengetahuan, “mengapa” ilmu pengetahuan perlu diketahui, “untuk apa” dan “siapa” yang akan menggunakan ilmu pengetahuan itu. Belajar untuk tahu diarahkan pada peserta didik agar mereka memiliki pengetahuan fleksibel, adaptable, value added dan siap memakai bukan siap pakai.¹⁹ Sebab, salah satu ukuran luar yang dapat dipakai untuk melihat sejauh mana tingkat kemajuan diskursus suatu disiplin ilmu adalah dengan melihat upaya-upaya dan hasil diskursus mengenai disiplin tersebut.

Learning to know merupakan landasan kegiatan untuk memperoleh, memperdalam dan memanfaatkan pengetahuan dapat berkembang dengan baik apabila murid dibekali dengan kemampuan dasar (membaca, menulis, berbicara, mendengarkan dan berhitung) dengan baik.

Dalam rangka merealisasikan *learning to know*, pendidik memiliki berbagai fungsi yang di antaranya adalah sebagai fasilitator, yaitu sebagai teman sejawat dalam berdialog dan berdiskusi dengan peserta didik guna mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun ilmu tertentu. Proses pendampingan diperlukan agar peserta didik mendapatkan pemahaman utuh atas sebuah materi yang disesuaikan nilai moral, etika dan agama yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidik juga harus mampu berperan sebagai informator, organisator, motivator, direktor, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, dan evaluator bagi peserta didiknya, sehingga peserta didik perlu dimotivasi agar timbul kebutuhan terhadap informasi, keterampilan hidup, dan sikap tertentu yang ingin dikuasainya.

Konsep learning to know ini menyiratkan makna bahwa pendidik harus mampu berperan sebagai berikut:

- a) berperan sebagai sumber belajar
- b) sebagai Fasilitator
- c) sebagai pengelola
- d) sebagai demonstrator
- e) sebagai pembimbing
- f) sebagai mediator
- g) sebagai evaluator



Learning to know adalah suatu proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati dan akhirnya dapat merasakan serta dapat menerapkan cara memperoleh pengetahuan, suatu proses yang memungkinkan tertanamnya sikap ilmiah yaitu sikap ingin tahu dan selanjutnya menimbulkan rasa mampu untuk selalu mencari jawaban atas masalah yang dihadapi secara ilmiah

b) *Learning to do* (Belajar Untuk Melakukan)

Pendidikan juga merupakan proses belajar untuk bisa melakukan sesuatu. Dalam pilar ini, belajar dimaknai sebagai upaya untuk membuat peserta didik bukan hanya mengetahui, mendengar dan melihat dengan tujuan akumulasi pengetahuan, tetapi lebih kepada dapat melakukan, terampil berbuat atau mengerjakan kegiatan tertentu (sesuatu) sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Fokus pembelajaran dalam pilar ini lebih memfokuskan pada ranah psikomotorik. Jenis belajar ini sebagai bentuk aktualisasi dari materi yang didapatnya yaitu berkarya dan berbuat. Berkarya berdasarkan potensi yang dimiliki dibarengi materi yang didapatnya. Dengan berkarya, tidak saja membuat mandiri tapi juga dapat membantu orang lain melalui karyanya tersebut.

Learning to do mengupayakan terhadap diberdayakannya peserta didik agar mau dan mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya sehingga mampu menyesuaikan diri dan berpartisipasi dalam masyarakat. Dengan demikian seorang individu perlu belajar berkarya, dan belajar berkarya erat kaitannya dengan belajar mengetahui, karena pengetahuan melandasi suatu perbuatan. Peserta didik diajarkan untuk melakukan sesuatu dalam situasi konkrit yang tidak hanya terbatas pada penguasaan ketrampilan yang mekanistik melainkan juga terampil dalam berkomunikasi, bekerjasama dengan orang lain, mengelola dan mengatasi suatu konflik. Melalui pilar kedua ini, dimungkinkan mampu mencetak generasi muda yang cerdas dalam bekerja dan mempunyai kemampuan untuk berinovasi.

Learning to do merupakan konsekuensi dari *learning to know*. *Learning to do* bukanlah kemampuan berbuat yang mekanis dan pertukangan tanpa pemikirantetapi *action in thinking* dan *learning by doing*. Peserta didik akan terus belajar bagaimana memperbaiki dan menumbuhkembangkan kerja, juga bagaimana mengembangkan teori atau konsep intelektualitasnya.

Beberapa bentuk *Active Learning*; kegiatan *Active learning* dilakukan dengan kegiatan mandiri, peserta didik membaca sendiri bahan yang akan dibahas di kelas. Pembahasan (diskusi) di kelas dengan diawali penugasan pembuatan artikel, melakukan problem posing, dan problem solving, Pada kegiatan pembelajaran yang aktif ini diberikan panduan awal (*advance organizer*) yang mengarahkan pada pembahasan materi pembelajaran, sebelum belajar mandiri dilaksanakan, sehingga



memungkinkan peserta didik aktif baik secara intelektual, motorik maupun emosional. Dalam pemberian tugas, peserta didik dituntut mampu merumuskan konsep baru yang disintesis dari materi yang telah dipelajari. Dan *learning to do* mengandung prinsip berikut:

- a) Menjembatani pengetahuan dan keterampilan
- b) Memadukan *learning by doing* dan *doing by learning*
- c) Mengkaitkan pembelajaran dengan kompetensi
- d) Mengkaitkan psikologi pembelajaran dengan sosiologi pembelajaran.

Learning to do akan bisa berjalan jika lembaga pendidikan (sekolah) memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya sehingga dapat berkembang dan dapat mendukung keberhasilan peserta didik nantinya, serta bakat dan minatnya agar *learning to do* (belajar untuk melakukan sesuatu) dapat terrealisasi. Secara umum, bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Sedangkan minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu

- c) *Learning to be* (Belajar untuk menjadi diri sendiri/mengembangkan diri)

Learning to be mengandung pengertian bahwa belajar adalah membentuk manusia yang menjadi dirinya sendiri. Dengan kata lain, belajar untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu dengan kepribadian yang memiliki tanggung jawab sebagai manusia.

Dalam pilar ketiga ini, belajar dimaknai sebagai upaya untuk menjadikan peserta didik sebagai dirinya sendiri. Belajar dalam konteks ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi peserta didik, sesuai dengan minat dan bakatnya atau tipe-tipe kecerdasannya (*types of intelligence*).

Konsep *learning to be*, perlu dihayati oleh praktisi pendidikan untuk melatih peserta didik agar mampu memiliki rasa percaya diri (*self confidence*) yang tinggi. Kepercayaan merupakan modal utama bagi peserta didik untuk hidup dalam masyarakat. Pengembangan dan pemenuhan manusia seutuhnya yang terus “berevolusi”, mulai dengan pemahaman diri sendiri, kemudian memahami dan berhubungan dengan orang lain. Mengukir kekayaan tak ternilai dalam diri.

Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri (*learning to be*). Menjadi diri sendiri diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, belajar menjadi orang yang berhasil, sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri. Belajar menjadi seseorang, mengembangkan kepribadian dan kemampuan untuk bertindak secara mandiri, kritis,



penyut pertimbangan serta bertanggung jawab. Dalam hal ini pendidikan tak bisa mengabaikan satu aspek pun dari potensi seseorang seperti ingatan, akal sehat, estetika, kemampuan fisik serta ketrampilanberkomunikasi. Telah banyak diakui bahwa sistem pendidikan formal saat ini cenderung untuk memberi tekanan pada penguasaan ilmu pengetahuan saja yangakhirnya merusak bentuk belajar yang lain. Kini telah tiba saatnya untuk memikirkan bentuk pendidikan secara menyeluruh, yang dapat menggiring terjadinya perubahan- perubahan kebijakan pendidikan di masa akan datang, dalam kaitan dengan isi maupun metode.

Jenis belajar ini mendidik peserta didik agar dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan tumbuh menjadi diri sendiri, diri yang mandiri dandiri yang bermanfaat bagi lingkungannya; tujuannya agar membentuk pribadi yang berkarater kuat tidak mudah goyah oleh arus pergaulan. Kreatif dengan setiap aspek dari potensi pribadi yang berupa: mengingat, menalar, rasa estetis, kemampuan-kemampuan fisik, dan keterampilan-keterampilan berkomunikasi

d) *Learning to live together* (Belajar untuk menjalani kehidupan bersama)

Learning to live together adalah belajar untuk bekerjasama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntunan kebutuhan dalam masyarakat global dimana manusia baik secara individual maupun secara kelompok tak mungkin bisa hidupsendiri atau mengasingkan diri bersama kelompoknya.

Pilar keempat ini memaknai belajar sebagai upaya agar peserta didik dapat hidup bersama dengan sesamanya secara damai. Dikaitkan dengan tipe- tipe kecerdasan, maka pilar keempat ini berupaya untuk menjadikan peserta didik memiliki kecerdasan sosial (social intelligence).

Jenis belajar ini sebagai bentuk terakhir dari pilar pendidikan rekomendasi UNESCO yang mendidik sekaligus mengarahkan peserta didik agar dapat hidup bersama (sosial) di tengah pluralisme. di tengah aruh globalisasi mementingkan ego seperti hal lumrah sehingga akan tercipta individualistic dan hal ini tidak sehat bila terus berkembang. Oleh karena itu jenis belajar ini sangat penting agarpeserta didik nanti akhirnya menjadi manusia sosial yang tidak hanya tahu, bermanfaat, berkarater tapi juga bersosial.

Learning to live together merupakan kelanjutan yang tidak dapat dielakkan dari *learning to know*, *learning to do* dan *learning to be*. *Learning to live together* ini menuntun seseorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi educated person yang bermanfaat baik bagi diri dan masyarakatnya, maupun bagi seluruh umat manusia sebagai amalan agamanya.

Dengan kemampuan yang dimiliki, sebagai hasil dari proses pendidikan, dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana individu



tersebut berada, sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Pemahaman tentang peran diri dan orang lain dalam kelompok belajar merupakan bekal dalam bersosialisasi di masyarakat (*learning to life together*). Salah satu fungsi sekolah adalah tempat bersosialisasi, artinya mempersiapkan peserta didik untuk dapat hidup bermasyarakat. Situasi bermasyarakat hendaknya dikondisikan di lingkungan sekolah. Kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima, perlu ditumbuhkan dan dikembangkan. Kondisi seperti inilah yang memungkinkan terjadinya "*learning to live together*". Belajar hidup bersama, mengembangkan pengertian atas diri orang lain dengan cara mengenali diri sendiri serta menghargai saling tergantung dalam melaksanakan proyek bersama dan belajar mengatasi konflik dalam semangat menghargai nilai-nilai kejamakan (*pluralitas*), saling mengerti dan perdamaian. Kesempatan untuk menjalin hubungan antara pendidik dan peserta didik, dorongan dan penyediaan waktu yang cukup untuk memberi kesempatan bekerjasama dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya, olahraga, serta keterlibatan dalam organisasi sosial maupun profesi diluar sekolah.

To live together yakni pendidikan mesti merangsang soft skill peserta didik sehingga kelak mereka mampu hidup bersama dengan orang lain, mampu bekerjasama dengan orang lain. Bahkan mereka terlatih untuk peka akan suka-duka orang lain. Kemampuan dan perbuatan akan berarti jika dapat dirasakan semua orang, sehingga apa yang kita miliki, ketahui dan pelajari bukan untuk kita saja tetapi selayaknya berguna bagi manusia lainnya.

Learning to live together yaitu proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati hubungan antar manusia secara intensif dan terus menerus untuk menghindari pertentangan ras/etnis, agama, suku, keyakinan politik, dan kepentingan ekonomi. Peningkatan pendidikan nilai kemanusiaan, moral, dan agama yang melandasi hubungan antar manusia.

Pendekatan pembelajaran tidak semata-mata bersifat hafalan melainkan dengan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan terintegrasikannya nilai-nilai kemanusiaan dalam kepribadian dan perilaku selama proses pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan adalah dengan pendekatan *kooperatif-integrated*. Pembelajaran mempunyai jangkauan tidak hanya membantu peserta didik belajar isi akademik dan ketrampilan semata, namun juga melatih peserta didik dalam meraih tujuan-tujuan hubungan sosial dan kemanusiaan. Model pembelajaran ditandai dengan adanya struktur tugas yang bersifat kontekstual, struktur tujuan, dan struktur penghargaan (*reward*).

Dari keempat visi pendidikan tersebut akan diperoleh kata kunci berupa *learning how to learn* (belajar bagaimana belajar). Sehingga pendidikan tidak hanya berorientasi



pada nilai akademik yang bersifat pemenuhan aspek kognitif saja, melainkan juga berorientasi pada bagaimana seorang anak didik bisa belajar dari lingkungan, dari pengalaman dan kehebatan dari orang lain, dari kekayaan dan luasnya hamparan alam, sehingga mereka bisa mengembangkan sikap-sikap kreatif dan daya berpikir imajinatif.

Dengan mengacu pada *learning how to learn*, maka endingnya akan melahirkan apa yang disebut dengan *skill learning* (keterampilan belajar). *Skill learning* yang pertumbuhannya memerlukan prasyarat tersebut searah dengan konsep “menjadi manusia pembelajar” yang ditulis oleh Harefa, bahwa manusia hidup untuk belajar *learning how to be* bukan belajar untuk hidup *learning how to do*. Hidup untuk belajar searah dengan keterampilan belajar, dan belajar untuk hidup dan dengan belajar terampil. Hidup untuk belajar hidup berarti mengeluarkan segenap potensi dirinya untuk membuat dirinya nyata bagi sesamanya. Belajar untuk hidup berarti usaha untuk mendapatkan pekerjaan. Hidup untuk belajar lebih esensial, karena belajar bukan hanya pelatihan tetapi proses untuk menjadi diri sendiri.

F. Pendidikan Sepanjang Hayat

Pendidikan sebagai lembaga dan usaha pembangunan bangsa dan watak bangsa. Pendidikan yang demikian mencakup ruang lingkup yang amat luas, yaitu pendidikan kemampuan mental, pikir, (rasio, intelek) dan kepribadian demikian jelas memerlukan rentangan waktu yang relatif panjang bahkan berlangsung seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup (Life Long Education) mulai di masyarakat melalui kebijakan Negara (Tap MPR No. IV/MPR/1973 jo. Tap MPR No. IV/MPR/1978, tentang GBHN) yang menetapkan antara lain dalam Bab IV Bagian Pendidikan bahwa, “Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggungjawab bersama antar keluarga, masyarakat, dan pemerintah.”

Pendidikan seumur hidup/sepanjang hayat adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar- mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Arti luas pendidikan sepanjang hayat (*Life Long Education*) adalah bahwa pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Pendidikan sepanjang hayat menjadi suatu kebutuhan yang penting karena, manusia perlu menyesuaikan diri supaya dapat tetap hidup secara normal dalam lingkungan masyarakatnya yang selalu berubah.

1. Dasar Pikiran Pendidikan Sepanjang Hayat

Ada beberapa cara untuk meninjau dasar pikiran mengenai pendidikan sepanjang hayat. Diantaranya yaitu:

a) Tinjauan Idiologis

Semua manusia dilahirkan sama dan mempunyai hak yang sama, khususnya hak untuk



memperoleh pendidikan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.

b) Tinjauan Ekonomis

Salah satu cara keluar dari lingkaran setan antara kebodohan dan kemelaratan ialah dengan pendidikan seumur hidup.

c) Tinjauan Sosiologis

Salah satu masalah pendidikan di negara berkembang adalah pemborosan pendidikan yang disebabkan oleh sebagian orang tua kurang menyadari pentingnya pendidikan, putus sekolah bahkan tidak sekolah sama sekali. Oleh karena pemborosan itu dapat berakibat tambahnya jumlah buta huruf, orang tua merupakan pemecahannya.

d) Tinjauan Politis

Negara kita adalah negara demokrasi di mana seluruh warga negara wajib menyadari hak dan kewajibannya di samping memahami fungsi pemerintah.

e) Tinjauan Teknologis

Dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi para pemimpin, teknisi, pendidik dan sarjana dari berbagai disiplin ilmu harus senantiasa menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi terus menerus untuk menambah cakrawala pengetahuan di samping keterampilan.

f) Tinjauan Psikologis dan Pedagogis

Tidak ayal lagi bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh besar terhadap pendidikan khususnya konsep dan teknik penyampaian. Oleh karena perkembangan ilmu dan teknologimakin luas dan kompleks maka tidak mungkin segalanya itu dapat diajarkan kepada anak di sekolah.

Maka dewasa ini tugas pendidikan formal yang utama adalah bagaimana mengajarkan cara belajar, menanamkan motivasi yang kuat kepada anak untuk belajar sepanjang hayatnya, memberi keterampilan kepada anak untuk secara lincah menyesuaikan diri kepada lingkungan masyarakat yang dengan cepatnya berubah-ubah.

2. Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat

Konsep pendidikan seumur hidup, sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar pendidikan dari zaman ke zaman. Apalagi bagi umat Islam, jauh sebelum orang-orang barat mengangkatnya, Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup, sebagaimana dinyatakan oleh Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

اُطُوبُ اِنْ جِئْتُكُمْ نَاقِطًا فَاَعَلَيْكُمْ لِي الْعِلْمُ

“Tuntutlah ilmu dari buaian sampai meninggal dunia.”

Asas pendidikan seumur hidup itu merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu, yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar informal, maupun formal baik



yang berlangsung dalam keluarga, di sekolah, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun tujuan untuk pendidikan manusia seutuhnya dan seumur hidupnya adalah sebagai berikut:

- a) Mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin. Dengan demikian, secara potensial keseluruhan potensi manusia diisi kebutuhannya agar berkembang secara wajar.
- b) Dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung selama manusia hidup.
- c) Mengembangkan kecakapan intelektual.
- d) Mengembangkan pola pikir yang lebih konkrit dan praktis.
- e) Peningkatan kualitas spiritual dan moral kehidupan seluruh umat manusia dan masyarakat.
- f) Untuk membina kepribadian.

3. Karakteristik Pendidikan Sepanjang Hayat

Adapun karakteristik pendidikan sepanjang hayat yaitu:

- a) Hidup, seumur hidup, dan pendidikan merupakan tiga istilah pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup.
- b) Pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup.
- c) Pendidikan seumur hidup tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi pendidikan seumur hidup mencakup dan memadukan semua tahap pendidikan (pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sebagainya).
- d) Pendidikan seumur hidup mencakup pola-pola pendidikan formal maupun pola-pola pendidikan non-formal, baik kegiatan-kegiatan belajar terencana maupun kegiatan-kegiatan belajar insidental.
- e) Pendidikan seumur hidup memiliki dua macam komponen besar yaitu pendidikan umum dan pendidikan profesional. Komponen tersebut tidak berpisah sama sekali antara yang satu dengan yang lainnya.
- f) Tujuan akhir pendidikan seumur hidup adalah mempertahankan dan meningkatkan mutu hidup



G. Landasan – Landasan Pendidikan

Secara umum, yang dimaksud dengan landasan pendidikan adalah dasar pijakan atau titik tumpu dalam sebuah proses pendidikan. Menurut Suyitno (2009 : 5) landasan terdapat menjadi dua jenis, yaitu landasan bersifat material (mengarah pada bentuk fisik atau bangunan) dan landasan bersifat konseptual (mengarah pada konsep atau teori). Pendidikan dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu studi pendidikan dan praktik pendidikan. Studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau kelompok dalam rangka memahami pendidikan, sedangkan praktik pendidikan adalah kegiatan seseorang atau kelompok atau lembaga dalam membantu individu atau kelompok untuk mencapai tujuan Pendidikan.

Misi utama materi landasan-landasan pendidikan dalam pendidikan tenaga kependidikan tidak tertuju kepada pengembangan aspek keterampilan khusus mengenai pendidikan sesuai spesialisasi pendidik, melainkan tertuju kepada pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh para pendidik sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Beberapa fungsi landasan pendidikan :

- 1) Sebagai acuan atau tolak ukur konsep dan teori bagi setiap pendidik dalam praktik Pendidikan
- 2) Sebagai konsep atau cara pandang dan bersikap dalam melaksanakan tugas kependidikan
- 3) Membentuk pola pikir dan pola kerja dalam praktik belajar mengajar.

1. Landasan Filsafat Dalam Pendidikan

Landasan ini bersumber dari pandangan-pandangan di dalam filsafat pendidikan, menyangkut kepercayaan terhadap hakikat manusia atau insan, kepercayaan tentang asal nilai, hakikat pengetahuan, serta perihal menjalani kehidupan yang lebih baik. Istilah filsafat atau filosofi merupakan istilah dengan asal bahasa Yunani kuno, yaitu *philein* yang berarti mencintai, dan *sophos* yang artinya nasihat, arif, atau bijaksana. Hal ini berarti mengkaji sesuatu secara radikal, menyeluruh, serta konseptual yang membentuk konsepsi-konsepsi tentang kehidupan (Tirtarahardja, Umar dan Sulo, 2012).

Filsafat pendidikan yang berusaha untuk memahami pendidikan secara lebih mendalam, menafsirkannya dengan menggunakan konsep-konsep umum yang dapat menjadi petunjuk atau arah bagi tujuan-tujuan dan kebijakan pendidikan. Dengan cara yang sama, filsafat umum mengkoordinasikan temuan-temuan dari berbagai cabang ilmu, dan filsafat pendidikan menafsirkan temuan-temuan ini untuk digunakan dalam bidang pendidikan. Teori-teori ilmiah tidak memiliki implikasi langsung dalam pendidikan; teori-teori ini tidak dapat langsung diterapkan dalam praktik pendidikan tanpa terlebih dahulu diuji secara filsafati (Kneller, 1971) Teori filsafat pendidikan ialah teori rasional tentang pendidikan. Teori tersebut tidak pernah dapat dibuktikan secara empiris. Di



samping teori filsafat pendidikan, ada pula teori ilmu pendidikan. Teori ini adalah teori rasional dan ada bukti empiris tentang pendidikan (Tafsir, 2010).

Selanjutnya, (Kneller, 1971) juga mengatakan bahwa filsafat pendidikan bersandar pada filsafat umum atau filsafat formal; artinya masalah-masalah pendidikan juga merupakan bagian dari cara berpikir filsafat secara umum. Seseorang tidak dapat memberikan kritik pada kebijakan pendidikan yang ada atau menyarankan kebijakan yang baru tanpa memikirkan masalah-masalah filsafati yang umum seperti hakikat kehidupan yang baik sebagai arah yang akan dituju oleh pendidikan, kodrat manusia itu sendiri, sebab yang dididik itu adalah manusia; yang dicari adalah hakikat kenyataan yang terdalam, yang menjadi pencarian semua cabang ilmu. Oleh karena itu, filsafat pendidikan merupakan penerapan filsafat formal dalam lapangan pendidikan (Kneller, 1971).

Sebagaimana halnya dengan filsafat umum, filsafat pendidikan bersifat spekulatif, preskriptif, dan analitik. Bersifat spekulatif artinya bahwa filsafat membangun teori-teori tentang hakikat manusia, masyarakat dan dunia dengan cara menyusunnya sedemikian rupa dan menginterpretasikan berbagai data dari penelitian pendidikan dan penelitian ilmu-ilmu perilaku (psikologi behavioristik).

Filsafat bersifat preskriptif artinya filsafat pendidikan mengkhususkan tujuan-tujuannya, yaitu bahwa pendidikan seharusnya mengikuti tujuan-tujuan itu dan cara-cara yang umum harus digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Filsafat pendidikan bersifat analitik tatkala filsafat pendidikan berupaya menjelaskan pernyataan-pernyataan spekulatif dan preskriptif, menguji rasionalitas ide-ide pendidikan, baik konsistensinya dengan ide-ide yang lain maupun cara-cara yang berkaitan dengan adanya distorsi pemikiran. Konsep-konsep pendidikan diuji secara kritis; demikian pula dikaji juga apakah konsep-konsep tersebut memadai atau tidak ketika berhadapan dengan fakta yang sebenarnya.

Filsafat pendidikan berusaha menjelaskan banyak makna yang berbeda yang berhubungan dengan berbagai istilah-istilah yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan seperti "kebebasan", "penyesuaian", "pertumbuhan", "pengalaman", "kebutuhan", dan "pengetahuan". Penjernihan istilah-istilah akan sampai pada hal-hal yang bersifat hakiki, maka kajian filsafati tentang pendidikan akan ditelaah oleh cabang filsafat yang bernama metafisika atau ontologi. Ontologi menjadi salah satu landasan dalam filsafat pendidikan. Selain itu, kajian pendidikan secara filsafat memerlukan pula landasan epistemologis dan landasan aksiologis. (Rukiyati & Purwastuti, 2015)

2. Landasan Sosial Budaya Dalam Pendidikan

Dasar dari landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan ini sesungguhnya menyangkut fakta tidak tertulis mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi



(Serevina, 2020):

- a) Keterkaitan sistem pendidikan kepada masyarakat lain.
- b) Interaksi antar manusia.
- c) Hubungan antar sekolah kepada kebiasaan anggotanya.

Wujud dari sosiologi pendidikan adalah tentang konsep proses sosial. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat mengalami perubahan sangat cepat, progresif, dan kerap kali menunjukkan gejala “disintegratif” (berkurangnya kesetiaan terhadap nilai-nilai umum), perubahan sosial yang sangat cepat menimbulkan “cultural lag” (ketinggalan kebudayaan akibat adanya hambatan- hambatan). Cultural lag ini merupakan sumber masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Masalah-masalah sosial juga dialami di dunia pendidikan, sehingga lembaga-lembaga pendidikan tidak mampu mengatasinya. Maka lembaga-lembaga pendidikan mengharapkan ahli sosiologi dapat menyumbangkan pemikirannya untuk ikut memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Dalam hal ini adalah sosiologi pendidikan.

Agar para pendidik dapat mengajar atau memberitahu bagaimana peserta didik dapat memiliki kebiasaan hidup yang harmonis, bersahabat, dan akrab maka pendidik harus memahami dan dibekali dengan sosiologi. Mengapa para pendidik dan calon pendidik harus memahami dan dibekali dengan sosiologi? Pendidik adalah seorang administrator, informator, konduktor, dan sebagainya, dan harus berkelakuan menurut harapan masyarakat. Dari pendidik, sebagai pendidik dan pembangun maka generasi baru diharapkan memiliki tingkah laku yang bermoral tinggi demi masa depan bangsa dan negara. Selain itu kepribadian pendidik dapat mempengaruhi suasana kelas/sekolah, baik kebebasan yang dimiliki anak dalam mengeluarkan buah pikiran, dan mengembangkan kreatifitasnya ataupun pengendalian dan keterbatasan yang dialami dalam pengembangan pribadinya. Proses sosial merupakan suatu cara berhubungan antar individu, antar kelompok atau antara individu dan kelompok yang menghasilkan bentuk hubungan tertentu.

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *Colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah *Cultural-Determinism*.

Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Kebudayaan menurut Taylor adalah totalitas yang kompleks yang mencakup pengetahuan,



kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh orang sebagai anggota masyarakat (*Imran Manan, 1989*). Kebudayaan produk perseorangan ini tidak disetujui *Hasan (1983)* dengan mengemukakan kebudayaan adalah keseluruhan dari hasil manusia hidup bermasyarakat berisi aksi-aksi terhadap dan oleh sesama manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain kepandaian. Sedangkan *Kneller* mengatakan kebudayaan adalah cara hidup yang telah dikembangkan oleh anggota-anggota masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan yang mana akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Bisa dikatakan bahwa, kebudayaan adalah hasil cipta dan karya manusia berupa norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang dipelajari dan dimiliki oleh semua anggota masyarakat.

Antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat dalam arti keduanya berkenaan dengan suatu hal yang sama yaitu nilai-nilai. Pendidikan membuat orang berbudaya, pendidikan dan budaya bersama dan memajukan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Bila kebudayaan berubah maka pendidikan juga bisa berubah dan bila pendidikan berubah akan dapat mengubah kebudayaan. Pendidikan adalah suatu proses membuat orang memasuki budaya, membuat orang berperilaku mengikuti budaya yang memasuki dirinya. Sekolah sebagai salah satu dari tempat enkulturasi suatu budaya sesungguhnya merupakan bahan masukan bagi anak dalam mengembangkan dirinya. Dapat dituliskan bahwa *Hubungan antara kebudayaan dan pendidikan adalah* : a) Pendidikan membentuk atau menciptakan kebudayaan, b) Pendidikan melestarikan kebudayaan, c) Pendidikan menggunakan dan berdasarkan kebudayaan.

Ada Implikasi Konsep Kebudayaan pada Pendidikan, yaitu : Materi pelajaran banyak dikaitkan dengan keadaan dan masalah masyarakat setempat (melalui MULOK). Metode belajar ditekankan pada kegiatan peserta didik baik individual maupun kelompok.

3. Landasan Ekonomi Dalam Pendidikan

Ekonomi Berasal dari bahasa Yunani oikos : keluarga/rumah tangga, nomos : peraturan/hukum, Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Inti dari masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Teori ekonomi pada dasarnya adalah teori



pilih memilih untuk memaksimalkan kepuasan berbagai kebutuhan berdasarkan keterbatasan sumberdaya (Sumarsono, 2003). Oleh karena itu "ekonomi" dapat diartikan sebagai *"the study of choice"* (Johnes, 1993) atau *"the study of the production and distribution of all scarce resources"* (Cohn, 1979).

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran, inti masalah ekonomi adalah adanya ketidak seimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Dapat juga dikatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang kegiatan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia yang sangat banyak.

Landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam mengembangkan pendidikan. Landasan ekonomi menurut kelompok kami yaitu, suatu dasar yang mempelajari ekonomi dari semua aspek.

4. Landasan Politik Dalam Pendidikan

Politik pendidikan adalah segala kebijakan pemerintah suatu negara dalam bidang pendidikan yang berupa peraturan perundangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara. Tetapi secara umum, masyarakat masih menganggap bahwa dunia pendidikan harus terpisah atau harus dipisahkan dari dunia politik. Keduanya tidak bisa dicampur menjadi satu karena dunia pendidikan membutuhkan pelayanan profesional yang harus berlangsung secara terus menerus dan tidak memihak kepada kelompok-kelompok kepentingan tertentu, melainkan untuk semuanya (Wirt dan Kirst, 1982). Sementara itu dunia politik lebih mementingkan konstituan (kelompoknya). Platform politik bisa berubah-ubah jika rezim juga berubah. Padahal dunia pendidikan membutuhkan layanan profesional yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan jika dunia pendidikan dicampur dengan dunia politik dikhawatirkan akan terjadi distorsi penyelenggaraan pendidikan.

Politik pendidikan terbagi menjadi empat definisi, yakni: Pertama, politik pendidikan adalah metode mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedua, politik pendidikan lebih berorientasi pada bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai. Ketiga, politik pendidikan berbicara mengenai metode untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya anggaran pendidikan, kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat dan sebagainya. Keempat, politik pendidikan berbicara mengenai sejauh mana pencapaian pendidikan sebagai pembentuk manusia Indonesia yang berkualitas, penyangga ekonomi nasional, pembentuk bangsa yang berkarakter (Supriyoko., 2007). Politik pendidikan dimaknai sebagai sebuah endapan politik negara, penjabaran dari tradisi bangsa dan nilai-nilai, serta sistem konsepsi rakyat mengenai bentuk negara dalam sistem pendidikan (Kartono, 1977). Antara tatanan politik suatu bangsa dan sistem pendidikan terjadi *mutually reinforcing*. Politik pendidikan bertujuan untuk memperjelas arah kemajuan pendidikan demi



pembangunan bangsa yang lebih baik ke depan.

Politik pendidikan menjadi paduan utama perjalanan pendidikan kebangsaan. Dengan adanya politik pendidikan yang jelas, maka konsep pendidikan yang akan dibentuk dan dicapai akan berada dalam bangunan konsep yang tepat, kuat dan kokoh. Semua itu akan melahirkan sebuah tatanan pendidikan yang mencerahkan. Dapat menghasilkan produk-produk pendidikan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara intelektual maupun sosial. Bagi pemerintah, selaku pemegang kebijakan pendidikan, politik pendidikan akan membuat kebijakan pendidikan lebih beradab dan mencerahkan.

5. Landasan Psikologis Dalam Pendidikan

Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan insan, sehingga landasan psikologis artinya salah satu landasan yang paling penting ada di dalam bidang pendidikan. Secara umum landasan psikologis dari pendidikan tertuju pada pemahaman insan, khususnya tentang proses perkembangan serta proses belajar peserta didik (Hasan, M., Harahap, T. K., Sos, S., & Inanna, 2013).

Pengertian landasan psikologis artinya pemahaman peserta didik, terutama yang berkaitan mengenai aspek kejiwaan, merupakan faktor keberhasilan bagi sistem pendidikan. Dalam hal itu, psikologi menyediakan sejumlah kebutuhan perihal kehidupan eksklusif manusia serta tanda-tanda yang berkaitan dengan aspek langsung (Hasan, M., Harahap, T. K., Sos, S., & Inanna, 2013).

Perkembangan peserta didik menjadi landasan atau dasar dari perkembangan manusia yang sudah berlangsung sejak dari kandungan (pertemuan sel telur atau ovum dengan sperma) hingga ajal datang (Hasan, M., Harahap, T. K., Sos, S., & Inanna, 2013).

Maka dari itu, dengan pentingnya lingkungan dalam mempengaruhi perilaku seseorang, perlunya kita bersama-sama menjadikan lingkungan kita lebih baik dan menciptakan hubungan yang harmonis antara warga sekitar. Pengalaman hidup yang dialami seseorang, membuat orang tersebut lebih dewasa. Pengalaman hidup baik itu yang menyenangkan ataupun yang kurang menyenangkan, sebaiknya kita jadikan pelajaran agar kita menjadi lebih baik lagi. Manusia dalam menjalani hidup sebaiknya jangan pernah melihat ke masa lalu, tetapi jadikan masalah tersebut sebagai pelajaran yang berharga dalam hidup, agar ke depannya bisa menjadi lebih baik (Qomarudin, 2021).

Semakin banyak pengalaman hidup yang kita alami akan membuat kita lebih kokoh dan tangguh dalam menjalani setiap cobaan dan masalah yang datang. Manusia untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik, dapat mengikuti pendidikan formal maupun nonformal (Hasan, M., Harahap, T. K., Sos, S., & Inanna, 2013). Di dalam pendidikan formal seperti sekolah, pendidik dapat dijadikan tempat konseling bagi peserta didik atau siswi yang bermasalah dalam perilakunya. Pendidik bimbingan konseling ini yang akan menggali masalah yang ada pada peserta didik dan siswi, kemudian memberikan arahan agar peserta didik atau siswi dapat menyelesaikan masalahnya, sehingga tidak mempengaruhi pelajaran di sekolah dan dapat mengubah perilaku peserta didik atau siswi menjadi lebih baik (Qomarudin, 2021).



Setiap sekolah diwajibkan memiliki pendidik bimbingan konseling, karenadengan adanya pendidik bimbingan konseling diharapkan peserta didik atau siswi yang mengalami masalah perilaku dapat segera diatasi dan tidak mengganggu peserta didik atau siswi lain. Jika penanganan masalah perilaku mengalami keterlambatan, tidak menutup kemungkinan peserta didik atau siswi yang lain ikut memiliki perilaku yang tidak baik (Hasan, M., Harahap, T. K., Sos, S., & Inanna, 2013).

Dengan menggabungkan kegiatan psikoterapi yang dilakukan oleh psikolog dan pendidik bimbingan konseling, diharapkan peserta didik atau siswi cepat mengalami perubahan dalam hal perilaku. Sebaiknya dalam memberikan bimbingan konseling, seorang pendidik bimbingan konseling memfokuskan perhatiannya pada perilaku yang tampak, yakni perilaku yang dapat diukur, diramalkan. dan digambarkan (Hasan & Inanna, 2013).

Karena dengan memperbaiki perilaku peserta didik atau siswi yang tampak oleh mata, akan lebih mudah dan cepat mengubah perilakunya. Dalam mengubah perilaku peserta didik atau siswi yang tidak baik sangat dibutuhkan peranan keluarga dan masyarakat sekitar. Dengan adanya kerjasama antara keluarga, masyarakat dan pihak sekolah, maka proses penyembuhan peserta didik atau siswi yang mengalami perilaku tidak baik akan cepat teratasi. Apabila salah satu dari unsur lingkungan tidak mendukung, maka akan terdapat kesulitan untuk mengubah perilaku seseorang. Setiap unsur memegang peranan masing-masing. Keluarga memiliki peranan yang sangat besar, karena sebagian besar waktu peserta didik atau siswi adalah bersama keluarga (Qomarudin, 2021).

6. Landasan Religius Dalam Pendidikan

Landasan religius dalam pendidikan merupakan dasar yang bersumber dari agama. Tujuan dari landasan religius dalam pendidikan adalah seluruh proses dan hasil dari pendidikan dapat mempunyai manfaat dan makna hakiki. Agama memberikan dan mengarahkan fitrah manusia memenuhi kebutuhan batin, menuntun kepada kebahagiaan dan menunjukkan kebenaran.

Pendidikan agama dan pendidikan karakter adalah dua hal yang saling berhubungan. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia diidentifikasi berasal dari empat sumber yaitu, agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Agama menjadi sumber kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa yang selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan didasari pada nilai agama. Sehingga nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai dan kaidah dari agama.

Pancasila sebagai prinsip kehidupan bangsa dan negara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan dan seni. Sedangkan budaya menjadi dasar dalam pemberian makna dalam komunikasi antar anggota masyarakat. Budaya menjadi penting karena sebagai sumber nilai dalam pendidikan budaya dan pendidikan karakter bangsa.

Sedangkan tujuan dari pendidikan nasional menurut UU. No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang



bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. (Zayadi, 2005)

Menurut (Zayadi, 2005), sumber nilai yang berlaku dalam kehidupan manusia digolongkan menjadi dua macam yaitu:

a) Nilai ilahiyah

Nilai ilahiyah adalah nilai yang berhubungan dengan ketuhanan atau *habul minallah*, dimana inti dari ketuhanan adalah keagamaan. Kegiatan menanamkan nilai keagamaan menjadi inti kegiatan pendidikan. Nilai-nilai yang paling mendasar adalah:

- 1) Iman, yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan kepada Allah.
- 2) Islam, yaitu sebagai kelanjutan dari iman, maka sikap pasrah kepada-Nya dengan menyakini bahwa apapun yang datang dari Allah mengandung hikmah kebaikan dan pasrah kepada Allah.
- 3) Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah senantiasa hadir atau berada bersama kita di manapun kita berada.
- 4) Taqwa, yaitu sikap menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah.
- 5) Ikhlas, yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan tanpa pamrih, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah.
- 6) Tawakal, yaitu sikap yang senantiasa bersandar kepada Allah, dengan penuh harapan kepada Allah.
- 7) Syukur, yaitu sikap dengan penuh rasa terimakasih dan penghargaan atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah.
- 8) Sabar, yaitu sikap batin yang tumbuh karena kesadaran akan asal dan tujuan hidup yaitu Allah.

b) Nilai insaniyah

Nilai insaniyah adalah nilai yang berhubungan dengan sesama manusia atau *habul minanas* yang berisi budi pekerti. Berikut adalah nilai yang tercantum dalam nilai insaniyah: (Zayadi, 2005)

- 1) Silaturahmi, yaitu petalian rasa cinta kasih antara sesama manusia.
- 2) Al-Ukhuwah, yaitu semangat persaudaraan.
- 3) Al-Musawah, yaitu pandangan bahwa harkat dan martabat semua manusia adalah sama.
- 4) Al-Adalah, yaitu wawasan yang seimbang.
- 5) Husnu Dzan, yaitu berbaik sangka kepada sesama manusia
- 6) Tawadlu, yaitu sikap rendah hati.



- 7) Al-Wafa, yaitu tepat janji.
- 8) Insyirah, yaitu lapang dada.
- 9) Amanah, yaitu bisa dipercaya
- 10) Iffah atau ta'afuf, yaitu sikap penuh harga diri, tetapi tidak sombong tetap rendah hati.
- 11) Qawamiyah, yaitu sikap tidak boros.
- 12) Al-Munfikun, yaitu sikap kaum beriman yang memiliki kesediaan yang besar menolong sesama manusia.

Tahap perkembangan religius yang dikembangkan Moran seperti dikutip M.I Soelaeman sebagaimana dijelaskan berikut:

1) Anak-anak

Dunia religius anak masih sangat sederhana sehingga disebut juga dengan the simply religious. Pada saat itu anak memang belum dapat melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri, bahkan sampai kepada yang paling sederhana pun. Dalam banyak hal anak harus mempercayakan dirinya kepada pendidiknya. Sifat anak adalah mudah percaya dan masih bersifat reseptif. Dalam dunia yang menurutnya belum jelas strukturnya, kesempatan untuk bertualang dalam dunia fantasi masih terbuka, karena dia belum dapat mengenal secara jelas realita yang dihadapinya. Oleh karenanya pendidikan agama kepada anak seringnya dengan metode cerita.

2) Remaja

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak menuju dewasa. Di samping perubahan biologis anak mengalami perubahan kehidupan psikologi dan kehidupan sosio-budayanya, dan yang lebih penting lagi dunia lainnya, dunia penuh penemuan dan pengalaman yang bahkan ditingkatkannya menjadi eksperimentasi. Tidak jarang dia menghadapi ketidakjelasan, keraguan bahkan kadang-kadang seperti menemukan dirinya dalam dunia yang sama sekali baru dan asing. Dalam situasi seperti ini, tidak jarang dia harus terus menempuh langkahnya, yang kadang bersifat sejalan dan kadang-kadang berlawanan dengan apa yang telah terbiasa dilakukan sehari-hari, atau bahkan berlawanan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku, sehingga dia tampak mementang dan menantang arus. Pada saat ini dia memulai aktifitas penemuan sistem nilai, adakalanya dia suka mencoba-coba, bereksperimen seberapa jauh keberlakuan nilai tersebut. Karena perkembangan penalaran, pengalaman dan pendidikannya yang sudah memungkinkan untuk berpikir dan menimbang, bersikap kritis terhadap persoalan yang dihadapinya, maka tidak jarang dia menunjukkan sikap sinis terhadap pola tingkahlaku atau nilai yang tidak setuju. Pada saat ini orang tua dan pendidik pada umumnya perlu mengundangnya memasuki dunia religius dan menciptakan situasi agar dia betah mendiaminya. Dengan



bimbingan orang tua atau pendidikannya, dengan tingkat kemampuan penalarannya, dengan tingkat kemampuan penyadaran akan nilai-nilai agama, kini dia mampu menganut suatu agama yang diakuinya.

3) Dewasa

Pada saat ini seseorang mencapai tahap kedewasaan beragama, yakni mampu merealisasikan agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari atas dasar kerelaan dan kesungguhan dan bukan halnya peluasan diluar. Pribadi yang rela dan sungguh-sungguh dalam keberagamaannya sehingga akan menerima dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama, maupun tugas hidupnya bukan sebagai sesuatu yang dibebankan dari luar, melainkan sebagai suatu sikap yang muncul dari dalam dirinya. (Latif, 2007).

7. Landasan Hukum Dalam Pendidikan

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Depdikbud, 1999). Hukum merupakan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini dalam kegiatan pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku itu. Cukup banyak kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan lain, seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, supervise, dan lain sebagainya. Kata yuridis berkaitan dengan hukum, maka yang menjadi asumsi dalam pendidikan adalah sumber-sumber hukum yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

Landasan hukum pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan, terutama pendidikan nasional. Sedangkan menurut (Pidarta, 1997) landasan hukum diartikan sebagai peraturan baku sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.

Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Landasan hukum seorang pendidik boleh mengajar misalnya, adalah surat keputusan tentang pengangkatannya sebagai pendidik. Yang melandasi atau mendasari ia menjadi pendidik adalah surat keputusan itu beserta hak-haknya. Surat keputusan itu merupakan titik tolak untuk ia bisa melaksanakan pekerjaan pendidik (Pidarta, 1997). Sementara hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi sesuai dengan aturannya yang berlaku pula.

Dari uraian diatas kata landasan hukum pendidikan dapat diartikan yaitu peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam dunia pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan baku-baku ini. Cukup banyak kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan lain, seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, supervisi, dan sebagainya.

Kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh hukum, antara lain adalah Pendidikan Anak Usia Dini berupaya memberikan bimbingan bermain sambil belajar untuk mencetak mental emosional



anak yang lebih siap memulai belajar tahap serius di Sekolah Dasar, masyarakat harus membantu pembiayaan pendidikan, pendidikan menengah mempersiapkan peserta didik untuk masuk ke perpendidikan tertinggi dan menjadi anggota masyarakat yang baik.



BAB 2 KOMPONEN PENDIDIKAN

Dalam aktifitas pendidikan terdapat enam komponen pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi namun komponen integrasinya terutama terletak pada pendidik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Komponen-komponen pendidikan tersebut meliputi : 1) tujuan, 2) pendidik, 3) siswa, 4) isi/materi, 5) metode, dan 6) situasi lingkungan. Noeng Muhadjir mengungkapkan bahwa komponen-komponen pendidikan meliputi: 1) tujuan, 2) subyek didik, 3) pendidik, 4) lingkungan.¹² Sejalan dengan penelitian di atas, Aminuddin Rasyad berpendapat bahwa “unsur-unsur esensial pendidikan adalah 1) materi pendidikan, 2) siswa dan pendidik 3) tujuan pendidikan, 4) cara-cara mendidik 5) alat pendidikan, 6) lingkungan pendidikan, 7) evaluasi pendidikan. Berdasarkan beberapa pendapat tentang komponen-komponen pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 komponen pendidikan yang digunakan dalam acuan pendidikan yaitu: 1) tujuan, 2) siswa, 3) pendidik, 4) isi/materi, 5) situasi lingkungan dan 6) alat pendidikan.

A. Komponen Tujuan

Tujuan pendidikan berfungsi sebagai arah yang ingin dituju dalam aktifitas pendidikan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka komponen-komponen pendidikan yang lain serta aktivitasnya senantiasa berpedoman kepada tujuan, sehingga efektifitas proses pendidikannya selalu diukur apakah dapat mencapai tujuan atau tidak. Tujuan pendidikan merupakan masalah sentral dalam pendidikan. Sebab tanpa perumusan yang jelas tentang tujuan pendidikan, perbuatan menjadi acak-acakan, tanpa arah, bahkan bisa sesat atau salah langkah. Oleh karena itu perumusan tujuan dengan jelas dan tegas, menjadi inti dari seluruh pemikiran pedagogis dan perenungan filosofis. Dalam perspektif Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Amir Faisal, tujuan pendidikan Islam pada hakekatnya sama dengan tujuan diturunkannya agama Islam yaitu untuk membentuk manusia yang bertakwa (muttaqin). Adapun manusia yang bertakwa itu adalah yang: 1) Dapat melaksanakan ibadah mahdah dan ghairu mahdah. 2) Membentuk warga negara yang bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsanya, dalam rangka bertanggung jawab kepada Allah. 3) Membentuk dan mengembangkan tenaga profesional yang siap dan terampil untuk memasuki teknostruktur masyarakatnya. 4) Mengembangkan tenaga ahli dibidang ilmu agama Islam. Uraian tentang tujuan di atas menunjukkan bahwa tanpa adanya tujuan yang jelas maka hasil yang didapat tentu tidak akan baik.

B. Komponen Siswa

Komponen Siswa / peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang ada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis, pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seseorang peserta didik



yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Syamsul Nizar mendeskripsikan enam kriteria peserta didik: 1) Peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa tetapi memiliki dunianya sendiri. 2) Peserta didik memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. 3) Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan dimana ia berada. 4) Peserta didik merupakan unsur utama jasmani dan rohani. 5) Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Proses pembelajaran pada hakikatnya diarahkan untuk membelajarkan siswa agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, maka proses pengembangan perencanaan dan desain pembelajaran, siswa harus dijadikan pusat dari segala kegiatan. Dalam proses pendidikan peserta didik di samping sebagai objek juga sebagai subjek. Oleh karena itu agar seorang pendidik berhasil dalam proses pendidikan, maka ia harus memahami peserta didik dengan segala karakteristiknya.

C. Komponen Pendidik

Pendidik adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap dan tingkahlaku peserta didik. Terdapat dua kategori pendidik yaitu pendidik menurut kodrat (orang tua) dan pendidik menurut jabatan (guru). Abudin Nata menjelaskan bahwa “dari komponen-komponen pendidikan, guru merupakan komponen pendidikan terpenting, terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.” Sedangkan tugas guru (pendidik) yang utama, menurut Imam alGhazali adalah “menyempurnakan, membersihkan dan menyucikan serta membawa hati manusia untuk mendekatkan diri pada Allah Swt.” Guru sebagai pendidik menurut jabatan menerima tanggung jawab dari tiga pihak yaitu orang tua, masyarakat dan negara. Tanggung jawab dari orang tua diterima guru atas dasar kepercayaan, bahwa guru mampu memberikan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan perkembangan siswa.

Dalam lembaga pendidikan formal seorang pendidik dikatakan baik jika memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Menurut Mustaqim dalam Psikologi pendidikan, ada tiga bagian utama kompetensi yang harus dikuasai seorang guru untuk dapat mengajar dengan baik, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi penguasaan materi ajar, dan kompetensi cara mengajar. Penguasaan materi pelajaran diperlukan agar peserta didik dibimbing untuk mampu menguasai penyampaian informasi dalam bentuk ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan baik. Kompetensi cara mengajar sangat dibutuhkan agar guru terampil dalam perencanaan pembelajaran, merancang strategi pembelajaran yang tepat, mampu melaksanakan dengan baik, dan mengevaluasinya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, menurut peraturan Pemerintah No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa guru wajib memiliki empat kompetensi, yaitu 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi profesional, 3) kompetensi kepribadian, 4) kompetensi sosial. Kompetensi kepribadian penting dikuasai seorang guru karena dengan kompetensi kepribadian inilah memungkinkan guru meramu berbagai potensi yang dimilikinya sehingga pembelajaran menjadi efektif



D. Komponen Materi/Isi

Pendidikan (Kurikulum) Salah satu konsep yang harus dikuasai oleh guru untuk menunjang kompetensi adalah kurikulum.³⁰ Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya pelari dan *curare* yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi Kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Membicarakan masalah kurikulum pendidikan yang dikaitkan dengan madrasah diniyah sebenarnya merupakan sesuatu hal yang tabu dikalangan ini terutama madrasah diniyah yang berada di kawasan pondok pesantren salaf/tradisional. Kata kurikulum tidak begitu populer, walaupun yang dimaksud dengan kurikulum adalah kegiatan baik yang berorientasi pada pengembangan intelektual, keterampilan, maupun kegiatan-kegiatan lain. Terlepas dari hal tersebut madrasah diniyah yang berada di pesantren salaf menyebutnya dengan materi pelajaran. Dalam dunia pendidikan kurikulum bisa diartikan secara sempit maupun secara luas. Secara sempit kurikulum diartikan hanya sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik di madrasah atau perguruan tinggi. Dari pengertian kurikulum secara sempit menurut Supiana adalah sejumlah materi/isi pelajaran. Materi/isi pendidikan adalah segala sesuatu pesan yang disampaikan oleh pendidik kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Secara lebih luas Nurdin dan Basyirudin mengartikan kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi lebih luas daripada itu: kurikulum diartikan merupakan aktivitas apa saja yang dilakukan madrasah dalam rangka memengaruhi peserta didik dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan, termasuk di dalamnya kegiatan pembelajaran, mengatur strategi dalam pembelajaran, cara mengevaluasi program pengembangan pembelajaran dan sebagainya. Crow and Crow mendefinisikan bahwa “kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah.”³⁵ Sedangkan M. Arifin memandang “kurikulum sebagai seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan.” Konsep kurikulum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 1 ayat 11: menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Definisi di atas menjadi pedoman bagi konsep kurikulum setiap jenis dan jenjang lembaga pendidikan di Indonesia. Dengan demikian kurikulum merupakan rencana dan pengaturan kegiatan pembelajaran yang terwujud dokumen tertulis dan sekaligus sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.

Dalam usaha pendidikan yang diselenggarakan di keluarga, di sekolah dan di masyarakat, terdapat syarat utama dalam pemilihan bahan/materi pendidikan yaitu: 1) materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan, 2) materi harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Materi pelajaran dapat dibedakan menjadi: pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Pengetahuan menunjuk pada informasi yang disimpan dalam pikiran siswa, dengan demikian pengetahuan berhubungan dengan berbagai informasi yang



harus dihafal dan dikuasai oleh siswa. Keterampilan menunjuk pada tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang dengan cara yang kompeten untuk mencapai tujuan tertentu.

E. Komponen Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan adalah suatu ruang dan waktu yang mendukung kegiatan pendidikan. Proses pendidikan berada dalam suatu lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Lingkungan ada dua macam, lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik yakni suasana dan keadaan berlangsungnya pendidikan. Lingkungan sosial yakni iklim dan suasana kependidikan. Siswa dengan berbagai potensinya akan berkembang maksimal jika berada dalam sebuah lingkungan yang kondusif. Iklim yang kondusif bagi pencapaian tujuan pendidikan adalah merupakan kurikulum tersembunyi bagi pencapaian tujuan pendidikan.

Iklim lingkungan kelas yang kondusif merupakan faktor pendorong yang dapat memberikan daya tarik bagi proses pembelajaran. Iklim belajar yang menyenangkan akan membangkitkan semangat dan menumbuhkan aktivitas serta kreativitas peserta didik. Lingkungan kelas yang kondusif, nyaman, menyenangkan, bersih, dan rapi berperan penting dalam menunjang efektifitas pembelajaran.

F. Komponen Alat

Pendidikan Alat pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berfungsi sebagai perantara pada saat menyampaikan materi pendidikan, oleh pendidik kepada siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Peristiwa pendidikan ditandai dengan adanya interaksi edukatif. Agar interaksi dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, maka disamping dibutuhkan pemilihan bahan materi pendidikan yang tepat, perlu dipilih metode yang tepat pula. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam prakteknya ada dua macam alat pendidikan. Pertama alat pendidikan dalam arti metode, kedua alat pendidikan dalam arti perangkat keras yang digunakan seperti media pembelajaran dan sarana pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peranan yang penting sebagai salah satu komponen pembelajaran. Tanpa media pembelajaran, proses pembelajaran sebagai proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara maksimal.

Menurut Omar Hamalik dalam bukunya *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, “media dalam proses belajar mengajar memiliki dua peranan penting: 1) media sebagai alat bantu mengajar, 2) media sebagai sumber belajar yang digunakan sendiri oleh peserta didik secara mandiri.” Dengan adanya uraian komponen-komponen pendidikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa memerhatikan komponen-komponen dalam pendidikan adalah sangat penting dilakukan karena adanya hubungan antara satu dengan yang lain dan membentuk suatu sistem, sebagai suatu sistem tentunya setiap komponen memberikan sumbangan bagi keberhasilan pengajaran sesuai dengan fungsi masing-masing.



BAB 3
ONTOLOGI PENDIDIKAN,
EPISTEMOLOGI DAN AXIOLOGI ILMU PENDIDIKAN

A. ONTOLOGI ILMU PENDIDIKAN

1. Pengertian Ontologi

Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada, menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab-akibat. Yaitu, ada manusia, ada alam, dan ada causa prima dalam suatu hubungan menyeluruh, teratur dan tertib dalam keharmonisan. Jadi, dari aspek ontologi, segala sesuatu yang ada ini berada dalam tatanan hubungan estetis yang diliputi dengan warna nilai keindahan.

Ontologi merupakan salah satu kajian kefilosafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Thales merupakan orang pertama yang berpendirian sangat berbeda di tengah-tengah pandangan umum yang berlaku saat itu. Di sinilah letak pentingnya tokoh tersebut. Kecuali dirinya, semua orang waktu itu memandang segala sesuatu sebagaimana keadaannya yang wajar. Apabila mereka menjumpai kayu, besi, air, daging, dan sebagainya, hal-hal tersebut dipandang sebagai substansi-substansi (yang terdiri sendiri-sendiri). Dengan kata lain, bagi kebanyakan orang tidaklah ada pemilihan antara kenampakan (appearance) dengan kenyataan (reality). Namun yang lebih penting ialah pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka (sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri). Ontologi terdiri dari dua suku kata, yakni ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud (being) dan logos berarti ilmu. Jadi ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat yaitu ada manusia, ada alam, dan ada kausa prima dalam suatu hubungan yang menyeluruh, teratur, dan tertib dalam keharmonisan (Suparlan Suhartono, 2007). Ontologi dapat pula diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Obyek ilmu atau keilmuan itu adalah dunia empirik, dunia yang dapat dijangkau pancaindera. Dengan demikian, obyek ilmu adalah pengalaman inderawi. Dengan kata lain, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud (yang ada) dengan berdasarkan pada logika semata. Pengertian ini didukung pula oleh pernyataan Runes bahwa “ontology is the theory of being qua being”, artinya ontologi adalah teori tentang wujud. Ontologi ilmu meliputi apa hakikat ilmu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan ilmiah, yang tidak terlepas dari persepsi filsafat tentang apa dan bagaimana (yang) “ada” itu (being, sein, het zijn). Paham monoisme yang terpecah menjadi idealisme atau spiritualisme, paham dualisme, pluralisme



dengan berbagai nuansanya, merupakan paham ontologik yang pada akhirnya menentukan pendapat bahkan keyakinan kita masing-masing mengenai apa dan bagaimana (yang) “ada” sebagaimana manifestasi kebenaran yang kita cari.

Pendidikan, ditinjau dari sisi ontologi, berarti persoalan tentang hakikat keberadaan pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa pendidikan selalu berada dalam hubungannya dengan eksistensi kehidupan manusia. Sedangkan kehidupan manusia ditentukan asal-mula dan tujuannya. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa ontologi pendidikan berarti pendidikan dalam hubungannya dengan asal-mula, eksistensi, dan tujuan kehidupan manusia. Tanpa manusia, pendidikan tak pernah ada. Tetapi, bagaimana halnya dengan keberadaan manusia tanpa pendidikan? Mungkinkah itu? Dengan demikian, jelaslah bahwa adanya pendidikan begitu sentral di dalam eksistensi manusia di muka bumi ini. Sehingga dapat diasumsikan bahwa adanya pendidikan dapat memberikan pengetahuan yang cerah tentang asal-mula manusia dan tujuan hidup manusia.

2. Objek dan Metode dalam Ontologi

2.1 Objek formal

Objek formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas. Bagi pendekatan kuantitatif, realitas tampil dalam kuantitas atau jumlah, telaahnya akan menjadi kualitatif, realitas akan tampil menjadi aliran-aliran materialisme, idealisme, naturalisme, atau hylomorphisme. Referensi tentang kesemuanya itu penulis kira cukup banyak. Hanya dua yang terakhir perlu kiranya penulis lebih jelaskan. Yang natural ontologik akan diuraikan di belakang hylomorphisme di ketengahkan pertama oleh aristoteles dalam bukunya “De Anima”. Dalam tafsiran-tafsiran para ahli selanjutnya di pahami sebagai upaya mencari alternatif bukan dualisme, tetapi menampilkan aspek materialisme dari mental.

2.2 Metode dalam Ontologi

Lorens Bagus memperkenalkan tiga tingkatan abstraksi dalam ontologi, yaitu : abstraksi fisik, abstraksi bentuk, dan abstraksi metaphisik. Abstraksi fisik menampilkan keseluruhan sifat khas sesuatu objek; sedangkan abstraksi bentuk mendeskripsikan sifat umum yang menjadi ciri semua sesuatu yang sejenis. Abstraksi metaphisik mengetangahkan prinsip umum yang menjadi dasar dari semua realitas. Abstraksi yang dijangkau oleh ontologi adalah abstraksi metafisik.

2.3 Beberapa Konsep Mengenai Ontologi Ilmu

Ontologi sebagai cabang filsafat yang membicarakan tentang hakikat benda bertugas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan “apa sebenarnya realitas benda itu? Apakah sesuai dengan wujud penampakkannya atau tidak?”. Dari teori hakikat (ontologi) ini kemudian muncullah beberapa aliran dalam filsafat, antara lain: Filsafat Materialisme, Filsafat Idealisme, Filsafat Dualisme, Filsafat Skeptisisme, Filsafat Agnostisisme.

Jujun S. Suriasumantri (2000: 34 – 35) menyatakan bahwa pokok permasalahan yang menjadi obyek kajian filsafat mencakup tiga segi, yakni (a) logika (Benar-Salah), (b) etika



(Baik-Buruk), dan (c) estetika (Indah-Jelek). Ketiga cabang utama filsafat ini lanjut Suriasumantri, kemudian bertambah lagi yakni, pertama, teori tentang ada: tentang hakikat keberadaan zat, hakikat pikiran serta kaitan antara zat dan pikiran yang semuanya terangkum dalam metafisika; kedua, kajian mengenai organisasi sosial/ pemerintahan yang ideal, terangkum dalam politik. Kelima cabang filsafat ini – logika, etika, estetika, metafisika dan politik – menurut Suriasumantri, kemudian berkembang lagi menjadi cabang-cabang filsafat yang mempunyai bidang kajian lebih spesifik lagi yang disebut filsafat ilmu.

Argumen ontologis ini pertama kali dilontarkan oleh Plato (428-348 SM) dengan teori idea-nya. Menurut Plato, tiap-tiap yang ada di alam nyata ini mesti ada ideanya. Idea yang dimaksud oleh Plato adalah definisi atau konsep universal dari tiap sesuatu. Plato mencontohkan pada seekor kuda, bahwa kuda mempunyai idea atau konsep universal yang berlaku untuk tiap-tiap kuda yang ada di alam nyata ini, baik itu kuda yang berwarna hitam, putih ataupun belang, baik yang hidup ataupun sudah mati. Idea kuda itu adalah faham, gambaran atau konsep universal yang berlaku untuk seluruh kuda yang berada di benua manapun di dunia ini.

Ontologi dapat mendekati masalah hakikat kenyataan dari dua macam sudut pandang. Orang dapat mempertanyakan “kenyataan itu tunggal atau jamak”? yang demikian ini merupakan pendekatan kuantitatif. Atau orang dapat juga mengajukan pertanyaan, “Dalam babak terakhir apakah yang merupakan jenis kenyataan itu?” yang demikian itu merupakan pendekatan secara kualitatif. Ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris (misalnya antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, ilmu teknik dan sebagainya). Ontologi sebagai cabang filsafat yang membicarakan tentang hakikat benda bertugas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan “apa sebenarnya realitas benda itu? apakah sesuai dengan wujud penampakkannya atau tidak?”. Dari teori hakikat (ontologi) ini kemudian muncullah beberapa aliran dalam persoalan keberadaan, yaitu:

- a. Keberadaan dipandang dari segi jumlah (kuantitas Monoisme)
 - a) Dualisme.
 - b) Pluralisme.
- b. Keberadaan dipandang dari segi sifat, menimbulkan beberapa aliran, yaitu
 - a) Spiritualisme.
 - b) Materialisme.
- c. Keberadaan dipandang dari segi proses, kejadian, atau perubahan
 - a) Mekanisme.
 - b) Teleologi.
 - c) Vitalisme.
 - d) Organisme.



3. Hakikat Manusia Sebagai Subjek Pendidikan (Pendidik dan Peserta Didik)

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, ayat 30:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Manusia dalam kajian kali ini lebih difokuskan kepada subjek pendidikan, bahwa dalam dunia pendidikan manusialah yang banyak berperan. Karena dilakukannya pendidikan itu tidak lain diperuntukan bagi manusia, agar tidak timbul kerusakan di bumi ini. Dalam pendidikan bahwa manusia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai pendidik dan peserta didik.

Menurut Al-Aziz, pendidik adalah orang yang bertanggungjawab dalam menginternalisasikan nilai-nilai religius dan berupaya menciptakan individu yang memiliki pola pikir ilmiah dan pribadi yang sempurna. Masing-masing definisi tersebut, mengisyaratkan bahwa peran, tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pendidik tidaklah gampang, karena dalam diri anak didik harus terjadi perkembangan baik secara afektif, kognitif maupun psikomotor. Dalam setiap individu terdapat harus terdapat perubahan ke arah yang lebih baik. Jika dalam ajaran Islam anak didik harus mampu menginternalisasikan ajaran-ajaran dalam dirinya, sehingga mampu menjadi pribadi yang bertaqwa dan berakhlakul karimah yang akan bahagia baik di dunia dan diakhirat.

Sedangkan anak didik (peserta didik) adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan



bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Pengertian tersebut berbeda apabila anak didik (peserta didik) sudah bukan lagi anak-anak, maka usaha untuk menumbuhkembangkannya sesuai kebutuhan peserta didik, tentu saja hal ini tidak bisa diperlakukan sebagaimana perlakuan pendidik kepada peserta didik (anak didik) yang masih anak-anak. Maka dalam hal ini dibutuhkan pendidik yang benar-benar dewasa dalam sikap maupun kemampuannya. Dalam pandangan modern, anak didik tidak hanya dianggap sebagai obyek atau sasaran pendidikan, melainkan juga harus diperlakukan sebagai subyek pendidikan, dengan cara melibatkan mereka dalam memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian bahwa peserta didik adalah orang yang memerlukan pengetahuan, ilmu, bimbingan dan pengarahan. Islam berpandangan bahwa hakikat ilmu berasal dari Allah, sedangkan proses memperolehnya dilakukan melalui belajar kepada guru. Karena ilmu itu berasal dari Allah, maka membawa konsekuensi perlunya seorang peserta didik mendekatkan diri kepada Allah atau menghiasi diri dengan akhlak yang mulia yang disukai Allah, dan sedapat mungkin menjauhi perbuatan yang tidak disukai Allah. Bertolak dari hal itu, sehingga muncul suatu aturan normatif tentang perlunya kesucian jiwa sebagai seorang yang menuntut ilmu, karena ia sedang mengharapkan ilmu yang merupakan anugerah Allah. Ini menunjukkan pentingnya akhlak dalam proses pendidikan, di samping pendidikan sendiri adalah upaya untuk membina manusia agar menjadi manusia yang berakhlakul karimah dan bermanfaat bagi seluruh alam.

4. Pendidikan dan Kaitannya Dengan Aspek-Aspek Lain

4.1 Pendidikan dan Manusia

Manusia, siapa pun, sebagai apa pun, di mana dan kapan pun berada, berhak atas pendidikan. Manusia sebagai objek pendidikan adalah manusia dalam perwujudannya sebagai individu yang menjadi bagian Integral dari masyarakatnya. Dua sisi perwujudan ini dipandang penting dan perlu untuk diproses dalam sistem pendidikan, agar dikemudian hari manusia dapat menemukan jati dirinya sebagai manusia. Berulang kali dinyatakan bahwa tanpa pendidikan, manusia tidak mungkin bisa menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam kehidupan, sesuai dengan hakikat asal-mula dan hakikat tujuan hidupnya. Sehubungan dengan hal itu, pendidikan secara khusus difungsikan untuk menumbuhkembangkan segala potensi kodrat (bawaan) yang ada dalam diri manusia.

4.2 Pendidikan dan Filsafat

Filsafat secara etimologis berarti ‘cinta kearifan’. Mencintai kearifan berarti mendambakan kehidupan yang diliputi dengan sikap dan perilaku adil. Kehidupan yang berkeadilan adalah kehidupan yang harmonis dan penuh dengan kebahagiaan. Kehidupan demikian adalah kehidupan dinamis; kehidupan kreatif untuk pertumbuhan dan perkembangan ke arah masa depan yang lebih baik.



Bertolak dari pemikiran filsafat tersebut, pendidikan muncul dan memulai sesuatu. Manusia mulai mencoba untuk mendidik diri sendiri dan sesamanya, dengan sasaran menumbuhkan kesadaran terhadap eksistensi kehidupan ini. Dalam hal ini, kegiatan pendidikan ditekankan pada materi yang berisi tentang pengetahuan umum berupa wawasan asal-mula, eksistensi dan tujuan kehidupan. Kesadaran terhadap asal-mula dan tujuan kehidupan adalah landasan dasar bagi perilaku sehari-hari, sehingga semua kegiatan eksistensi kehidupan ini selalu bergerak teratur menuju satu titik tujuan akhir.

4.3 Pendidikan dan Sejarah

Ada satu lagi persoalan khas manusia, yakni sejarah. Maksudnya, sejarah adalah suatu rentetan kejadian yang berlangsung di dalam kehidupan masyarakat manusia. Rentetan kejadian tersebut tidak terjadi secara kebetulan, namun berlangsung dalam kesengajaan. Ciri khas objek sejarah adalah rentetan kejadian yang selalu bergerak menuju perkembangan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi, sejarah bisa dikatakan sebagai suatu sistem rentetan kejadian yang bersumber dari kesadaran, dengan objek khusus yaitu kesadaran tentang perlunya perubahan-perubahan demi perkembangan dan kemajuan bagi kehidupan masyarakat manusia.

Untuk itu, berdasarkan sejarahnya, manusia selalu mengubah dan mengembangkan sistem pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman. Sejarah mengideakan masa mendatang yang lebih baik dan maju. Sementara itu, pendidikan menindaklanjuti dengan mengubah dan mengembangkan sistem pembelajaran untuk mendapatkan keahlian dan keterampilan yang relevan dengan kehidupan yang diideakan sejarah itu.

B. EPISTEMOLOGI ILMU PENDIDIKAN

1. Pengertian Epistemologi

Epistemologi sering juga disebut dengan teori pengetahuan. Istilah epistemologi berasal dari kata Yunani *episteme*, yang artinya pengetahuan, dan *logos* yang artinya ilmu atau teori. Jadi, epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya (validitas) pengetahuan. Epistemologi memfokuskan pada makna pengetahuan yang dihubungkan dengan konsep, sumber, dan kriteria pengetahuan, dan jenis pengetahuan.

Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal-usul susunan, metode-metode, dan sahnya pengetahuan. Hal yang dikaji dalam epistemologi adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Contoh pertanyaan-pertanyaan epistemologi seperti: Apakah sumber-sumber pengetahuan? Bagaimana kita memutuskan antara dua pandangan yang berlawanan? Pengetahuan apakah yang paling berharga?

Menurut A. Susanto (2010: 105) suatu pengetahuan itu termasuk ilmu atau pengetahuan ilmiah apabila pengetahuan itu dan cara memperolehnya telah memenuhi syarat tertentu. Apabila syarat-



syarat itu belum terpenuhi, maka suatu pengetahuan dapat digolongkan dalam pengetahuan lain yang bukan ilmu. Adapun syarat-syarat suatu pengetahuan termasuk ilmu atau pengetahuan ilmiah adalah dasar pembenaran, sifat sistematis, dan intersubyektif.

Ilmu pendidikan merupakan sebuah sistem pengetahuan tentang pendidikan yang diperoleh melalui riset. Oleh karena pengetahuan yang dihasilkan riset tersebut disajikan dalam bentuk konsep-konsep pendidikan, maka ilmu pendidikan dapat pula dibataskan sebagai sebuah usaha sistem konsep pendidikan yang dihasilkan melalui riset.

2. Objek formal dalam Epistemologi Ilmu Pendidikan

Objek formal ilmu berkenaan dengan bidang yang menjadi keseluruhan ruang lingkup garapan sebuah ilmu. Sedangkan objek material objek material ilmu berkenaan dengan aspek-aspek yang menjadi garapan penyelidikan langsung ilmu yang bersangkutan. Dapat terjadi bahwa sekelompok cabang ilmu mempunyai objek formal yang sama namun mempunyai objek material yang berbeda, misalnya: objek formalnya manusia, pada cabang ilmu antropologi objek materialnya asal-usul, perkembangan, dan ciri-ciri spesies atau ras manusia; pada cabang ilmu psikologi objek materialnya tingkah laku binatang dan manusia.

Objek formal Ilmu Pendidikan adalah pendidikan, yang dapat diartikan secara maha luas, sempit, dan terbatas. Pendidikan dalam arti luas adalah belajar sepanjang hidup (*lifelong*) dari dalam kandungan hingga liang lahat. Berlangsungnya pendidikan tidak terbatas dalam satu jenis lingkungan hidup tertentu, tetapi berlangsung dalam segala bentuk lingkungan hidup manusia. Pendidikan dalam arti maha luas maka bentuk-bentuk kegiatannya mempunyai ruang lingkup yang luas juga, baik dalam bentuk pendidikan informal yang tidak disengaja/direncanakan maupun bentuk pendidikan formal yang terprogram dengan ketat. Contoh bentuk kegiatan pendidikan dalam arti maha luas adalah:

- a. Pengalaman belajar individual, misalnya
- b. Belajar bebas (*independent study*),
- c. Sistem sorongan dalam pengajian Al Quran di surau,
- d. Sistem magang dalam pelatihan keterampilan di tempat kerja,
- e. Sistem tutorial dalam pendidikan privat,
- f. Sistem pemberian tugas perorangan,
- g. Bentuk-bentuk pengalaman belajar kelompok, misal:
- h. Sistem klasikal di sekolah,
- i. Metode kelompok dalam pelatihan tenaga kerja seperti: diskusi, simposium, konverensi, dll.
- j. Sistem pemberian tugas.

Tujuan pendidikan pun tidak terbatas karena keseluruhan pengalaman belajar yang beraneka ragam. Aliran pendidikan yang cenderung mendefinisikan pendidikan dalam arti maha luas adalah Kaum Humanis Romantik, salah satunya adalah Ivan Illich, dan Kaum Pragmatis yang dipelopori



John Dewey. Mereka tidak setuju dengan praktek pendidikan yang ada, sekolah terasing dari kehidupan nyata.

Dalam arti sempit, pendidikan tidaklah berlangsung seumur hidup, tetapi berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas. Pendidikan merupakan hasil rekayasa manusia, pengalaman belajar terjadi dalam dunia sekolah yang memiliki batas waktu dan tempat serta terstruktur. Pendidikan diselenggarakan secara berjenjang dari Taman Kanak-Kanak (*Kindergarten*), Sekolah Dasar (*Elementary School*), Sekolah Menengah (*Senior High School*), dan Perguruan Tinggi (*University*). Bahkan sekarang sebelum Taman Kanak-Kanak ada program Pendidikan Anak Usia Dini (*Playgroup*). Pendidikan merupakan lembaga formal yang diciptakan khusus untuk menyelenggarakan pendidikan pada jenjang tertentu dengan guru sebagai pengendali kegiatan pendidikan dari perencanaan hingga penilaian pendidikan. Kegiatan pendidikan mengikuti kalender pendidikan dengan menggunakan rekayasa teknologi pendidikan, baik berupa metodologi pendidikan maupun penggunaan media pembelajaran. Tujuan pendidikan dirumuskan pada saat perencanaan agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan baik untuk tercapainya kompetensi-kompetensi tertentu sesuai perencanaan. Aliran pendidikan yang mendefinisikan pendidikan dalam arti sempit adalah Kaum Behavioris (B. Watson, B.F. Skinner, Lester Frank Ward). Mereka yakin bahwa sekolah sebagai hal ihwal yang berkenaan dengan rekayasa perubahan tingkah laku. Ada tiga prinsip utama yang mendasari sekolah dalam menyelenggarakan proses rekayasa perubahan tingkah laku, yaitu:

- a. Pembentukan pola tingkah laku seseorang sangat kuat dipengaruhi oleh lingkungan,
- b. Pendidikan di sekolah merupakan rekayasa perubahan pola tingkah laku yang terprogram secara cermat,
- c. Masa depan sekolah sebagai lembaga perekayasa pola tingkah laku yang terprogram adalah cerah karena mempunyai peranan yang besar dalam mencapai kemajuan.

Jadi pendidikan dalam arti sempit adalah sekolah yang merupakan lingkungan buatan manusia yang diciptakan sebagai bentuk pola rekayasa pengubahan pola tingkah laku berdasarkan prinsip kerja ilmiah dan teknologi sehingga menghasilkan tenaga berkompotensi dan produktif.

Pendidikan dalam arti luas terbatas merupakan pendidikan yang berisi berbagai pengalaman belajar secara keseluruhan lingkungan hidup, baik di sekolah maupun di luar sekolah yang sengaja diselenggarakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengalaman belajar di sekolah harus ditingkatkan menjadi interaksi dua arah antara guru dan siswa sehingga pengalaman belajar yang dicapai lebih optimal yang mendukung pada tercapainya tujuan yang diharapkan. Pengalaman belajar di luar sekolah harus ditingkatkan kualitasnya menjadi pengalaman belajar yang terprogram dan terstruktur sehingga menjadi lebih produktif.

Aliran pendidikan yang mendukung pendidikan dalam arti luas terbatas adalah Kaum Realisme Kritis. Mereka mengupayakan perpaduan yang harmonis antara pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah.

Dalam mengaplikasikan sistem pendidikan, Indonesia menerapkan pendidikan luas terbatas.



Hal ini tertuang dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : *“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”*.

Pendidikan di negara kita memiliki fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

3. Objek material dalam Epistemologi Ilmu Pendidikan

Objek material ilmu pendidikan berkenaan dengan aspek-aspek yang menjadi garapan penyelidikan langsung ilmu yang bersangkutan, jadi lebih spesifik. Pendidikan didefinisikan secara maha luas, sempit, maupun luas terbatas tetap merupakan kegiatan manusia yang mengkorelasikan kondisi yang real dengan kondisi yang ideal. Hasil yang diharapkan berupa kondisi ideal peserta didik yang mampu berdaya saing di masyarakat melalui beberapa proses, antara lain: humanisasi, civilisasi, sosialisasi, enkulturasi, personalisasi, dan profesionalisasi. Serangkaian kegiatan proses pendidikan dilakukan untuk mengubah kondisi awal peserta didik sebagai kondisi real agar tercapai kondisi ideal sesuai tujuan yang diharapkan. Untuk mencapai kondisi yang ideal tentunya banyak faktor aktual yang mempengaruhi, antar lain: dimensi psikologis, sosiologis, antropologis, ekologis, teknologis, historis, serta kependudukan dan manajemen.

Pendidikan yang diberikan kepada peserta didik berupa bimbingan dan pengajaran. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk menentukan pilihan-pilihan dan penyesuaian diri peserta didik dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Bimbingan bertujuan untuk membantu menumbuhkan kebebasan dan kemampuan untuk dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Pengajaran adalah bantuan dalam bentuk memberi dorongan, mengarahkan kegiatan, menumbuhkan kemampuan, dan memaksimalkan upaya-upaya peserta didik dalam memperoleh pengetahuan sehingga mengembangkan kecerdasan mereka sendiri. Ciri-ciri pengajaran yaitu:

- a. Mengajar adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi dalam gagasan-gagasan mereka dan belajar sesuatu dalam proses interaksi.
- b. Mengajar adalah mengisi jiwa peserta didik berupa informasi dan pengetahuan tentang fakta-fakta untuk digunakan pada masa yang akan datang.



- c. Mengajar adalah sebuah proses yang hubungan antara peserta didik, guru, kurikulum, dan variabel-variabel lainnya terorganisasi dalam sebuah polayang sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan.
- d. Mengajar adalah mendorong peserta didik belajar.

Pendidikan merupakan sebuah proses atau serangkaian kegiatan untuk mengembangkan suatu jenis kepribadian tertentu. Bloom dan kawan-kawan membedakan tujuan pendidikan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Pendidikan kognitif, adalah jenis pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan-kemampuan intelektual dalam mengenal lingkungan.
- b. Pendidikan afektif, adalah jenis pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan menghayati nilai-nilai untuk mengenali kegunaannya bagi hidup terhadap apa yang telah dipelajari secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pendidikan afektif tercakup antara lain:
 - 1. Pendidikan religious
 - 2. Pendidikan susila (etis)
 - 3. Pendidikan estetis
 - 4. Pendidikan social
 - 5. Pendidikan pribadi
- c. Pendidikan keterampilan, adalah jenis pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan melakukan perbuatan-perbuatan secara tepat sehingga menghasilkan kinerja yang standar. Pendidikan keterampilan mencakup antara lain:
 - 1. Pendidikan keterampilan dasar
 - 2. Pendidikan kejuruan
 - 3. Pendidikan profesional
 - 4. Pendidikan olahraga

Pendidikan di Indonesia mengacu kepada sistem pendidikan nasional. Sesuai Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan jenis pendidikan mencakup:

- a. Pendidikan umum, merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan.



- b. Pendidikan kejuruan, merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik dapat bekerja dalam bidang tertentu,
- c. Pendidikan akademik, merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan,
- d. Pendidikan profesi, merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu,
- e. Pendidikan vokasi, merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- f. Pendidikan keagamaan, merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- g. Pendidikan khusus, merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Proses pendidikan berlangsung sepanjang hidup sejak lahir hingga meninggal dunia. Secara garis besar tahap-tahap perkembangannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendidikan balita
2. Pendidikan kanak-kanak
3. Pendidikan anak sekolah
4. Pendidikan anak remaja
5. Pendidikan orang dewasa

Tahap-tahap perkembangan pendidikan di atas didasarkan pada faktor usia mulai dari lahir hingga meninggal.

Pendidikan seumur hidup merupakan proses perubahan perilaku dari lahir hingga meninggal. Aspek yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tidak lepas dari tiga aspek, yaitu: aspek individu dalam diri peserta didik, aspek masyarakat yang berinteraksi dengan peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung, dan aspek lingkungan fisik yang ada di sekitar peserta didik. Supaya pendidikan dapat berhasil mencapai tujuan yang diharapkan maka harus terstruktur dan berkesinambungan. Hal ini diuraikan dalam manajemen pendidikan yang mencakup beberapa komponen, yaitu: perencanaan, sistem pendidikan menurut jenjang dan jenis pendidikan, organisasi, administrasi, keuangan, pemasokan tenaga kependidikan, sistem evaluasi, dan penelitian untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Apabila ditinjau dari objek materialnya, ilmu pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ilmu Pendidikan Makro, adalah ilmu pendidikan yang menyelidiki keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan nasional,



2. Ilmu pendidikan Mikro, adalah ilmu pendidikan yang menyelidiki satuan pendidikan atau kegiatan pendidikan secara keseluruhan atau hanya satu satuan atau satu bentuk kegiatan pendidikan.

C. AXIOLOGI ILMU PENDIDIKAN

1. Pengertian Axiologi

Aksiologi berasal dari kata *axios* yaitu dari bahasa Yunani yang berarti nilai dan *logos* yang berarti teori. Dengan demikian maka aksiologi adalah “teori tentang nilai”. Menurut Bramel aksiologi terbagi dalam tiga bagian:

moral conduct, yaitu tindakan moral yang melahirkan etika,

esthetic expression, yaitu ekspresi keindahan,

sosio-political life, yaitu kehidupan sosial politik, yang akan melahirkan filsafat sosio-politik.

(Amsal Bakhtiar, 2004: 162-163).

Menurut Suriasumantri aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut kamus Bahasa Indonesia aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika (Jujun S. Suriasumantri, 2000: 105).

Dalam *Encyclopedia of Philosophy* dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan *value* dan *valuation*. Ada tiga bentuk *value* dan *valuation*, yaitu:

Nilai, digunakan sebagai kata benda abstrak. Dalam pengertian yang lebih sempit seperti baik, menarik dan bagus. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencakup sebagai tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran dan kesucian. Penggunaan nilai yang lebih luas merupakan kata benda asli untuk seluruh macam kritik atau predikat pro dan kontra, sebagai lawan dari suatu yang lain, dan ia berbeda dengan fakta. Teori nilai atau aksiologi adalah bagian dari etika.

Nilai sebagai kata benda konkret. Contohnya ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai, ia seringkali dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilainya, nilai dia, dan sistem nilai dia. Kemudian dipakai untuk apa-apa yang memiliki nilai atau bernilai sebagaimana berlawanan dengan apa-apa yang tidak dianggap baik atau bernilai.

Nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai dan dinilai. Menilai umumnya sinonim dengan evaluasi ketika hal tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan. Dewey membedakan dua hal tentang menilai, ia bisa berarti menghargai dan mengevaluasi.

Dari definisi-definisi aksiologi di atas, terlihat dengan jelas bahwa permasalahan utama adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika.



2. Landasan Aksiologi

Ilmu dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan kesejahteraannya dengan menitik beratkan pada kodrat dan martabat. Untuk kepentingan manusia, maka pengetahuan ilmiah yang diperoleh disusun dan dipergunakan secara komunal dan universal.

Dagobert Runes (1963 : 32) mengemukakan beberapa persoalan dengan nilai yang mencakup : hakikat nilai, tipe nilai, criteria nilai, dan status metafisika nilai.

Hakikat Nilai

K.Bertens (2007:142) berpendapat, bahwa hakikat dari nilai-nilai, yaitu :

- 1) Nilai berasal dari kehendak: voluntarisme.
- 2) Nilai berasal dari kesenangan: Hedonisme
- 3) Nilai berasal dari kepentingan. (Perry)
- 4) Nilai berasal dari hal yg lebih disukai (preference). Martineau.
- 5) Nilai berasal dari kehendak rasio murni. (I.Kant).

Tipe nilai

Tipe nilai dapat dibedakan antara lain *intrinsik* dan nilai *instrumental*. Nilai intrinsik merupakan nilai akhir yang menjadi tujuan, sedangkan nilai instrumental merupakan alat untuk mencapai nilai intrinsik.

Sebagai contoh nilai intrinsik adalah nilai yang dipancarkan oleh suatu lukisan, dan shalat lima waktu merupakan nilai intrinsik dan merupakan suatu perbuatan yang sangat luhur. Nilai instrumentalnya bahwa dengan melaksanakan shalat akan mencegah perbuatan yang keji/jahat yang dilarang oleh Allah dan tujuan akhirnya mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Kriteria nilai

Kriteria nilai adalah sesuatu yang menjadi ukuran nilai, bagaimana nilai yang baik, dan bagaimana nilai yang tidak baik. Standar pengujian dipengaruhi aspek psikologis dan logis.

Kaum hedonist menemukan standar nilai dalam kuantitas kesenangan yang dijabarkan oleh individu atau masyarakat.

Kaum idealis mengakui sistem objektif norma rasional sebagai kriteria. Kaum naturalis menemukan ketahanan biologis sebagai tolak ukur Status Metafisika Nilai Metafisik nilai adalah bagaimana hubungan nilai-nilai tersebut dengan realitas dan dibagi menjadi tiga bagian:

Subjektivisme adalah nilai semata-mata tergantung pengalaman manusia.

Objektivisme logis adalah nilai merupakan hakikat logis atau subsistensi, bebas dari keberadaannya yang dikenal.

Objektivisme metafisik adalah nilai merupakan sesuatu yang ideal bersifat integral, objektif, dan komponen aktif dari kenyataan metafisik. (misalnya: theisme).



3. Teori Tentang Nilai

Teori Nilai membahas dua masalah yaitu masalah Etika dan Estetika.

a. Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “ethos” yang berarti adat kebiasaan tetapi ada yang memakai istilah lain yaitu moral dari bahasa latin yakni jamak dari kata nos yang berarti adat kebiasaan juga. Akan tetapi pengertian etika dan moral ini memiliki perbedaan satu sama lainnya. Etika ini bersifat teori sedangkan moral bersifat praktek. Etika mempersoalkan bagaimana semestinya manusia bertindak sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tindakan manusia itu. Etika hanya mempertimbangkan tentang baik dan buruk suatu hal dan harus berlaku umum.

Antara ilmu (pendidikan) dan etika memiliki hubungan erat. Masalah moral tidak bisa dilepaskan dengan tekad manusia untuk menemukan kebenaran, sebab untuk menemukan kebenaran dan terlebih untuk mempertahankan kebenaran, diperlukan keberanian moral (Jujun S. Suriasumantri, 1998 : 235).

Dalam perkembangan sejarah etika ada empat teori etika sebagai sistem filsafat moral yaitu, hedonisme, eudemonisme, utiliterisme dan deontologi. Hedonisme adalah pandangan moral yang menyamakan baik menurut pandangan moral dengan kesenangan. Eudemonisme menegaskan setiap kegiatan manusia mengejar tujuan. Dan adapun tujuan dari manusia itu sendiri adalah kebahagiaan. Utilitarisme, yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memajukan kepentingan para warga negara dan bukan memaksakan perintah-perintah ilahi atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati. Deontologi, adalah pemikiran tentang moral yang diciptakan oleh Immanuel Kant. Menurut Kant, yang bisa disebut baik dalam arti sesungguhnya hanyalah kehendak baik. Semua hal lain disebut baik secara terbatas atau dengan syarat. Misalnya kekayaan manusia apabila digunakan dengan baik oleh kehendak manusia.

b. Estetika

Estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Estetika membahas tentang indah atau tidaknya sesuatu. Dalam dunia pendidikan hendaklah nilai estetika menjadi patokan penting dalam proses pengembangan pendidikan yakni dengan menggunakan pendekatan estetis-moral, dimana setiap persoalan pendidikan Islam coba dilihat dari perspektif yang mengikut sertakan kepentingan masing-masing pihak, baik itu siswa, guru, pemerintah, pendidik serta masyarakat luas. Ini berarti pendidikan Islam diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang kreatif, berseni.



4. Karakteristik Nilai

Ada beberapa karakteristik nilai yang berkaitan dengan terori nilai, yaitu :

a) Nilai subjektif atau objektif.

Nilai itu objektif jika ia tidak bergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai; sebaliknya nilai itu subjektif jika eksistensinya, maknanya, dan validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian, tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis atau fisik.

b) Nilai absolute atau berubah.

Suatu nilai dikatakan absolute atau abadi, apabila nilai yang berlaku sekarang sudah berlaku sejak masa lampau dan akan berlaku serta abash sepanjang masa, serta akan berlaku bagi siapapun tanpa memperhatikan ras, maupun kelas social. Dipihak lain ada yang beranggapan bahwa semua nilai relative sesuai dengan keinginan atau harapan manusia.

5. Tingkatan Hierarki Nilai

Terdapat beberapa pandangan yang berkaitan dengan hierarki nilai yaitu:

kaum idealis berpandangan secara pasti terhadap tingkatan nilai, dimana nilai spiritual lebih tinggi daripada non spiritual (nilai material). Mereka menempatkan nilai religi pada tingkat yang tinggi karena nilai religi membantu manusia dalam menemukan akhir hidupnya, dan merupakan kesatuan dengan nilai spiritual.

kaum realis juga berpandangan bahwa terdapat tingkatan nilai, dimana mereka menempatkan nilai rasional dan empiris pada tingkatan atas, sebab membantu manusia realitas objektif, hukum alam dan aturan berfikir logis.

kaum pragmatis menolak tingkatan nilai secara pasti. Menurut mereka suatu aktifitas dikatakan baik seperti yang lainnya apabila memuaskan kebutuhan yang penting dan memiliki nilai instrumental. Mereka sangat sensitive terhadap nilai-nilai yang meghargaan masyarakat.

6. Aksiologi Ilmu Pendidikan sebagai Nilai Kegunaan Teoritis

Kegunaan bagi ilmu dan teknologi

Hasil ilmu pendidikan adalah konsep-konsep ilmiah tentang aspek dan dimensi pendidikan sebagai salah satu gejala kehidupan manusia. Pemahaman tersebut secara potensial dapat dipergunakan untuk lebih mengembangkan konsep-konsep ilmiah pendidikan, baik dalam arti meningkatkan mutu (validitas dan signifikan) konsep-konsep ilmiah pendidikan yang telah ada, maupun melahirkan atau menciptakan konsep-konseo baru, yang secara langsung dan tidak langsung bersumber pada konsep-konsep ilmiah pendidikan yang telah ada.

Rowntree dalam educational teknologi in curuculum development antara lain menyatakan: bahwa oleh karena teknologi pendidikan adalah seluas pendidikan itu sendiri, maka teknologi pendidikan berkenaan dengan desain dan evaluasi kurikulum dan pengalaman-pengalaman belajar,



serta masalah-masalah pelaksanaan dan perbaikannya. Pada dasarnya teknologi pendidikan adalah suatu pendekatan pemecahan masalah pendidikan secara rasional, suatu cara berpikir skeptis dan sistematis tentang belajar dan mengajar.

Kegunaan bagi filsafat

Konsep-konsep ilmiah yang dihasilkan oleh ilmu pendidikan, secara potensial dapat mengundang berkembangnya kritik pendidikan, baik yang datang dari kalangan para pengamat pendidikan pada umumnya, maupun yang datang dari kalangan yang profesional pendidikan, yang termasuk didalamnya para ilmuwan pendidikan, para filosof pendidikan serta para pengelola dan pengembang pendidikan.

7. Aksiologi Ilmu Pendidikan Sebagai Nilai Kegunaan Praktis

a. Kegunaan bagi praktek pendidikan

Pemahaman tenaga kependidikan secara komprehensif dan sistematis turut serta dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan tugas-tugas profesionalnya. Hal ini terjadi karena konsep-konsep ilmiah pendidikan menerangkan prinsip-prinsip bagaimana orang melakukan pendidikan. Penguasaan yang mantap terhadap konsep-konsep ilmiah pendidikan memberikan pencerahan tentang bagaimana melakukan tugas-tugas profesional pendidikan. Apabila hal ini terjadi, maka seorang tenaga pendidikan akan dapat bekerja konsisten dan efisien, karena dilandasi oleh prinsip-prinsip pendidikan yang jelas terbaca dan kokoh.

b. Kegunaan bagi seni pendidikan

Disamping memberi kemungkinan berkembangnya teknologi pendidikan, penerapan konsep-konsep ilmiah tentang pendidikan dalam praktek, dapat pula memberi peluang pada berkembangnya seni pendidikan. Sebuah kegiatan pendidikan dikatakan sebuah seni pendidikan apabila kegiatan tersebut tidak saja mencapai hasil yang diharapkan, tetapi proses pelaksanaannya dapat memberi keasyikan dan kesenangan, baik bagi peserta didik maupun pendidiknya. Dalam kegiatan sebagai seni, berlangsungnya suatu proses hubungan sosial, melibatkan emosi yang cukup mendalam dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini mengandung arti bahwa penerapan konsep-konsep ilmiah pendidikan dalam praktek pendidikan perlu memperhitungkan terpenuhinya kebutuhan emosional, berupa rasa puas, rasa senang ataupun rasa yang sejenisnya.

Nilai dan implikasi aksiologi didalam pendidikan didalamnya teknologi pendidikan- ialah "to examine and integrate these values as they enter into the lives of people through the channels of the schools (Brameld, 1955: 33). (Pendidikan menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut di dalam kehidupan manusia dan membinanya di dalam kepribadian anak.

Perlu pula disadari bahwa banyak konsep-konsep ilmiah pendidikan khususnya, dan teori-teori pendidikan pada umumnya mempunyai pengaruh kecil terhadap praktek pendidikan. Konsep ilmiah pendidikan yang salah dapat terjadi karena disusun melalui kesimpulan terburu-



buru yang kurang didukung oleh fakta yang cukup memadai, sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam praktek pendidikan.

Oleh karena itu aksiologi sebagai nilai kegunaan praktis dalam praktik pendidikan secara komprehensif dan sistematis turut serta dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan tugas-tugas profesionalnya. Hal ini terjadi karena konsep-konsep ilmiah pendidikan menerangkan prinsip-prinsip bagaimana orang melakukan pendidikan. Penguasaan yang mantap terhadap konsep-konsep ilmiah pendidikan memberikan pencerahan tentang bagaimana melakukan tugas-tugas profesional pendidikan.

Sedangkan aksiologi ilmu pendidikan sebagai nilai teoritis secara potensial dapat mengundang berkembangnya kritik pendidikan, baik yang datang dari kalangan para pengamat pendidikan pada umumnya, maupun yang datang dari kalangan yang profesional pendidikan, yang termasuk didalamnya para ilmuwan pendidikan, para filosof pendidikan serta para pengelola dan pengembang pendidikan.



BAB 4

ALIRAN BARU PENDIDIKAN

A. Aliran-aliran Baru dalam Pendidikan dan Pengajaran

Sebagai reaksi terhadap liberalisme pada abad ke-19, pada abad ke-20 ini timbulah aliran-aliran dalam pendidikan dan pengajaran. Aliran-aliran itu dapat digolongkan menjadi:

1. Aliran sosial (kesosialan)

Aliran sosial ini timbul sebagai reaksi terhadap pengabaian unsur-unsur sosial dalam pendidikan secara eksterm, yaitu aliran individualisme (subyektivisme) sehingga tidak memikirkan anak sebagai individu. Aliran sosial mengambil langkah-langkah mendirikan sekolah kerja sebagai pelaksanaan pencapaian cita-citanya.

2. Aliran kepribadian

Aliran kepribadian memberikan reaksi terhadap pendidikan yang terlalu intelektualistik. Intelektualisme hanya mengutamakan pembentukan kecerdasan tanpa mengindahkan pendidikan watak. Aliran ini bertujuan membentuk manusia yang dapat menguasai diri dan mengembangkan kebijakan-kebijakan. Aliran ini juga mencapai cita-citanya melalui pendirian sekolah-sekolah kerja.

3. Aliran pembaharuan pengajaran

Aliran pembaharuan pengajaran timbul karena rasa tidak puas terhadap pelaksanaan pengajaran pada waktu itu, kemudian mulai mengadakan percobaan-percobaan dan mencari jalan baru dalam bidang pengajaran.

B. Aliran Gerakan Baru Pendidikan

Gerakan-gerakan baru di pendidikan pada umumnya termasuk yang kedua yakni upaya peningkatan mutu pendidikan dalam satu atau beberapa komponen. Beberapa dari gerakan-gerakan baru tersebut memusatkan diri pada perbaikan dan peningkatan kualitas kegiatan belajar-mengajar pada sistem persekolahan, seperti pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, dan pengajaran proyek, taman siswa dan INS (*Indonesische Nederlandsce School*), pesantren dan muhammadiyah.

1. Pengajaran Alam Sekitar

Gerakan ini mendekatkan peserta didik terhadap alam sekitarnya, Manusia hidup dalam lingkungan tertentu hendaknya mampu memanfaatkan lingkungannya sejauh mungkin baik kemanfaatan bagi hidupnya sehari-hari maupun kemanfaatan dalam rangka pengembangan pribadi manusia yang menjadi dasar bagi usaha pendidikan terhadap anak. Semua hal yang menjadi isi alam sekitar besar sekali pengaruhnya kepada anak, baik itu positif maupun negatif merupakan bagian hidup bagi anak-anak yang tidak dapat terlepas dari alam sekitar itu. Pengajaran alam sekitar



diselenggarakan terhadap anak dengan memperkenalkan bagian alam sekitar tertentu kepada anak.

- a. Langkah-langkah pokok pengajaran alam sekitar ialah:
 - 1) Menetapkan tujuan harus mempertimbangkan kemampuan dan tingkat perkembangan anak. Penetapan tujuan ini sekaligus dikaitkannya objek yang akan di amati dan didasarkan atas prinsip konsentris.
 - 2) Persiapan perlu dilakukan, baik persiapan guru maupun persiapan murid. Persiapan dimaksudkan untuk melancarkan proses pengamatan.
 - 3) Pelaksanaan pengamatan, hal-hal khusus yang ditemukan dilapangan menjadi tanggung jawab guru untuk menanganinya, sehingga hal itu tidak mengganggu kelancaran kegiatan.
 - 4) Pengolahan dijadikan sebagai titik tolak bahan dasar bagi pengajaran lebih lanjut. Kegiatan tersebut baik secara lisan atau tulisan.
- b. Keuntungan pengajaran alam sekitar
 - 1) Pengajaran ini menentang verbalisme dan intelektualisme karena memiliki pengertian yang didukung oleh kenyataan yang terdapat di lingkungannya.
 - 2) Objek alam sekitar membangkitkan perhatian spontan dari anak-anak yang akan mendorongnya melakukan kegiatan dengan sepenuh hati.
 - 3) Anak - anak selalu didorong untuk aktif dan kreatif
 - 4) Bahan - bahan yang diajarkan adalah apa yang mereka jumpai sehari-hari.
 - 5) Anak - anak didorong untuk mengenal, mengerti, mencintai, memelihara, dan mengembangkan alam sekitar.

2. Pengajaran Pusat Perhatian

Gerakan ini memfokuskan anak harus dididik untuk dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat, anak harus diarahkan kepada pembantuan individu dan anggota masyarakat. Oleh karena itu anak harus mempunyai pengetahuan atas diri sendiri dan dunianya. Pengajaran pusat perhatian di titik beratkan pada sesuatu pusat tertentu yang menarik perhatian anak didik.

- a. Asas - Asas Pengajaran pusat perhatian.

Asas pokok pengajaran pusat perhatian ialah pengajaran alam sekitar. Disamping itu ada asas-asas tertentu yang tampaknya lebih menonjol dalam kaitan dengan pengajaran pusat perhatian, yaitu:

 - 1) Pengajaran ini didasarkan atas kebutuhan anak dalam hidup dan perkembangannya.
 - 2) Setiap bahan pengajaran merupakan suatu keseluruhan, tidak mementingkan bagian-bagian itu.
 - 3) Hubungan keseluruhan antara bagian-bagian itu adalah hubungan simbiosis.



4) Anak didorong untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif bertanggung jawab dan mandiri.

5) Harus ada hubungan kerjasama antara rumah dan sekolah.

3. Sekolah Kerja

Gerakan ini dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan dan juga bertolak dari pandangan bahwa pendidikan tidak hanya demi kepentingan individu tetapi juga demi kepentingan masyarakat. Dengan kata lain sekolah berkewajiban menyiapkan warga negara yang baik.

Sekolah kerja adalah sekolah yang mendasarkan usaha-usahanya pada kegiatan berkerja, Keaktifan langsung dan nyata baik rohani dan jasmani untuk didik. Dengan berkerja anak didik didorong untuk mengembangkan jiwanya, pengetahuannya, rasa tanggung jawab, keterampilannya, dan kehalusan budi pekertinya.

Sekolah kerja dibagi menjadi tiga golongan besar, atau tiga kelompok sekolah kerja :

- a) Sekolah-sekolah perindustrian (untuk calon-calon tukang cukur, tukang cetak, tukang kayu, tukang daging, masinis dan lain-lain.)
- b) Sekolah-sekolah perdagangan, disusun menurut golongan makanan, pakaian, bank, asuransi, memegang buku, porselin, pisau dan gunting dari besi dan lain-lain.
- c) Sekolah-sekolah rumah tangga, bertujuan mendidik para calon ibu yang diharapkan akan menghasilkan warga negara yang baik.

a. Dasar dasar sekolah kerja sebagai berikut:

- 1) Di dalam sekolah kerja anak aktif
- 2) Pusat kegiatan pengajaran dan pendidikan adalah anak.
- 3) Sekolah kerja mendidik anak menjadi pribadi yang berani berdiri sendiri dan bertanggung jawab.
- 4) Bahan pelajaran disusun dalam suatu keseluruhan yang erpusat pada masalah kehidupan.
- 5) Sekolah kerja mementingkan pengetahuan fungsional yang yang dapat digunakan untukberprakarsa,mencipta dan berbuat.

b. Macam macam sekolah kerja

- 1) Sekolah kerja sosiologi:tugas pendidikannya ialah memimpin anak menjadi warga negara yang baik
- 2) Sekolah kerja psikologis: proses pengajaran yang aktif dan kreatif untuk memungkinkan perkembangan kejiwaan ana secara mantap dan sepenuhnya.
- 3) Sekolah sosiologis-psikologis :proses pengajaran ini diciptakan suasana yang memungkinkan anak dapat bekerja secara bebas dan spontan sehingga perkembangan pribadi anak dapat berlangsung dengan baik.



- 4) Sekolah kerja keperibadian: lebih menekankan pentingnya pengembangan keperibadian anak. Dalam hubungan ini anak wajib di beri pendidikan ketuhanan, kesusilaan dan kesosialan sehingga keperibadian anak menjadi lengkap dan harmonis.

4. Pengajaran proyek

Dalam gerakan ini, anak bebas menentukan pilihannya, merancang, serta memimpinnya. Proyek yang ditentukan oleh anak, mendorongnya untuk mencari jalan pemecahan bila ia menemukan kesulitan.

Pengajaran proyek ialah bahwa pengajaran harus aktif, ilmiah dan memasyarakat.

“Proyek” pada dasarnya adalah tugas yang harus dipecahkan melalui suatu rencana dan penyelenggaraan kegiatan secara baik. Hasil kegiatan itu dinilai, mulai dari penentuan masalah sampai dengan pada penilaian anak harus diikuti sertakan secara aktif, baik secara perorangan maupun berkelompok.

a. Langkah-langkah pokok pengajaran proyek

- 1) Persiapan. dalam rangka ini guru harus mendorong anak agar mereka dapat memikirkan, mengusulkan, dan mendiskusikan apa yang mereka perlu pelajari. Persiapan -persiapan lebih lanjut dilakukan, seperti menetapkan jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan, Siapa - siapa yang akan melakukan kegiatan itu masing-masing, peralatan yang diperlukan, jadwal kegiatan. Dalam menyusun persiapan ini perlu dipraktekkan metode ilmiah berupa penyusunan hipotesis dan pengajuan alternatif.
- 2) Kegiatan belajar. kegiatan belajar diawali dengan perjalanan sekolah, karyawisata, Peninjauan atau pengamatan suatu objek, membaca buku, majalah dan membuat tentang catatan tentang apa yang mereka amati.
- 3) Penilaian - penilaian yang sering dilakukan ialah dengan mengadakan pameran. Suatu hasil kegiatan dilakukan oleh anak anak (misalkan gambar), karangan, laporan, model) dipamerkan. Seluruh warga kelas memperhatikan apa yang dipamerkan itu, dan memberikan kritik, tanggapan, menambahkan hal-hal yang dirasa masih kurang dan sebagainya.

5. Taman siswa dan INS (Indonesische Nederlansce School)

Taman Siswa

Perguruan ini dilandasi oleh semangat kebangsaan, yaitu bagaimana membangun bangsa yang mereka lahir dan batin serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan kebudayaan bangsa sendiri sesuai dengan harkat alam dan kodrat manusia.

Asas-asas taman siswa ialah :

- 1) Menjadi hak seorang pengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertib persatuan.



- 2) Pengajaran harus membimbing anak menjadi manusia yang merdeka dalam rasa, dalam berfikir, dan dalam mempergunakan tenaganya.
- 3) Pendidikan harus didasarkan atas kebudayaan bangsa sendiri,
- 4) Pendidikan harus merata untuk seluruh rakyat.
- 5) Taman siswa harus hidup dan terus berkembang dengan kekuatan sendiri dan menolak segenap bantuan yang menimbulkan ikatan, baik lahir maupun batin.

INS (*Indonesische Nederlansce School*)

INS ialah membangkitkan jiwa patriotisme dan membentuk watak bangsa merdeka yang sanggup berdiri sendiri dan bebas ketergantungan terhadap bangsa lain. Tujuan ini secara lebih terperinci dirumuskan:

- a. Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan.
- b. Memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat.
- d. Menanamkan kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab,
- e. Berusaha untuk dapat berdiri sendiri dan tidak bersedia menerima bantuan orang lain.

6. Pesantren dan Muhammadiyah

Dasar pemikiran pendidikan sistem pesantren yaitu pendidikan yang dilakukan berlandaskan pada akidah maupun hukum agama yang berlaku. Pengetahuan yang diberikan adalah pembentukan dan pengembangan ahlak serta moral agama, sehingga pola pemikirannya masih bersifat tradisional (lama).

Lama kelamaan, sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat pola pemikiran lama sudah harus ditinggalkan. Perintis modernisasi ini adalah kalangan Muhammadiyah yang memadukan unsur pendidikan pesantren dengan ilmu pengetahuan,

Disini dapat kita lihat adanya perubahan pola pikir lama ke arah pola pikir baru sehingga dikatakan Muhammadiyah perintis modernisasi pendidikan di Indonesia.

C. Pengaruh Gerakan Baru Dalam Pendidikan

Telah dikemukakan bahwa gerakan baru dalam pendidikan tersebut terutama berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, namun dasar-dasar pemikirannya tentulah menjangkau semua segi pendidikan, baik aspek konseptual maupun operasional. Sebab itu, mungkin saja gerakan - gerakan itu tidak diadopsi sepenuhnya di suatu masyarakat atau negara tertentu, namun asas pokoknya menjwai kebijakan-kebijakan pendidikan dalam masyarakat atau negara itu.

Akhirnya, perlu ditekankan lagi bahwa kajian tentang pemikiran-pemikiran pendidikan pada masa lalu akan sangat bermanfaat untuk memperluas pemahaman tentang seluk-beluk pendidikan, serta memupuk wawasan historis dari setiap tenaga kependidikan.



D. Tokoh-Tokoh Pelopor Aliran Baru Dalam Pendidikan

1) J.A. Comenius (Moravia, 28 Maret 1592)

Riwayat hidup :

Penuh penderitaan, pengorbanan, dan pengabdian. Orang tua penggiling tepung. Masa muda: Anak Cerdas, tidak mendapat pendidikan yang baik, orang tua meninggal etika masih kecil. Lulus sekolah tinggi Heidelberg (Belanda).

Pandangan Hidup: Tuhan menciptakan manusia untuk tuhan sebagai makhluk tertinggi dan makhluk berfikir. Perkembangan anak melalui empat tingkatan: Enam tahun, anak mengeluarkan isi jiwanya dengan bahasa menurut caranya sendiri · 6-12 tahun, melahirkan isi jiwa dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa orang lain. 12-18 tahun, bercakap sesuai dengan rasa keindahannya. 18-24 tahun, pemuda bercakap sesuai dengan kedudukannya maupun kehormatannya

2) J.H. Restalozzi (Zurich, 12 Januari 1746)

Riwayat hidup:

Anak seorang dokter, ayahnya meninggal ketika berumur lima tahun, badan lemah, sukar bergaul. Pandangan hidup: orang wajib dengan cinta dan kasih mengabdikan diri untuk umat manusia dan tuhan.

Tujuan pendidikan adalah memimpin anak menjadi orang baik dengan jalan mengembangkan daya (potensi) yang ada pada anak, sebab pada hakikatnya pendidikan adalah tidak lain daripada pemberian pertolongan, agar anak kemudian dapat menolong dirinya sendiri.

3) Fr.W.A. Frobel (Jerman, 21 April 1782)

Riwayat hidup:

Anak seorang pendeta, tidak pernah mengenal cinta Ibu, karena ibunya meninggal sewaktu dia masih bayi dan diperlakukan kejam, oleh ibu tiri. Pandangan hidup :

1. Bahwa seluruh Alam semesta berasal dari tuhan, dikuasai oleh tuhan, dan untuk tuhan,
2. Manusia menurut kodratnya baik, sifat jelek timbul karena pendidikan yang salah atau karena kurang perhatian
3. Kehidupan rohani tiap orang mengulang kehidupan rohani seluruh umat
4. Antara seluruh alam yang ada terhadap suatu hubungan yang erat dan seluruh kehidupan merupakan kesatuan yang bulat. Pendidikan adalah usaha dengan berbagai alat untuk membangkitkan manusia sebagai makhluk yang sadar, berfikir dan mengerti, supaya menjelma hukum tuhan yang ada padanya.

4) John Lock (Inggris, 1632)

Riwayat hidup:

Anak ahli hukum. Masa muda, kesehatannya buruk, belajar kedokteran, ilmu Alam, dan filsafat Masa dewasa sebagai Dokter Pribadi. Pandangan Hidup:



1. Seorang rasionalis: pengetahuan terjadi secara induktif melalui penginderaan, tidak secara deduktif.
2. Jiwa manusia pada waktu lahir adalah kosong
3. Tidak mengaku adanya tuhan secara deduktif, melainkan secara pemikiran logis
4. Etika didasarkan atas kegunaan (utilitarianisme) tidak melalui buku wajib.
2. Adanya Negara karena perjanjian bersama, tidak karena diperintahkan tuhan Tujuan pendidikan adalah membentuk anak manusia menjadi seorang “Gentleman” yang mengutamakan kepribadian daripada pengetahuan.

5) J.J. Rousseau (Geneve, 1712)

Riwayat hidup:

Asal usul: orang Prancis, ayahnya tukang jam, masa muda: pendidikannya jelek sekali, ibunya meninggal pada waktu melahirkan. Ayahnya membiarkannya pada kebebasan, tanpa suatu ketenangan. Dia merupakan anak yang cerdas dan suka sekali membaca buku apa saja. Pandangan Hidup; semua yang baik dari tangan pencipta, semua menjadi buruk di tangan manusia. Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia bebas, merdeka tanpa tekanan maupun ikatan. Tidak untuk menjadi manusia bagi kalangan tinggi ataupun jabatan.

Tujuan pendidikan wanita:

1. Menjadi ibu yang dedikasi terhadap keluarga
2. Pendidik yang cakap, bijaksana dalam membimbing kehidupan keluarga
3. Menjadi istri yang berbakti pada suami dan sanggup melayani suka duka suami.

6) J.F. Herbart (Jerman, 24 Mei 1776)

Riwayat hidup:

Anak Ahli hukum. Masa muda:

1. Kesehatan buruk
2. Mendapat pelajaran tambahan dari Ibu
3. Anak yang cerdas
4. Pendidikan terakhir S1 Filsafat Pandangan Hidup: dalam segala hal orang selalu harus memberikan pendapat dan keputusan juga dalam pendapat manusia.

Tujuan pendidikan adalah menyatukan pada anak didik pandangan yang baik dengan kemauan yang baik, sehingga dalam keadaan itu anak didik pada tiap perbuatannya menunjukkan suatu kepribadian yang berbuat berdasarkan sila formal.



BAB 5

HAKEKAT DAN ESSENSI MANUSIA

A. Mengetahui Manusia Sebagai Makhluk Ciptaan Tuhan

Manusia Menurut Irjus Indrawan merupakan Ciptaan Tuhan, Manusia merupakan makhluk multi dimensi karena hakikat manusia jika dilihat dari kedudukan kodratnya, manusia terdiri atas dua unsur yakni sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri, manusia dalam batas-batas tertentu memiliki kemauan bebas (free-will) yang menjadikan manusia memiliki kemandirian dan kebebasan. Sebagai makhluk Tuhan, manusia tidak bisa melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan Tuhan (takdir-Nya). Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Karena manusia mempunyai akal dan pikiran untuk berfikir secara logis dan dinamis, serta mampu membatasi diri dengan perbuatan yang tidak harus dilakukan, dan kita bisa memilih perbuatan mana yang positif dan mana yang negative. Pada dasarnya manusia tersusun atas dua unsur yaitu materi dan immateri, jasmani dan rohani. Unsur materi (tubuh) manusia berasal dari tanah dan roh manusia berasal dari substansi immateri. Tubuh mempunyai daya fisik jasmani yaitu mendengar, melihat, merasa, meraba, mencium dan daya gerak. Unsur-unsur immateri manusia diuraikan sebagai berikut: Menurut Mustafa Zahri (1976:121) dalam Irjus Indrawan bahwa unsur immateri pada manusia terdiri dari roh, qalbu, aqal, dan nafsu. Unsur-unsur immateri manusia diuraikan sebagai berikut: Roh diartikan sebagai pemberian hidup dari Tuhan kepada manusia. Roh ini mendapat perintah dan larangan dari Tuhan. Bertanggung jawab atas segala gerak-geriknya dan memegang komando atas segala kehidupan manusia.

1. Roh bukan jasad dan bukan pula tubuh. Keberadaannya tidak melekat pada sesuatu.
2. Hati (Qalb)

Menurut Al-Ghazali, qalb memiliki dua arti yaitu arti fisik dan metafisik. Arti fisik yaitu jantung, berupa segumpal daging yang berbentuk bujur memanjang yang terletak di pinggir dada sebelah kiri. Sedangkan arti metafisik, yaitu batin sebagai tempat pikiran yang sangat rahasia dan murni, yang merupakan hal yang lathif (yang halus) yang ada pada diri manusia. Qalb ini bertanggung jawab kepada Tuhan, ditegur, dimarahi serta dihukum. Qalb menjadi bahagia apabila selalu ada di sisi Tuhan dan berusaha melepaskan dari belenggu selain Tuhan. Dengan qalb manusia dapat menangkap rasa, mengetahui dan mengenal sesuatu dan pada akhirnya memperoleh ilmu (Dawam Raharjo, 1987:7) dalam Idrus Indrawan.

3. Potensi Manusia (Akal)

Manusia memiliki sesuatu yang tidak ternilai harganya, anugerah yang sangat besar dari Tuhan, yakni akal. Sebagai makhluk yang berakal, manusia dapat mengamati sesuatu. Dalam pandangan Al-Ghazali, akal mempunyai empat pengertian yaitu:



- a. Sebutan yang membedakan manusia dengan hewan.
 - b. Ilmu yang lahir disaat anak mencapai usia akil balig, sehingga dapat membedakan perbuatan baik dan buruk.
 - c. Ilmu-ilmu yang didapat dari pengalaman sehingga dapat dikatakan —siapa yang banyak pengalaman, maka ia orang yang berakal
 - d. Kekuatan yang dapat menghentikan dorongan naluriyah untuk menerawang jauh ke angkasa, mengekang dan menundukkan syahwat yang selalu menginginkan
4. Nafsu

Nafsu dalam istilah psikologi lebih dikenal dengan sebutan daya karsa, dalam bentuk bereaksi, berusaha, berbuat, berkemauan, atau berkehendak. Pada prinsipnya nafsu selalu cenderung pada hal yang sifatnya keburukan, kecuali nafsu tersebut dapat dikendalikan dengan dorongan dorongan yang lain, seperti dorongan akal, dorongan hati nurani yang selalu mengacu pada petunjuk Tuhan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, secara kodrati dianugerahkan hak dasar yang disebut hak asasi tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Manusia juga memiliki suatu keluhuran dan martabat naluriyah motivasi, atau pendorong manusia dalam berbagai hal.

Manusia sebagai makhluk sosial tentu saja ingin memenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan primer, sekunder, ataupun kebutuhan tersier. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia dengan adanya sebuah dorongan akan pemenuhan suatu hal tertentu, yaitu motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan untuk mewujudkan perilaku tertentu yang terarah, sebagai pendorong kemampuan, usaha, keinginan, menentukan arah dan menyeleksi tingkah laku kepada suatu tujuan tertentu. (Surya, 2003 : 107) dalam Idrus Irawan bahwa dalam rumusan ilmu mantiq (logika), kita temukan sebuah rumusan tentang manusia dari hewan, yaitu al-insan hayawanun nathiq, yang artinya insan itu adalah hewan (bukan hewan) yang nathiq, yang mengeluarkan pendapat dan berkatakata dengan mempergunakan pikirannya. Tegasnya, manusia adalah hewan yang berpikir. Pada saat-saat tertentu dalam perjalanan hidupnya, manusia mempertanyakan tentang asal-usul alam semesta dan asal-usul keberadaan dirinya sendiri. Prof. Dr. R. F. Beerling, dalam idrus Irawan menyatakan bahwa sepanjang zaman telah dicoba orang menyatakan dengan berbagai macam cara, dimana letak hakikat perbedaan manusia, misalnya dengan binatang. Bahwa ia pandai tertawa, bahwa ia memiliki perasaan malu, bahwa ia membedakan antara yang baik dan yang buruk, bahwa ia memiliki kemauan yang bebas. Semuanya ini adalah sifat-sifat yang mungkin menimbulkan pandangan tentang manusia secara filsafat yang panjang lebar. Akan tetapi yang tipis sekali ialah bahwa manusia itu makhluk bertanya. 1. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran, kebenaran yang dicari manusia ialah kebenaran tentang sesuatu yang menjadi masalah manusia atau yang dimasalahkan manusia.



Ada tiga teori kebenaran yaitu sebagai berikut:

1. Teori Korespondensi

Teori korespondensi tentang kebenaran (the correspondence theory of truth) menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan atau dengan kata lain pernyataan yang sesuai dengan kenyataan.

2. Teori Konsistensi/koherensi

Teori konsistensi tentang kebenaran (the consistence theory of truth) menjelaskan bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu kita ketahui, terima dan akui sebagai benar. Teori ini juga disebut teori penyaksian (yustifikasi) tentang kebenaran, karena memang menurut teori ini suatu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian (yustifikasi) oleh putusan-putusan lainnya terdahulu yang sudah diketahui dan diakui sebagai benar.

3. Teori Pragmatis

Teori pragmatis tentang kebenaran (the pragmatic theory of truth) ialah bahwa suatu ucapan, dalil atau teori itu dianggap benar tergantung berfaedah atau tidaknya ucapan, dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk bertindak dalam penghidupannya. Pendapat tentang hakikat manusia sangat beragam, tergantung pada sudut pandang masing-masing. Ada beberapa konsep tentang makna manusia, antara lain homo sapiens yaitu makhluk yang memiliki akal budi, animal rational yaitu makhluk yang memiliki kemampuan berpikir, homo laquen yaitu makhluk yang mempunyai kemampuan berbahasa, homo faber atau homor toolmaking animal yaitu makhluk yang mampu membuat perangkat peralatan (Djamal dalam Jalaluddin 2011:77, dalam Mukhamad Fathoni, 2012:3). Pembahasan tentang manusia sangat beragam dan tidak henti-hentinya, hal ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing orang. Beberapa di antara telah memandang manusia sebagai makhluk yang mampu berpikir, makhluk yang memiliki akal budi, makhluk yang mampu berbahasa, dan makhluk yang mampu membuat perangkat peralatan untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kehidupannya.

B. Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial

Di dalam diri manusia terdapat dua kepentingan yaitu kepentingan individu dan kepentingan bersama. Kepentingan individu didasarkan manusia sebagai makhluk individu, karena pribadi manusia yang ingin memenuhi kebutuhan pribadi. Kepentingan bersama didasarkan manusia sebagai makhluk sosial (kelompok) yang ingin memenuhi kebutuhan bersama. Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai person atau perseorangan atau sebagai diri pribadi. Manusia sebagai diri pribadi merupakan makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotipe dan fenotipe. Faktor genotipe adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir, ia merupakan faktor keturunan, dibawa individu sejak



lahir. Kalau seorang individu memiliki ciri fisik dan karakter atau sifat yang dibawa sejak lahir, maka ia juga memiliki ciri fisik dan karakter atau sifat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Istilah lingkungan merujuk pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik seperti kondisi alam sekitarnya, baik itu lingkungan buatan seperti tempat tinggal (rumah) dan lingkungan bukan buatan. Lingkungan sosial merujuk pada lingkungan dimana seseorang individu melakukan interaksi sosial. (Irjus Irawan, 2020).

Liputan6.com, Jakarta Mengenal antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Secara etimologi, antropologi adalah berasal dari bahasa Yunani, “anthropos” yang artinya manusia atau orang dan “logos” yang artinya ilmu atau nalar. Melansir dari situs website resmi *Universitas Bandar Lampung*, antropologi adalah ilmu pengetahuan tentang manusia.

1. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* mengartikan antropologi adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Ahli dalam bidang ini, Haviland (1985) mengemukakan antropologi adalah studi tentang manusia dan perilakunya dan melaluinya diproses pengertian lengkap tentang keanekaragaman manusia.
2. Memahami karakteristik yang menjadi perhatian antropologi adalah berhubungan dengan kebudayaan dan ciri-ciri biologis manusia. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari karakteristik hidup manusia dengan orientasi pada kebudayaan yang dihubungkan dengan ciri-ciri sosio-psikologis atau ciri-ciri biologis, melalui pendekatan holistik (melihat atau memandang sesuatu sebagai kebulatan yang utuh).
3. Berikut Liputan6.com ulas pengertian antropologi adalah ilmu pengetahuan tentang manusia lebih dalam, Rabu (1/12/2021). Pengertian Antropologi adalah Ilmu Tentang Manusia, Ini Menurut Para Ahli dan Konsepnya

Pengertian Antropologi Menurut Para Ahli

1. Zerhun Dodda Doffana Pengertian antropologi adalah studi keilmuan yang mempelajari dan mendalami berbagai aspek mengenai manusia.
2. Mario Blaser Pengertian antropologi adalah ilmu yang meneliti dan mempelajari mengenai kehidupan manusia dari segi kebudayaan (culture). Asal manusia bukanlah dari monyet yang mengalami evolusi hingga menjadi manusia, sehingga berbanding terbalik dengan teori Darwin.
3. Melville J. Herskovits Pengertian antropologi adalah studi keilmuan yang mempelajari tentang manusia dan kehidupannya.
4. Conrad Phillip Kottak Pengertian antropologi adalah studi ilmu yang secara holistic mempelajari berbagai keragaman pada manusia, meliputi aspek biologis, kebahasaan, sosial budaya, dan lingkungannya dalam dimensi waktu lampau, saat ini, dan masa mendatang.



5. Rifhi Siddiq Pengertian antropologi adalah ilmu yang mempelajari dan mendalami semua aspek yang ada pada kehidupan manusia. Aspek yang dipelajari dalam antropologi adalah konsepsi kebudayaan, norma, ilmu pengetahuan, tradisi, teknologi, seni, linguistic dan lambang, serta kelembagaan.
6. Roger Keesing Pengertian antropologi adalah ilmu yang mempelajari kajian tentang manusia. Antropologi adalah terdorong untuk berorientasi pada upaya pemahaman makna bukan hanya sekadar ukuran yaitu dengan lebih menekankan pada penafsiran yang dekat dengan hakikat manusia atau human being (kemanusiaan).
7. Ariyono Suyono dan Kamus Antropologi Pengertian antropologi adalah ilmu yang berusaha untuk mempelajari dan mencapai sebuah pengertian mengenai tentang makhluk hidup. Antropologi adalah manusia dengan memahami, mempelajari, dan mendalami ragam warna dan bentuk fisik, kepribadian, masyarakat, dan kebudayaannya.
8. Prof. Dr. Harsojo, SU, M.Sc, Pengertian antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang umat manusia sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat. Terutama dalam segi tradisi, sifat khusus badani (fisik), cara produksi, dan nilai pergaulan hidup yang berbeda antar satu individu dengan individu lainnya.
9. Prof. Dr. Sarmini, M. Hum, Pengertian antropologi adalah menekankan pada aspek antropologi budaya. Pengertian antropologi adalah ilmu yang menggunakan aspek kebudayaan. Bertujuan menjelaskan fenomena yang terjadi di dalam kehidupan manusia melalui dimensi kebudayaan atau manusia itu sendiri.
10. Clifford Geertz, Pengertian antropologi adalah pabrik atau sumber pengertian mengenai kehidupan umat manusia untuk menafsirkan pengalaman dan menuntun tindakan.
11. Edward B. Tylor, Pengertian antropologi adalah studi ilmu yang mempelajari mengenai perkembangan kebudayaan manusia dari yang sederhana hingga menjadi kompleks. Menurutnya, ada 3 tahap utama evolusi yang dilalui oleh manusia yaitu tahap liar, biadab, dan peradaban.
12. Prof. Benford, Pengertian antropologi adalah cara yang bentuknya tidak berada di bawah kendali keturunan. Ilmu ini memiliki fungsi untuk membantu penyesuaian pada individu dan kelompok terhadap masyarakat ekologinya (hubungan timbal balik antara manusia dengan kondisi alam sekitar).
13. Tapi Omas Ihromi, Pengertian antropologi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang kehidupan manusia dengan perannya sebagai makhluk sosial, baik dalam segi ekonomi maupun politik.
14. Anthony Reid, Pengertian antropologi adalah rumpun ilmu yang menjadikan berbagai macam cara hidup manusia beserta tindakannya sebagai objek penelitian dan bahan analisis.



15. Carol R. Ember dan Melvin Ember, Pengertian antropologi adalah disiplin ilmu yang didasarkan pada rasa keingintahuan yang tiada henti-hentinya (tidak terbatas) mengenai kehidupan

C. Konsep Antropologi

Ahli antropologi, Keesing mengemukakan tidak ada dua ahli antropologi yang berfikir sama persis atau menggunakan dengan tepat pengoperasian konsep-konsep atau simbol-simbol sama dalam antropologi. Berikut contoh konsep antropologi, melansir dari website resmi *Universitas Pendidikan Indonesia*:

1. Kebudayaan

Kebudayaan adalah bagian dari konsep antropologi. Memiliki arti sama dengan cultura yang berarti: berkembang dan tumbuh. Kebudayaan mengacu pada kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu generasi, ke generasi berikutnya.

2. Evolusi

Evolusi adalah bagian dari konsep antropologi. Istilah ini bagian dari sebuah transformasi yang berlangsung secara bertahap.

3. Cultur Area

Cultur area atau daerah budaya adalah bagian dari konsep antropologi. Suatu daerah budaya yang menjadi bagian dari geografis dengan sejumlah ciri-ciri budaya, dan kompleksitas lain yang dimilikinya.

4. Enkulturas

Enkulturas adalah bagian dari konsep antropologi. Ini konsep yang menjadi sebuah sikap memahami proses kebudayaan sendiri, maupun kebudayaan orang lain.

5. Difusi

Difusi adalah bagian dari konsep antropologi. Proses penyebaran unsur-unsur secara meluas, sehingga melewati batas tempat di mana kebudayaan itu muncul.

6. Akulturasi

Akulturasi adalah bagian dari konsep antropologi. Bagian dari proses ataupun saling mempengaruhi dari satu kebudayaan asing yang berbeda sifatnya. Lambat laun unsur-unsur kebudayaan yang ada, diakomodasikan ke kebudayaan itu sendiri. Akan tetapi, masih memegang unsur kebudayaan aslinya.

7. Etnosentrisme

Etnosentrisme adalah bagian dari konsep antropologi. Memiliki arti penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai, dan standar budaya sendiri. Pemahaman seperti ini, dapat menghambat komunikasi antar-budaya.



8. Tradisi

Tradisi adalah bagian dari konsep antropologi. Ini bagian dari pola perilaku yang dilakukan berulang kali oleh sekelompok orang. Lama kelamaan pola perilaku tersebut, menjadi sebuah tradisi.

9. Ras dan etnik

Ras adalah bagian dari konsep antropologi. Digambarkan sebagai sekelompok orang yang memiliki beberapa kesamaan berdasarkan aspek fisik yang disebabkan karena adanya faktor keturunan.

10. Stereotip

Stereotip adalah bagian dari konsep antropologi. Salah satu penghambat terjadinya komunikasi antarbudaya. Stereotip adalah persepsi terhadap seseorang berdasarkan kelompok mana orang itu dikategorikan atau berdasarkan keyakinan tertentu.

11. Kekerabatan

Keluarga atau kekerabatan adalah bagian dari konsep antropologi. Suatu institusi domestik yang bergantung pada afeksi. Konsep kekerabatan ingin menegaskan bahwa tujuan dari keluarga adalah membesarkan anak.

12. Magis

Magis adalah bagian dari konsep antropologi. J.G Frazer dalam karyanya yang berjudul *Golden Bough*, magis berarti penerapan yang salah dalam dunia materiil. Dunia materiil ini mendukung adanya pemikiran terkait dunia yang semu.

13. Tabu

Tabu adalah bagian dari konsep antropologi. Dalam ilmu antropologi, tabu berarti terlarang. Contoh tabu adalah bersentuhan dengan kepala suku.

14. Perkawinan

Perkawinan adalah bagian dari konsep antropologi. Secara umum, konsep perkawinan mengacu pada konsep formal pepaduan hubungan 2 individu yang berbeda jenis dan dilakukan secara seremonial-simbolis, serta semakin dikarakterisasi oleh adanya kesederajatan, kerukunan, dan kebersamaan dalam hidup berpasangan. Manusia merupakan makhluk sosial, mereka membutuhkan orang lain. Sejak manusia dilahirkan di dunia, sesungguhnya ia telah belajar dan berkenalan dengan hubungan-hubungan sosial. Hubungan sosial manusia mengacu pada hubungan antar individu, antar masyarakat, dan individu dengan masyarakat. Hubungan sosial dimulai dari hubungan antara anak dengan orang tua kemudian meluas hingga ketetangga. Dalam hubungan sosial tersebut terjadilah proses pengenalan dan proses pengenalan tersebut mencakup berbagai budaya, nilai, norma dan tanggung jawab manusia, sehingga dapat tercipta corak kehidupan masyarakat yang berbeda-beda dengan masalah yang berbeda pula. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya, (Pidarta, 2009:151) dalam



Irjus Indrawan (2012). Jadi dalam ilmu sosiologi mempelajari tentang bagaimana hubungan antara manusia satu dengan yang lain, bagaimana susunan unit masyarakat atau sosial di wilayah serta kaitanya dengan yang lain. Sosiologi diperlukan dalam pendidikan karena konsep dan teori dari sosiologi memberikan petunjuk kepada guru-guru tentang bagaimana seharusnya mereka membina para siswa, agar mereka memiliki kebiasaan akrab, harmonis bersahabat sesama teman. Antara sosiologi dan sosiologi pendidikan saling terkait. Sosiologi memberikan bantuan pada pendidikan dalam wujud sosiologi pendidikan. Dengan demikian ilmu sosiologi memiliki peran yang penting dalam pendidikan sebagai acuan atau dasar dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan, dasar atau acuan disebut dengan landasan. Jadi landasan sosiologis pendidikan merupakan dasar atau acuan yang dijadikan acuan dalam mencapai tujuan pendidikan yang bersumber dari sosiologis. Berdasarkan konteks masalah diatas, maka perlu dipetakan ulang, dideskripsikan secara lebih lanjut mengenai bagaimana landasan sosiologis JISIP Vol. 1 No. 2 ISSN 2598-9944 November 2017 Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 102 pendidikan di indonesia, implementasi landasan sosiologis pendidikan di Indonesia serta bagaimana pula implikasinya bagi sistem pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu (pendidik dan peserta didik) bahkan dua generasi yang memungkinkan generasi muda mengembangkan diri. Pengembangan diri tersebut dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dapat berlangsung baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar atau alas, karena itu landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material (contoh: landasan pesawat terbang); dapat pula bersifat konseptual (contoh: landasan pendidikan). Konsep pendidikan pula dapat dipahami dari dua sudut pandang, pertama dari sudut praktek sehingga kita mengenal istilah praktek pendidikan, dan kedua dari sudut studi sehingga kita kenal istilah studi pendidikan. Praktek pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan bantuan dalam praktek pendidikan dapat berupa pengelolaan pendidikan (makro maupun mikro), dan dapat berupa kegiatan pendidikan (bimbingan, pengajaran dan atau latihan). Studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Uraian landasan pendidikan sedikit menyimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Perolehan jenis landasan pendidikan ini mencakup empat bagian diantaranya:



- a. Landasan religius pendidikan, maksudnya memiliki asumsi- asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan.
- b. Landasan filosofis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan.
- c. Landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan.
- d. Landasan yuridis atau hukum pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang- undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Dengan demikian landasan pendidikan ini memiliki fungsi yang sangat mendasar atas pijakan atau titik tolak praktek pendidikan dan atau studi pendidikan.

D. Hakekat manusia dan sesi sosiologi

Ruang Lingkup Sosiologi Pendidikan Pembahasan terkait ruang lingkup sosiologi bisa ditinjau dari pendekatan Pertama, pendekatan tujuan sosiologi pendidikan. Kedua, pendekatan pemakaian istilah atau pengertian sosiologi pendidikan. Jika mengacu arti sebenarnya secara logis, rumusan tujuan sosiologi pendidikan berdasarkan hakikat dari sosiologi pendidikan itu sendiri. Karena cakupan sosiologi terlalu luas, maka sangatlah tepat apabila digunakan dua pendekatan tersebut. Pendekatan pertama, ruang lingkup berdasarkan tujuan sosiologi pendidikan, sehingga dapat disusun sebagai berikut:

1. Sosiologi untuk guru
2. Sosiologi sekolah
3. Sosiologi mengajar

Pengembangan pokok pikiran sosiologi guna memenuhi tujuan sosiologi pendidikan, dalam hal ini memiliki beberapa ruang lingkup diantaranya :

1. Pengantar, meliputi:
2. Konsep dasar sosiologi
3. Struktur sosial
4. Fungsi dan pengendalian sosial
5. Perubahan sosial
6. Taksonomi ahli sosiologi
7. Macam-macam kelompok dan sistem sosial
8. Hasil penelitian ilmu sosial

Pendekatan kedua, pendekatan berdasarkan pengertian dan istilah sosiologi pendidikan. Ada beberapa istilah sosiologi pendidikan yang pernah digunakan diantaranya, social foundation of



education (yayasan social pendidikan), educational sociology (sosiologi pendidikan), social education (pendidikan sosiologi), school and society (sosial dan pendidikan), community relation (relasi komunikasi). Pemakaian istilah sosiologi sebagai terjemahan dari educational sociology, pemakaian istilah ternyata mempunyai konsekuensi logis terhadap ruang lingkup sosiologi pendidikan. Peran Penting Sosiologis Sebagai Salah Satu Landasan Pendidikan Manusia hakikatnya adalah makhluk bermasyarakat dan berbudaya. Namun karena manusia tidak secara otomatis mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya, maka masyarakat melakukan pendidikan atau sosialisasi (socialization). Menurut Ornstein (2008:291): “Socialization, which prepares children to function first as young people and then as adults, transmits culture and thereby allows society to function satisfactorily”. Sosialisasi, yang mempersiapkan anak-anak berfungsi pertama sebagai orang-orang muda dan kemudian sebagai orang dewasa, membawa budaya dan dengan demikian memungkinkan masyarakat berfungsi secara memuaskan.

Dengan demikian diharapkan setiap individu mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya sehingga tidak terjadi penyimpangan tingkah laku terhadap sistem nilai dan norma masyarakat. Payne (1928) menjelaskan bahwa Sosiologi Pendidikan merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi alat (mean) untuk mendeskripsikan dan menjelaskan institusi, kelompok sosial, dan proses sosial yang merupakan hubungan sosial di dalamnya individu memperoleh pengalaman yang terorganisasi. Sosiologi Pendidikan di dalam menjalankan fungsinya untuk menelaah berbagai macam hubungan antara pendidikan dengan masyarakat, harus memperhatikan sejumlah konsep-konsep umum. Lester Frank Ward, adalah pencetus pertama kali lahirnya Educational Sociology sebagai cabang ilmu yang baru dalam sosiologi pada awal abad ke-20. Ia sering dijuluki sebagai “Bapak Sosiologi Pendidikan”. Fokus kajian Educational Sociology adalah penggunaan pendidikan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan sosial dan sekaligus memberikan rekomendasi untuk mendukung perkembangan pendidikan itu sendiri.

Selanjutnya, pada tahun 1923 dibentuk organisasi profesional bernama National Society for the Study of Educational Sociology dan menerbitkan Journal of Educational Sociology. Pada tahun 1948, organisasi profesional yang mandiri itu bergabung ke dalam seksi pendidikan dari American Sociological Society. Sedangkan Sosiologi lahir di Eropa pada abad ke-19 karena pergeseran pandangan tentang masyarakat sebagai ilmu empiris yang memperoleh pijakan yang kokoh. Nama sosiologi untuk pertama kali digunakan oleh August Comte (1798-1857) pada tahun 1839 (Soim, 2012:90). Di Prancis, pelopor sosiologi pendidikan yang terkemuka adalah Durkheim (1858-1917), merupakan Guru Besar Sosiologi dan Pendidikan pada Universitas Sorbonne. Di Jerman, Max Weber (1864-1920) menyoroti keadaan dan penyelenggaraan pendidikan pada masyarakat dengan latar belakang sosial budaya serta tingkat kemajuan berbeda.

Di Inggris muncul aliran sosiologi yang memfokuskan perhatiannya akan analisis pendidikan pada level mikro, yaitu mengenai interaksi sosial yang terjadi dalam ruang belajar. Bernstein, misalnya, berusaha dengan jalan menyajikan lukisan tentang kenyataan dan permasalahan yang terdapat



dalam sistem persekolahan dengan tujuan agar para pengambil keputusan menentukan langkah-langkah perbaikan yang tepat. Di Indonesia, perhatian akan peran pendidikan dalam pengembangan masyarakat, dimulai sekitar tahun 1900, saat Indonesia masih dijajah Belanda. Para pendukung politik etis di Negeri Belanda saat itu melihat adanya JISIP Vol. 1 No. 2 ISSN 2598-9944 November 2017 Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 104 keterpurukan kehidupan orang Indonesia. Mereka mendesak agar pemerintah jajahan melakukan politik balas budi untuk memerangi ketidakadilan melalui edukasi, irigasi, dan emigrasi. Meskipun pada mulanya program pendidikan itu amat elitis, namun selanjut berjalan dengan baik, meluas dan meningkat ke arah yang makin populis sampai penyelenggaraan wajib belajar dewasa ini. Pelopor pendidikan pada saat itu antara lain: Van Deventer, R.A. Kartini, dan R. Dewi Sartika, (Soim, 2012:91-92).

Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi empat bidang, yaitu: (1) Hubungan sistem sekolah dengan aspek masyarakat lain, (2) Hubungan kemanusiaan di sekolah, (3) Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya, (4) Sekolah dalam komunitas, (Basri, 2013:90). Dalam pendidikan di sekolah terdapat interaksi dan komunikasi antara siswa dengan siswa yang lain, guru dengan siswa. Interaksi sosial dan komunikasi tersebut bagian dari proses sosial. Bentuk dari interaksi sosial menurut Pidarta (2009:157) berupa (1) Kerjasama, misalnya kerjasama dalam kelompok belajar pada anak-anak, kerjasama antar guru-guru, guru-guru dengan para orang tua siswa, dan sebagainya. (2) Akomodasi ialah usaha untuk meredakan pertentangan, mencari kestabilan, serta kondisi berimbang diantara para anggota. Contohnya, interaksi orang tua yang tidak setuju kenaikan SPP akhirnya melahirkan kesepakatan tertentu, kompromi antar siswa menentukan daerah karyawisata. (3) Asimilasi atau akulturasi ialah usaha mengurangi perbedaan pendapat antara anggota serta usaha meningkatkan persatuan pikiran, sikap dan tindakan dengan memperhatikan tujuan-tujuan bersama. Contohnya, pakaian seragam, perlakuan yang sama di sekolah. (4) Persaingan, sebagai bentuk interaksi sosial yang negatif. (5) Pertikaian, adalah proses sosial yang menunjukkan pertentangan atau konflik satu dengan yang lain.

Landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Karena dalam pendidikan mesti terdapat studi pendidikan dan praktek pendidikan, maka istilah landasan pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan, (Syaripudin, 2012:7-8). Asumsi yang dijadikan dasar dalam praktek pendidikan berasal dari filsafat, sejarah, psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi dan lain sebagainya. Jika asumsinya bersumber dari sosiologi maka disebut dengan landasan sosiologi pendidikan, jadi landasan sosiologi pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek dan atau studi pendidikan yang bersumber dari sosiologi. Setiap kelompok sosial memiliki dinamikanya sendiri-sendiri, yang disebut dengan dinamika kelompok. Dinamika ini bermanfaat bagi setiap kelompok untuk memajukan kelompoknya. Ada dua teori untuk meningkatkan produktivitas kelompok sosial, yaitu teori struktural dan teori konflik. Teori



structural fungsional memanfaatkan struktur dan fungsi untuk meningkatkan produktivitas kelompok. Yang dimaksud dengan struktur ialah bagian-bagian kelompok dengan peranannya dan posisinya masing-masing. Sedangkan teori konflik menggunakan prinsip-prinsip pemaksaan dalam melakukan perbaikan atau perubahan kelompok sosial. Contohnya guru-guru SD beramai-ramai kuliah lagi PGSD karena ada peraturan dari pemerintah tentang kualifikasi guru harus S1 yang sesuai dengan yang diajarkannya agar guru-guru mendapatkan tunjangan sertifikasi. Selain struktur, fungsi dan tekanan ada beberapa faktor yang merupakan kekuatan-kekuatan dalam kelompok yang menimbulkan perubahan kelompok atau dinamika kelompok yaitu: tujuan kelompok, pembinaan kelompok, rasa persatuan kelompok, iklim kelompok, dan efektifitas kelompok, pendidikan yang diinginkan aliran sosiologi adalah proses pendidikan yang bisa mempertahankan dan meningkatkan keselarasan hidup dalam pergaulan manusia. Untuk mewujudkan cita-cita pendidikan membutuhkan sosiologi. Peran penting sosiologis sebagai salah satu landasan JISIP Vol. 1 No. 2 ISSN 2598-9944 November 2017 Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 105 pendidikan harus mengacu pada teori, prinsip, dan konsep dari sosiologi pendidikan.

Konsep dan teori sosiologi pendidikan memberi petunjuk kepada guru-guru bagaimana seharusnya membina para siswa agar mereka memiliki kebiasaan saling kerjasama, rukun, bersahabat, saling membantu sesama teman dan saling menghormati sesama teman. Menurut Wiradji sosiologi pendidikan meliputi: (1) interaksi guru-guru dengan siswa, (2) dinamika kelompok kelas dan diorganisasi intra sekolah, (3) struktur dan fungsi pendidikan, dan (4) sistem-sistem masyarakat dan pengaruhnya terhadap pendidikan, (Pidarta, 2009:153). Dari pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa sosiologi memiliki peran penting dalam landasan pendidikan dalam melaksanakan pendidikan dengan baik sehingga tujuan dari pendidikan bisa tercapai. Implementasi landasan sosiologi dalam Pendidikan Indonesia: Sebuah Analisis Sekolah sebagai masyarakat kecil tujuannya adalah mempersiapkan anak-anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam implementasi sosiologi, perilaku manusia berkaitan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sosiologi berpandangan bahwa perilaku manusia tidak bebas melainkan mengikuti pola yang kontinu dan pola itu sebagai pengatur perilaku adalah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Nilai yang berlaku bersumber dari norma, agama, peraturan undang-undang, pengetahuan. Ada tiga jenis pola kegiatan sosial dalam pendidikan, yaitu (1) pola kegiatan sosial nomothetis adalah pola kegiatan sosial yang lebih menekankan pada dimensi tingkah laku yang bersifat normatif, pendidikan adalah sosialisasi kepribadian, pendidikan adalah upaya pewarisan sosial kepada generasi muda; (2) pola kegiatan sosial ideografis adalah pola kegiatan sosial yang lebih menekankan pada dimensi tingkah laku yang bersifat individual/perseorangan. Pendidikan adalah sebagai personalisasi peranan yaitu upaya membangun seseorang untuk mengetahui dan mengembangkan apa yang ingin diketahui dan dikembangkannya; (3) Pola kegiatan sosial transaksional adalah pola kegiatan yang mengutamakan keseimbangan berfungsinya dimensi tingkah laku nomothetis dan ideografis. Pendidikan adalah suatu sistem sosial yang bersifat demokratis, (Setiasih, 2009:10). Pola kegiatan



sosial tersebut berlangsung di sekolah, yang merupakan bagian dari pendidikan formal. Maka dari itu sekolah sebagai bagian dari pendidikan harus pengembangan nilai. Karena salah satu fungsi dari sekolah adalah untuk memperbaiki mental anak-anak. Seperti harapan Coleman yaitu sekolah memperbaiki kesehatan mental bangsa, seperti mencegah kenakalan, obat bius, mencegah penyakit menular, hamil muda dan sebagainya. Harapan seperti itu juga dikemukakan oleh Wuradji dengan mengatakan, (1) sekolah sebagai control sosial, yaitu untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan jelek kala di rumah maupun di masyarakat, (2) sekolah sebagai pengubah sosial, yaitu untuk menyeleksi nilai-nilai, menghasilkan warga Negara yang baik, dan menciptakan ilmu serta teknologi baru (Pidarta, 2009:163).

Kewajiban membina mental tidak hanya kewajiban sekolah, karena anak-anak disekolah hanya beberapa jam saja, sedangkan waktu yang lebih banyak dihabiskan di lingkungan rumah. Hal ini sejalan dengan salah satu pasal dalam undang-undang yang mengatakan sekolah/pemerintah, orang tua dan masyarakat secara bersama-sama bertanggung jawab atas terlaksananya pelaksanaan pendidikan. Berarti mereka bersama-sama bertanggung jawab atas terwujudnya tujuan pendidikan. Implementasi landasan sosiologi dalam pendidikan bisa dilaksanakan dalam beberapa kegiatan sosiologi dalam pendidikan diantaranya:

- a. Sosialisasi anak-anak dalam pendidikan, kegiatan tersebut bisa dilihat dari interaksi antar siswa, interaksi siswa dengan guru, guru dengan siswa. Agar interaksi antar siswa bisa dibina dengan baik maka sebagai seorang guru harus membina siswanya dengan baik.
- b. Proses sosialisai anak-anak disekolah seperti konsep tentang interaksi sosial, kontak sosial, komunikasi, bentuk interaksi sosial dan sebagainya.
- c. Kelompok sosial dengan berbagai bentuknya termasuk sekolah. JISIP Vol. 1 No. 2 ISSN 2598-9944 November 2017 Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 106
- d. Dinamika kelompok, yang sudah tentu berlaku dalam dunia pendidikan misalnya dinamika dalam kelas, dinamika dalam kegiatan intra maupun ekstra sekolah dan lain sebagainya.
- e. Nilai-nilai yang ada di masyarakat serta kewajiban sekolah untuk
- f. mengembangkan aspek itu pada diri anak-anak. Peranan pendidikan dalam masyarakat atau sosial.
- g. Dukungan masyarakat terhadap pendidikan.

Implikasi landasan sosiologi dalam Pendidikan Indonesia: Sebuah Analisis Individu maupun masyarakat sebagai suatu kesatuan individu-individu mempunyai berbagai kebutuhan. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut masyarakat membangun atau mempunyai pranata sosial. Salah satu diantaranya adalah pranata pendidikan. Pendidikan merupakan pranata sosial yang berfungsi melaksanakan sosialisasi. Terdapat hubungan antara pendidikan dengan masyarakat. Berbagai pandangan atau teori sosiologi yang menggambarkan fungsi atau peranan pendidikan dalam hubungannya dengan masyarakat. Sosialisasi adalah suatu proses dimana anak belajar menjadi



seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Yang dipelajari individu melalui sosialisasi ini adalah peranan-peranan. Dalam proses sosialisasi individu belajar untuk mengetahui peranan yang harus dijalankannya serta peranan-peranan yang harus dijalankan orang lain. Melalui penguasaan peranan-peranan yang ada dalam masyarakat ini individu akan dapat berinteraksi dengan orang lain. Seseorang dikatakan melaksanakan peranannya jika ia melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya. Dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan atau untuk mencapai tujuan-tujuannya, setiap individu maupun kelompok melakukan interaksi sosial. Dalam interaksi sosial tersebut mereka melakukan berbagai tindakan sosial. Tindakan sosial yang dilakukan individu hendaknya sesuai dengan status dan peranannya. Implikasi terhadap konsep pendidikan menurut Pidarta (2009:191) adalah sebagai berikut:

1. keberadaan sekolah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sekitarnya, keduanya saling menunjang. Sekolah seharusnya menjadi agen pembangunan masyarakat,
2. perlu dibentuk badan kerja sama antara sekolah dengan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk wakil-wakil orang tua siswa, untuk ikut memajukan pendidikan
3. proses sosialisasi anak perlu ditingkatkan,
4. dinamika kelompok dimanfaatkan untuk belajar.

Dari penjelasan diatas menurut penulis implikasi dari landasan sosiologi terhadap pendidikan adalah:

- a. Pengembangan teori Pendidikan Implikasi sosiologi dalam pengembangan teori pendidikan: mendorong lahir dan berkembangnya sosiologi pendidikan, mendorong lahir dan berkembangnya ilmu pendidikan kependudukan dan mendorong lahir dan berkembangnya aliran sosiologisme pendidikan.
- b. Tujuan Pendidikan Pendidikan dapat dijadikan ajang pembelajaran bagi siswa untuk mempersiapkan diri mereka sebelum terjun di masyarakat. Sekolah sebagai pengubah sosial, yaitu untuk menyeleksi nilai-nilai, menghasilkan warga negara yang baik, dan menciptakan ilmu serta teknologi baru untuk mencapai tujuan pendidikan nasional maka sekolah seharusnya menjadi agen pembangunan masyarakat. Agar tujuan dari pendidikan nasional bisa tercapai perlu dibentuk badan kerja sama antara sekolah dengan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk wakil- wakil orang tua siswa, untuk ikut memajukan pendidikan
- c. Kurikulum Pendidikan Kurikulum pendidikan harus disusun berdasarkan kondisi social masyarakat. Kurikulum disusun bukan hanya harus berdasarkan nilai, adat istiadat, cita-cita dari masyarakat, karena kondisi social senantiasa berubah dan berkembang sejalan dengan perubahan masyarakat. Maka kurikulum harus disusun dengan memperhatikan unsur fleksibilitas dan bersifat dinamis, sehingga kurikulum tersebut senantiasa relevan dengan masyarakat. Konsekuensi JISIP Vol. 1 No. 2 ISSN 2598-9944 November 2017 Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 107 logisnya, pada waktunya perlu diadakan perubahan dan revisi kurikulum, sesuai dengan perkembangan dan perubahan sosial yang



ada pada saat itu. Program kurikulum harus disusun dan mengandung materi sosial.

- d. Proses Pendidikan.
- b. Sekolah merupakan bagian dari kelompok sosial yang ada di masyarakat, maka dari itu dalam sekolah harus melaksanakan nilai-nilai yang dibuat dan disepakati oleh masyarakat yang bersumber dari norma, pemerintah, agama, dan pengetahuan. Sekolah sebagai kontrol sosial, yaitu untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan jelek kala dirumah maupun di masyarakat. Proses sosialisasi anak perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan siswa agar siswa mudah bersosialisasi dengan siswa lain, dan mampu berkomunikasi dengan baik.

]Implikasi sosiologi sangat berkaitan erat dengan pendidikan, hal itu disebut sebagai istilah sosiologi pendidikan, yaitu ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan guna mengembangkan kepribadian individu agar lebih membaik. Pandangan sosiologi pendidikan menurut Nasution, merupakan proses analisis social dan pola-pola sosial yang terdapat dalam sistim pendidikan. Menurutnya sosiologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang otonom mempunyai sifat diantaranya:

1. sifat umum, yang membahas prinsip hubungan antar manusia pada umumnya dan bukanlah orang perorangan atau daerah perdaerah.
2. sifat kategoris, bahwa sosiologi menyatakan apa adanya hubungan antar manusia didalam masyarakat dan bukan bersifat normatif. Dalam hal ini jika kita mengkaji bahwa sosiologi ini mengkaji prilaku manusia dan hubungannya dengan personal lainnya. Pada umumnya, seluruh prilaku manusia dipelajarinya melalui hubungannya dengan manusia lain-nya baik dirumah, sekolah tempat permainan, pekerjaan dan Sebagian.

E. Mengetahui hakekat manusia dari segi psikologi

Manusia menurut pola psikologis Kekhasan pola ini adalah perpaduan antara metode-metode psikologi eksperimental dan suatu pendekatan filosofis tertentu, misalnya fenomenologi. Tokoh-tokoh yang berpengaruh besar pada pola ini antara lain Ludwig Binswanger, Erwin Straus dan Erich Fromm. Binswanger mengembangkan suatu analisis eksistensial yang bertitik tolak dari psikoanalisisnya Freud. Namun pendirian Binswanger bertolak belakang dengan pendirian Freud tentang kawasan bawah sadar manusia yang terungkap dalam mimpi, nafsu dan dorongan seksual. Menurut Binswanger, analisis Freud sangat berat sebelah karena dia mengabaikan aspek-aspek budaya dari eksistensi manusia seperti agama, seni, etika dan mitos. Freud menurut Binswanger, memahami kebudayaan secara negatif, yakni lebih sebagai penjinakan dorongan-dorongan alamiah daripada sebagai ungkapan potensi manusia untuk memberi arah pada hidupnya. Penelitian psikologis harus diarahkan pada kemampuan manusia untuk mengatasi dirinya sendiri dalam penggunaan kebebasannya yang menghasilkan keputusan-keputusan dasar. Freud dengan psikoanalisisnya



berpendapat bahwa manusia pada dasarnya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif.

Tingkah laku individu ditentukan dan dikontrol oleh kekuatan psikis yang sejak semula memang sudah ada pada diri individu itu. Individu dalam hal ini tidak memegang kendali atas “nasibnya” sendiri, tetapi tingkah lakunya semata-mata diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan instink biologisnya. Pandangan Freud tersebut ditentang oleh pandangan humanistik tentang manusia. Pandangan humanistik menolak pandangan Freud yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya tidak rasional, tidak tersosialisasikan dan tidak memiliki kontrol terhadap “nasib” dirinya sendiri. Sebaliknya, pandangan humanistik yang salah satu tokohnya adalah Rogers mengatakan bahwa manusia itu rasional, tersosialisasikan dan untuk berbagai hal dapat menentukan “nasibnya” sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengarahkan, mengatur, dan mengontrol diri sendiri.

Pandangan behavioristik pada dasarnya menganggap bahwa manusia sepenuhnya adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol atau dikendalikan oleh faktor-faktor yang datang dari luar. Penentu tunggal dari tingkah laku manusia adalah lingkungan. Dengan demikian, kepribadian individu dapat dikembalikan semata-mata kepada hubungan antara individu dan lingkungannya. Hubungan itu diatur oleh hukum-hukum belajar seperti teori pembiasaan (conditioning) dan peniruan. Salah satu tokoh dari pandangan ini adalah Skinner (Depdikbud, 1984/1985: 1-3). Dari ketiga pandangan yang disebut terakhir, dapat disimpulkan bahwa Freud dengan psikoanalisisnya lebih menekankan faktor internal manusia, sementara pandangan behaviorisme lebih menekankan faktor eksternal. Sedangkan pandangan psikologi humanistik lebih menekankan kemampuan manusia untuk mengarahkan dirinya, baik karena pengaruh faktor internal maupun eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak serta merta atau otomatis melakukan suatu tindakan berdasarkan desakan faktor internal, karena desakan faktor internal bisa saja ditanggguhkan pelaksanaannya. Buktinya orang berpuasa, meskipun dorongan rasa laparnya kuat, tetapi manusia bisa mengarahkan dirinya dalam arti bisa menanggguhkan desakan atau dorongan itu, yakni pada saatnya berbuka di sore hari. Begitu juga, manusia tidak serta merta atau otomatis melakukan tindakan karena mendapat rangsangan dari luar (eksternal). Dia dapat mengabaikannya, bahkan dia dapat memutuskan sesuatu yang berbeda dengan desakan faktor eksternal. Buktinya, manusia dapat menolak iming-iming sesuatu yang menggurikan dari pihak lain.

F. Manusia menurut pola pemikiran sosial-budaya

Manusia menurut pola pemikiran ini tampil dalam dimensi sosial dan kebudayaannya, dalam hubungannya dengan kemampuannya untuk membentuk sejarah. Menurut pola ini, kodrat manusia tidak hanya mengenal satu bentuk yang uniform melainkan berbagai bentuk. Salah satu tokoh yang termasuk dalam pola ini adalah Erich Rothacker. Dia berupaya memahami kebudayaan setiap bangsa melalui suatu proses yang dinamakan reduksi pada jiwa-jiwa nasional dan melalui mitos-mitos. Yang



dimaksud reduksi pada jiwa-jiwa nasional adalah proses mempelajari suatu kebudayaan tertentu dengan mengembalikannya pada sikap-sikap dasar serta watak etnis yang melahirkan pandangan bangsa yang bersangkutan tentang dunia, atau *weltanschauung*. Pengalaman purba itu dapat direduksi lagi. Dengan demikian, meskipun orang menciptakan dan mengembangkan lingkup kebudayaan nasionalnya, kemungkinan-kemungkinan pelaksanaan dan pengembangannya sudah ditentukan, karena semuanya itu sudah terkandung dalam warisan ras. Tokoh lain yang dapat dimasukkan dalam pola ini adalah Ernst Cassirer (1990: 39-40) seorang filsuf kebudayaan abad 20. Dia merumuskan manusia sebagai *animal symbolicum*, makhluk yang pandai menggunakan symbol. Menurut Cassirer, definisi manusia dari Aristoteles, yakni *zoon politicon*, manusia adalah makhluk sosial memang memberi pengertian umum tetapi bukan ciri khasnya (1990:337). Begitu pula definisi manusia sebagai *animal rationale* dianggap tidak memadai, karena rasio tidak memadai untuk memahami bentuk-bentuk kehidupan budaya manusia dalam seluruh kekayaan dan bermacam-macamnya. Itulah mengapa dia menawarkan definisi manusia sebagai *animal symbolicum* yakni makhluk yang pandai membuat, memahami dan menggunakan symbol (1990: 40) Pada bagian lain Cassirer juga berpendapat bahwa ciri utama atau ciri khas manusia bukanlah kodrat fisik atau kodrat metafisiknya, melainkan karyanya. Karyanyalah, sistem-sistem kegiatan manusiawilah yang menentukan dan membatasi dunia.

G. Hakekat Manusia Dari Segi Dimensiologi

1. Filosofis

Manusia sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Esensi manusia sebagai makhluk filosofis ini sering disebut dengan filsafat hidup dalam artian pedoman yang dimiliki manusia dalam kehidupannya (Anshori dkk , 2018, dalam Iswadi, Karnati Neti, dkk, 2022).

Saat ini ada ilmu yang membahas masalah yang ada dalam kehidupan manusia yang disebut dengan filosofi. Dengan kata lain filosofi dapat diartikan juga sebagai filsafat hidup manusia. Manusia yang mempunyai filosofi dalam hidupnya, manusia tersebut akan menyesuaikan dirinya dengan filosofi yang dianutnya. Filosofi yang dianut manusia diharapkan dapat berguna untuk manusia tersebut dan orang sekitarnya. Filosofi hidup yang baik akan membuat manusia menjadi orang yang berguna dan sebaliknya filosofi yang tidak baik menjadikan manusia tidak berguna. Manusia hendaknya dalam menjalankan hidupnya sudah baik atau belum. Apabila filosofi belum baik atau masih kurang, manusia diharapkan dapat mengubah filosofi tersebut dengan filosofi yang baik. Manusia yang tidak memiliki filosofi hidup, bukan berarti manusia tersebut orang tidak baik. Ada kemungkinan manusia tersebut belum menemukan jati dirinya, sehingga tidak dapat menentukan mana filosofi hidup yang sesuai dengan dirinya (Anshori, Ichsan dkk 2018, dalam Iswadi, Karnati Net dkk, 2022).



2. Individual

Manusia di dalam hidupnya, dikatakan sebagai makhluk individu, manusia memiliki keinginan atau cita-cita yang akan diperolehnya dalam kehidupan. Bakat atau potensi tersebut yang akan membuat manusia dapat meraih apa yang diinginkannya atau dicita-citakan (Iswadi, Karnati Neti, dkk, 2022)

Manusia sebagai makhluk individu memiliki kecerdasaaaaan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal, dimana sering disebut potensi. Dengan potensi yang diharapkan manusia dapat mengembangkan dirinya menjadi pribadi atau individu yang baik. Manusia dapat berinteraksi dengan lingkungannya, dengan memperhatikan norma-norma yang ada di lingkungan tersebut. Manusia untuk memperoleh kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal harus melewati tahapan Pendidikan. ((Iswadi, Karnati Neti, dkk , 2022).

3. Sosial

Manusia sebagai makhluk social artinya bahwa manusia dalam menjalankan kehidupannya tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Kita sebagai makhluk social harus dapat saling menghargai satu sama lain. karena jika manusia tidak saling menghargai, maka yang terjadi adalah saling menghujat. Kita sebagai makhluk social menuntut manusia saling membantu, Ketika ada tetangganya atau orang yang membutuhkan pertolongannya. Dengan memberikan bantuan kepada orang lain, diharapkan semakin tercipta hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar. Manusia yang selalu dapat membantu tetanngganya, tidak akan mengalami kesulitan, jika suatu hari dirinya tertimpa musibah. (Anchori, Ichsan, dkk, 2018, dalam Iswadi, Karnati Neti, dkk, 2022).

4. Susila

Manusia sebagai makhluk Susila dapat diartikan bahwa dalam kehidupannya bermasyarakat, manusia harus mempertimbangkan baik dan buruk. Manusia harus melihat apakah setiap tindakannya akan berakibat merugikan orang lain atau tidak. Apabila dalam tindakannya manusia merugikan orang, kita dapat dikatakan sebagai makhluk asusila. Dan sebaliknya jika dalam hidup selalu bermanfaat untuk orang lain dan tidak merugikan orang lain, maka kita dikatakan makhluk Susila. (Anchori, Ichsan, dkk, 2018, dalam Iswandi dan Karnati Neti, 2022)

5. Beragama

Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih. Manusia dilahirkan tidak memiliki dosa. Seiring tumbuh dan berkembang, manusia diberikan kemampuan untuk berpikir dan diharapkan dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Agar dapat membedakan benar dan salah, manusia dari kecil sudah diajarkan oleh orang tuanya untuk beribadah menurut keyakinan yang dianut oleh orang tuanya. Semakin dewasa, manusia dapat menentukan sendiri agama yang diyakininya. (Anshori, Ichsan, dkk, 1918, dalam Iswadi, Karyati Neti, dkk, 2022)

Manusia sebagai makhluk beragama, ketika sudah memiliki bekal dari orang tuanya, akan menjadi dasar sebagai pondasi dalam meniti kehidupannya. Tetapi bukan hanya dari orang tua, pengaruh manusia menjalankan agamanyapun bisa dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan



disekitarnya. Contohnya lingkungan sekolah, lingkungan bermain, lingkungan berinteraksi baik secara formal, non formal maupun secara informal. Sedikit demi sedikit pengaruh itu akan tertanam dan masuk ke alam bawah sadar dan membuat file-file memory di dalam kehidupan si anak. Karena ada kata pepatah yang mengatakan, bahwa bayi itu lahir seperti kertas putih yang belum tertulis. Dia mau jadi apa, tergantung sejauh mana lingkungan itu akan membuat tulisan atau coretan di dalam memory kehidupannya. Oleh sebab ada teori yang menyebutkan bahwa seorang Ketika di dalam kandungan, kalau ingin baik agamanya sesuai dengan yang diinginnnya, yaitu dengan memperdengarkan alunan alqur'an Ketika anak tersebut masih di dalam kandungan. Sehingga anak tersebut familiar dengan kata-kata yang diperdengarkan karena sudah terrekam di alam bawah sadarnya. Sehingga sudah di tangkap oleh akal dan tersimpan dalam suatu memory di dalam otaknya.



BAB 6

SEJARAH PENDIDIKAN DI INDONESIA

A. Kondisi Pendidikan Pada Zaman Kolonial

1. Zaman “Verenigde Oost-Indische Compagnie”(Voc)

Kegiatan yang dilakukan oleh VOC terutama dipusatkan dibagian timur Indonesia dimana agama Katolik telah berakar dan di Batavia (Jakarta). Pada tahun 1607 didirikan sekolah pertama di Ambon untuk anak-anak Indonesia, karena pada saat itu belum ada anak Belanda. Tujuan utamanya untuk melenyapkan agama Katolik dengan menyebarkan agama protestan. Jumlah sekolah cepat bertambah.

Sekolah pertama di Jakarta dibuka pada tahun 1630 untuk mendidik anak Belanda dan Jawa agar menjadi pekerja yang kompeten pada VOC. Kurikulum sekolah-sekolah selama VOC bertalian erat dengan gereja. Menurut peraturan sekolah 1643 tugas guru adalah: memupuk rasa takut terhadap Tuhan, mengajarkan dasar-dasar agama Kristen. Semua sekolah disuatu wilayah berada di bawah pengawasan pendeta. Guru-guru diangkat oleh Gereja Reformasi di Amsterdam. Sebelum dikirim ke tanah jajahan mereka mula-mula diuji tentang kemampuannya membaca dan menyanyikan lagu-lagu gereja.

Adapun masalah yang dihadapi dalam pendidikan ialah soal bahasa pengantar disekolah. Guru pertama di sekolah pertama di Ambon ingin menggunakan bahasa Belanda di sekolah. Tetapi ia gagal dan akhirnya guru berikutnya menggunakan bahasa Melayu. Perkembangan pendidikan mulai merosot pada pertengahan abad ke-18. Jakarta yang berpenduduk 16.000 jiwa hanya mempunyai 270 murid, Surabaya hanya 24 dan diseluruh pulau Jawa hanya 350 murid. Pada tahun 1800 sejumlah uang disumbangkan kepada sekolah di Jakarta dan tak diketahui apa yang harus diperbuat dengan uang itu karena pada saat itu tak ada seorang pun guru Belanda disana. Pada saat yang sama VOC dibubarkan. Sewaktu tanah jajahan itu dikembalikan kepada Belanda tahun 1816 pendidikan berada dalam keadaan yang menyedihkan dengan tidak adanya satu sekolah pun di luar Jawa. Setelah dua abad di bawah pemerintahan VOC keadaan pendidikan lebih menyedihkan lagi dibandingkan dengan waktu orang Belanda mulai menginjakkan kakinya di bumi Indonesia.

2. PEMERINTAHAN BELANDA (SEJAK 1816)

a. Masa Liberal (1816-1891)

Sewaktu pemerintahan diterima kembali oleh para Komisaris Jenderal dari orang Inggris pada tahun 1816, mereka harus memulai sistem pendidikan dari dasarnya, karena pendidikan pada zaman VOC berakhir dengan kegagalan total. Pemerintahan baru yang diresapi oleh ide-ide liberal aliran aufklarung atau enlightenment menaruh kepercayaan akan pendidikan sebagai alat untuk mencapai kemajuan ekonomi dan social.



b. Pendidikan bagi Anak Belanda

Pada akhir abad ke-19 hampir tercapai taraf pendidikan universal bagi anak-anak Belanda di seluruh Indonesia. Suatu sekolah menengah didirikan pada tahun 1860 yang membuka kesempatan bagi anak-anak Belanda untuk melanjutkan pelajarannya di universitas di negeri Belanda, atau untuk menduduki tempat yang tinggi dalam pemerintahan. Fasilitas yang bermutu tinggi senantiasa dipertahankan selama masa kolonial yang menjaga agar anak-anak Belanda selalu mendapat pendidikan yang lebih baik daripada anak Indonesia. Jalan ke perguruan tinggi telah tersedia bagi anak Belanda pada saat hanya segelintir anak Indonesia terdapat pada sekolah rendah yang jumlahnya sedikit dan tidak membuka kesempatan memasuki pendidikan lanjutan.

Kurikulum sekolah mengalami perubahan radikal. Diengaruhi oleh ide liberalisme, orang menaruh kepercayaan akan kekuasaan pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian ilmiah empiris. Tujuan pendidikan bukan lagi memupuk rasa takut akan Tuhan dan pusat studi bukan lagi Kitab Injil. Pendidikan sekarang ditujukan kepada pengembangan kemampuan intelektual, nilai-nilai rasional dan sosial dan usaha mencapai tujuan-tujuan sekuler lainnya.

c. Pendidikan bagi Anak Indonesia

Ide-ide liberal yang diterapkan bagi anak-anak Belanda dengan menyediakan fasilitas pendidikan secukupnya, tidak dilaksanakan bagi anak-anak Indonesia, selain adanya sejumlah peraturan. Statuta 1818 menyatakan bahwa "pemerintah hendaknya membuat peraturan yang diperlukan mengenai sekolah-sekolah bagi anak bumiputera. Pemerintah memberi kesempatan bagi anak bumiputera untuk mendapatkan pendidikan pada sekolah Belanda".

Selama setengah abad ke-18 pertama pemerintah Belanda tak satu sekolah pun menyediakan bagi anak Indonesia. Alasannya ialah agar menghormati bumiputera serta lembaga-lembaga dengan membiarkan penduduk dibawah pimpinan mereka. Adapun alasan lain ialah kesulitan finansial yang berat yang dihadapi orang Belanda sebagai akibat *Perang Diponegoro* yang mahal dan banyak menelan banyak korban serta peperangan Belanda dan Belgia. Kesulitan keuangan ini menyebabkan raja Belanda untuk meninggalkan prinsip-prinsip liberal dan menerima rencana yang dianjurkan oleh *Van den Bosch* yaitu melaksanakan kerja paksa yang dianggap cara yang paling ampuh untuk memperoleh keuntungan. Yang kemudian dikenal sebagai *Cultuurstelsel* atau Tanam Paksa. Dan sistem ini harus mempekerjakan sejumlah besar orang bumiputera sebagai pegawai rendah yang murah untuk menjaga perkebunan pemerintah berjalan lancar. Pegawai ini, yang sedapatnya dipilih dari anak-anak kaum ningrat yang telah mempunyai kekuasaan tradisional yang menjamin keberhasilan perusahaan ini, harus diberi pendidikan. Untuk tujuan ini pada tahun 1848 untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial diberikan sejumlah £ 25.000,- untuk pendirian sekolah bagi anak bumiputera. Keputusan ini ternyata penting karena inilah pertama kalinya uang pemerintah dipakai untuk pendidikan anak-anak bukan Kristen.



Dalam pada itu pemerintah dipegang oleh kaum liberal yang mempunyai pendidikan yang sangat luas. Tokoh-tokoh seperti Van Hoevell. Anggota parlemen, Thorbecke, perdana menteri, dan Fransen Van de Putte, menteri jajahan, tampil kedepan untuk mempertahankan kepentingan rakyat Indonesia. Kaum liberal sebenarnya tidak menentang politik mencari keuntungan, akan tetapi mereka yakin bahwa usaha bebas akan lebih berperikemanusiaan dan akhirnya lebih menguntungkan daripada kerja paksa. Dan pada akhirnya Sistem Tanam Paksa dihapuskan tahun 1870. Peraturan pemerintah tahun 1854 menginstruksikan Gubernur Jenderal untuk mendirikan sekolah dalam tiap kabupaten bagi pendidikan anak pribumi.

Sejak tahun 1890 sekolah-sekolah dari berbagai agama, termasuk sekolah Islam, yang memenuhi syarat, dapat mengajukan permohonan subsidi dari pemerintah.

d. Politik Etis (1900-1920)

Pada tahun 1899 terbit sebuah artikel oleh *Van Deventer*, berjudul *Hutang Kehormatan* dalam majalah *De Gids*. Disitu ia mengemukakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari Indonesia selama ini hendaknya dibayar kembali dari perbendaharaan negara.

Van Deventer menganjurkan program yang ambisius untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Ia ingin memperbaiki irigasi agar meningkatkan produksi

pertanian, menganjurkan transmigrasi dari pulau Jawa yang terlampau padat penduduknya. Akan tetapi usaha perbaikan akan sia-sia tanpa *pendidikan* massa. Pendidikan dan emansipasi Indonesia secara berangsur-angsur itulah inti Politik Etis.

Pendidikan mulai menyatakan peranan yang kian aktif dalam menentukan arah perkembangan politik. Tampak kemajuan yang pesat dalam pendidikan dalam beberapa dekade semenjak di jalankannya Politik Etis daripada yang terjadi selama beberapa abad pengaruh Belanda sebelumnya.

Kesejahteraan rakyat Indonesia tak kunjung tiba. Pendidikan yang baik tetap terbatas pada golongan atas. Untuk rakyat banyak pendidikan dijaga agar sedapat mungkin tetap rendah dan sederhana, hampir tanpa jalan keluar ke pendidikan lanjutan untuk mendapat kedudukan yang lebih baik.

Akan tetapi pendidikan berorientasi Barat, walaupun terbatas ada golongan kecil dan dimaksud untuk menghasilkan pegawai, menimbulkan elite intelektual baru, banyak sedikit menjadi asing terhadap kebudayaan tradisional. Namun elite ini menjadi juru bicara nasionalisme Indonesia yang anti Barat. Pendidikan yang seharusnya mendekatkan bangsa Belanda dan Indonesia, dalam kenyataan menjauhkan mereka.

3. Beberapa Ciri Umum Politik Pendidikan Belanda

a. Gradualisme

Menurut *Kat Angelino* dalam lingkungan tanah jajahan perkembangan yang berangsur-angsur



adalah cara satu-satunya yang tepat. Orang Belanda sangat lamban dan membiarkan penduduk Indonesia dalam keadaan pendidikan yang hampir sama sewaktu mereka mula-mula menginjakkan kakinya disana.

Di Indonesia VOC mencegah gerej untuk menyebarkan pendidikan dengan pertimbangan bahwa perkembangan pendidikan akan menggerakkan penduduk yang mungkin akan merong-rong kedudukan monopoli mereka.

Pemerintah liberal pada masa ini, yang menginginkan pendidikan netral, lebih cenderung agar penduduk tidak diberi pendidikan daripada merangsang memberontak oleh pendidikan yang diberikan misi Kristen.

Ada berbagai yang menyebabkan perkembangan pendidikan di Indonesia sangat lambat. Pemerintah Belanda tidak rela jika harus mengeluarkan biaya jutaan untuk murid yang jumlahnya jutaan. Adapun alasan lain ialah pendidikan anak Indonesia sebaiknya di pegang oleh raja masing-masing, karena katanya orang Belanda tidak ingin mengganggu adat istiadat setempat.

Gradalisme juga menjamin kedudukan yang menguntungkan bagi orang Belanda. Membatasi kesempatan bagi orang Indonesia. Antara lain berfungsi menjaga agar anak Belanda selalu lebih maju. Memberi pendidikan tanpa jaminan pekerjaan hanya memupuk elite intelektual yang mengalami frustrasi dan merupakan ancaman bagi pemerintah Belanda.

Adapun alasan lain perkembangan di Indonesia sangat lamban ialah sangat rendahnya jumlah pelajar Indonesia dibandingkan dengan anak Belanda walaupun sudah mendapatkan kesempatan.

b. Dualisme

Merupakan ciri dominan dalam system pendidikan Belanda. Ada sekolah berbeda untuk berbagai golongan rasial dan sosial. Sistem pendidikan terbagi dalam dua kategori yang jelas. Sekolah Belanda dan Sekolah Pribumi masing-masing dengan inspeksi, kurikulum, bahasa pengantar, dan pembiayaan tersendiri.

Dualisme dapat dilihat sebagai konsekuensi kenyataan berbagai bangsa yang hidup bersama dalam hubungan kolonial dengan hak-hak yang berbeda-beda, orang Belanda sebagai penjajah, penguasa, dan pemberi pekerjaan, dan orang Indonesia sebagai yang terjajah, buruh dan pekerja.

Selang perang Dunia I pendidikan lebih terbuka dan tidak lagi memperhatikan perbedaan kebangsaan. Unifikasi pendidikan akhirnya tercapai baru setelah kemerdekaan Indonesia yang memberikan kesempatan yang sama melalui saluran yang sama untuk mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya.

c. Kontrol Sentral yang Kuat

Pemerintah memainkan peranan penting dalam segala masalah pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda berada di bawah kontrol Gubernur Jenderal yang menjalankan pemerintahannya atas nama Raja Belanda. Ia hanya bertanggung jawab kepada Raja yang diwakili oleh Menteri Jajahan.



Sampai 1918 segala masalah pendidikan diputuskan hanya oleh pegawai Belanda saja tanpa konsultasi dengan orang Indonesia, akan tetapi dengan didirikannya *Volksraad*, maka orang Indonesia untuk yang pertama kalinya memperoleh kesempatan untuk secara resmi mengemukakan pendapatnya dan dengan sendirinya mulai mempengaruhi perkembangan pendidikan selanjutnya.

Oleh sebab itu, pendidikan dikontrol secara sentral, guru-guru dan orang tua tidak mempunyai pengaruh langsung dalam politik pendidikan.

d. Pendidikan Sebagai Penyediaan yang Kuat

Sekolah pertama untuk anak Indonesia didirikan pemerintah dengan tujuan mendidik anak-anak aristokrasi di Jawa untuk menjadi pegawai di perkebunan pemerintah yang senantiasa berkembang selama masa Tanam Paksa. Perluasan pendidikan sebagian besar ditentukan oleh kebutuhan pegawai dan juru tulis yang meningkat. Oleh sebab kebutuhan pegawai administrasi yang murah oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta maka pendidikan Barat makin terbuka bagi orang Indonesia.

e. Prinsip Konkordasi

Bertujuan untuk menjaga agar sekolah-sekolah di Hindia Belanda mempunyai kurikulum dan standar yang sama dengan sekolah dengan negeri Belanda. Sekolah-sekolah Belanda di Indonesia berhasil dalam mencapai standar seperti di negeri Belanda dan anak dari Indonesia tidak menemui banyak kesulitan di negeri Belanda dibanding dengan anak pindah sekolah di negeri itu sendiri.

f. Tidak Adanya Sistem Organisasi Sistematis

Sekitar 1910 terdapat berbagai ragam sekolah rendah bagi anak-anak seperti Sekolah Desa untuk anak-anak di daerah pedesaan, Sekolah Kelas Dua untuk anak orang biasa di kota-kota, Sekolah Kelas Satu untuk anak-anak kaum ningrat dan golongan kaya, Sekolah Khusus untuk anak militer, juga untuk golongan aristokrasi di Sumatra, dan disamping itu sejumlah sekolah untuk pendidikan pegawai dan dokter Jawa.

Tidak adanya hubungan antar-sekolah untuk anak pribumi mulai disadarisetelah 1910. Gubernur Jenderal Idenburg mengirim surat pada waktu itu kepada Menteri Jajahan tentang rencananya untuk menyatukan sekolah yang sedianya lepas-lepas menjadi suatu kesatuan yang bulat.

B. Kondisi Pendidikan Pada Zaman Jepang

Di zaman penjajahan Jepang walaupun sangat singkat (7 maret 1942 – 17 agustus 1945) penting sekali artinya bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Arti zaman itu tidak terletak pada isi pendidikan dan pengajaran yang diberikan di sekolah-sekolah namun lebih pada organisasi pendidikan.



Karena Indonesia dikuasai Jepang dizaman perang, segala usaha Jepang ditujukan untuk kepentingan perang. Dalam kegiatan pendidikan murid-murid dipaksa mengumpulkan batu pasir untuk kepentingan pertahanan. Pekarangan sekolah ditanami ubi dan sayur-mayur untuk menambah bahan makanan. Murid-murid juga diwajibkan untuk menanam pohon jarak untuk menambah persediaan minyak bagi kepentingan perang Jepang. Tiap pagi disekolah diadakan latihan gerak badan dilanjutkan dengan latihan baris-berbaris, beladiri dan latihan perang.

Yang terpenting pada zaman Jepang adalah diakhirinya system pendidikan kolonial Belanda. Pendidikan pada zaman Hindia Belanda sangatlah tidak adil dan berat sebelah, karena mereka selalu menjadikan pendidikan anak-anak Belanda adalah yang paling utama, walaupun jumlah mereka sangat jauh lebih sedikit dari anak Indonesia. Anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang sangat terbatas sekali, jumlah maupun jenisnya. Kesempatan yang sama dengan anak Belanda hanya didapatkan oleh anak Indonesia yang mempunyai keturunan bangsawan dan berkecukupan.

Sekolah Desa diganti dengan Sekolah Rakyat dengan lama pendidikan 6 tahun. Sekolah Menengah diganti dengan Tju untuk Gakko laki-laki dan Zyu Gakko untuk anak perempuan yang lam belajarnya 3 tahun dan MULO pun ditiadakan. Jepang juga membangun sekolah-sekolah kejuruan, dan sekolah guru. Sekolah guru ini lebih menekankan kepada pelajaran sejarah, ilmu bumi.

Adapun usaha pemerintah untuk mengadakan penambahan gur-guru dari SD hingga SLA/Madrasah bahkan dosen di Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara apa adanya. Bahkan lulusan SR pun diterima menjadi guru dan kemudian akhirnya disetarakan melalui SGB demikian juga lulusan SLP menjadi guru SLP setelah disetarakan melalui SGA. Jepang menganggap sekolah guru penting sekali, karena sekolah itu yang akan menyiapkan tenaga dalam jumlah besar untuk memompakan dan mempropagandakan semangat Jepang terhadap anak didik.

Adapun tonggak sejarah lainnya di tahun 60-an adalah, Indonesia menyatukan berbagai gerakan kepanduan. Tanggal 14 agustus 1964 Presiden menetapkan gerakan kepanduan menjadi Gerakan Praja Muda Karana, yang dikenal dengan Gerakn Prqamuka. Gerakan ini tidak berlandaskan politik, dan lebih bertujuan untuk menyiapkan kader bangsa yang siap untuk membangun bangsa dengan jiwa takwa terhadp Tuhan Yang Maha Esa, jujur, sukarela, dan senang mengabdikan menolong sesama.

C. Komdisi Pendidikan Zaman Pergerakan Kemerdekaan

Dengan bertambahnya pendidikan di Indonesia pada abad ke-20, timbullah golongan dalam masyarakat Indonesia yaitu golongan cerdas pandai. Golongan ini adalah golongan yang mendapatkan pendidikan dari Belanda, tetapi tidak diperlakukan sewajarnya dalam masyarakat kolonial. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan kesadaran nasional untuk bernegara. Kesadaran ini juga dipengaruhi oleh kejadian-kejadian penting di Asia seperti pergerakan bangsa India dan kemenangan Jepang atas Rusia. Kemudian seluruh Asia mulai bangkit untuk melawan kekuasaan asing dengan alat dan cara yang justru dipelajari dari bangsa Barat itu sendiri. Akhirnya pada abad



itu golongan cendekiawan Indonesia mulai mengenal organisasi.

Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908, Wahidin merintis Budi Oetomo bersama anak-anak kaum bangsawan yang belajar di STOVIA Jakarta. Tujuannya adalah untuk memajukan bangsa Indonesia dalam segala bidang kehidupan, terutama kebudayaan. Salah satunya adalah memperbanyak jumlah sekolah dan memberikan pendidikan untuk pribumi di kalangan yang lebih luas.

Akibat pergerakan ini maka timbullah kesadaran politik pribumi. Karena setelah tahun 1908 banyak bermunculan partai dan pergerakan baik yang berasaskan agama maupun nasionalisme dan sosial. Salah satunya adalah Muhammadiyah yang dipimpin oleh KH.A.Dahlan. lembaga ini paling giat membangun sekolah, rumah sakit serta rumah yatim piatu. Tahun 1925 Muhammadiyah telah mempunyai 29 cabang di seluruh Indonesia dengan lembaga pendidikan yang meliputi, 8 buah HIS dan satu Sekolah Guru (Kweekschool), 32 Sekolah Kelas Dua, dan 14 Sekolah Agama yang berjumlah kurang lebih 4000 orang dengan kurang lebih 119 orang guru.

Selain itu ada yang berlandaskan kebangsaan yaitu Indische Partij (IP) yang didirikan pada tanggal 6 September 1912, yang merumuskan semboyan "*Indie lost van Nederland*". Selanjutnya semboyan ini diambil alih oleh PNI pada tahun 1928 dan diterjemahkan menjadi Indonesia Merdeka. Tentu saja pemikiran pergerakan ini mengkhawatirkan pemerintahan kolonial, maka Indische Partij tidak diizinkan dan pemimpinnya (tiga serangkai) yaitu dr. Tjipto Mangunkusumo, Suwardi Surjaningrat (Ki. Hajar Dewantara) dan dr. Douwes Dekker (dr. Setiabudi) diasingkan ke luar Jawa.

Selamaasingkan di Negeri Belanda tokoh Indidche Partij Ki. Hajar Dewantara menyelesaikan pendidikan guru. Setelah kembali ke Indonesia ia mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk membangun pendidikan bangsa, maka didirikanlah lembaga pendidikan yang berasaskan Panca Dharma yaitu Kebangsaan, Kebudayaan, Kemanusiaan, Kemerdekaan dan Kodrat Alam. Lembaga itu adalah National Onderwijs Institut Taman Siswa yang didirikan pada tahun 1922 dengan jenjang pendidikannya meliputi, Taman Indria (TK), Taman Muda (SD), dan Taman Dewasa (SMP), dan Taman Madya (SMA), dan Taman Guru hingga Perguruan Sarjana Wiyata. Hasil dari pergerakan ini, membuahkan semangat nasionalisme yang tinggi dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dari isi Sumpah Pemuda ini kelihatan bahwa pwesatuan bangsa Indonesia semakin kuat, karena merasa diikat oleh negara, bangsa dan bahasa yang satu yaitu Indonesia.

D. Kondisi Pendidikan Pada Zaman Orde Baru

Pada masa pemerintahan orde baru, presiden soeharto dan kabimetnya menganut pola *bottom up planning*, atau pola perencanaan dimensi tunggal yang bersifat makro. Tapi diharapkan pada saat penerapannya sampai disekolah sudah menjadi kebijakan mikro. Perencanaaan ini disebut berdimensi tunggal, karena perencanaan pendirian sekolah, pengangkatan guru, penyediaan buku,dsb. Didasarkan pada jumlah penduduk usia sekolah yang dilayani.

Sejak awal pemerintahan orde baru mengembangkan dua sistem pendidikan, yaitu sistem



pendidikan umum dan keagamaan. Dualisme sistem pendidikan ini bertujuan yaitu melahirkan dua dasar politik utama yaitu kekuatan nasionalisme dan keagamaan. Dalam dualisme pendidikan, pada jalur pendidikan umum dikenal jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Pada jalur pendidikan kejuruan seperti STM, SMEA atau SPG. Sedangkan pendidikan yang berdasarkan keagamaan (Islam) dikembangkan dalam bentuk Madrasah (MI, MTs, dan MA), untuk menyiapkan tenaga kependidikan diselenggarakan Pendidikan Guru Agama (PGA). Pada masa orde baru jalur pendidikan keagamaan kurang mendapatkan perhatian dibandingkan jalur umum dan jalur kejuruan, madrasah pada umumnya saat itu dikelola oleh masyarakat sendiri, contohnya seperti pesantren.

Pada tahun 1973, Presiden mengeluarkan Kepres Nomor 10 tahun 1973, mengenai pengadaan SD/SDLB serta pengangkatan guru SD Inpres. Hal ini didorong karena pemerintah mendapatkan keuntungan dari minyak bumi sehingga pengadaan sekolah-sekolah umum dari SD-SMA ditambah membutuhkan pengadaan guru ikut terkena dampaknya. Pada saat itu, profesi sebagai guru menjadi jabatan padat karya sehingga gaji dan kesejahteraannya pun relatif rendah. Pada saat itu pemerintah juga mengatasi permasalahan yang sebagian besar warga buta huruf sehingga pemerintah mengadakan jalur pendidikan luar sekolah yang dikenal dengan Program kelompok Belajar Paket A. Pada tahun 1984, presiden menggalakan program wajib belajar 6 tahun, hal ini diharapkan pada akhir tahun 80-an bangsa Indonesia sudah berpendidikan SD 6 tahun.

Pada tahun 1989, dikeluarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 2 tahun 1989, yang mengharuskan agar warga Indonesia paling tidak berpendidikan dasar 9 tahun. Pada tahun 1994, pemerintah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun. Menurut UUSPN pendidikan sembilan tahun meliputi

SD 6 tahun dan SMP 3 tahun. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia siap memasuki era perdagangan bebas. Semua warga negara paling tidak nantinya diharapkan setelah lulus dari SMP tidak lagi buta fungsional dalam membaca berbagai petunjuk informasi, dan dapat menggunakan informasi tersebut untuk bekerja dan belajar sepanjang hayat. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas mengajar guru. SPG yang semula meluluskan guru SD ditutup dan diharuskan guru tersebut melewati jenjang D-2 di IKIP atau FIKIP. Serta SGPLB ditutup dan LPTK yang ditunjuk menggantikannya adalah IKIP atau FIKIP untuk pengajaran SMA dan mengambil program S-1.

Dilain pihak peningkatan mutu SMU dan SMK juga dilakukan, yang nantinya pemerintah berharap agar lulusannya dapat siap bekerja dengan menguasai informasi dan teknologi juga trampil selkaligu adaptif. Kebijakan keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) pun digulirkan dan pada pelaksanaannya dikenal dengan Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Konsep sistem ganda di SMK didasarkan pada perumusan konsepsi yang jelas tentang pembangunan dan pertumbuhan industri.

Di bidang pendidikan tinggi, tahun 1992 di Indonesia terdapat 75 lembaga Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yang terdiri dari 2 akademi, 26 politeknik, 2 sekolah tinggi, 14 institut, dan 31 universitas. Selain itu terdapat 1027 perguruan tinggi swasta, yang terdiri dari 337 Akademi, 5 politeknik, 95 sekolah tinggi, 5 institut, dan 240 universitas.



Disamping pembahasan mengenai pendidikan bagi anak-anak biasa, pendidikan anak luar biasa juga menjadi perhatian pemerintah. UUPP No. 12 tahun 1952 sistem pendidikan yang dikembangkan yaitu sistem pendidikan segregasi, yang menyatakan bahwa pendidikannya berlangsung terpisah terhadap pendidikan umum. Dengan dikeluarkannya UUSPN No.2/1989 pemerintah mulai memperkenalkan sistem pendidikan integrasi bagi anak-anak luar biasa yang mampu untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak biasa lainnya. Untuk ini PLB harus mulai diarahkan ke dalam sistem integrasi sebagai antonim segregasi. Pada tanggal 20 Mei 1998 presiden Soeharto mengundurkan diri dan memberikan mandat kepada Habibie untuk melanjutkan kepemimpinannya dan dimulailah masa reformasi.

E. Kondisi Pendidikan Pada Masa Reformasi

1. Keadaan Pendidikan Pada Masa Reformasi

Dewasa ini pembangunan sumber daya manusia di Indonesia dirasakan berada di ambang yang mengkhawatirkan. Belakangan kita dipukul oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh UNDP mengatakan bahwa pembangunan manusia di Indonesia masih rendah (Peringkat 112 dari 175 negara yang di survey). Bukti lain bisa didapat dengan semakin membanjirnya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, justru hampir sebagian besar menjadi tenaga profesional yang tentu saja mereka mendapatkan upah yang jauh diatas rata-rata dibanding tenaga kerja profesional dari Negara kita. Kejadian sebaliknya menjadi kenyataan yang harus kita terima adalah saudara-saudara kita yang menjadi tenaga kerja di luar negeri justru menjadi tenaga kasar baik di sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga atau di sector lain sebagai buruh. Dan bukan tidak mungkin upah yang mereka terima pun jauh dibawah standard yang diterima oleh tenaga kerja yang berasal dari negara itu sendiri. Tragisnya kita malah terlalu bangga dengan mengirim tenaga-tenaga kasar ke luar negeri, bahkan mereka dihibur dengan penghargaan sebagai penyumbang devisa tertinggi bagi negara kita. Ironisnya lagi, mereka yang menjadi tenaga kerja diluar negeri masih saja menjadi bulan-bulanan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yang hanya memanfaatkan mereka untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Tak heran bahwa mereka banyak yang terjebak menjadi tenaga kerja ilegal, menjadi terpidana tanpa jaminan hukum yang kuat, atau terjebak kedalam pekerjaan yang sangat merendahkan martabat manusia seperti prostitusi dan sebagainya.

Paparan tersebut seharusnya bisa menjadi gambaran bagi kita untuk lebih memperbaiki pembangunan manusia di negara kita. Akan tetapi bila kita tengok kembali apa yang terjadi di negeri kita sendiri, sepertinya masalah tersebut tidak akan terselesaikan begitu saja, dan malah menimbulkan sebuah pesimisme besar menyangkut nasib generasi kita di masa yang akan datang. Baru-baru ini saja kita telah diributkan dengan isu mahal nya biaya pendidikan yang seharusnya menjadi tonggak bagi pembangunan manusia di negara kita. Mahalnya biaya pendidikan, menjadi pukulan yang sangat dahsyat yang melukai hati seluruh warga Negara ini yang peduli terhadap nasib bangsanya.

Suatu kewajaran memang, kalau ada pemikiran yang menyatakan bahwa pendidikan yang



bermutu memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mengingat rendahnya alokasi APBN yang rendah disektor pendidikan membuat para pengelola pendidikan memutar otak untuk mencari tambahan dana untuk menutupi kurang-kekurangan disana-sini. Belum lagi ditambah dengan angka korupsi yang tidak sedikit yang membuat dana pendidikan semakin tidak mencukupi. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan pun jadi terbengkalai dan semakin tidak ter pikirkan karena masalah-masalah tersebut. Gaji para pengajar yang sedemikian tidak memadai juga turut menjadi pemicu rendahnya mutu pendidikan kita. Jadi dari pemikiran tersebut muncul alasan kenapa biaya pendidikan menjadi meningkat.

Akan tetapi kenyataan bisa menjadi terbalik ketika mahal nya biaya pendidikan menimbulkan rasa ketidakadilan karena banyak pihak yang merasa dirugikan. Harus diakui bahwa sebagian masyarakat di negara kita adalah orang-orang yang tidak mampu. Belum lagi ditambah dengan badai krisis yang melanda kita 5 tahun belakangan ini, memperparah keadaan negara kita dengan semakin tingginya angka kemiskinan. Bukan mustahil dengan mahal nya biaya pendidikan, mereka yang tidak mampu akan kesulitan atau bahkan tidak bisa sama sekali membuka akses terhadap sektor pendidikan. Mereka inilah yang akhirnya menjadi korban. Dengan sulitnya akses ke sektor pendidikan membuat mereka menjadi terpinggirkan. Dan hal ini akan menjadi pemicu bagi rendahnya mutu sumber daya manusia negara kita. Mereka akan terjebak ke dalam data-data statistik yang mengukur dari angka pengangguran, kemiskinan, sampai kepada kriminalitas. Padahal mereka ini juga tercatat sebagai warga negara yang menurut amanat konstitusi, mereka juga berhak mendapatkan pendidikan serta penghidupan yang layak.

Jadi dari sini timbul suatu dilema, disatu sisi mutu pendidikan kita yang masih rendah yang membuat sumber daya manusia kita juga rendah, sedangkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, biaya yang dibutuhkan tidak sedikit, dan akibat banyak factor membuat biaya pendidikan harus naik, namun disisi lain muncul ketidakadilan yang mengakibatkan ada sebagian masyarakat yang harus tersingkir karena mereka tidak mampu menjangkau biaya pendidikan yang tinggi, dan ironisnya hal ini juga menyebabkan rendahnya mutu sumber daya manusia negara kita.

Lantas apa yang bisa menjadikan pemecahan bagi permasalahan yang kita hadapi ini. Terlebih lagi saat ini kita dipacu oleh persaingan global yang semakin ketat yang membutuhkan sumber daya manusia yang unggul demi mengejar ketertinggalan negara kita dari negara lain. Yang paling utama tentu saja adalah memperbaiki sektor pendidikan. Mengingat pendidikan adalah tonggak dasar bagi semua aspek yang mempengaruhi perkembangan sumber daya manusia kita. Dalam hal ini penting kiranya untuk membuka akses selebar-lebarnya terhadap sektor pendidikan bagi semua lapisan masyarakat terutama bagi mereka yang tidak mampu dengan harapan paling tidak akan membantu mereka untuk meningkatkan mutu sumber daya mereka sendiri untuk mampu bersaing dengan yang lainnya. Penyelenggaraan pendidikan dengan biaya murah bukan tidak mungkin menjadi sebuah solusi yang meski tidak sepenuhnya tepat tetapi akan sangat banyak membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan pendidikan mereka. Dengan pendidikan murah semua lapisan masyarakat



akan merasakan pendidikan tanpa ada yang tertinggal atau bahkan terpinggirkan.

Jepang sebagai ikon negara maju, mengadakan pendidikan dengan biaya yang terjangkau oleh warganya. Untuk tingkat dasar Jepang mengenakan biaya sekitar 3% dari total biaya keseluruhan. Pada tingkat lanjutan pertama dikenakan biaya 13%, sedangkan untuk tingkat lanjutan atas dikenakan biaya 26% dari total biaya. Selebihnya, sisa biaya pendidikan di tanggung oleh pemerintah dengan memberikan subsidi. Contoh lain lagi adalah Thailand yang mengadakan pendidikan gratis dari tingkat dasar sampai ke tingkat lanjutan atas, bahkan tanpa harus menggunakan sistem ujian untuk melanjutkan pendidikan dari jenjang satu ke yang lebih tinggi kecuali untuk masuk ke jenjang pendidikan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan gratis ini malah dijamin oleh Konstitusi Thailand tahun 1997 dan Undang-Undang Pendidikan Nasional Thailand tahun 1999, yang mengakibatkan semua warga negara Thailand berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas secara gratis selama 12 tahun. Belajar dari Perancis, negara ini memberikan kesempatan kepada setiap warganya untuk mendapatkan kesempatan belajar sampai ke tingkat menengah. Dalam La Loi Savary (Undang-Undang Pendidikan Tinggi Perancis) yang disahkan tahun 1984 malah menghapus ujian masuk ke jenjang pendidikan tinggi, karena ujian masuk tersebut membatasi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi hanya kepada satu kelompok saja.

2. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

KBK proses belajar mengajarnya menuntut guru dan peserta didik bersikap toleran, menjunjung tinggi prinsip kebersamaan dan kebhinekaan serta berpikiran terbuka. Dengan demikian guru dan peserta didik dapat bersama-sama belajar menggali kompetensinya masing-masing dengan optimal.

Dengan KBK guru dituntut untuk membuktikan keprofesionalannya, mereka dituntut untuk dapat menyusun dan membuat rencana pembelajaran yang berdasarkan kemampuan dasar apa yang dapat digali dan dikembangkan oleh peserta didik. Guru harus mampu mengejawantahkan potensi diri dan bakat peserta didik sehingga mampu mencari dan menemukan ilmu pengetahuannya sendiri. Tugas guru bukan mencurahkan dan menyuapi peserta didik dengan ilmu pengetahuan, tetapi mereka hanya sebagai motivator, mediator dan fasilitator pendidikan. Guru harus mampu menyusun suatu rencana pembelajaran yang tidak saja baik tetapi juga mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari, membangun, membentuk serta mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupannya.

Faktor utama untuk dapat melaksanakan KBK adalah bahwa guru harus mampu mengubah dirinya sendiri. KBK pada dasarnya adalah proses belajar mengajar yang berlangsung dalam rangka pengkonstruksian dan penyusunan pengetahuan oleh peserta didik dengan cara memberi makna dan merespon ilmu pengetahuan sebelumnya. Pengkonstruksian dan penyusunan pengetahuan berlangsung dan dilakukan dari/oleh dan untuk peserta didik. Dengan demikian di dalam penyusunan rencana pembelajaran guru harus mampu menyusunnya sehingga kelas berlangsung dalam suasana



fun, demokratis dan terbuka.

Pendekatan pembelajaran yang dapat dilakukan adalah pendekatan konstruktivisme, sains dan teknologi dan pendekatan inquiri. Dengan ketiga pola pendekatan tersebut peserta didik diberikan kesempatan untuk menemukan suatu konsep dengan menggunakan seluruh kompetensi yang dimiliki. Ketercapaian penggalan dan penemuan kompetensi, dilakukan oleh peserta didik itu sendiri sehingga mereka mampu menghayati dan mengamalkan untuk bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa ingin tahu, toleransi, berpikiran terbuka, kepercayaan diri, kasih sayang, kepedulian, kebersamaan, kekeluargaan dan persahabatan.

Pelaksanaan KBK menuntut guru harus lebih sabar, penuh perhatian dan pengertian, mempunyai daya kreatifitas yang tinggi dan dedikasi penuh. Perhatian dan pengertian dari guru kepada peserta didik akan menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik kepada gurunya. Dengan demikian timbulah persahabatan yang unik antara guru dengan peserta didik. Guru menjadi sahabat tempat bertanya, teman diskusi dan mencurahkan seluruh gagasan dan pengetahuan serta kompetensi peserta didik tanpa rasa takut atau canggung. Hubungan persahabatan yang berlangsung tetap dalam ikatan yang etis dan dinamis.

Interaksi seperti di atas dapat terwujud bila terjadi saling silang, pemberian perhatian antara peserta didik dan guru. Hal itu dapat tercapai bila guru mampu berkomunikasi dengan seimbang dan multi arah, dengan menggunakan bahasa yang akrab, bersahabat ramah serta luwes dan lugas. Guru harus mampu mengembangkan kemampuan kompetensi dirinya sendiri sebelum mampu membelajarkan peserta didik mencari, menggali dan menemukan kompetensinya. Diperlukan kemauan, kemampuan dan kesungguhan yang kuat dari guru

KBK adalah kurikulum ideal yang tidak saja akan berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita, tetapi juga menuntut para guru untuk mempersiapkan seluruh potensi dirinya. Kesehatan dan tercapainya kesejahteraan dalam arti sesungguhnya untuk para guru harus diperhatikan dengan nyata, bukan hanya retorika. Bagaimana guru dapat mengajar dengan enerjik di dalam kelas, sementara tubuhnya lemah karena makanan yang seadanya? Untuk mencapai tujuan dilaksanakannya KBK tidak saja menuntut para guru tetapi juga diperlukan keseriusan pemerintah untuk memberikan pendapatan dan kesejahteraan yang memadai untuk para guru. Bukan masanya lagi guru diberi gelar Pahlawan Tanpa Tanda Jasa tapi harus diberi penghargaan yang pantas dan manusiawi.

Profesionalitas guru tidak saja dilihat dari kemampuan guru dalam mengembangkan dan memberikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik. Profesionalitas guru juga harus dilihat oleh pemerintah dengan cara memberikan gaji yang pantas serta berkeadilan. Bila kebutuhan dan kesejahteraan para guru telah diberikan oleh pemerintah, maka tidak akan ada lagi guru yang membolos karena harus banting tulang.



BAB 7

MASALAH-MASALAH PENDIDIKAN DI INDONESIA

A. Masalah Pemerataan Pendidikan

Menurut Rahmat dalam Iswadi et al. (2022) pemerataan pendidikan merupakan sistem pendidikan yang bisa menyediakan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat supaya mendapatkan pendidikan, sehingga pendidikan sebagai alat utama untuk mengembangkan energi manusia serta mendukung pengembangan pendidikan di Indonesia. Pemerataan pendidikan telah mendapatkan apresiasi paling utama di negara yang maju. Perihal ini tidak akan terlepas dari tumbuhnya pemahaman yang berisi pendidikan, pendidikan ialah kedudukan yang sangat berguna dalam mengembangkan bangsa Indonesia.

Permasalahan pemerataan pada pendidikan selalu terkait pada sistem pendidikan dan pendidikan yang selayaknya mempersiapkan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua warga, sehingga warga bisa akses pada pendidikan di mana daerah tersebut tidak dapat menjadi tempat melanjutkan untuk meningkatkan sumber daya manusia di negara kita.

Menurut Wayan dalam Iswadi et al. (2022), pemerataan pendidikan yang selalu berhubungan dengan kualitas proses dan kualitas hasil pendidikan, dan ini masih belum menyeluruh di negara Indonesia. Tidak sedikit ditemukan generasi yang cukup besar dalam pelaksanaan pendidikan yang ada di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, lebih tepatnya bila dibedakan wilayah Jawa dengan wilayah Timur di Indonesia. Bila mana diamati lebih teliti dalam masa waktu sepuluh tahun terakhir, dapat dirasakan bahwa pendidikan masih tidak berhasil dapat menaikkan kualitas hasil belajar secara totalitas.

Dalam Buku yang berjudul *Equality of educational opportunity* oleh Coleman dkk (1986) bahwa harus ada kesetaraan kesempatan dalam pendidikan di pendidikan dasar dan menengah di seluruh Amerika Serikat. Dimana setiap orang memiliki akses yang adil dan setara terhadap pendidikan yang berkualitas baik tanpa memandang latar belakang sosial, ras, jenis kelamin atau agama, dan di mana orang mencapai kesuksesan dalam pendidikan sesuai dengan upaya dan kemampuannya, bebas segala bentuk diskriminasi. Dalam kasus di mana ras antara murid dan guru, ditemukan tren bahwa guru kulit putih mengajar anak-anak negro tetapi guru negro jarang mengajar anak-anak kulit putih.

Sehingga pemerataan menurut konsep Coleman terdapat pemerataan aktif dan pasif. Dimana pemerataan pasif lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaandalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya.

Konsep pemerataan aktif yang dikemukakan Coleman seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah membuat kebijakan ataupun mensinkronisasi kebijakan sebagai upaya mengoptimalkan



salah satu kinerja pemerintah mengatasi rendahnya rata-rata pendidikan peserta Indonesia yang saat ini kondisinya masih terjadi ketimpangan yang sangat jauh di antar propinsi (Muqsith, 2020).

Permasalahan pemerataan pendidikan muncul bilamana masih ada masyarakat Indonesia khususnya anak yang umurnya belum bisa memasuki Lembaga pendidikan yang ada. Bahkan sekarang keadaan pendidikan di Indonesia masih tidak menyeluruh. Contohnya di daerah perkotaan fasilitas pendidikan telah berkembang. Sebaliknya, di daerah desa, hanya bisa memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada. Tidak Cuma wargadi daerah desa yang tertinggal pendidikan yang kurang, tetapi pula minimnya para guru, sehingga memerlukan guru dari daerah lain. Meski terdapat masyarakat yang tinggal di kota besar tetapi masyarakat yang tinggal di kota besar masih banyak yang kekurangan dalam hal finansial, sehingga masyarakat tersebut juga tidak dapat merasakan pendidikan. Bahkan anak dibawah umur sekarang sudah banyak yang bekerja demi membantu kedua orang tuanya untuk dapat bertahan hidup (Rahmat dalam Iswadi et al., 2022).

1. Pemerataan pendidikan formal

a) Pendidikan prasekolah dan SD

Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk anak yang belum cukup umur untuk menduduki pendidikan dasar taupun pendidikan anak umur dini, contohnya PAUD dan TK (Taman Kanak-kanak). Ketersediaan dalam pendidikan prasekolah banyak ditemui di wilayah kota. Sebaliknya, pendidikan prasekolah tidak sering ditemui di wilayah pedesaan (Rahmat dalam Iswadi et al., 2022). Pendidikan SD (Sekolah Dasar) mulai bisa dialami pemerataannya di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan atau terpencil. Akan tetapi yang jadi persoalan adalah kualitas pendidikan dasar yang secara tidak menyeluruh. Contohnya dari perspektif sarana dan prasarana yang ada di sekolah, perlengkapan serta hasil pendidikan, sampai mutu energi pendidikan tidak sama antara pendidikan di wilayah pedesaan dengan wilayah di kota serta pusat pemerintahan. Persoalan tersebut bisa menimbulkan perbandingan mutu dari sumber daya manusia yang dihasilkan dari lulusan sekolah tersebut.

b) Pendidikan sekolah menengah

Dalam pendidikan sekolah menengah bisa juga dirasakan pemerataannya di berbagai daerah di Indonesia. Akan tetapi permasalahan pembangunan peluang pendidikan juga masih bisa dirasakan. Anak-anak yang umurnya sudah mencapai di usia sekolah menengah tetapi ia tidak meneruskan pendidikannya ke pendidikan menengah dari pendidikan dasar, dengan alasan mereka tidak mempunyai biaya untuk sekolah. Tidak hanya itu saja, sarana dan prasarana yang ada itu berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Perbandingan itu bisa kita rasakan di antara pendidikan sekolah menengah yang terdapat di daerah kota dengan wilayah pedesaan. Aspek lainnya yang mempengaruhi minimnya pemerataan peluang pendidikan di jenjang pendidikan sekolah menengah adalah minimnya pemahaman tentang pendidikan di wilayah



pedesaan, sehingga akses pendidikan sangat sulit dilampaui dan tidak bisa diseminasi bahwa sangat pentingnya pendidikan (Rahmat dalam Iswadi et al., 2022).

c) Pendidikan sekolah tinggi

Permasalahan pemerataan peluang pendidikan pada tahapan pendidikan di perguruan tinggi diakibatkan dari sekian banyak aspek. Seperti halnya biaya yang dibutuhkan untuk meneruskan pendidikan perguruan tinggi tersebut. Tidakhanya itu saja, aspek lainnya yaitu masyarakat Indonesia yang tidak pernah menyangka akan pentingnya pendidikan di perguruan tinggi, dan akhirnya masyarakat merasa sudah cukup puas dengan lulusan sekolah dasar ataupun sekolah menengah. Alhasil mutu pada universitas yang tidak menyeluruh di Sebagian wilayah di negara Indonesia. Seperti mutu pendidikan di perguruan tinggi yang terdapat di wilayah pelosok ataupun wilayah pedesaan dengan pendidikan di perguruan tinggi yang terdapat di bagian pusat pemerintah atau kota. Perihal itu bisa sangat berpengaruh pada mutu lulusan ataupun sumber daya manusia yang dapat dihasilkan (Rahmat dalam Iswadi et al., 2022).

2. Pemerataan pendidikan nonformal

Saat ini mengalami hambatan dimana kita harus memiliki peningkatan dalam akses serta pemerataan pendidikan di jalan formal, mengembangkan pendidikan pula mengalami perkara dalam kenaikan akses serta pemerataan pendidikan nonformal. Menurut jalan pendidikan nonformal pula mengalami dimana perkara bermakna dengan perihal ekspansi serta pemerataan dalam akses pendidikan untuk tiap masyarakat Indonesia. Pemahaman warga khususnya yang sudah cukup umur untuk meneruskan untuk tingkatkan wawasan serta keterampilan yang masih sangat minim. Terlebih lagi pendidikan nonformal biasanya memerlukan bayaran yang cukup tinggi sehingga tidak bisa menjangkau pada masyarakat menengah ke bawah (Rahmat dalam Iswadi et al., 2022)

Faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya pemerataan pendidikan sebagai berikut :

- a) Pendirian suatu Lembaga pendidikan yang masih mengarah pada daerah perkotaan, dan minim di daerah pedesaan. Hal ini berdampak pada kurang adanya pemerataan peluang pendidikan.
- b) Terdapat pendirian atau pengelolaan pendidikan prasekolah yang tidak memenuhi kriteria minimum, baik pada sisi sarana dan prasarana, kualitas, serta pengalaman pembimbing.
- c) Keadaan sosial ekonomi warga di daerah dan wilayah pedesaan yang mayoritas masyarakatnya tidak mampu, sehingga tidak bisa menunjang kegiatan anak-anak atau peserta didik dalam bermain sambil belajar.
- d) Minimnya sarana dan prasarana.
- e) Minimnya pemahaman pendidikan bagi masyarakat negara.
- f) Minimnya mutu energi pendidikan serta pendidikan.
- g) Penerusan pendidikan yang lambat sebab minimnya teknologi di wilayah tersebut.



Berbagai cara telah dilakukan untuk meningkatkan mutu serta pemerataan pendidikan, seperti peningkatan kuantitas anak-anak yang turut merasakan pendidikan dan penerusan tentang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi daritingkatan sekolah dasar sampai sekolah menengah. Apabila sudah cukup umur, pemerintah sudah melaksanakan upaya untuk meningkatkan pendidikan masyarakatnya. Hal itu dapat dilihat sejak tahun 1984, Indonesia sudah berusaha untuk meratakan pendidikan resmi sekolah dasar, setelah itu dilanjutkan dengan program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Tahun 1994, dan saat ini telah berkembang menjadi Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Rahmat dalam Iswadi et al., 2022).

Tidak hanya itu saja, pemerintah terus memberi dorongan berbentuk dana siswa, semacam Gerakan Orang Tua Asuh ataupun Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Di dalam Proopenas 1999, memuat program yang baik untuk pendidikan dasar serta prasekolah, pendidikan menengah, pendidikan perguruan tinggi, serta pendidikan luar sekolah. Di antara program yang tercantum adalah pendidikan dasar serta prasekolah, pendidikan menengah yang penuntasan wajib belajar selama dua belas tahun, serta rencana pengatan PLS (Pendidikan Luar Sekolah) yang memiliki tujuan untuk menyediakan bantuan bagi masyarakat yang belum ataupun tidak pernah mendapatkan pendidikan resmi untuk meningkatkan diri, perilaku pengetahuan, keahlian, serta potensi untuk meningkatkan upaya yang bermanfaat dalam meningkatkan kemajuan dalam kehidupan (Rahmat dalam Iswadi et al., 2022).

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilakukan upaya meningkatkan sosialisaserta jangkauan pelayanan pendidikan dan mutu serta kuantitas masyarakat belajar paket B yang setara dengan SMP, serta paket C yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk menunjang program wajib belajar dua belas tahun, serta meningkatkan bermacam tipe pendidikan luar sekolah yang berorientasi pada keadaan serta kemampuan area yang menggunakan fasilitas serta lembaga yang ada (Rahmat dalam Iswadi et al., 2022).

Saat ini juga terdapat cara pemerataan pendidikan yaitu dengan mempraktikkan kepada warga yang belum mampu (warga yang tidak mampu, perpindahan warga yang menjadi warga negara asing, golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil, di wilayah yang terdapat konflik, serta anak-anak jalanan), seperti meletakkan satu pembimbing yang akan berkunjung kemudian memberikan bimbingan, pelayanan, serta pendidikan bagi anak yang putus sekolah (SD Pamong) serta Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah (Jenjang Pendidikan formal yang paling dasar di Indonesia), serta Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah terbuka. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar serta prasekolah, dicoba dengan metode meningkatkan mutu pendidikan dasar serta prasekolah, meningkatkan penyediaan, pemakaian, perawatan fasilitas serta prasarana pendidikan berbentuk buku pelajaran pokok, buku teks, dan perlengkapan peraga istimewa Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu pengetahuan Alam serta matematika, bibliotek, laboratorium, dan bagian lainnya yang dibutuhkan (Rahmat dalam Iswadi et al., 2022).



Pada tahapan akademik di perguruan tinggi terdapat program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan bidikmisi, yang menjadi tahapan darma siswadari pemerintah untuk pelajar yang lulus Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan yang berprestasi namun kurang mampu sehingga dapat meneruskan pendidikannya ke sekolah tinggi. Hal itu telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya serta menciptakan SDM yang bermutu. Tidak hanya prestasi, pelajar yang mempunyai kesempatan untuk memperoleh darma siswa bidik misi serta LPDP diharapkan dapat bekerja sama ataupun membantu pembangunan bangsa serta negara Indonesia.

Pemerataan pendidikan dilakukan dengan mengusahakan agar seluruh warga dapat meningkatkan pendidikan tanpa menengal umur serta waktu. Oleh karena itu, dilakukan penguatan untuk seluruh tingkatan pendidikan mulai dari pendidikan yang teratur maupun terbuka seperti Sekolah Dasar di daerah terpencil, pembimbing yang berkunjung, Sekolah Dasar yang memberikan pelayanan pendidikan bagi anak yang putus sekolah, Sekolah Menengah Pertama terbuka, pendidikan penyesuaian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama serta Sekolah Menengah Atas atau disebut juga program Paket A, B, C, serta pendidikan di perguruan tinggi terbuka yang biasa diketahui sebagai pendidikan tidak langsung. Cara tersebut menegaskan bahwa pemerintah berusaha untuk melaksanakan pemerataan pada pendidikan, dan dilengkapi dengan adanya pendidikan wajib selama dua belas tahun (Rahmat dalam Iswadi et al., 2022).

Pemerintahan sudah melaksanakan bermacam hal untuk mengatasi ketidakmerataan pendidikan, yaitu dengan metode belajar wajib melakukan pendidikan selama dua belas tahun, pemerintah memberikan beasiswa untuk warga yang kurang mampu, sampai membagikan bantuan dana operasional atau biasa disebut dana BOS. Namun kenyataannya, bantuan tersebut belum tersalurkan secara menyeluruh, bahkan tidak sedikit warga tidak mampu yang tidak memperoleh bantuan, dimana seharusnya segala rakyat mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang memadai.

Tidak hanya program itu saja, tetapi masih terdapat nya program pemerintah seperti cara untuk menanggulangi kasus kesetaraan peluang pendidikan di Indonesia semacam program pengabdian sarjana pendidikan. Program tersebut merupakan suatu program untuk menempatkan para guru ke wilayah pedesaan untuk pembangunan pendidikan di wilayah tersebut. Ada pula program Kartu Indonesia Pintar serta Surat Keterangan Tidak Mampu bagi pelajar yang kurang mampu agar meneruskan pendidikan. Terdapat pula program pendidikan jarak jauh bagi pelajar yang terkendala jarak, akhirnya bisa mengikuti jalan pendidikan yang diberikan. Program pendidikan profesi guru yang digunakan buat kelulusan Sarjana Pendidikan yang dimana lulusan tersebut mau jadi pembimbing yang andal untuk tingkatan mutu energi pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia (Rahmat dalam Iswadi et al., 2022).

Beberapa penelitian telah dilakukan dalam mengkaji tentang pemerataan pendidikan di Indonesia. Safarah & Wibowo (2018) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui upaya pemerataan kualitas pendidikan melalui program zonasi sekolah dasar. Penelitian ini merupakan studi literatur yang membahas program zonasi sekolah sebagai upaya pemerataan pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan memiliki dua elemen kunci yakni membekali individu dengan pengetahuan yang memungkinkan mereka mengambil bagian dalam segala aspek kehidupan serta memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada setiap individu. Salah satu upaya dalam pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu program zonasi sekolah. Hasil studi menunjukkan bahwa program zonasi sekolah menjadi salah satu program yang efektif dari pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Nanggala (2020) melakukan Analisis wacana pembaharuan kebijakan zonasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebagai solusi pemerataan pendidikan di Indonesia. Pemerataan pendidikan merupakan upaya memperbaiki mutu pendidikan, guna mewujudkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berkompeten, berakhlak, dan unggul. Solusi alternatif dalam mengatasi ketidakmerataan pendidikan di Indonesia adalah penerapan sistem zonasi, sebagai kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan radius zona antara sekolah dengan tempat siswa terkait berdomisili. Hambatan dalam pelaksanaan sistem zonasi di Indonesia, adalah, sarana dan prasarana yang tidak merata, ketidakjelasan informasi, masih terdapatnya oknum yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta adanya ketidaksesuaian antara jumlah penduduk dengan keberadaan sekolah di daerah tertentu. Nadiem Makarim mengeluarkan pembaharuan untuk sistem zonasi, yaitu menambah kuota jalur prestasi menjadi 30%, mengurangi kuota jalur zonasi minimal 70%. Sebagai upaya memotivasi peserta didik agar lebih berprestasi.

Selain itu Rohaeni & Saryono (2018) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya pemerataan pendidikan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Implementasi Kebijakan PIP melalui KIP dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tim/panitia sebagai pengelola dana KIP yang sudah bekerja berdasarkan tugas masing-masing. Hal lain ditandai dengan siswa yang menerima dana KIP memenuhi kriteria kondisi keluarga siswa yang ditentukan dari kepemilikan Kartu perlindungan Sosial (KPS) sehingga siswa yang tidak bersekolah atau pendidikannya terkendala masalah biaya dapat bersekolah sehingga dapat terwujud pendidikan yang merata. Faktor pendukung implementasi kebijakan PIP melalui KIP: Informasi dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya secara rutin ke sekolah dan secara online. Dapodik digunakan



pemerintah sebagai salah satu indikator penentu sasaran penerima PIP melalui KIP, Adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan siswa dan orang tua terhadap penggunaan dana, Siswa menjadi lebih aktif dan rajin ke sekolah karena kebutuhan sekolah terpenuhi. Faktor penghambat: evaluasi program PIP melalui KIP yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada mekanismenya, penggunaan dana KIP kurang tepat, kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana KIP.

B. Masalah Mutu Pendidikan

Kualitas pendidikan sangat luas liputannya, tidak sedikit yang cuma melihat pada mutu luaran. Ketika kita menyadari proses pendidikan yang baik, maka dapat menghasilkan hasil yang baik juga, jadi apabila proses pendidikannya tidak signifikan maka kualitas hasil yang kita harapkan juga akan kurang signifikan pula. Jika terjadinya pendidikan yang kurang ideal, maka hal tersebut mempengaruhi hasil tes yang bagus, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil pendidikan itu nyata. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya permasalahan pada mutu pendidikan yang terkait dengan “pengolahan” belajar (Riza dalam Iswadi et al., 2022).

Proses belajar dengan baik jika didukung pada suatu bagian pendidikan termasuk sumber daya pendidikan, siswa, fasilitas pendidikan, silabus serta kawasan sekitar yang memadai. Misalnya, jika bagian-bagian yang berada di sekolah itu lengkap, sedangkan sumber daya manusia yang tidak terampil, hal tersebut berkaitan dalam suatu proses pendidikan yang kurang maksimal dalam rangka meningkatkan mutu serta hasil Pendidikan. Permasalahan kualitas pendidikan sangat erat kaitannya dengan ketersediaannya akses di semua tingkat pendidikan, dimana situasi di negara kita masih tidak merata, khususnya di wilayah desa dimana masih sangat minim jika dibandingkan pada perkotaan.

Untuk menanggulangi permasalahan kualitas pendidikan itu butuh terdapatnya atensi pemerintah mengupayakan anak-anak yang berada di wilayah pedesaan turut mengenyam pendidikan. Cara yang bisa dilakukan oleh pemerintahan antara lain dengan membangun pendidikan bebas biaya. Akan tetapi, di wilayah pedesaan yang tidak banyak hasil dari pendidikannya, dan pastinya pendidikan yang dibentuk pula dilengkapi fasilitas yang serba ada buat mendukung metode pendidikan. Sebaiknya tiap satu daerah mempunyai minimal satu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta sekolah menengah atas, dan satu perguruan tinggi (Rahmat dalam Iswadi et al., 2022).

Kualitas pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai hasil yang diharapkan. Penetapan kualitas hasil pendidikan awal dilakukan oleh suatu organisasi yang mencari hasil kualitas pendidikan dengan bentuk sertifikat. Selanjutnya, saat telah memasuki dunia kerja, evaluasi dilakukan oleh instansi terkait dalam bentuk *performance test*. Sehingga kualitas pendidikan dapat terlihat pada mutu luarannya.

Jika maksud dari pendidikan nasional dijadikan sebagai tolak ukur, hingga pertanyaannya merupakan, “apakah keluaran dari suatu sistem pendidikan menjadikan kepribadian yang bertakwa, mandiri setara berkreasi, sebagai bagaian warga yang bersosial serta tanggung jawab, warga Negara



yang sayang dengan tanah air sertamempunyai rasa kesetiakawanan sosial?” Walaupun disadari jika dari hakikatnya penerapan dengan identitas semacam ini tidak semata-mata hasil dari suatu lembaga pendidikan itu sendiri. Namun apabila tahap penereapan semacam itu, bentuk pendidikan dianggap mempunyai andil (usaha) yang pas, yang senantiasa jadi perkara yakni jika metode pengukuran kualitas penerapan tersebut tidaklah gampang. Berhubung sulitnya untuk mengukur terhadap penerapan tersebut sehingga seseorang berdialog yang berkaitandengan kualitas pendidikan, biasanya cuma menginterpretasikan dari suatu hasil pendidikan yang diketahui sebagai hasil mata pelajaran pokok dan tidak pokok, ataupunhasil prestasi akademik. Bila tahapan pendidikan tidak maksimal, maka akan sulit untukmengharapkan terbentuknya hasil pendidikan yang berkualitas. Apabila terjalinpendidikan yang tidak maksimal, maka menciptakan nilai hasil tes yang tidak seperti yangdiharapkan, yang baik, hingga nyaris bisa ditentukan kalau hasil pendidikan yang terdapatdalam permasalahan proses pendidikan.

Sasaran kualitas pendidikan merupakan revisi mutu pendidikan terutama bagian dari masukan untuk meningkatkan pendidikan sekolah menengah serta perguruan tinggi,serta bagian masukan yang fungsional dan bagian pergerakan tersebut. Terdapat dua aspek yang memepengaruhi mutu pendidikan di Indonesia yaitu:

1. Aspek internal, meliputi lembaga pendidikan seperti kementrian pendidikan, dinas pendidikan wilayah serta sekolah
2. Aspek eksternal, yaitu warga selaku objek dari pendidikan.

Sebagian permasalahan yang menimbulkan rendahnya mutu pendidikan, yaitu:

- a. Rendahnya mutu fasislitas pendidikan
- b. Minimnya pengajar yang kurang kompeten
- c. Minimnya kesejahteraan bagi pengajar
- d. Minimnya keberhasilan bagi pelajar
- e. Minimnya pemerataan peluang pendidikan
- f. Mahalnya biaya pendidikan

Cara-cara memecahkan suatu masalah mutu pendidikan secara ilustrasi yangmencakup pada hal-hal sumber daya manusia, dan proses perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemilihan informasi dilakukan dengan cara objektif, terutama untuk meningkatkansistem pendidikan sekolah menengah atas serta universitas
- b. Mutu pendidikan ditingkatkan melalui pendidikan lebih lanjut, berupa training, bimbingan dan lainnya. Modul yang tertulis di dalam silabus perlu disempurnakan, dengan menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing sehingga dapat memberikan semangat kepadapeserta didik.
- c. Melakukan peningkatan fasilitas pendidikan
- d. Fasilitas pendidikan perlu disempurnakan dengan penambahan sumber pendidikanberupa



- buku dan laboratorium
- e. Diperlukannya kenaikan sumber daya manajemen pendidikan yang menjadikan penopang pada pendidikan
- f. Perlunya pengolahan kualitas yang mencakup
 - Informasi pengolahan pendidikan
 - Pengontrol serta penilaian pada tahap pendidikan
 - Penelitian yang sangat erat pada saat melakukan pemilihan kepada calon mahasiswa
 - Penilaian dari suatu kelembagaan

Dari informasi tersebut bahwa permasalahan pendidikan berkaitan dengan mutu pembimbing yang minim, fasilitas pendidikan yang tidak mencukupi, serta tidak meratanya kualitas hasil kelulusan masing-masing pada tingkatan pendidikan. Guru pastinya memiliki keinginan yang tersendiri yang tidak dapat disampaikan kepada siswa. Tidak sedikit manusia yang menjadi guru karena tidak diterima di prodi lainnya ataupun tidak memiliki biaya. Tetapi berbeda dengan zaman dulu, dimana guru menjadi cita-cita mereka. Tidak hanya mempunyai kemahiran dalam melakukan pendidikan kepada siswa saja, tetapi guru mempunyai sejarah yang berarti berkaitan dengan pendidikan yang guru berikan. Fasilitas pendidikan pula ikut menjadi aspek penyebab terpuruknya sistem pendidikan, terutama bagi penduduk di wilayah terbelakang (Rahmat dalam Iswadi et al., 2022).

Beberapa penelitian yang mengkaji bagaimana mutu pendidikan di Indonesia diantaranya Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin (2017) yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa rendahnya kualitas Pendidikan di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

1. Rendahnya Sarana dan Prasarana dari segi sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia yang bisa dikatakan kondisinya masih jauh dari kata mencukupi, hal ini dapat kita amati sekolah yang terdapat di desa-desa yang letaknya jauh dari pusat kota. Misalnya saja masih adanya gedung sekolah yang rusak ataupun tak layak pakai, kepemilikan dan penggunaan media belajar masih minim sekali, perpustakaan yang tidak memadai sehingga sumber buku pembelajaran tidak lengkap, laboratorium tidak memiliki standard operasional, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan lain sebagainya. Bahkan masih ada saja sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, lalu sekolah yang tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan lain sebagainya.

Hal-hal yang demikian tentu akan sangat mempengaruhi secara langsung kualitas pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, sangat penting bagi bangsa Indonesia khususnya pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana agar pembelajaran bisa berjalan dengan sangat baik sehingga meningkatnya kualitas pendidikan di Negara yang kita cintai ini.



2. Rendahnya Kualitas Guru Keadaan guru di Indonesia bisa dikatakan cukup memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana yang disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Dalam realita yang terjadi saat ini masih banyak guru yang tidak optimal dalam menjalankan tugasnya, seperti: terlambat ketika masuk ke kelas, lebih banyak bercerita dibanding menjelaskan pelajaran, kurang memahami konsep materi yang akan diajarkan, kurang memahami karakter siswa bahkan ada yang masuk ke dalam kelas hanya untuk memberikan tugas lalu pergi meninggalkan kelas begitu saja. Walaupun guru bukan satu-satunya faktor penentu dalam keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar. Namun kualitas guru yang rendah ini juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesejahteraan guru yang ada di Indonesia.
3. Rendahnya kualitas siswa seperti yang sudah diketahui bahwa rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta rendahnya kualitas guru di Indonesia, maka hal tersebut juga berimbas pada pencapaian prestasi siswa sehingga pencapaiannya menjadi tidak maksimal. Gambaran prestasi belajar siswa sebagaimana dalam hasil penilaian yang dilakukan oleh International Association for the Evaluation of Educational Achievement Study Center Boston College, yang diikuti oleh 500.000 siswa dari 63 negara terhadap Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS); Indonesia diwakili oleh siswa kelas VIII tahun 2011. Dari hasil penilaian tersebut mengungkapkan bahwa Indonesia dalam bidang Matematika berada di urutan ke-38 dengan skor 386 dari 42 negara yang siswanya di tes (skor Indonesia turun 11 angka dari penilaian tahun 2007). Peringkat pertama diraih oleh siswa Korea (613), selanjutnya diikuti Singapura (500). Dalam bidang sains, Indonesia berada di urutan ke-40 dengan skor 406 dari 42 negara (skor Indonesia turun 21 angka dari penilaian tahun 2007). Rendahnya prestasi siswa di Indonesia salah satunya juga disebabkan oleh rendahnya minat baca dari siswa itu sendiri. Sehingga prestasi yang harus diperoleh oleh siswa menjadi rendah. Jadi sebagai seorang pendidik dan selaku masyarakat kita harus menanamkan sifat budaya membaca kepada anak sejak dini.

Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin (2017) juga menguraikan bahwa untuk mengatasi masalah-masalah, seperti rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, dan lain-lain seperti yang telah dijelaskan diatas, secara garis besar ada dua solusi yaitu:

1. Solusi Sistemik

Solusi sistemik merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan rendahnya pendidikan di Indonesia dimana caranya yaitu dengan mengubah sistem-sistem sosial yang



berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme (mazhab neoliberalisme), yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan.

2. Solusi Teknis

Solusi teknis merupakan solusi lain selain solusi sistemik dimana solusi ini menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Contohnya pada kasus rendahnya kualitas guru, yaitu dengan diberi solusi peningkatan kesejahteraan, lalu memberikan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan jenjang pendidikannya dengan memberikan bantuan biaya untuk melanjutkan pendidikannya, serta memberikan berbagai pelatihan dalam upaya untuk meningkatkan profesionalnya sebagai seorang pendidik. Lalu pada kasus rendahnya prestasi siswa, yaitu diberi solusi dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peragadan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya.

Jika adanya kedua solusi tersebut, maka diharapkan tingkat pendidikan di Indonesia semakin meningkat. Sehingga bangsa Indonesia dapat menciptakan generasi-generasi baru yang unggul, cerdas, kreatif, serta berkepribadian pancasila dan bermartabat.

Selain itu penelitian Rahmawati (2021) menguraikan bahwa Pada tahun 1968 Indonesia mengirim guru ke Malaysia untuk memperbaiki pendidikan dalam negeri (Malaysia), dalam hal ini sudah pasti pendidikan di Indonesia lebih maju daripada pendidikan di Malaysia. Namun pada kenyataannya, Malaysia jauh lebih maju. Diketahui bersama bahwasanya pendidikan di Indonesia masih rendah khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Hal ini tentu tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan serta menimbulkan ketimpangan pendidikan. Permasalahan pendidikan di daerah 3T sangat kompleks, salah satunya adalah permasalahan pendidik atau guru. Seperti, kurangnya jumlah pengajar, minimnya kompetensi, kualifikasi yang berada di bawah standar mutu, serta distribusi yang tidak merata.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2021) perkembangan dan kemajuan suatu negara ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia bangsa tersebut. Dengan adanya pendidikan diharapkan dapat memperbaiki kualitas dari sumber daya manusia tersebut agar dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Indonesia yang pada dasarnya adalah negara berkembang, tentu bisa saja menjadi negara yang maju apabila pendidikannya sudah berjalan dengan baik dan semestinya. Namun, pada kenyataannya pendidikan di Indonesia mengalami kemerosotan sehingga kualitas pendidikan di Indonesia berada di tingkat terendah tertinggal dengan negara-negara lainnya. Jika kita kupas secara keseluruhan, banyak yang menjadi penyebab atas rendahnya kualitas



pendidikan di Indonesia. Dari beberapa masalah diatas, pastinya ada sebuah faktor penyebab terjadinya masalah-masalah tersebut. Ada tiga faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Pendekatan Pembelajaran

Semua problematika pendidikan yang muncul dalam masyarakat Indonesia bermuladari adanya kegagalan sistem pendidikan. Baik itu dari kegagalan pendidikan di lingkungan keluarga, kegagalan pendidikan di lingkungan masyarakat, sampai kegagalan pendidikan di sekolah. Semua aspek di atas jika kurang optimal dalam melakukan pendidikan terhadap anak, maka anaklah yang akan menjadi korbannya. Akan ada beberapa hal atau sikap yang tidak sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu.

2. Faktor Perubahan Kurikulum Di Indonesia

Setiap pergantian kabinet pemerintahan khususnya menteri pendidikan, maka kurikulum yang ditetapkan pun ikut berubah. Hal ini yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Semakin sering berganti kurikulum tidak menjamin kualitas pendidikannya. Yang terjadi adalah tidak adanya ketetapan pasti dalam dasar sebuah pendidikan. Kurikulum yang merupakan pijakan guru dalam mengajar, akan menjadi kurang optimal apabila terus menerus diganti.

3. Faktor Kompetensi Guru

Dalam sebuah pendidikan yang maju, dibutuhkan seorang guru yang profesional. Maksudnya setiap guru diharuskan memiliki kemampuan dalam memahami materi bahan ajar secara luas dan mendalam. Salah satu kendalanya adalah di daerah-daerah terpencil yang dimana kekurangan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

Rendahnya kualitas sistem pendidikan di Indonesia menyebabkan Indonesia tertinggal oleh negara-negara lainnya. Bukan hanya permasalahan dari sistem pendidikan yang belum tepat, tetapi ada juga permasalahan-permasalahan pokok lainnya. Yang sebenarnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Yang diperlukan hanya kerja sama antar pihak baik itu pemerintah, tenaga pendidik, peserta didik, orang tua, dan juga masyarakat. Jika salah satu komponen tersebut tidak dapat bekerja sama dengan baik, maka tujuan dari pendidikan yang bermutu tidaklah membuahkan hasil yang baik. Kualitas pendidikan Indonesia akan terus menurun. Dari beberapa faktor di atas, terdapat solusi yang dapat memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah menciptakan arah baru pembelajaran di Indonesia. Maksudnya, seorang guru harusnya tidak hanya mengutamakan materi yang disampaikan pada murid, namun guru juga harus memperhatikan perkembangan peserta didiknya. Guru harus dapat menyeimbangkan perkembangan intelektual dan psikologi peserta didik. Lalu solusi selanjutnya yaitu, memperbaiki kualitas dari tenaga pengajar yang ada. Tenaga pengajar harusnya menguasai beberapa kompetensi, seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Lalu yang paling penting



adalah menentukan kurikulum yang tetap dan tepat untuk dijadikan sebagai landasan bahan pengajaran kepada peserta didik.

Oktavia (2015) Pendidikan berperan sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Melalui pendidikan dapat diciptakan generasi yang unggul dan kompetitif yang berkualitas dalam menghadapi tantangan yang terjadi di masa yang akan datang. Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan di Indonesia tentunya dipengaruhi beberapa faktor penghambat. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah faktor pengaruh lingkungan. Lingkungan sangat berperan penting dalam hal ini. Jika pada sebuah lingkungan tertentu banyak orang yang telah memperoleh pendidikan, maka dapat dipastikan lingkungan tersebut dapat lebih unggul dibandingkan lingkungan yang lainnya yang persentasinya orang yang memperoleh pendidikan lebih rendah. Oleh karena itu, sudah selangkahnya seluruh masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh pendidikan dengan layak. Namun pada kenyataannya, sangat disayangkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memperoleh pendidikan dengan berbagai alasan. Hal ini membuktikan masih lemahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Selain itu, satu persatu permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia bermunculan. Mulai dari masalah yang ringan hingga berat. Selangkahnya pemerintah mampu memberikan perhatian lebih terhadap masalah pendidikan tersebut. Demi masa depan bangsa dan negara Indonesia. Karena masa depan suatu bangsa ada ditangan anak muda pada masa sekarang. Kesuksesan sebuah negara dapat dilihat dari tingkat pendidikan di negara itu sendiri.

C. Masalah Efisiensi Pendidikan

Efisiensi pendidikan erat kaitannya dengan memanfaatkan segala kemampuan yang dimiliki agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Jika penggunaannya efektif dan efisien, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaiannya dikatakan kurang (Riza dalam Iswadi et al., 2022).

Tidak sedikit para pakar yang beranggapan mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia, bahwa sistem pendidikan sudah bagus dalam mengikuti perkembangan zaman serta kemajuan teknologi. Akan tetapi terdapat beberapa wilayah yang belum dapat dijangkau oleh kebijakan pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari tidak sedikitnya siswa yang putus sekolah akibat bekerja dan membantu keperluan orang tuanya, terdapat perbedaan kelas antara kelas unggulan serta kelas biasa, sehingga diperlukan pendidikan yang lebih efisien (Riza dalam Iswadi et al., 2022).

Efisiensi maksudnya memakai tenaga serta anggaran yang lebih sedikit, namun dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi, bentuk pendidikan yang efektif yaitu menggunakan sumber daya serta biaya yang tidak besar, sehingga bisa menghasilkan peningkatan kelulusan yang berkualitas. Pada akhirnya, perihal yang terpadu pada pengurusan pendidikan wajib nampak di antara seluruh faktor serta komponen, baik antara pendidikan bebas biaya ataupun pendidikan yang mengeluarkan biaya, pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah, di antaranya suatu organisasi serta bagian yang berjejeran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Rahmat



Iswadi et al., 2022). Pendidikan dikatakan efisien apabila penggunaan sumber daya yang ada (waktu, sumber daya, biaya) tepat pada tujuan. Efisiensi ini bergantung pada pengoptimalan penggunaan sumber daya tersebut, sehingga tidak akan terjadi pembengkakan biaya, sumber daya, serta waktu.

Efisiensi adalah bagaimana mewujudkan efektivitas pada suatu tujuan dan menggunakan metode yang lebih mudah. Dalam metode pendidikan tentu jauh lebih baik apabila semuanya dapat dihitung buat mencari hasil yang baik tanpa mengesampingkan suatu prosesnya. Hal tersebut dapat dicermati pada system pendidikan di Indonesia, dimana belum mementingkan proses, namun mengutamakan pada hasil yang harus dicapai.

Analisis semacam itu bisa ditunjukkan kepada unsur yang kecil, dari tiga standar itu. Contohnya apakah durasi yang dipakai sudah sinkron dengan agenda atau rancangan, apakah guru memberikan pendidikan dan dosen yang memberikan perkuliahan yang minimum atau sama seperti durasi yang diwajibkan untuk pendidikan, atau sepadan pada Pegawai Negeri. Bila pendidik sudah mempunyai kemampuan yang mumpuni namun siswa masih ada yang tinggal kelas, berhenti dari sekolahan, tidak berhasil dalam mencapai kelulusan, maka hal tersebut menjadi permasalahan pada bagian efisien dalam pendidikan. Permasalahan efisiensi pendidikan terjalin pula di dalam perkuliahan. Permasalahan itu bisa dilihat dari adanya ketidakberhasilan pelajar.

Pakar tidak sedikit berkata kalau bentuk pendidikan saat ini sedang minimnya efisiensi. Perihal itu nampak berawal tentang banyaknya pelajar yang dikeluarkan dari sekolahan, tidak sedikit pelajar yang tidak sanggup dalam melakukan pendidikan, tidak sedikit pelajar yang tertinggal atau tidak naik kelas, serta belum sanggup melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk anak-anak yang kurang mampu. Dari hal tersebut, semua wajib berupaya dalam menciptakan metode supaya penerapan pendidikan jadi efektif. Permasalahan efisien pendidikan memperdebatkan dengan cara berjalannya suatu lembaga pendidikan. Pendidikan memakai suatu tenaga yang dapat dibuat menggapai keberhasilan pendidikan yang seharusnya. Apabila pemakaiannya irit serta tepat pada tujuan, maka dapat dikatakan efisiensinya sangat mumpuni. (Riza dalam Iswadi et al., 2022). Sebagian permasalahan efisien pendidikan yang berguna yaitu :

1. Bagaimana sumber daya pendidikan yang ada di negara kita dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
2. Bagaimana fasilitas dalam pendidikan yang ada di negara kita dimanfaatkan dengan baik,
3. Bagaimana pendidikan yang ada di negara kita dilaksanakan dengan seharusnya.

Masalah efisien dalam pendidikan bisa dipecahkan dengan tahap mendekatkan secara keseluruhan fasilitas pendidikan seperti :

- a. Menitikberatkan pandangan kepada pelajar

Dasar menitikberatkan pandangan kepada pendidik sebaiknya dilakukan dengan menempatkan atensi kepada pendidik dengan mencermati ciri, semangat, kemampuan dari pendidik.



b. Memanfaatkan bagian dari pendidikan

Memanfaatkan bagian dari pendidikan berarti pada pendidik sebaiknya menggunakan bagian pendidikan buat menemui sebuah wawasan serta kemampuan yang telah dibutuhkannya. Beberapa penelitian yang mengkaji tentang efisiensi pendidikan diantaranya Rahman (2017) mengkaji tentang efisien dalam pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat maupun orang tua untuk membeli pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi. Biaya yang dikeluarkan di bidang pendidikan sebagai bentuk investasi pada priode tertentu, pada masa yang akan datang harus menghasilkan keuntungan atau manfaat baik dalam bentuk financial maupun nonfinansial. Untuk meningkatkan benefit pendidikan secara optimal, maka para pengelola pendidikan tentunya perlu mewujudkan efisiensi dalam investasi pendidikan.

Hasil beberapa studi yang dilakukan Bank Dunia, menunjukkan bahwa investasi pendidikan sebagai kegiatan inti pengembangan sumber daya manusia terbukti telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan terhadap tingkat keuntungan ekonomi. Ini berarti bahwa investasi dalam pendidikan merupakan upaya yang menguntungkan baik secara sosial maupun ekonomis.

Menurut Rahman (2017) Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitikberatkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat. Pakar ekonomi mulai memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan oleh karena pendidikan akan meningkatkan kemampuan manusia dalam memproduksi. Disinilah muncul pandangan mengenai manusia sebagai modal pembangunan atau sering disebut sebagai human capital. Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak, kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal yang penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber diperoleh dan kepada siapa uang harus dibelanjakan.

Efisiensi pembiayaan pendidikan adalah penggunaan biaya pendidikan secara tepat sesuai dengan tingkat prioritas kebutuhan guna mewujudkan proses pembelajaran yang bermutu sehingga menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan pada masing-masing jenjang dan jenis pendidikan. Oleh sebab itu biaya pendidikan dapat dipertanggungjawabkan dipertanggungjawabkan secara jujur dan amanah dalam upaya meningkatkan mutu proses pembelajaran dan mutu lulusan.

Dalam pendekatan mutu, peranan pembiayaan nampak lebih jelas, oleh karena penggunaan biaya pendidikan yang efisien dipandang sebagai penempatan setiap usaha yang harus mampu

meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan dapat memacu prestasi belajar siswa, dan mutu pendidikan sebagai keluaran dari proses pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan sesuatu hal yang penting untuk diperhatikan dan hal itu memberikan konsekuensi terhadap anggaran pendidikan (Rahman, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniady (2012) yang mengkaji tentang Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung (Studi Deskriptif Penggunaan Dana BOS pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung). Berdasarkan hasil penghitungan dengan menggunakan rumus *return on investment*, diperoleh nilai sebesar 37 %, artinya penyelenggaraan pendidikan di SD layak dilaksanakan atau *feasible* karena akan memberikan pengembalian investasi dalam bidang pendidikan sehubungan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan bagi peserta didik. Disamping itu, hubungan manfaat pendidikan dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam membiayai pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung diperoleh nilai sebesar 73%, artinya, biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar, memberikan kontribusi sebesar 73%, terhadap produktivitas pembangunan ekonomi.

D. Masalah Relevansi Pendidikan

Pendidikan kesesuaian berhubungan erat pada bagian pendidikan serta perkembangan secara umum, dan berkepentingan perseorangan, warga secara jangka pendek maupun jangka panjang. Permasalahan itu menjelaskan beberapa pada bagian pendidikan untuk menciptakan suatu karya yang cocok dengan keberlangsungan suatu cara untuk memperkembangan pendidikan. Bila mana bagian pendidikan menciptakan hasil yang dibutuhkan di semua wilayah pembangunan, sehingga bisa berkaitan langsung ataupun tidak pada permintaan dunia kerja, maka mutu output yang disyaratkan pada lapangan kerja tersebut relevan dengan yang dikembangkan oleh kelembagaan (Riza dalam Iswadi et al., 2022). Jika dilihat dengan teliti, dalam mengembangkan suatu sekolah pasti dilandaskan keperluan yang nyata serta selaras dengan pembangunan nasional, serta dapat melihat kearifan local di masing-masing daerah (Riza dalam Iswadi et al., 2022). Pendidikan dapat dikatakan sesuai apabila dalam pendidikan bisa menciptakan hasil yang cocok dengan bidang keperluan dalam perkembangan yang sesuai. Permasalahan kesesuaian adalah permasalahan yang berkaitan dengan kesesuaian, di antaranya memiliki wawasan, kemampuan serta perilaku lulusan yang baik di sekolah, pada tujuan warga harus memiliki tiga hal tersebut, agar warga dapat dibutuhkan pada sumber daya dalam bekerja. Pendidikan dibidang tidak ataupun belum sesuai apabila tingkat relevansi itu tidak ada hasil (Rahmat dalam Iswadi et al., 2022).

Permasalahan kesesuaian nampak pada tidak sedikitnya lulusan dari satuan pendidikan tersebut yang belum sanggup dari segi keahlian psikologi serta teknis analisis untuk meneruskan kesatuan pada pendidikan tersebut. Permasalahan kesesuaian pula bisa dikenal pada tidak sedikitnya kelulusan terhadap satuan pendidikan yang terpilih, ialah sekolah yang memiliki jurusan serta pendidikan yang ada di universitas, yang tidak ataupun terlebih lagi belum sanggup untuk terjun ke



dunia kerja. Tidak hanya itu saja, tetapi pula bisa diamati pada perkembangan yang tidak bekerja yang terus menjadi bertambah di Negara kita. Saat ini masih kerap menjumpai kelulusan dari Sekolah Menengah Atas yang tidak bekerja, apalagi tidak sedikit juga yang dapat diamati pada lulusan sarjana masih banyak yang tidak bekerja. Seperti hal semacam terdapat permasalahan perusahaan yang diharuskan untuk menghasilkan biaya buat pendidikan ataupun pembimbingan untuk calon karyawan nya, sebab calon tersebut masih dinilai tidak mempunyai keahlian dalam bekerja semacam seperti yang diharapkan (Rahmat dalam Iswadi et al., 2022). Terdapatnya ketidakserasian pada output pendidikan serta keperluan pada pekerjaan, dilibatkan silabus yang tidak berfokus pada keahlian yang diperlukan pada saat peserta didik merambah dunia kerja.

Perkara relevansi pendidikan bisa dipecahkan dengan cara:

- a. Ekspansi serta pemerataan pendidikan yang berkualitas baik, agar supaya warga tersebut bermutu baik, yang akhirnya untuk menaikkan kesesuaian pada pendidikan dengan keperluan dunia bisnis serta perusahaan.
- b. Peningkatan keahlian di perguruan tinggi, kemampuan serta tanggungan kesejahteraan sumber daya pendidikan sehingga bisa difungsikan dengan maksimal, paling utama pada kenaikan pendidikan sifat batin serta perilaku seseorang supaya bisa menampilkan apa yang telah didapatkan sepanjang meneruskan pendidikan.
- c. Mengadakan pembaruan pada pendidikan, yang tercantum dalam silabus, dengan menyusun silabus yang mengarahkan kepada kriteria pada Negara kita yang berfungsi dengan baik di Negara kita serta sesuai pada kebutuhan di daerah tersebut.



BAB 8

LANDASAN FILSAFAT, PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI DALAM PENDIDIKAN

A. Filsafat

Sebelum mendefinisikan filsafat pendidikan, maka perlu diberikan pengertian terlebih dahulu arti filsafat, karena antara filsafat dengan pendidikan merupakan dua konsep yang berbeda. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai bahasan filsafat dan filsafat pendidikan, hubungan filsafat dan filsafat Pendidikan.

Filsafat dapat diartikan sebagai *way of life* manusia sepanjang kehidupannya di dunia. Cita-cita manusia selalu berkaitan dengan falsafah hidupnya, bahkan nasib suatu bangsa dan negara bergantung pada ideologi yang dianut, yang secara substansial diciptakan oleh filsafat. Filsafat bermakna sikap yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara kontemplatif dan menyeluruh.

Kata filsafat berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris, yaitu *philosophy*, sedangkan dalam bahasa Yunani *philein* atau *philos* dan *sofein* atau *sophi*. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang artinya *al-hikmah*. *Philos* yang berarti cinta, senang dan suka, serta kata *sophia* yang berarti pengetahuan, hikmah dan kebijaksanaan. Dengan demikian, dapat ditarik pengertian bahwa filsafat adalah cinta pada ilmu pengetahuan atau kebenaran, suka kepada hikmah dan kebijaksanaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang berfilsafat (disebut *filosuf*) adalah orang yang mencintai kebenaran, berilmu pengetahuan, ahli hikmah dan bijaksana.

Beberapa definisi filsafat dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Filsafat adalah proses pencarian kebenaran dengan cara menelusuri hakikat dan sumber kebenaran secara sistematis, logis, kritis, rasional, dan spekulatif. Alat yang digunakan untuk mencari kebenaran adalah akal yang merupakan sumber utama dalam berpikir. Dengan demikian kebenaran filosofis adalah kebenaran berpikir yang rasional, logis, sistematis, kritis, radikal, dan universal.
2. Filsafat adalah pengetahuan tentang cara berpikir terhadap segala sesuatu atau sarwa sekalian alam, artinya materi pembicaraan filsafat adalah segala hal yang menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Dengan demikian, pencarian kebenaran filosofis tidak pernah berujung dengan kepuasan dan tidak mengenal pemutlakan kebenaran. Bahkan, untuk suatu yang “sudah” dianggap benar pun kebenarannya masih diragukan, dikatakan tidak mengenal kata puas karena kebenaran akan mengikuti situasi dan kondisi dan alam pikiran manusia yang haus dengan pengetahuan.
3. Filsafat adalah pengembaraan alam pikir manusia yang tidak mengenal kenyang



- dengan ilmu pengetahuan dan kebenaran yang hakiki.
4. Filsafat adalah pencarian kebenaran dengan cara berpikir sistematis yang dilakukan secara teratur mengikuti system yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Berpikir sistematis senantiasa mengikuti aturan logika yang benar normative, artinya cara berpikir yang mengikuti premis-premis tertentu, misalnya menarik kesimpulan dari pemikiran umum kearah pemikiran khusus atau sebaliknya dari pemikiran khusus menuju pemikiran umum. Keduanya lebih dikenal dengan *logika deduktif* dan *induktif*. Sistematika berpikir normative disusun dengan struktur dan retorika yang sinergis sehingga berfilsafat bukan menambah kebingungan orang lain yang diajak berkomunikasi, tetapi menjadikannya lebih komunikatif dan efektif.
 5. Pengertian formal dari filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Suatu sikap falsafi yang benar adalah sikap yang kritis dan mencari kebenaran tanpa batas. Sikap tersebut merupakan sikap terbuka dalam melihat persoalan dengan berbagai sudut pandang dan tanpa prasangka. Filsafat adalah mencari jawaban yang tidak pernah abadi. Berfilsafat tidak pernah selesai karena telah ditemukannya kebenaran, tetapi kebenaran pertamaa yang telah diperoleh merupakan langkah awal menuju kontemplasi filosofis yang lebih mendalam dan mengakar. Dengan mikian”tidak ada” kebenaran akhir dari hasil perenungan filosofis karena hakikat kebenaran bukan sebatas yang tampak.
 6. Filsafat adalah seni kritik dengan tidak membatasi diri pada destruktif pemikiran tentang kebenaran. Fanz Magnis Suseno menegaskan bahwa kritis dalam filsafat adalah kritis dalam arti filsafat tidak pernah puas diri, tidak pernah membiarkan sesuatu dianggap sudah selesai. Sifat kritis filsafat ditunjukkan dengan tiga pendekatan dalam filsafat, yaitu pendekatan ontologis, epistemologis dan aksiologis. Ahli filsafat selalu berpikir kritis dengan melakukan pemeriksaan kedua terhadap segala sesuatu yang telah ditemukan secara filosofis. Kebenaran pertama merupakan awal menuju kebenaran kedua dan seterusnya. Dengan demikian tidak ada kata “berhenti” untuk menggali kebenaran yang sesungguhnya “paling benar”. Kebenaran yang benar pun akan dikaji kembali karena tidak ada kebenaran yang paling benar sepanjang kebenaran itu dihasilkan melalui rasionalisasi.
 7. Filsafat adalah pengetahuan metodis, sistematis, dan koheren tentang seluruh kenyataan (realitas). Filsafat merupakan refleksi rasional atas keseluruhan realitas untuk mencapai hakikat (kebenaran) dan memperoleh hikmah (kebijaksanaan). Al-Kindi (801 M – 873 M) menyebutkan bahwa filsafat adalah “*kegiatan manusia tingkat tertinggi yang merupakan pengetahuan yang benar mengenai hakikat segala yang ada bagi manusia. Bagian filsafat yang paling mulia adalah pengetahuan kebenaran pertama yang merupakan sebab dari segala kebenaran*”.



8. Filsafat adalah pencarian kebenaran tanpa mengenal batas dengan menggunakan rasio secara sistematis dan radikal yang diawali keraguan atas segala sesuatu. Menjangkau segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, yang bersifat kontemplatif, logis, kritis dan spekulatif. Filsafat menjelajah keberadaan yang empiris, fisik, metafisik, natural, supranatural, materiil, immaterial, rasional dan suprarasional.

B. Objek Material Filsafat

Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, sedangkan objek forma filsafat adalah pencarian terhadap yang ada dan yang mungkin ada yang dipikirkan secara kontemplatif pada problematika yang tidak dapat dijangkau oleh pendekatan empiris dan observative yang biasa berada dalam sains.

Hal-hal yang materiil dan metafisikal menjadi objek materi filsafat. Filsafat menyatakan seluruh yang ada dan yang mungkin ada sebagai realitas yang sebenarnya sebagaimana hakikat segala sesuatu berada pada sesuatu itu sendiri. Pada dasarnya realitas terdiri dari dua hal, yaitu :

- a. Kenyataan yang disepakati (*agreement reality*), yaitu segala sesuatu yang dianggap nyata karena kita mengatakan sebagai kenyataan;
- b. Kenyataan yang didasarkan pada pengalaman (*experimental reality*), yaitu pengalaman manusia.

Berdasarkan dua realitas tersebut, pengetahuan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Pengetahuan yang diperoleh melalui persetujuan;
2. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengetahuan langsung atau observasi.

Pada awalnya pengetahuan diperoleh dengan cara memercayai cerita orang lain karena manusia tidak dapat belajar segala sesuatu melalui pengalamannya sendiri. Pengalaman adalah pengetahuan sementara yang tidak kekal (*transitory knowledge*). Melalui rentang waktu yang sangat Panjang, pengetahuan mengalami berbagai pengklasifikasian.

Penyelidikan filosofis akan terus bekerja secara radikal sampai dengan ditemukannya jawaban masalah yang dikajinya. Filsafat terus bekerja meskipun ilmu pengetahuan telah berhenti melakukan penyelidikan.

Manfaat filsafat dalam kehidupan adalah :

1. Dasar dalam bertindak;
2. Dasar dalam mengambil keputusan;
3. Mengurangi salah paham dan konflik;
4. Bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah.

Manusia selalu bertanya karena terdorong oleh rasa ingin tahu. Hasrat ingin tahu manusia tersebut terpuaskan bila manusia memperoleh pengetahuan yang benar mengenai hal-hal yang dipertanyakan. Dalam sejarah perkembangannya, ternyata manusia selalu berusaha memperoleh



pengetahuan yang benar atau yang secara singkat dapat disebut sebagai kebenaran. Manusia senantiasa berusaha memahami, memperoleh, dan memanfaatkan kebenaran untuk kehidupannya. Tidak salah jika satu sebutan lagi diberikan kepadanya, yaitu manusia sebagai makhluk pencari kebenaran. Filsafat kerap kali dianggap sebagai ilmu yang abstrak, padahal filsafat sebenarnya sangat dekat dengan manusia. Filsafat sendiri merupakan suatu usaha untuk memahami atau mengerti dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya. Bidang kajiannya sangat luas dan mencakup keseluruhan sejauh yang dapat dijangkau oleh pikiran. Menurut Ali Mudzafir filsafat berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang asal mula dan sifat dasar alam semesta tempat manusia hidup serta apa yang merupakan tujuan hidupnya.

Sementara itu, filsafat secara terminologi diartikan secara berbeda oleh beberapa ahli. Menurut Plato (427-347 SM) filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Aristoteles (384-322 SM) menyebutkan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika (filsafat keindahan). Al-Farabi (950 M), seorang filsuf Muslim terbesar sebelum Ibnu Sina mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Ibnu Rusyd (1126-1198 M), berpendapat bahwa filsafat atau hikmah merupakan “otonom” yang perlu dikaji oleh manusia karena dikaruniai akal.¹⁴ Menurut Immanuel Kant (1724-1804 M), filsafat merupakan ilmu dasar segala pengetahuan, yang mencakup persoalan; apakah yang kita ketahui? (dijawab oleh metafisika), apakah yang boleh kita kerjakan? (dijawab oleh etika/norma), sampai dimanakah pengharapan kita? (dijawab oleh agama), dan apakah yang dinamakan manusia? (dijawab oleh antropologi). Kattsoff menjelaskan bahwa seorang filsuf dianggap sebagai orang yang memandang segala sesuatu dari sudut keabadian, dan karenanya menemukan ketiadaan sifat pentingnya segala sesuatu, atau dianggap sebagai orang yang memandang manusia sebagai sesuatu yang tidak berarti.

Menurut Hamersma, ada tiga hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu adanya rasa heran, yang dilanjutkan dengan sikap ragu-ragu, dan terakhir sadar akan adanya keterbatasan. Dengan adanya kesadaran akan keterbatasan, manusia mulai berfilsafat, dan memikirkan bahwa di luar manusia yang terbatas ada sesuatu yang tidak terbatas. Menyimak keberadaan filsafat di atas, menurut Jan Hendrik sesungguhnya filsafat telah memerankan sedikitnya tiga peranan utama dalam sejarah pemikiran manusia, yaitu sebagai pendobrak, pembebas, dan pembimbing. Filsafat dikatakan berperan sebagai pendobrak, karena kehadiran filsafat mampu mendobrak dan memberontak pintu dan tembok-tembok tradisi kuno yang begitu sakral dan tidak boleh diganggu gugat, dimana dongeng dan takhayul menjadi dominasi yang dianggap benar. Selain mendobrak tradisi yang penuh mitos, filsafat juga mampu membebaskan manusia dari ketidaktahuan dan kebodohnya, sehingga dengan penyelidikan tentang hakikat sesuatu, peradaban manusia semakin maju dan berkembang. Hal yang terpenting dari peran filsafat dalam sejarah pemikiran manusia, adalah keberadaan filsafat yang mampu membebaskan manusia dari cara berpikir yang mistis dan irasional dengan membimbing



manusia untuk berpikir secara rasional.

Sementara itu, kegunaan filsafat dalam kehidupan manusia secara umum, sebagaimana diidentifikasi oleh Burhanuddin, adalah:

1. Plato merasakan bahwa berpikir dan memikirkan adalah suatu keinginan yang maha berharga.
2. Rene Descartes yang masyhur sebagai pelopor filsafat modern, menyebutkan bahwa berfilsafat berarti berpangkal pada suatu kebenaran yang fundamental.
3. Alfred North Whitehead seorang filsuf modern merumuskan filsafat sebagai kesadaran dan pandangan jauh ke depan dan suatu kesadaran akan hidup, dan kesadaran akan kepentingan yang memberi semangat kepada seluruh usaha peradaban.
4. Maurice Marleau Ponty, mengatakan bahwa jasa dari filsafat adalah terletak pada sumber penyelidikannya, sumber itu akan dapat berpikir tentang manusia.

Dalam perkembangannya, ilmu tidaklah berlangsung secara mendadak, tetapi melalui evolusi (bertahap). Kalau pada masa sekarang kita melihat bahwa Eropa merupakan sentral atau gudang ilmu pengetahuan, maka dalam sejarah ilmu terbukti bahwa sumbangsih dunia Timur bagi kemajuan ilmu pengetahuan hingga seperti sekarang sangatlah besar. Banyak penemuan yang terjadi di dunia Timur yang baru dikembangkan belakangan di dunia Barat. Namun perkembangan demikian secara teoritis senantiasa mengacu pada peradaban Yunani. Kesemuanyaitu merupakan rangkaian panjang sejarah perkembangan ilmu bagi peradaban manusia yang dengan kemampuan akal pikirnya selalu dinamis dan progressif, dimana hal terpenting yang mendorong manusia selalu melangkah maju adalah adanya rasa ingin tahu (curiosity).

Dalam pengertian yang lebih luas, Harold Titus mengemukakan pengertian filsafat sebagai berikut :

1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis.
2. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi.
3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan.
4. Filsafat ialah analisis logis dari bahasan dan penjelasan tentang arti konsep.
5. Filsafat ialah sekumpulan problema-problema yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat.

Selanjutnya, Imam Barnadib menjelaskan filsafat sebagai pandangan yang menyeluruh dan sistematis. Menyeluruh, karena filsafat menggunakan bukan hanya pengetahuan melainkan juga suatu pandangan yang dapat menembus sampai dibalik pengetahuan itu sendiri. Sistematis, karena filsafat menggunakan berpikir secara sadar, teliti dan terartur sesuai dengan hokum-hukum yang ada. Sedangkan menurut Harun Nasution, filsafat ialah berpikir menurut tata tertib (logika), bebas (tidak



terikat pada tradisi, dogma, serta agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan.

Sedangkan menurut Jujun S. Srisumantri, adalah sebagai karakteristik dan berpikir filosofis. Ia berpandangan bahwa berpikir secara filsafat merupakan cara berpikir radikal, sistematis, menyeluruh dan mendasar untuk suatu permasalahan yang mendalam.

Karena pemikiran-pemikiran yang bersifat filsafat didasarkan atas pemikiran yang bersifat spekulatif, maka nilai-nilai kebenaran yang dihasilkannya juga tak terhindarkan dari kebenaran yang spekulatif. Hasilnya sangat tergantung dari pandangan filosof yang bersangkutan. Oleh karena itu, pendapat yang baku dan diterima oleh semua orang agak sulit diwujudkan. Padahal kebenaran yang ingin dicapai oleh filsafat ialah kebenaran yang bersifat hakiki, hingga nilai kebenaran tersebut dapat dijadikan pandangan hidup manusia. Mengingat dominasi penggunaannalar manusia dalam berfilsafat, maka kebenaran yang dihasilkan didasarkan atas penilaian kemampuan maksimal menurut nalar manusia.

Dalam kaitan ini, Muhammad Noor Syam menjelaskan, filsafat adalah suatu lapangan pemikirandan penyelidikan manusia yang amat luas (komprehensif). Filsafat menjangkau semua persoalan dalam daya kemampuan pikiran manusia dengan mencoba mengerti, menganalisis, menilai dan menyimpulkan semua persoalan-persoalan secara mendalam. Meskipun kesimpulan-kesimpulan filsafat bersifat hakiki, tetap saja masih relative dan subyektif.

Dengan demikian, kebenaran filsafat adalah kebenaran yang relatif, artinya, kebenaran itu sendiriselalu mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zaman dan peradaban manusia. Bagaimanapun juga, penilaian tentang suatu kebenaran yang dianggap benar itu masih tergantung pada ruang dan waktu. Apa yang dianggap benar oleh masyarakat atau bangsa lain, belum tentu akan dinilai sebagai suatu kebenaran oleh masyarakat atau bangsa lainnya. Sebaliknya, sesuatu yang dianggap benar oleh suatu masyarakat atau bangsa lain dalam suatu zaman akan berbeda pada zaman berikutnya.

Dari uraian diatas, dapat diambil suatu pengertian bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan komprehensif yang berusaha memahami persoalan-persoalan yang timbul didalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia. Dengan demikian, diharapkan agar manusia dapat mengertidan memiliki pandangan yang menyeluruh dan sistematis mengenai alam semesta dan tempat manusia didalamnya.

Filsafat dibutuhkan manusia dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dan berbagai lapangan kehidupan manusia. Jawaban itu merupakan hasil pemikiran yang sistematis, integral, menyeluruh untuk mengatasi masalah-masalah yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan.

B. Pengertian Filsafat Pendidikan

Ada beberapa pengertian filsafat pendidikan, diantaranya sebagai berikut :

1. Filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang menyelidiki substansi pelaksanaan



- pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, latar belakang, cara, hasil dan hakikat ilmu pendidikan yang berhubungan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunannya.
2. Filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang memikirkan hakikat pendidikan secara komprehensif dan kontemplatif tentang sumber, seluk beluk pendidikan, fungsi dan tujuan Pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang mengkaji proses pendidikan dan teori-teori Pendidikan.
 3. Filsafat pendidikan mengkaji hakikat guru dan anak didik dalam proses pembelajaran di kelas dan di luar kelas.
 4. Filsafat pendidikan mengkaji berbagai teori kependidikan, metode, dan pendekatan dalam Pendidikan.
 5. Filsafat pendidikan mengkaji strategi pembelajaran alternatif.
 6. Filsafat pendidikan mengkaji hakikat tentang kurikulum pendidikan.
 7. Filsafat pendidikan mengkaji hakikat evaluasi pendidikan dan evaluasi pembelajaran.
 8. Filsafat pendidikan mengkaji hakikat alat-alat dan media pendidikan.

Berbagai pengertian filsafat pendidikan telah dikemukakan para ahli. Menurut Al-Syaibani, filsafat Pendidikan adalah aktifitas pikiran yang teratur, yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan dan memadukan proses Pendidikan. Artinya, filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat-maklumat yang diupayakan untuk pengalaman kemanusiaan yang merupakan faktor yang integral.

Filsafat pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai kaidah filosofis dalam bidang pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan falsafah umum dan menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasar dari filsafat umum dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan Pendidikan secara praktis.

Menurut John Dewey, filsafat Pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir (intelektual) maupun daya perasaan (emosional), menuju tabiat manusia. Sementara menurut Thompson, filsafat artinya melihat suatu masalah secara total dengan tanpa ada batas atau implikasinya, ia tidak melihat tujuan, metode atau alat-alatnya, tapi juga meneliti dengan seksama hal-hal yang dimaksud.

Menurut Imam Barnadib, filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Sedangkan menurut seorang ahli filsafat Amerika, Brubacher, filsafat pendidikan adalah seperti menaruh sebuah kereta didepan seekor kuda, dan filsafat dipandang sebagai bunga, bukan sebagai akar tunggal pendidikan.

Brubacher mengelompokkan filsafat pendidikan pada dua kelompok besar, yaitu filsafat pendidikan “progresif”, dan filsafat pendidikan “pragmatisme”. Untuk mendapatkan pengertian filsafat pendidikan yang lebih sempurna (jelas), ada baiknya kita melihat beberapa konsep mengenai



pengertian pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah bimbingan secara sadar dari pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya manusia yang memiliki kepribadian utama dan ideal. Yang dimaksud kepribadian yang utama atau ideal adalah kepribadian yang memiliki kesadaran moral dan sikap mental secara teguh dan sungguh-sungguh memegang dan melaksanakan ajaran atau prinsip-prinsip nilai (filsafat) yang menjadi pandangan hidup secara individu, masyarakat maupun filsafat bangsa dan negara.

Dengan demikian, dari uraian diatas dapat ditarik suatu pengertian bahwa filsafat pendidikan sebagai ilmu pengetahuan normative dalam bidang pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma dan/atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia dalam hidup dan kehidupannya.

Filsafat, jika dilihat dari fungsinya secara praktis, adalah sebagai sarana bagi manusia untuk dapat memecahkan berbagai problematika kehidupan yang dihadapinya, termasuk dalam problematika di bidang pendidikan. Oleh karena itu, apabila dihubungkan dengan persoalan pendidikan secara luas, dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan arah dan pedoman atau pijakan dasar bagi tercapainya pelaksanaan dan tujuan pendidikan. Jadi, filsafat Pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan yang merupakan penerapan analisis filosofis dalam lapangan pendidikan.

Dalam hubungannya antara filsafat (umum) dan filsafat pendidikan, filsafat pendidikan memiliki beberapa Batasan. *Pertama*, filsafat Pendidikan merupakan pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah filsafat dalam bidang pengalaman kemanusiaan yang disebut pendidikan. Maka, filsafat pendidikan berusaha untuk menjelaskan dan menerangkan supaya pengalaman bermanusia ini sesuai dengan kehidupan baru. Filsafat pendidikan mengandung upaya untuk mencari konsep-konsep yang menempatkan manusia ditengah-tengah gejala yang bervariasi dalam proses pendidikan. *Kedua*, mempelajari filsafat Pendidikan karena adanya kepercayaan bahwa kajian itu sangat penting dalam mengembangkan pandangan terhadap proses pendidikan dalam upaya memperbaiki keadaan Pendidikan. Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan bimbingan, penilaian, metode, dan lain-lain merupakan tanggung jawab filsafat pendidikan yang sangat bergantung pada usaha bimbingan tingkah laku anak didik dan sikap mereka terhadap masyarakat. *Ketiga*, filsafat pendidikan memiliki prinsip-prinsip, kepercayaan, konsep, andaian yang terpadu satu sama lainnya. Prinsip-prinsip yang dimaksudkan ialah kepercayaan-kepercayaan, andaian-andaian yang dipercayai terhadap masalah-masalah Pendidikan. Mengingat antara filsafat dan pendidikan mempunyai keterkaitan erat dan kokoh, maka tugasnya pun seiring, yakni berupaya bersama dalam memajukan hidup umat manusia. Metode yang dipergunakan oleh filsafat pendidikan adalah sebagai berikut :

1. *Ontologi pendidikan*, yaitu substansi pendidikan dalam semua perspektifnya, sebagaimana melihat pendidikan dari tujuan esensialnya sebagai pencapaian maksimal dari pendidikan. Berbicara masalah ontology tidak terlepas dari filsafat karena filsafat diperlukan untuk menjelaskan dasar ontologis dari ilmu, termasuk dalam kajian

pendidikan. Aspek realitas yang dijangkau teori Pendidikan melalui pengalaman pancaindra adalah dunia pengalaman manusia secara empiris. Adapun objek materiil filsafat pendidikan adalah manusia seutuhnya, manusia yang lengkap aspek-aspek kepribadiannya, yaitu manusia yang berakhlak muliadalam situasi pendidikan atau diharapkan melampaui manusia sebagai makhluk sosial mengingat sebagai warga masyarakat yang memiliki ciri yang baik (good citizenship atau kewarganegaraan yang sebaik-baiknya). Filsafat Pendidikan dijabarkan dari filsafat, artinya filsafat pendidikan tidak boleh bertentangan dengan filsafat, secara ontologis, filsafat pendidikan berusaha mengkaji secara mendalam hakikat pendidikan dan semua unsur yang berhubungan dengan pendidikan.

Menurut Made Pidarta, ontology filsafat pendidikan mempertanyakan hal-hal berikut :

- a. Apakah Pendidikan itu ?
- b. Apa yang hendak dicapai ?
- c. Bagaimana cara terbaik merealisasikan tujuan-tujuan Pendidikan ?
- d. Bagaimana sifat Pendidikan itu ?
- e. Bagaimana perbedaan Pendidikan teori dengan praktik ?
- f. Bagaimana hakikat kurikulum yang disajikan ?
- g. Siapa dan bagaimana para peserta didiknya ?
- h. Bagaimana sistem perkembangan bakat dan minat anak didik ?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut memberikan inspirasi terhadap upaya pengembangan Pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang berbudi luhur, rasional, terampil dan mandiri. Manusia yang bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Akan tetapi, jawaban terhadap semua pertanyaan ontologis biasanya memerlukan penelitian, analisis, deskripsi dan penjabaran. Oleh karena itu, dari ontology filsafat Pendidikan dilanjutkan oleh epistemology filsafat Pendidikan. Pendekatan ontology atau metafisik menekankan pada hakikat keberadaan, dalam hal ini keberadaan Pendidikan itu sendiri.

2. *Epistemologi pendidikan*, yaitu menyelidiki sumber ajaran atau prinsip yang terdapat dalam Pendidikan serta dasar atau asas yang digunakan untuk Pendidikan yang dimaksudkan. Berbagai teori Pendidikan dikaji secara mendalam sehingga latar belakang kelahirannya diketahui secara aplikatif berkaitan dengan Pendidikan. *Epistemologi* adalah kata lain dari filsafat ilmu berasal dari bahasa latin *episteme*, berarti *knowledge*, yaitu pengetahuan dan *logos* berarti *teori*. Jadi, epistemology, berarti “teori pengetahuan” atau teori tentang metode, cara, dan dasar dari ilmu pengetahuan, atau studi tentang hakikat tertinggi, kebenaran, dan Batasan ilmu manusia. Dalam filsafat, epistemology merupakan cabang filsafat yang meneliti asal, struktur, metode-metode dan kesahihan pengetahuan.



Istilah epistemology pertama kali dipakai oleh J.F. Ferrier, Institut of Metaphysics (1854 M) yang membedakan dua cabang filsafat, yaitu epistemology dan ontologi. Epistemologi berbeda dengan logika. Jadi, logika merupakan sains formal (formal science) yang berkenaan dengan prinsip-prinsip penalaran yang sah. Epistemologi adalah sains filosofis (philosophical science) tentang asal usul pengetahuan dan kebenaran. Puncak pengkajian epistemology adalah masalah kebenaran yang membawa ke ambang pintu metafisika.

Dalam epistemology, dibicarakan tentang sumber pengetahuan dan sistematikanya. Selain itu dibicarakan pula tentang hakikat ketepatan susunan berpikir yang secara akurat pula digunakan untuk masalah-masalah yang bersangkutan dengan maksud menemukan kebenaran isi sebuah pernyataan. Isi pernyataan adalah sesuatu yang ingin diketahui. Oleh karena itu, epistemology relevan dengan ilmu pengetahuan yang disebut juga dengan filsafat ilmu.

Berkaitan dengan pemikiran di atas, terdapat empat jenis kebenaran yang secara umum telah dikenal, yaitu sebagai berikut :

Kebenaran religious, yaitu kebenaran yang memenuhi kriteria atau dibangun berdasarkan kaidah-kaidah agama atau keyakinan tertentu, yang disebut juga dengan kebenaran absolut atau kebenaran mutlak yang tidak terbantahkan.

Kebenaran filosofis, yaitu kebenaran hasil perenungan dan pemikiran kontemplatif terhadap hakikat sesuatu, meskipun pemikiran intelektual tersebut bersifat subjektif dan relative, tetapi kontemplatif.

Kebenaran estetis, yaitu kebenaran yang berdasarkan penilaian indah atau buruk, serta cita-cita rasa estetis, artinya keindahan yang berdasarkan harmoni dalam pengertian luas yang menimbulkan rasa senang, tenang dan nyaman.

Kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang ditandai oleh terpenuhinya syarat-syarat ilmiah, terutama menyangkut adanya teori yang menunjang dan sesuai dengan bukti. Kebenaran ilmiah ditunjang oleh rasio dan kebenaran rasional berdasarkan teori yang menjungnya. Kebenaran ilmiah divalidasi oleh bukti-bukti empiris, yaitu hasil pengukuran objektif di lapangan. Sifat objektif berlaku umum, dapat diulang melalui eksperimentasi, cenderung amoral, sesuai dengan apa adanya, bukan apa yang seharusnya, yang merupakan ciri ilmu pengetahuan. Kebenaran pengetahuan dapat pula dibagi menjadi 2 macam, yaitu *kebenaran mutlak atau absolut* dan *kebenaran relative atau nisbi*. Kebenaran mutlak atau absolut adalah kebenaran yang tidak berubah-ubah dan tidak dapat dipengaruhi oleh yang lain. Artinya, kebenaran yang sudah ada pada hakikat dirinya sendiri, misalnya kebenaran adanya Tuhan. Adapun kebenaran relative atau nisbi adalah kebenaran yang berubah-ubah, tidak tetap, dan dapat dipengaruhi oleh hal lain diluar hakikat dirinya. Misalnya, fungsi mata dalam melihat



sesuatu. Kebenaran dari cara melihat dan hasil dari penglihatan tidak pernah tetap.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa epistemology adalah filsafat yang mengkajiseluk beluk dan tata cara memperoleh suatu pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, metode dan pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan logis dan rasional. Epistemologi Pendidikan adalah filsafat tentang sumber-sumber Pendidikan dan seluk beluk Pendidikan.

3. *Aksiologi pendidikan*, yaitu penyelidikan mengenai kegunaan fundamental dalam Pendidikan, baik secara jasmani maupun rohani, dampak Pendidikan secara fungsional terhadap kehidupan manusia, terhadap akal dan hati semua anak didik, aspek-aspek yang menyangkut fungsi nilai, estetika dan tujuan pragmatis Pendidikan terkaji secara mendalam, radikal, logis dan sistematis. Aksiologi Pendidikan berkaitan dengan masalah ilmu dan pengetahuan (kognitio), maksudnya adalah memikirkan segala hakikat pengetahuan atau hakikat keberadaan segala sesuatu yang bersifat fisik dan metafisik, baik yang umum maupun yang khusus. Oleh karena itu kajian mengarahkan diri pada dasar-dasar pengetahuan dalam bentuk penalaran, logika, sumber pengetahuan dan kriteria kebenaran. Demikian pula dengan aspek ontologinya, kajian tentang hakikatnya mengarahkan diri pada hal-hal yang sifatnya metafisik, asumsial, dan batas-batas penjelajahan ilmu yang dilengkapi perspektif epistemologis tentang sistem berpikir dan struktur pengetahuan ilmiah.

Dengan penjelasan diatas, dapat diambil pemahaman bahwa objek penyelidikan ilmu pengetahuan hanya terbatas pada sesuatu yang dapat diselidiki secara ilmiah. Jika tidak dapat diselidiki lagi, ilmu pengetahuan akan berhenti sampai disitu. Berbeda dengan penyelidikan filsafat Pendidikan, yang akan terus bekerja hingga masalah yang dikajinya ditemukan hingga ke akar-akarnya. Bahkan, filsafat Pendidikan baru menampakan hasil kerjanya manakala ilmu pengetahuan yang dikaji telah memiliki kemampuan mendekatkan diri antara hamba dengan Sang Pencipta. Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa tujuan pendidikan atau aksiologi pendidikan secara esensial adalah terwujudnya anak didik yang memahami ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terwujudnya insan kamil, yaitu manusia yang kembali pada fitrahnya dan pada tujuan kehidupan yang sejati.

Aksiologi pendidikan juga berkaitan dengan aliran-aliran pendidikan yang terus berkembang. Aliran-aliran pendidikan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Positivisme

Positivisme dibangun oleh August Comte (1798 – 1857 M) yang titik tolak ajarannya adalah tanggapannya atas perkembangan pengetahuan manusia, baik perseorangan maupun



umat manusia secara keseluruhan, melalui tiga zaman atau tiga stadia. Menurutnya, perkembangan tigazaman ini merupakan hukum yang tetap. Ketiga zaman tersebut adalah zaman teologis, zaman metafisis, dan zaman ilmiah atau positif.

Menurut positivism, Pendidikan bertujuan agar masyarakat menyadari bahwa kebenaran harus ditandai oleh sesuatu yang empiris, realistis dan indriawi. Jika Pendidikan hanya mengandalkan idealism, hal tersebut sama dengan menghasilkan khayalan belaka.

Menurut August Comte, indra sangat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Melalui eksperimen ini, kekeliruan indra dapat dikoreksi.

2. Renaisans

Istilah renaisans berasal dari Bahasa perancis, berarti kebangkitan kembali. Para sejarawan menggunakan istilah tersebut untuk menunjukan berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa. Orang pertama yang menggunakan istilah tersebut adalah Jules Michelet, sejarawan Perancis terkenal. Menurutnya renaisans adalah periode penemuan manusia dan dunia, bukan sekedar sebagai kebangkitan kembali yang merupakan permulaan kebangkitan modern. Apabila dikaitkan dengan keadaan, renaisans adalah masa antara zaman pertengahan dan zaman modern yang dapat dipandang sebagai masa peralihan.

Ciri utama renaisans adalah humanism, individualism, terlepas dari agama (tidak ingin diatur oleh agama), empirisme, dan rasionalisme.

Secara esensial, zaman renaisans dalam filsafat tidak berbeda dari zaman modern. Ciri-ciri filsafat renaisans ada pada filsafat modern. Tokoh pertama filsafat modern adalah Descartes.

3. Humanisme

Humanisme lahir akibat kekuasaan Gereja yang telah menafikan berbagai penemuan manusia. Bahkan, dengan doktrin dan kekuasaannya, Gereja telah meredam para filsuf dan ilmuwan yang dengan penemuan ilmiahnya telah mengingkari kitab suci yang diacu oleh kaum Kristiani.

Menurut Ali Syariati, berkaitan dengan eksistensi manusia, bagian dari aliran filsafat yang menyatakan bahwa tujuan pokok dari segala sesuatu adalah demi kesempurnaan manusia. Aliran ini memandang bahwa manusia adalah makhluk mulia yang semua kebutuhan pokok diperuntukan untuk memperbaiki spesiesnya.

Humanisme Yunani berusaha untuk mencapai jati diri manusia dengan seluruh kebenciannya kepada Tuhan dan pengingkarnya atas kekuasaan-Nya, serta memutuskan tali perhambaan manusia dengan "langit", ketika ia menjadikan manusia sebagai penentu benar atau tidaknya suatu perbuatan dan menentukan bahwa segala potensi keindahan terletak pada tubuh manusia. Humanisme Yunani memerhatikan unsur-unsur yang mengagungkan keindahan kekuasaan atau kenikmatan bagi manusia. Dalam humanism, manusia adalah sebagai berikut:

a. Makhluk asli, artinya ia mempunyai substansi yang mandiri diantara makhluk-makhluk



- yang mempunyai wujud fisik dan yang gaib dan mempunyai esensi genera yang mulia (essence generique).
- b. Makhluk yang memiliki kehendak bebas, dan ini merupakan kekuatan paling besar yang luarbiasa dan tidak bisa ditafsirkan.
 - c. Makhluk yang sadar (berpikir) merupakan karakteristik menonjolnya, yaitu sadar dalam pengertian bahwa manusia memahami realitas alam luar dengan kekuatan “berpikir”nya yang menakjubkan dan merupakan suatu mukzijat, menemukan berbagai hal yang tersembunyi dari indra dan mampu menganalisis dan mencari sbab-sebab yang terdapat dalam setiap faktaatau realita, tanpa terpaku pada hal-hal yang bersifat indriawi dan kausilitas, dan menarik kesimpulan tentang “akibat” melalui “sebab” dan seterusnya.
 - d. Manusia tidak pernah menjadi sesuatu yang lain, kecuali seonggok daging yang tidak berartidan sekadar virus kecil sudah cukup untuk mematikannya.
 - e. Makhluk yang sadar akan dirinya sendiri. Artinya, dia adalah makhluk hidup satu-satunya yang memiliki pengetahuan budaya dan nisbat dengan dirinya.
 - f. Makhluk kreatif. Kreativitas yang menyatu dengan perbuatannya ini menyebabkan manusia mampu menjadikan dirinya sebagai makhluk sempurna di depan alam dan di hadapan Tuhan. Kreativitas inilah yang menjadikan manusia memiliki kekuatan luar biasa yang memungkinkan dirinya menembus batas-batas fisik dan kemampuannya yang sangat terbatas.
 - g. Makhluk yang mempunyai cita-cita dan merindukan sesuatu yang ideal, dalam arti dia tidak menyerah dan menerima “apayang ada”, tetapi selalu berusaha mengubahnya menjadi “apa yang semestinya”.
 - h. Makhluk moral dan bernilai. Nilai-nilai adalah ungkapan tentang hubungan manusia dengan salah satu fenomena, cara, kerja, atau kondisi yang didalamnya terdapat motif yang lebih luhur daripada keuntungan (utilite).

Ada empat aliran yang mengklaim sebagai bagian dari humanisme, yaitu : (1) Liberalisme Barat; (2) Marksisme; (3) Eksistensialisme, dan (4) Agama. Liberalisme Barat menyatakan diri sebagai pewaris asli filsafat dan peradaban humanisme dalam sejarah, dan itu dipandang sebagai aliran pemikiran peradaban yang dimulai dari Yunani Kuno dan mencapai puncak kematangan kesempurnaan relatifnya pada Eropa Modern.

Filsafat pendidikan, yaitu merumuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hakikat pendidikan dan pelaksanaannya. Pelaksanaan Pendidikan dilakukan dengan merujuk pada tujuan pendidikan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, proses dan tujuan yang hendak dicapai oleh Pendidikan merupakan hakikat pendidikan itu sendiri, artinya perjalanan pendidikan bergantung pada tujuannya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan merumuskan berbagai metode, strategi, cara yang akan diterapkan dalam pendidikan, dan



proses pembelajaran.

4. Naturalisme

Kata nature atau “alam” yang dipakai dalam filsafat, bukan hanya terbatas pada alam lautan, gunung, dan kehidupan liar, melainkan tercakup di dalamnya astronomi yang mencakup bagian-bagian yang luas dari ruang dan waktu, dari fisika dan kimia, serta analisisnya yang bersifat atom dan subatom. Naturalisme memandang, alam merupakan keseluruhan realitas.

5. Materialisme

Istilah materialism didefinisikan dengan beberapa cara. *Pertama*, materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa atom materi yang berada sendiri dan bergerak merupakan unsur-unsur yang membentuk alam, akal, dan kesadaran (consciousness), termasuk segala proses fisikalnya merupakan mode materi tersebut yang dapat ditafsirkan seluruhnya dengan sains fisik. *Kedua*, doktrin alam semesta dapat ditafsirkan seluruhnya dengan sains fisik. Kedua definisi tersebut mempunyai implikasi yang sama, walaupun menyajikan bentuk materialism yang lebih tradisional.

6. Pragmatisme

Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Pegangan pragmatism adalah logika pengamatan. Aliran ini bersedia menerima segala sesuatu asalkan membawa akibat praktis. Pengalaman-pengalaman pribadi, kebenaran mistis, semuanya bisa diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan asalkan membawa akibat praktis yang bermanfaat. Dengan demikian, patokan pragmatism adalah “manfaat bagi hidup praktis”. Tujuan pendidikan Barat pragmatisme adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan adalah bentuk pengembangan kecerdasan manusia yang bermanfaat bagi manusia, maka manfaat menjadi tujuan Pendidikan.
- b. Manfaat dan kegunaan Pendidikan dapat bersifat teoritis atau praktik yang mempermudah kehidupan manusia.
- c. Kenikmatan, kemakmuran, dan kemuliaan yang diperoleh melalui Pendidikan menjadi pusat tujuan Pendidikan Barat, sehingga pragmatism dapat melahirkan hedonism, liberalism dan ateisme.

Sebagaimana dikatakan oleh Suriasumantri bahwa pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya. Berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang kita belum tahu. Berfilsafat berarti berendah diri bahwa tidak semuanya akan pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang seakan tak terbatas ini. Demikian juga berfilsafat berarti mengoreksi diri, semacam keberanian untuk berterus terang seberapa jauh sebenarnya kebenaran yang dicari



telah dijangkau. Hubungan utama dari filsafat dengan psikologi adalah ilmu pengetahuan dimana subjek psikologi adalah manusia dan mempelajari tingkah laku dari manusia berhubungan dengan kehendak, akal dan juga pengetahuan. Sementara filsafat juga mengulas tentang tingkah laku manusia namun membutuhkan data dari ilmu.

Berikut diuraikan hubungan psikologi dengan filsafat yang paling utama, antara lain :

1. Menegaskan akar historis. Psikologi dan ilmu ilmu lainnya adalah pecahan dari filsafat dan dalam filsafat sendiri juga bisa ditemukan refleksi yang mendalam mengenai konsep jiwa dan juga perilaku manusia. Refleksi refleksi inilah yang nantinya bisa ditemukan dalam teks kuno filsafat atau teks filsafat modern. Dengan mempelajari tentang ini, maka psikolog bisa semakin paham tentang akar historis dari ilmu yang mereka miliki dan juga tentang perdebatan yang sedang terjadi didalamnya. Jika membaca tentang beberapa teks kuno Aristoteles dan Thomas Aquinas mengenai konsep jiwa dan manusia, maka beberapa teks kuno tersebut akan memberikan sudut pandang dan juga pemikiran yang baru untuk perkembangan ilmu psikologi.
2. Memberikan Kerangka Berpikir. Jika dilihat secara khusus, fungsi filsafat dalam psikologi juga bisa memberikan kerangka berpikir yang sistematis, logis sekaligus rasional untuk para psikolog baik praktisi dan juga akademisi. Dengan menggunakan ilmu logika yang menjadi salah satu cabang filsafat, psikolog juga akan dibekali dengan kerangka berpikir yang bisa digunakan dalam kerja mereka. Semua ilmu pengetahuan dibangun atas dasar logika begitu juga dengan psikologi. Metode pendekatan dan juga penarikan kesimpulan secara menyeluruh akan diambil atas dasar prinsip logika sehingga dengan belajar logika secara sistematis, para psikolog nantinya bisa mengembangkan ilmu psikologi secara sistematis, rasional dan juga logis.
3. Perkembangan Etika. Filsafat juga mempunyai cabang yang cukup penting dalam perkembangan ilmu psikologi yakni etika. Yang dimaksud dengan etika dalam hal ini adalah mengenai moral dan moral disini mengartikan semua yang berhubungan dengan baik atau buruk. Sementara dalam praktek ilmiah, ilmuwan juga membutuhkan etika untuk panduan agar penelitian tidak sampai melanggar nilai moral dasar seperti hak asasi manusia dan juga kebebasan. Sebagai praktisi, seorang psikolog juga akan membutuhkan panduan etis dalam kerja mereka dan panduan etis umumnya akan diterjemahkan dalam bentuk kode etik profesi psikologi.
4. Eksistensialisme. Salah satu dari cabang cabang filsafat yang berpengaruh dalam psikologi adalah eksistensialisme. Beberapa tokoh yang berhubungan dalam hal ini diantaranya adalah Friedrich Nietzsche, Viktor Frankl, Soren Kierkegaard, Jean Paul Sartre dan juga Rollo May. Eksistensialisme merupakan cabang filsafat yang merefleksikan manusia dimana akan selalu bereksistensi dalam hidup sehingga manusia



akan dipandang sebagai individu yang akan terus berproses untuk mendapatkan makna dan tujuan dalam hidup. Eksistensialisme nantinya akan merefleksikan masalah manusia sebagai individu mengenai kecemasan, makna, otentisitas dan juga tujuan hidup dari manusia sebagai fungsi filsafat manusia dalam psikologi dan kehidupan manusia.

5. Mengangkat Asumsi. Hubungan filsafat dengan psikologi selanjutnya adalah ilmu filsafat yang bisa mengangkat asumsi dalam ilmu psikologi. Filsafat juga berguna untuk fungsi kritik pada asumsi dan kritik disini bukan mengartikan sebuah kritik yang menghancurkan namun kritik yang konstruktif agar ilmu psikologi nantinya bisa berkembang menuju arah yang jauh lebih manusiawi dan bisa memahami realitas kehidupan dari manusia dimana asumsi tersebut bisa dibagi menjadi tiga yakni antropologis, epistemologis dan juga metafisis.
6. Refleksi Teori Sosial Kontemporer. Dalam perkembangan psikologi sosial, filsafat bisa memberikan wacana atau sudut pandang yang baru dalam bentuk refleksi teori sosial kontemporer. Dalam filsafat sosial yang menjadi salah satu cabang filsafat, para filsuf dibekali dengan banyak cara pandang fenomena sosial politik seperti massa, kekuasaan, negara, masyarakat, legitimasi, ekonomi, hukum dan juga budaya. Pada pembahasan segala teori tersebut, filsafat sosial nantinya bisa menyumbangkan banyak hal dalam perkembangan psikologi sosial dan juga bentuk dialog diantara ilmu yang komprehensif. Membantu Perkembangan Ilmu Psikologi. Ilmu filsafat sebagai salah satu cabang dari filsafat juga dapat menyumbang besar untuk perkembangan ilmu macam macam psikologi khusus. Ilmu filsafat merupakan cabang dari filsafat yang bisa merefleksikan beberapa konsep dari para ilmuwan seperti contohnya konsep metode, objektivitas, pembuatan kesimpulan dan juga konsep standar kebenaran sebuah pernyataan ilmiah. Psikolog sebagai seorang ilmuwan membutuhkan kemampuan berpikir dari ilmu filsafat dengan tujuan agar para psikolog bisa tetap sadar jika ilmu sebenarnya tidak pernah bisa mencapai kepastian yang mutlak namun hanya dalam level probabilitas.
7. Memberikan Cara Berpikir Radikal, Sistematis dan rasional. Hubungan berikut dari filsafat dengan psikologi adalah filsafat yang bisa memberikan cara berpikir radikal, sistematis sekaligus rasional pada ilmu psikologi sehingga nantinya macam macam teori belajar dalam psikologi bisa menjelajah ke area yang sebelumnya belum pernah tersentuh. Teori dari psikologi tradisional masih beranggapan jika manusia bisa diperlakukan seperti individu yang mutlak dan manusia bisa diperlakukan sebagai objek. Dengan cara berpikir dalam disiplin filsafat, kepercayaan teori psikologi tradisional nantinya bisa kembali ditelaah serta mencari kemungkinan pendekatan baru yang lebih sesuai.
8. Memperlancar Integrasi Antara Ilmu. Filsafat juga bisa berguna untuk memperlancar integrasi diantara berbagai ilmu yang dibutuhkan khususnya ilmu pengetahuan dalam



berkembang ke arah spesialisasi yang akhirnya bisa menimbulkan kebuntuan yang bisa menyebabkan ciri ciri depresiberat.

9. Membedakan Antara Ilmu pengetahuan. Filsafat nantinya juga bisa membantu dalam urusan membedakan antara ilmu pengetahuan dan juga scientisme dimana scientisme bertujuan untuk tidak mengakui kebenaran lain dibandingkan dengan kebenaran yang diutarakan ilmu pengetahuan sekaligus tidak menerima cara pengenalan lainnya dibandingkan dengan cara pengenalan yang dilakukan ilmu pengetahuan. Dengan ini, maka ilmu pengetahuan akan melewati batasan batasan dan akan menjadi sebuah filsafat.
10. Menilai Secara Kritis. Filsafat ilmu bisa memiliki peran untuk menilai secara kritis tentang apa yang dianggap benar oleh ilmu psikologi kognitif. Seperti yang sudah diungkapkan, ilmu memiliki peran besar bagi manusia dan akan mendukung peradaban dari manusia sehingga harus sangat dihargai. Akan tetapi terkadang kelemahan yang harus diperhatikan adalah jika pelaku ilmu berpendapat jika diluar ilmu mereka tidak ada pengetahuan lain yang bisa dibenarkan. Sedangkan kelemahan lainnya adalah adanya anggapan mengenai kebenaran yang dikemukakan secara eksplisit dengan mengabaikan bidang filsafat yang sebenarnya sudah dimasuki oleh para pelaku ilmu yang bersangkutan. Memberikan Solusi Dari Permasalahan. Filsafat merupakan ilmu yang mempertanyakan sebuah jawaban, sementara psikologi adalah ilmu yang menjawab pertanyaan atau masalah dengan katalain berguna sebagai cara menyelesaikan masalah menurut psikologi. Dengan berfilsafat, psikolog nantinya bisa memperoleh solusi dari sebuah permasalahan yang sedang dihadapi klien sebab akan terus diberi pertanyaan seperti kenapa, mengapa, apakah alasannya dan terus seperti itu hingga nantinya diperoleh kesimpulan dari permasalahan tersebut. Pada saat seseorang sudah bisa mempertanyakan dirinya, bagaimana dirinya bisa terbentuk dan seperti apa posisinya dalam alam semesta, itu menandakan seseorang sudah berfilsafat sampai ke taraf tertinggi.
11. Memiliki Pandangan Ilmu Alam dan Supranatural. Psikologi adalah cabang ilmu yang mengulas tentang manusia dimana untuk orang awam tidak menganggap jika psikologi merupakan ilmu perdukunan atau sebuah ilmu supranatural seperti bisa meramal, membaca pikiran dan sebagainya. Sedangkan filsafat membahas tentang refleksi terhadap alam dan semua fenomena yang ada. Dengan menjelaskan fenomena ilmu alam atau ilmu pengetahuan atau sains, maka psikologi dan filsafat mempunyai pandangan yang bisa dikatakan berbeda.
12. Berkaitan Dengan Pikiran dan Kognisi. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, psikolog hanya sedikit ambil bagian dari filsafat yaitu tentang pikiran dan juga kognisi. Akan tetapi 30 tahun terakhir sudah berubah yakni kecerdasan buatan, antropologi, psikologi kognitif dan juga linguistik serta ilmu saraf yang akhirnya membuat ilmu



psikologi dan filsafat berjalan pada jalur yang sama. Filsuf psikolog bahkan juga bisa berkontribusi untuk membuat karya ilmiah pada kedua disiplin tersebut. Saling melengkapi. Hubungan antara filsafat dan psikologi juga bersifat saling melengkapi jika dilihat dari fungsi keduanya. Psikologi bisa menjelaskan secara detail tentang gejala psikis dan psikologis seseorang sehingga sebab, dinamika dan juga kemungkinan dari perilaku bisa dijelaskan secara lengkap. Sedangkan filsafat lebih menargetkan pada aspek manusia secara menyeluruh seperti segi rohani dan jasmani, kebebasan dan determinisme, keilahian dan juga individualitas, kesejarahan dan kebudayaan, kebahasaan dan simbolisme merupakan kesatuan dari gejala dan juga kejadian manusia yang selanjutnya akan dilihat sebagai sebuah integral sehingga fungsi keduanya akan saling melengkapi kebutuhan dari ilmu pengetahuan manusia.

C. Psikologi

1. Definisi Psikologi

Sesuai dengan sejarahnya, pengertian psikologi lebih kepada ilmu yang mempelajari gejala-gejala jiwa pada manusia. Jiwa manusia sendiri bersifat abstrak, sehingga sulit untuk dipelajari secara objektif, maka muncullah psikologi sebagai tolak ukur perubahan jiwa manusia yang dilihat dalam bentuk perilaku. Dalam perkembangannya, psikologi dikenal juga sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku. Kata psikologi berasal dari bahasa Inggris psychology yang dalam istilah lama disebut ilmu jiwa. Kata psychology merupakan dua akar kata yang bersumber dari bahasa Greek (Yunani), yaitu: (1) psyche yang berarti jiwa; (2) logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah psikologi memang berarti ilmu jiwa.

Psikologi pada mulanya digunakan para ilmuwan dan para filosof sebagaimana disebutkan oleh Reber untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam memahami akal pikiran dan tingkah laku aneka ragam makhluk hidup mulai yang primitif sampai yang paling modern. Namun ternyata tidak cocok, lantaran menurut para ilmuwan dan filosof, psikologi memiliki batas-batas tertentu yang berada diluar kaidah keilmuan dan etika falsafi. Kaidah saintifik dan patokan etika filosofis ini tak dapat dibebankan begitusa saja sebagai muatan psikologi.

Sebelum menjadi disiplin ilmu yang mandiri pada tahun 1879 M, psikologi memiliki akar-akar yang kuat dalam ilmu kedokteran dan filsafat yang hingga kini (sekarang) masih tampak pengaruhnya. Dalam ilmu kedokteran, psikologi berperan menjelaskan apa-apa yang terpikir dan terasa oleh organ-organ biologis (jasmaniah). Sedangkan dalam filsafat, psikologi berperan serta dalam memecahkan masalah-masalah rumit yang berkaitan dengan akal, kehendak, dan pengetahuan. Karena kontak dengan berbagai disiplin itulah, maka timbul bermacam macam definisi psikologi yang satu sama lain berbeda, seperti:

1. Psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental (the science of mental life);
2. Psikologi adalah ilmu mengenai pikiran (the science of mind);



3. Psikologi adalah ilmu mengenai tingkah laku (the science of behavior);
4. dan lain-lain definisi yang sangat bergantung pada sudut pandang yang mendefinisikannya.

Psikologi sendiri mempunyai banyak pengertian, yaitu :

1. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses-proses mental baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku.
2. Menurut Ernest Hilgert (1957) psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan lainnya.
3. Menurut George A. Miller psikologi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan dan mengendalikan peristiwa mental dan tingkah laku.
4. Menurut Clifford T. Morgan psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan.
5. Menurut Chaplin psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai perilaku manusia dan hewan, juga menyelidiki terhadap organisme dalam segala ragam dan kerumitannya ketika mereaksi arus dan perubahan alam sekitar dan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang mengubah lingkungan.
6. Menurut Singgih Dirgagunarsa, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia.
7. Menurut Plato dan Aristoteles, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakekat jiwa serta prosesnya. Pengertian psikologi diatas menunjukkan beragamnya pendapat para ahli psikologi. Perbedaan tersebut bermuasal pada adanya perbedaan titik berangkat para ahli dalam mempelajari dan membahas kehidupan jiwa yang kompleks ini. Dan dari pengertian tersebut paling tidak dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan perbuatan individu, dimana individu tersebut tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya. Psikologi adalah ilmu mempelajari gejala kejiwaan yang di tampilkan ataupun hewan yang pemanfaatannya untuk kepentingan manusia ataupun aktivitas- aktivitas individu baik yang disadari maupun yang tidak disadari yang diperoleh melalui salah satu proses atau langkah-langkah ilmiah tertentu serta mempelajari penerapan dasar-dasar atau prinsip-prinsip, metode, teknik, dan pendekatan psikologis untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah dalam pendidikan. Kondisi psikologis adalah kondisi karakteristik psikofistik manusia sebagai individu, yang di nyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungan. Perilaku merupakan manifestasi dan ciri-ciri kehidupan perilaku kognitif, afektif, psikomotor.

Upaya mengenal berbagai unsur dan aspek kejiwaan yang mempengaruhi gerak-gerik dan tingkah laku anak didik, terutama pada saat proses pendidikan sedang berlangsung, biasanya dibahas secara berlangsung, biasanya dibahas secara khusus dan panjang lebar dalam salah satu cabang psikologi yang disebut “psikologi pendidikan” atau “ilmu jiwa pendidikan”. Dengan demikian psikologi pendidikan bisa disebut sebagai “salah satu cabang psikologi yang membahas tentang



berbagai tingkah laku atau gejala kejiwaan anak didik yang berlangsung dalam proses pendidikan”. Atau dengan istilah lain bisa di katakan bahwa proses pendidikan adalah “studi kejiwaan yang sistematis tentang berbagai faktor yang berhubungan dengan gerak gerik dan tingkah laku anak didik yang berlangsung dalam proses pendidikan”

Dari berbagai definisi tersebut, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa psikologi sebagai studi ilmu mengenai proses perilaku dan proses mental. Bidang khusus yang terdapat didalamnya sangat beraneka ragam termasuk psikologi eksperimental, psikologi fisiologi, psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi kepribadian, psikologi klinis dan penyuluhan, Psikologi sekolah dan pendidikan, serta psikologi industri dan permesinan. Dengan demikian, psikologi merupakan salah satu bagian dari Ilmu perilaku atau ilmu sosial.

2. Definisi Psikologi Pendidikan

Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang cara manusia belajar dalam psikologi pengajaran, intervensi pendidikan, pendidikan pengaturan, dan psikologi sosial di dalam sekolah yang mana sebagai organisasi. Ilmu psikologi pendidikan ini berkaitan mengenai cara siswa dapat belajar serta berkembang dalam sebuah sub kelompok. Ada banyak definisi yang diutarakan para ahli terkait psikologi pendidikan, bahkan psikologi pendidikan menurut sebagian ahli adalah subdisiplin psikologi, bukan psikologi itu sendiri. Di antara salah seorang ahli yang menganggap psikologi pendidikan sebagai subdisiplin psikologi terapan adalah Arthur S. Reber (1988, seorang guru besar psikologi pada Brooklyn College, University of New York City). Dalam pandangan Arthur S. Reber (1988) seorang guru besar psikologi pada Brooklyn College, University of New York City, University of British Columbia Canada, dan juga pada University of Innsbruck Austria, psikologi pendidikan adalah sebuah sub disiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teoridan masalah kependidikan yang berguna sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas.
2. Pengembangan dan pembaruan kurikulum.
3. Ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan.
4. Sosialisasi dan proses-proses dan interaksi proses-proses tersebut dengan pendayagunaan ranah kognitif.
5. Penyelenggaraan pendidikan keguruan.

Ada beberapa pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli, antara lain:

1. Menurut Barlow, psikologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang berdasar pada riset psikologis yang menyediakan berasal dari sumber-sumber yang digunakan membantu melaksanakan tugas-tugas guru di dalam sebuah proses belajar mengajar agar dapat berjalan lancar dan efektif.
2. Menurut Tardi, psikologi pendidikan adalah bidang studi psikologi yang berkaitan tentang



penerapan ilmu pengetahuan yang mana mempelajari perilaku-perilaku manusia yang berkaitan dengan usahanya dalam bidang kependidikan.

3. Menurut Witherington, psikologi pendidikan adalah studi sistematis yang menjelaskan tentang proses dan faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Sedangkan definisi pendidikan adalah proses pertumbuhan yang berlangsung dalam sebuah tindakan-tindakan belajar. Menurut Banks & Thompson, psikologi pendidikan adalah kajian perlakuan maupun tingkah laku yang berasal dari manusia yang ada di dalam proses pembelajaran dan pengajaran.
4. Muhibbin Syah mengatakan bahwa dapat dipastikan bahwa disiplin psikologi pendidikan pada dasarnya mencurahkan perhatiannya pada perbuatan atau tindak tanduk orang-orang yang belajardan mengajar. Oleh karenanya, psikologi pendidikan mempunyai dua objek riset dan kajian. (1) Siswa, yaitu orang-orang yang sedang belajar, termasuk pendekatan, strategi, faktor yang mempengaruhi, dan prestasi yang dicapai. (2) Guru, yaitu orang-orang yang berkewajiban atau bertugas mengajar, termasuk metode, model, strategi dan lain-lain yang berhubungan dengan aktivitas penyajian materi pelajaran.
5. Menurut Abd. Rachman Abror, definisi psikologi pendidikan yang dikemukakan oleh Para ahli kiranya tidak nampak adanya perbedaan yang esensial. Satu sama lain mengandung titik kesamaan pandangan. Sehingga Ia menyimpulkan, psikologi pendidikan adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berlangsung dalam proses belajar-mengajar.

Psikologi pendidikan pada dasarnya adalah sebuah disiplin psikologi (atau boleh juga disebut subdisiplin psikologi) yang menyelidiki masalah-masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Lalu, hasil-hasil penyelidikan ini dirumuskan ke dalam bentuk konsep, teori, dan metode yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan proses belajar-mengajar. Alhasil, psikologi pendidikan dapat digunakan sebagai pedoman praktis, disamping sebagai kajian teoritis.

Secara garis besar, banyak ahli yang membatasi pokok-pokok bahasan psikologi pendidikan menjadi tiga macam, antara lain :

1. Pokok bahasan mengenai “belajar”, yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri-ciri khas perilaku belajar siswa, dan sebagainya.
2. Pokok bahasan mengenai “proses belajar”, yakni tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa.
3. Pokok bahasan mengenai “situasi belajar”, yakni suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun nonfisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa.

Jika didasarkan metode psikologi pendidikan akan banyak penjelasan yang berbeda-beda



tentang ruang lingkup psikologi pendidikan. Jika ditanya mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan yang berdasarkan pada buku psikologi pendidikan tentunya anda akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda satu sama lainnya. Sebagian besar buku psikolog akan menjelaskan mengenai ruang lingkup yang luas, namun sebagian lainnya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan yang lebih sempit dan terbatas. Dalam ruang lingkup pendidikan yang lebih luas biasanya akan membahas banyak hal, tak hanya proses belajar namun juga membahas tentang teori psikologi perkembangan, kesehatan mental, hereditas dan lingkungan, evaluasi belajar, dan masih banyak lainnya. Sedangkan untuk ruang lingkup yang lebih sempit, penjelasan hanya berkisar pada proses belajar mengajar saja tanpa menjelaskan lainnya.

Perbedaan ini tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penulis yang menulis buku tersebut. Adayang memang bertujuan untuk memberikan pengantar saja, namun membahas ruang lingkup secara lebih luas tapi tidak mendalam. Jika ruang lingkup pembahasan terbatas, berkisar pada proses belajarmengajar saja namun pembahasan akan lebih mendalam. Sehingga jika berdasarkan pada buku-bukupsikologi pendidikan, tidak akan pernah menunjukkan ruang lingkup psikologi pendidikan yang benar-benar sama. Meskipun begitu, jika didasarkan pada ilmu psikologi, psikologi pendidikan akan membahas hal-hal berikut ini :

1. Pertumbuhan dan perkembangan
2. Hereditas dan lingkungan
3. Potensial serta karakteristik tingkah laku
4. Hasil proses pendidikan serta pengaruhnya di dalam individu yang memiliki sifat personal dansosial
5. Higiene mental dan pendidikan
6. Evaluasi hasil pendidikan
7. Namun menurut penjelasan Sumadi Suryobroto (1987), ruang lingkop ilmu psikologi pendidikan dapat meliputi beberapa hal, antara lain adalah:
8. Pengetahuan mengenai psikologi pendidikan, mulai dari pengertian ruang lingkup, sejarah psikologi pendidikan, dan tujuan untuk mempelajari ilmu tersebut.
9. Pembawaan
10. Lingkungan fisik dan psikologis
11. Proses-pross tingkah laku
12. Perkembangan siswa
13. Hakikat dan ruang lingkup belajar
14. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar
15. Pengukuran pendidikan
16. Hukum dan teori belajar
17. Transfer belajar



18. Aspek praktis pengukuran pendidikan
19. Kesehatan mental
20. Ilmu statistik dasar
21. Pendidikan pembentukan watak atau kepribadian
22. Kurikulum pendidikan sekolah dasar
23. Kurikulum pendidikan sekolah menengah.

Sedangkan menurut Soerjabrata (1974) ruang lingkup psikologi pendidikan ada di dalam peninjauan yang dilakukan secara statis yaitu kajian psikologi tentang siswa yang ada di dalam dunia pendidikan yang mana mencakup gejala jiwa serta tingkah laku umum. Sedangkan untuk peninjauan secara dinamis, psikologi pendidikan mencakup mengenai individu siswa di dalam proses pendidikan terutama pada perubahan tingkah laku.

3. Peran Psikologi Terhadap Pendidikan

Psikologi pendidikan memang sudah menjadi sebuah dasar dalam pembentukan dan pengembangan di dalam sistem kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian di dalam bidang pendidikan. Kontribusi di dalam perkembangan dunia pendidikan memiliki beberapa manfaat, antara lain adalah :

a. Peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan

Dari sisi psikologis, pengembangan diri siswa dapat didasarkan pada kemampuan kognitif, afektif, serta psikomotor. Kemampuan tersebut dapat terlihat dari perkembangan sikap, tingkah laku, motivasi, dan hal lainnya. Komponen pembelajaran ini adalah proses input menuju output. Lalu untuk penggunaan kurikulum yang digunakan sebagai kerangka alur input ke output membutuhkan hakikat-hakikat psikologi. Kurikulum pendidikan yang saat ini mulai dikembangkan adalah kurikulum dengan basis kompetensi. Kompetensi disini bertujuan untuk dapat mengembangkan kemampuan terlebih pada pengetahuan, ketrampilan, serta refleksi dalam bertindak dan berpikir. Kebiasaan bertindak dan berpikir yang memiliki refleksi diri yang konsisten akan memungkinkan individu tersebut terbentuk menjadi individu yang kompeten dan unggul.

b. Peran psikologi terhadap sistem pembelajaran

Terkait teori-teori psikologi yang berkaitan dengan dampak seseorang dalam bertindak laku, ilmu psikologi juga memiliki pengaruh dalam sistem pembelajaran di dunia pendidikan secara positif. Siswa dapat sungguh-sungguh belajar saat respon psikologinya memang dibimbing dengan pengajar yang baik. Proses pemahaman di dalam pembelajaran sebuah topik akan lebih mudah jika penyelesaian-penyelesaian masalah di dalam pembelajaran sudah dialami. Keinginan dan hasrat untuk bisa menjadi yang lebih tinggi



melalui pendekatan psikologi dari guru melalui interaksi dan komunikasi yang sangat menyenangkan. Tak hanya itu saja, kehadiran psikologi pendidikan juga melahirkan beragam prinsip-prinsip pembelajaran yang dijelaskan Sudirwo (2002) :

- 1) Seseorang yang belajar harus mempunyai sebuah tujuan
- 2) Tujuan lahir didasarkan pada kebutuhan bukan sebuah paksaan
- 3) Bersedia mengalami beberapa kesulitan
- 4) Belajar dapat dibuktikan dengan adanya perubahan perilaku
- 5) Belajar membutuhkan adanya insight mengenai apa yang harus dipahami dan dipelajari
- 6) Seseorang yang membutuhkan bimbingan
- 7) Ujian dibutuhkan namun harus didahului dengan adanya pemahaman.

c. Peran psikologi terhadap sistem penilaian

Ilmu psikologi juga memberikan peranan dan manfaat dalam sistem penilaian. Misalnya, melalui psikologi dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kecerdasan peserta didik, tes bakat digunakan untuk mengetahui bakat dan potensi di dalam diri peserta didik sehingga nantinya lebih mudah untuk dibimbing dan membantu mengembangkan potensi di dalam diri, tes aspek kepribadian digunakan untuk membantu guru agar lebih bisa mengenal baik pribadi siswa-siswanya sehingga nantinya dapat memberikan pendekatan di dalam proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Beragam tes psikologi dapat membantu untuk memberikan penilaian kepada masing-masing siswa yang digunakan untuk mempermudah dalam menjembatani potensi, keinginan, ataupun impian siswa yang sesuai dengan bakat dan kemampuan.

Secara garis besar, banyak ahli yang membatasi pokok-pokok bahasan psikologi pendidikan menjadi 3 (tiga) macam :

- 1) Pokok bahasan mengenai “belajar”, yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri-ciri khas perilaku belajar siswa, dan sebagainya.
- 2) Pokok bahasan mengenai “proses belajar”, yakni tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa.
- 3) Pokok bahasan mengenai “situasi belajar”, yakni suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun nonfisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa.

d. Manfaat dan Metode Psikologi Pendidikan

1) Manfaat Psikologi Pendidikan

Peserta didik merupakan subjek dari psikologi pendidikan, di dalamnya tidak terlepas dengan perilaku dalam mengekspresikan diri pada situasi berlangsungnya pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Bentuk ekspresi yang dilakukan oleh anak/peserta didik



tidak lepas dari unsur psikologi, seperti: kesiapan mereka untuk menerima pelajaran, kesehatan mental yang sedang dialaminya, minat belajarnya dan lain-lain. Apabila guru/pendidik telah memperhatikan berbagai ekspresi mereka, maka dengan mudah guru/pendidik memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Dengan demikian, seorang pendidik dituntut untuk mengetahui dan memahami makna ekspresi yang dilakukan oleh anak didiknya, dengan tetap memperhatikan minat, kebutuhan dan kesiapan dalam belajar. Dari penjelasan diatas, terdapat peran penting dari psikologi pendidikan untuk peserta didik. Adapun manfaat dari psikologi pendidikan sebagai berikut:

- a) Merumuskan program pembelajaran secara tepat.
- b) Memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai.
- c) Memberikan bimbingan atau konseling.
- d) Memfasilitasi dan memotivasi belajar siswa.
- e) Menciptakan iklim belajar yang kondusif.
- f) Berinteraksi secara tepat dengan siswanya.
- g) Menilai hasil pembelajaran yang adil

2) Metode Psikologi Pendidikan

Psikologi Pendidikan sebagai bagian/cabang dari psikologi tentunya dalam memperoleh fakta- fakta pengetahuan yang diperlukan oleh ilmu ini menggunakan cara-cara studi (Metode Penelitian) yang tidak jauh berbeda dengan Psikologi sebagai induknya. Dalam memperoleh fakta-fakta pengetahuan tentang tingkah laku yang khusus dalam situasi yang ada hubungannya dengan tujuan dan praktek pendidikan di sekolah sebagaimana yang sudah disebutkan diatas, Psikologi Pendidikan akan menggunakan metode-metode penelitian psikologi sebagai berikut :

a) Metode Observasi

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap tingkah laku peserta didik atau objek lainnya dalam situasi wajar, dilaksanakan dengan berencana, kontinyu, sistematis, serta diikuti dengan pencatatan atau perekaman secara lengkap. Hal-hal yang harus diperhatikan seorang peneliti maupun pendidik atau personal lainnya yang akan menggunakan metode observasi dalam mengumpulkan data, antara lain : Situasi wajar, Berencana, Kontinyu, dan Sistematis.

b) Metode Observasi Naturalistik

Naturalistic observation adalah sejenis observasi yang dilakukan secara alamiah, karena itu peneliti berada diluar objek yang diteliti atau tidak menampakkan diri sebagai orang yang sedang melakukan penelitian.

c) Metode Eksperimen

Eksperimen merupakan serangkaian percobaan yang dilakukan oleh eksperimenter



(peneliti yang bereksperimen) dalam sebuah laboratorium atau ruangan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, apa saja yang akan atau telah dilakukan oleh seorang eksperimen pasti ada unsur kesengajaan untuk diciptakan situasi buatan dalam pendidikan. Sedangkan teknik pelaksanaannya disesuaikan dengan data yang akan diangkat, misalnya: data pendengaran siswa, penglihatan siswa, gerak mata siswa ketika membaca, juga untuk mengatur kecepatan siswa terhadap suatu stimulus tertentu. Secara tidak langsung, tujuan dari peneliti atau pendidik menggunakan metode ini untuk menguji keabsahan dan kecermatan kesimpulan yang ditarik dari hasil temuan penelitian dengan menggunakan metode lain (misalnya observasi), kemudian menimbulkan keragu-raguan atau masalah baru, maka eksperimen atau percobaan dapat dilakukan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka rancangan eksperimen dibuat sebaik mungkin, sehingga semua unsur peneliti baik pengguna laboratorium atau tempat dan subjek yang akan diteliti, betul-betul memenuhi syarat penelitian eksperimental. Obejek yang akan diteliti dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu :

- a. Kelompok percobaan (eksperimental group), terdiri dari sejumlah orang yang tingkah lakunya diteliti dengan perlakuan khusus, sesuai dengan data yang diinginkan.
- b. Kelompok pembandingan (control group), terdiri dari objek yang jumlah dan karakteristiknya sama kelompok percobaan, tetapi tingkah lakunya tidak diteliti atau diperlakukan seperti kelompok percobaan.

d) Metode Tes

Metode ini dilakukan dengan memberikan tugas yang harus dilakukan oleh subjek atau informan, baik berbentuk tulisan maupun lisan. Metode ini ada kemiripan dengan metode eksperimen. Tetapi ada juga perbedaannya. Ada beberapa macam tes, seperti: tes intelegensi, tes sikap, tes situasi, tes kecepatan reaksi, tes hasil belajar dan lain sebagainya.

e) Metode Kuesioner

Kuesioner (Questionnaire) disebut juga dengan :

- a) Metode surat-menyurat (mail survey), sebab pelaksanaan penyebaran dan pengambilan data sering dikirimkan ke dan dari responden menggunakan jasa pos.
- b) Metode angket (Perancis : Enquete) berupa daftar yang memuat responden untuk dikerjakan atau dijawab. Biasanya jawaban dalam angket sudah tersedia, sehingga responden / subjek tinggal memilih jawaban atau memberi tambahan jawaban manakala jawaban yang sudah tersedia kurang memenuhi jawaban. Untuk memperoleh data yang diharapkan dalam menggunakan metode ini, maka para peneliti harus melakukan uji coba (try out) kepada sejumlah orang tertentu yang memiliki latar belakang dan karakteristik yang sama dengan calon responden.

f) Metode Interview

Metode ini hampir ada kesamaannya dengan metode kuesioner, yaitu sama-sama memberi beberapa pertanyaan kepada subjek / responden, hanya saja interview digunakan untuk



mencari data dengan menggunakan wawancara atau dialog secara lisan. Oleh karena itu, metode ini lebih cocok digunakan oleh peneliti yang : 1) Jumlah responden sedikit, 2) Wilayah atau tempat responden dapat dijangkau oleh peneliti, 3) Ada maksud tertentu, terkait dengan persoalan yang harus dirahasiakan oleh kedua belah pihak (peneliti dan responden), 4) Ada hubungan personal antara peneliti dengan responden, sehingga data tersebut akan diperoleh secara objektif.

g) Metode Studi Kasus

Metode Studi Kasus atau Case Study merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh gambaran yang rinci mengenai aspek-aspek psikologi peserta didik atau sekelompok masyarakat (kecil) tertentu. Metode ini selain digunakan oleh para peneliti psikologi, juga para peneliti ilmu-ilmu sosial yang lebih memungkinkan untuk melakukan investigasi (penyelidikan dengan mencatat fakta) dan penafsiran yang lebih luas dan mendalam.

h) Metode Penyelidikan Klinis

Metode ini juga disebut dengan clinical method yang hanya dimanfaatkan oleh para ahli psikolog klinis atau psikiater. Oleh karena itu, dalam penggunaan metode ini harus melalui prosedur diagnosis dan penggolongan penyakit kelainan jiwa, juga cara memberi perlakuan pemulihan terhadap kelainan jiwa tersebut. Yang perlu diperhatikan oleh para peneliti dalam menggunakan metode ini hanya diperuntukkan bagi responden atau anak didik yang mengalami penyimpangan perilaku. Oleh karena itu, penggunaan sarana dan cara yang dikaitkan metode klinis harus selalu memperhatikan batas-batas kesanggupan siswa. Tidak kalah pentingnya, bahwa metode klinis harus selalu mementingkan intensitas dan ketelitian yang sungguh-sungguh dari peneliti atau pendidik. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh peneliti dengan menggunakan metode klinis adalah untuk memastikan sebab-sebab timbulnya ketidaknormalan perilaku responden atau peserta didik atau lainnya sebagai objek.

i) Metode Sosiometris

Metode ini digunakan untuk mempelajari hubungan sosial peserta didik atau pendidik atau sekelompok masyarakat dalam skala kecil, sehingga dapat diketahui popular dan terisolernya salah satu dari mereka. Metode ini juga dapat digunakan dilingkungan sekolah atau dalam satu kelas atau sekelompok komunitas masyarakat, maka cara yang digunakan sebagai berikut: seluruh peserta didik dalam kelas tersebut dipersilahkan untuk menulis nama-nama temannya yang sangat disenangi dan tidak disenangi pada sesuatu hal (seperti : belajar bersama, bermain bersama, bertukar pikiran, mengerjakan tugas dan lain-lain) dikertas tulis. Selanjutnya hasil pemikiran tersebut disusun dalam suatu tabula tau sosiogram, dengan tetap memperhatikan jumlah pernyataan responden yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam hal-hal yang sudah ditentukan. Sesudah itu, hasilnya akan tampak dari masing-masing responden, seperti deretan vertical sebagai pemilih dan deretan horizontal sebagai terpilih. Sebagai hasil



pemilihan teman yang disenangi dan tidak disenangi selanjutnya ditabulasikan, kemudian data tersebut dianalisis dan analisisnya dapat menggunakan sosiogram atau menghitung indeks popularitas (IP) masing-masing.

3) Pentingnya Mempelajari Psikologi Pendidikan

a) Pokok Permasalahan Pendidikan

Pada bagian ini akan dibahas empat masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya. Secara kuantitatif dapat dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan. Indikator pencapaiannya dapat dilihat pada kemampuan baca tulis masyarakat yang mencapai 67,24%. Hal ini sebagai akibat dari program pemerataan pendidikan, terutama melalui INPRES SD yang dibangun oleh rezim Orde Baru. Namun demikian, keberhasilan dari segi kualitatif pendidikan di Indonesia belum berhasil membangun karakter bangsa yang cerdas dan kreatif apalagi unggul.

Pengetahuan tentang bagaimana memindahkan informasi dan kemampuan setidaknya sama pentingnya dengan pengetahuan tentang informasi dan kemampuan itu sendiri. Kita semua mempunyai guru (sayangnya paling sering dosen perguruan tinggi) yang cerdas dan berpengetahuan mendalam tentang bidang mereka tetapi tidak dapat mengajar.

Adapun masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Masalah pemerataan pendidikan
- b) Masalah mutu pendidikan
- c) Masalah efisiensi pendidikan
- d) Masalah relevansi pendidikan

Berikut ini adalah penjelasan detail mengenai keempat jenis permasalahan pokok pendidikan tersebut.

a) Masalah Pemerataan Pendidikan

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai wahana untuk memajukan bangsa dan kebudayaan nasional, pendidikan nasional diharapkan dapat menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjukkan pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga Negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Pada masa awalnya, di tanah air kita pemerataan pendidikan itu telah dinyatakan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, sebagai dasar pendidikan dan



pengajaran di sekolah. Pada Bab XI pasal 17 berbunyi : Tiap- tiap warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran padasekolah itu dipenuhi. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan.

Banyak macam pemecahan masalah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, langkah-langkahyangdi tempuh melalui cara konvensional dan cara inovatif.

Cara konvensional

1. Membangun gedung sekolah seperti SD Inpres atau ruang belajar
2. Menggunakan gedung sekolah untuk double shift (sistem pergantian pagi dan sore). Sehubungan dengan itu yang perlu dikalahkan, utamanya untuk pendidikan dasar ialah membangkitkan kemauan belajar bagi masyarakat atau keluarga yang kurang mampu agar mau menyekolahkan anaknya.

Cara Inovatif

1. Sistem pamong (pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru) atau (Instructional Management by Parent, Community and teacher). Sistem tersebut di rintis di sekolah dan didiseminasikan ke beberapa provinsi.
2. SD kecil pada daerah terpencil
3. Sistem guru kunjung
4. Kejar paket A dan B
5. Belajar jarak jauh, seperti Universitas terbuka.

b) Masalah Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran, dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya jika luaran tersebut terjun kelapangan kerja penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes unjuk kerja (performance test). Lazimnya sesudah itu masih dilakukan pelatihan pemagangan bagi calon untuk penyesuaian dengan tuntutan persyaratan kerja di lapangan. Jadi mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas keluarannya. Jika tujuan pendidikan nasional dijadikan kriteria, maka pertanyaannya adalah: Apakah keluarga dari suatu sistem pendidikan menjadi pribadi yang bertakwa, mandiri dan berkarya, anggota masyarakat yang sosial dan bertanggung jawab, warga negara yang cinta kepada tanah air dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial. Dengan kata lain apakah keluaran itu mewujudkan diri sebagai manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan membangun lingkungannya. Kualitas luaran seperti itu disebut nurturant effect. Meskipun di sadari bahwa pada hakekatnya produk dengan ciri-ciri seperti itu tidak semata-mata hasil



sistem pendidikan sendiri. Tetapi jika terhadap produk seperti itu sistem pendidikan di anggap mempunyai andil yang cukup, yang tetap menjadi persoalan ialah carapengukuran produk tersebut tidak mudah. Berhubung dengan sulitnya pengukuran terhadap produk tersebut maka jika orang berbicara tentang mutu pendidikan, umumnya hanyamengasosiasikan dengan hasil belajar yang dikenal sebagai hasil Ujian Negara atau hasil Sipenmaru, UMPTN (yang bias di sebut instructional effect), karena ini yang mudah di ukur. Hasil UN dan lain-lain tersebut itu di pandang sebagai gambaran tentang hasil pendidikan. Jika terjadi belajar yang tidak optimal menghasilkan skor hasil ujian.yang baik maka hampir dapat dipastikan bahwa hasil belajar tersebut adalah semu. Ini berarti bahwa pokok permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada masalah pemrosesan pendidikan. Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu, didalam TAP MPR RI 1998 tentang GBHN disebutkan bahwa titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkaran mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan, dan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya untuk memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan pengajaran ilmu pengetahuan alam dan matematika. Umumnya kondisi mutu pendidikan di seluruh tanah air menunjukkan bahwa di daerah pedesaan utamanya di daerah terpencil lebih rendah daripada di daerah perkotaan.

Pemecahan Masalah Mutu Pendidikan

Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia dan manajemen sebagai berikut:

1. Seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan PT.
2. Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut misalnya berupa pelatihan, penataran, seminar, kegiatan-kegiatan kelompok studi seperti PKG dan lain- lain.
3. Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tenteram untuk belajar.
4. Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran dan peralatan laboratorium.
5. Peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran.

Kegiatan pengendalian mutu yang berupa kegiatan-kegiatan:

1. Laporan penyelenggaraan pendidikan oleh semua lembaga pendidikan
2. Supervisi dan monitoring pendidikan oleh penilik dan pengawas
3. Sistem ujian nasional atau Negara seperti Ebtanas, Sipenmaru atau UMPTN.
4. Akreditasi terhadap lembaga pendidikan untuk menetapkan status suatu Lembaga

c) Masalah Efisiensi Pendidikan

Masalah Efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan



mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi yang sebaliknya, efisiensinya berarti rendah. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah :

1. Bagaimana tenaga kependidikan difungsikan.
2. Bagaimana parasarana dan sarana pendidikan di gunakan.
3. Bagaimana pendidikan diselenggarakan.
4. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga.

Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru, dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan.⁴⁵ Untuk itu seorang guru harus mempunyai kompetensi dalam bidangnya. Kompetensi menurut Louise Moqvist adalah *“competency has been defined in the light of actual circumstances re-lating to the individual and work. Sementara itu, dari Training Agency sebagaimana disampaikan Len Holmes (1992) menyebutkan bahwa: “A competence is a description of something which a person who works in a given occupational area should be able to do. It is a description of an action.*

Masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang sangat terbatas. Pada masa 5 tahun terakhir ini jatuh pengangkatan setiap tahunnya hanya sekitar 20% dari kebutuhan tenaga dilapangan. Sedangkan persediaan tenaga yang siap di angkat (untuk sebagian besar jenis bidang studi, sebab ada bidang studi tertentu yang belum tersedia tenaganya) lebih besar dari kebutuhan di lapangan. Dengan demikian berarti lebih dari 80% tenaga yang tersedia tidak segera difungsikan. Ini berarti pemubaziran terselubung karena biaya investasi pengadaan tenaga tidak segera terbayar kembali melalui pengabdian (belum terjadi rate of return). Sebab tenaga kependidikan khususnya guru tidak dipersiapkan untuk berwirausaha. Masalah penempatan guru, khususnya guru bidang penempatan studi, sering mengalami kepincangan, tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Masalah pengembangan tenaga kependidikan di lapangan biasanya terlambat, khususnya pada saat menyongsong hadirnya kurikulum baru. Setiap pembaruan kurikulum menuntut adanya penyesuaian dari para pelaksana di lapangan.

1) Masalah Relevansi Pendidikan

Telah di jelaskan pada bagian terdahulu bahwa tugas pendidikan ialah menyiapkan sumberdaya manusia untuk pembangunan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam seperti sektor produksi, sektor jasa dan lain-lain. Baik dari segi jumlah maupun dari



segi kualitas. Jika sistem pendidikan menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua sektor pembangunan yang aktual (yang tersedia) maupun potensial dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi.

Sebenarnya kriteria relevansi seperti yang dinyatakan tersebut cukup ideal jika dikaitkan dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya pada gambaran tentang kerajaan yang ada antara lain sebagai berikut:

- 1) Status lembaga pendidikan sendiri masih bermacam-macam kualitasnya.
- 2) Sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan luaran siap pakai.

Peta kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratan yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh Lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun programnya tidak tersedia. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat sebagai suprasistem. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai suprasistem tersebut dimana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan intern sistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Artinya, suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini, yaitu:

- 1) Bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan.
- 2) Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan ketrampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat.

Masalah Pendidikan Ada dua faktor penghambat perbaikan mutu pendidikan. Yaitu, (1) gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan kesempatan pendidikan bagi rakyat banyak memerlukan penghimpunan dan pengarahannya dana dan daya. Faktor (2), kondisi satuan-satuan pendidikan pada saat demikian mempersulit upaya peningkatan mutu karena jumlah murid dalam kelas terlalu banyak, tenaga pendidik kurang kompeten, sarana yang tidak memadai, dan seterusnya.

2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Berkembangnya Masalah Pendidikan

Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan antara lain: perkembangan iptek dan seni, laju pertumbuhan penduduk, aspirasi masyarakat dan keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan :

1) Perkembangan IPTEK dan Seni

Sejalan dengan berkembangnya arus globalisasi di negara kita, terutama dengan pesatnya peningkatan teknologi komunikasi, membuat segala sesuatu harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Implikasinya di dalam masyarakat sangat terasa. Oleh karena



itu pendidikan harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dengan IPTEK. Ilmu Pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat. Seni merupakan kebutuhan hidup manusia. Pengembangan kualitas seni secara terprogram menuntut tersedianya sarana pendidikan tersendiri disamping program-program lain dalam sistem pendidikan.

2) Laju Pertumbuhan Penduduk

Masalah kependudukan dan pendidikan bersumber pada 2 hal yaitu: penambahan penduduk dan penyebaran penduduk.

3) Aspirasi Masyarakat

Belakangan ini aspirasi masyarakat semakin meningkat sejalan dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 'reformasi'. Aspirasi tersebut menyangkut kesempatan pendidikan, kelayakan pendidikan dan jaminan terhadap taraf hidup setelah mereka menjalani proses pendidikan.

4) Keterbelakangan Budaya dan Sarana

Kehidupan Keterbelakangan budaya disebabkan beberapa hal misalnya letak geografis yang terpencil dan sulit dijangkau, penolakan masyarakat terhadap unsur budaya baru karena dikhawatirkan akan mengikis kebudayaan lama, dan ketidakmampuan ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut.

D. Sosiologi

a) Pengertian Sosiologi Pendidikan

Kata sosiologi pertama kali dipakai oleh Auguste Marie Francois Xavier Comte, seorang filsuf Perancis, karya utamanya berjudul *The Course of Positive Philosophy* yang diterbitkan antar tahun 1830 dan tahun 1842. Sebagai suatu disiplin ilmu, sosiologi lahir sebagai bagian dari tradisi intelektual yang bertumpu pada kerangka pemikiran Eropa Barat dan Amerika.

Sosiologi pendidikan merupakan suatu studi yang mempelajari tentang perkembangan kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial dapat terpengaruh oleh cara pendidikan yang pernah atau sedang dijalankan. Pendidikan sendiri merupakan hal yang diperlukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam pengembangan ini, pendidikan berguna untuk memberi penilaian logika, etika, serta estetika yang terdapat pada diri manusia itu sendiri.

Lebih lanjut, melalui pentingnya pendidikan tersebut, sosiologi pendidikan hadir menawarkan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang tercipta dari pengaruh pendidikan terhadap kehidupan sosial dan sebaliknya.

Untuk mengerti dan memahami disiplin sosiologi pendidikan, maka diperlukan telaah secara komprehensif, yang dimulai dari definisi, sejarah kemunculannya sampai menjadi



sebuah pendekatan yang diakui dan dikenal luas. Mempelajari sosiologi pendidikan tidak bisa dilepaskandari telaah komprehensif tersebut, karena kemunculan disiplin ilmu ini merupakan persentuhan antara disiplin sosiologi dan ilmu pendidikan. Pada awalnya, sosiologi dan ilmu pendidikan memiliki wilayah kajian yang berbeda. Namun karena perkembangan sosial yang berlangsung menyebabkan kedua disiplin ilmu ini bersinergi. Dengan kata lain, sosiologi pendidikan merupakan subdisiplin yang menempati wilayah kajian yang menjembatani disiplin sosiologi dengan ilmu pendidikan. Ruang jembatan tersebut secara garis besar diisi dengan titik-titik persentuhan dalam konsep, teori, metodologi, ruang lingkup, maupun pendekatan yang dipergunakan.

Secara historis, sosiologi dan pendidikan dianggap sebagai pengetahuan kuno, yang keberadaannya berbarengan dengan awal mula adanya manusia. Apabila sosiologi dipahami dalam arti luas, yakni sebagai social interaction (interaksi sosial) atau human relationship (hubungan antar manusia), maka sosiologi telah ada sejak zaman Nabi Adam. Namun sosiologi dalam pengertian scientific (ilmu pengetahuan), yakni sebagai ilmu yang tersistematisasi dan bermetode, maka baru diakui sejak abad ke 19 melalui Auguste Comte (1798-1857), yang kemudian ia dikenal sebagai bapak pendiri sosiologi.

Demikian juga dengan pendidikan, kalau pendidikan dipahami dalam arti luas, yakni sebagai proses belajar, mengenal, dan mengetahui, maka pendidikan telah ada sejak zaman Nabi Adam juga. Ketika Allah swt mengajari Adam untuk mengenal nama-nama seluruh benda yang ada di sekitarnya, dapat dikatakan bahwa peristiwa tersebut sebagai aktivitas pendidikan (QS. Al- Baqarah: 31): “Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya kemudian Dia perlihatkan kepada para Malaikat seraya berfirman, ‘sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar!’”. Tetapi sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, ilmupendidikan baru diakui pada abad 19, ketika para ahli berhasil merumuskan obyek, metode, dansistemnya. Mempelajari sebuah ilmu sebaiknya dimulai dari definisinya. Mengetahui definisi akan memudahkan kita untuk mengerti dan memahami isinya. Istilah sosiologi pendidikan merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata; sosiologi dan pendidikan. Untuk menjawab pertanyaan ini secara terperinci, lebih baik ditinjau dari perspektifetimologis dan terminologis.

Secara etimologis (asal-usul kata), “sosiologi pendidikan” berasal dari kata ‘sosiologi’ dan ‘pendidikan.’ ‘Sosiologi’ berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yakni kata ‘socius’ dan ‘logos’. ‘Socius’ (Yunani) yang berarti ‘kawan’, ‘berkawan’, ataupun ‘bermasyarakat’, sedangkan ‘logos’ berarti ‘ilmu’ atau bisa juga ‘berbicara tentang sesuatu’. Dengan demikian secara harfiahistilah “sosiologi” dapat diartikan ilmu tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya.

Secara terminologis, beberapa ahli mendefinisikan sosiologi secara agak berbeda. Marx



Weber memandang sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami (interpretative understanding) tindakan sosial serta hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal. Pitirim A. Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari: (a) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka ragam gejala-gejala sosial (misal: antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi; dan gerakan masyarakat dengan politik); (b) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala-gejala sosial dengan gejala-gejala non sosial (misal: gejala geografis dan biologis).

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli dapatlah disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat atau cabang ilmu sosial yang mempelajari secara sistematis kehidupan bersama manusia yang ditinjau dan diamati dengan menggunakan metode empiris yang di dalamnya terkandung studi tentang kelompok-kelompok manusia, tatanan sosial, perubahan sosial, sebab-sebab sosial, dan segala fenomena sosial yang mempengaruhi perilaku manusia. Jadi sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu berhubungan satu dengan yang lain dalam kelompoknya dan bagaimana susunan unit-unit masyarakat atau sosial di suatu wilayah serta kaitannya satu dengan yang lain. Sementara istilah pendidikan, secara etimologis mempunyai padanan kata education dalam bahasa Inggris, dan al-tarbiyah, al ta'lim, al-ta'dib, dan al-riyadah, dalam bahasa Arab. Walau setiap term tersebut mempunyai makna yang berbeda, karena perbedaan teks dan konteks kalimatnya, namun dalam beberapa hal, term-term tersebut mempunyai kesamaan makna. Dalam definisi ini buku ini diambil sisi kesamaannya. Pengertian 'pendidikan', secara sederhana, adalah proses pengubahsuaian sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Secara terminologis, menurut Muhammad Athiyah al-Abrasyi, mendefinisikan pendidikan (tarbiyah) sebagai upaya mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna, kebahagiaan hidup, cinta tanah air, kekuatan raga, kesempurnaan etika, sistematis dalam berpikir tajam, berperasaan, giat dalam berkreasi, toleransi pada yang lain, berkompetensi dalam mengungkapkan bahasa tulis dan bahasa lisan dan terampil berkegiatan. Sementara Azyumardi Azra menganggap pendidikan sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Pengertian lain, pendidikan dipahami sebagai usaha manusia optimistik mendasar yang dikenali dari aspirasi untuk kemajuan dan kesejahteraan. Pendidikan dianggap sebagai tempat anak-anak bisa berkembang sesuai kebutuhan dan potensi unik mereka. Selain itu juga sebagai salah satu arti terbaik dalam mencapai kesetaraan sosial yang lebih tinggi. Banyak orang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan setiap orang hingga potensi tertinggi mereka dan memberi kesempatan untuk mencapai segalanya dalam kehidupan sesuai kemampuan alami mereka. Dari



penjelasan tentang asal-usul kata sosiologi pendidikan di atas, kini saatnya memahami apa arti sebenarnya dari sosiologi pendidikan itu? Secara singkat, yang menjadi masalah sentral sosiologi pendidikan adalah aspek-aspek sosiologi dalam pendidikan.

Sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pendidikan yang sangat fundamental. Secara terminologis (istilah), menurut Zainuddin Maliki, sosiologi pendidikan adalah kajian bagaimana institusi dan kekuatan sosial mempengaruhi proses dan outcome pendidikan dan begitu pula sebaliknya. Menurut definisi ini terdapat hubungan timbal-balik antara pendidikan dan perkembangan sosial. Pendidikan akan melahirkan perubahan sosial, begitu juga perubahan sosial mempengaruhi arah pendidikan, sehingga antara pendidikan dan perubahan sosial terdapat hubungan simbiosis-mutualisme. Menurut S. Nasution, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Definisi ini menginginkan pendidikan sebagai aktivitas sosial agar dapat mencetak generasi yang memiliki kepribadian, karakter, dan moral yang baik. Abdullah Idi mendefinisikan sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mendeskripsikan dan menjelaskan tentang lembaga-lembaga, kelompok-kelompok sosial, proses sosial, dimana terdapat suatu hubungan sosial (social relationship) yang dengan interaksi sosial itu individu memperoleh dan mengorganisasikan pengalamannya. Dari definisi ini dapat diambil pemahaman bahwa institusi pendidikan hendaknya dapat dijadikan sebagai wahana untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan agar dapat dijadikan bekal dalam kehidupannya. Damsar mendefinisikan sosiologi pendidikan ke dalam dua pengertian. *Pertama*, sosiologi pendidikan adalah suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial, dengan pendidikan. Dalam hubungan ini dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi pendidikan. Juga sebaliknya, bagaimana pendidikan mempengaruhi masyarakat. *Kedua*, sosiologi pendidikan diartikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena pendidikan. Pendekatan sosiologis terdiri dari konsep, variabel, teori, dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk di dalamnya kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan. Abu Ahmadi menjelaskan bahwa sosiologi pendidikan adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses belajar dan juga mempelajari antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dengan kata lain, sosiologi pendidikan bisa disebut sebagai hubungan individu dengan lingkungan sekitarnya, sebab antara seorang individu tidak dapat berdiri sendiri di lingkungan sosial mereka.

Masih banyak lagi definisi yang dibuat oleh para ahli tentang sosiologi pendidikan. Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang membahas dan diterapkan dalam memecahkan segala problematika yang ada dalam pendidikan, terutama dalam interaksi sosial antara peserta didik dengan lingkungan,



guru, dan sesamanya, begitu juga dalam melihat gejala-gejala sosial yang berkembang dalam sistem pendidikan, sehingga aspek-aspek sosiologi yang ada dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan segala suatu yang berhubungan dengan pendidikan, guna tercapainya kemajuan dalam bidang pendidikan. Kajian sosiologi pendidikan menekankan implikasi dan akibat sosial dari pendidikan dan memandang masalah-masalah pendidikan dari sudut totalitas lingkup sosial kebudayaan, politik dan ekonomisnya bagi masyarakat. Apabila psikologi pendidikan memandang gejala pendidikan dari konteks perilaku dan perkembangan pribadi, maka sosiologi pendidikan memandang gejala pendidikan sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat.

b) Tujuan Mempelajari Sosiologi Pendidikan

Ada beberapa konsep tentang pentingnya mempelajari sosiologi pendidikan, di antaranya, menurut Zainuddin Maliki, tujuan mempelajari sosiologi pendidikan adalah untuk:

1. Menganalisis proses sosialisasi.
2. Menganalisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat.
3. Menganalisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat.
4. Membantu memecahkan masalah-masalah sosial pendidikan.
5. Menganalisis tujuan pendidikan secara obyektif.
6. Mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya.

Sementara menurut Nasution, ada beberapa konsep tentang tujuan Sosiologi Pendidikan, antarlain sebagai berikut:

1. Analisis proses sosiologi.
2. Analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat,
3. Analisis intraksi social di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat,
4. Alat kemajuan dan perkembangan social,
5. Dasar untuk menentukan tujuan pendidikan,
6. Sosiologi terapan, dan
7. Latihan bagi petugas pendidikan.

Sedangkan menurut Ary Gunawan, tujuan sosiologi pendidikan sebagai berikut:

1. Menganalisis proses sosialisasi anak, baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Pengaruh lingkungan dan kebudayaan masyarakat terhadap perkembangan pribadi anak perludiperhatikan.
2. Menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Banyak pakar atau orang yang beranggapan bahwa pendidikan memberikan peran yang sangat besar bagi kemajuan masyarakat. Sebab, dengan memiliki ijazah yang tinggi, seseorang akan lebih mampu



menduduki jabatan yang lebih tinggi serta penghasilan yang lebih banyak. Benarkah?

3. Menganalisis status pendidikan di dalam masyarakat. Berdirinya suatu lembaga pendidikan dalam masyarakat sering disesuaikan dengan tingkatan daerah tempat lembaga pendidikan berada.
Misalnya, perguruan tinggi bisa didirikan di tingkat provinsi atau minimal kabupaten yang cukup baik animo mahasiswanya.
4. Menganalisis partisipasi orang-orang terdidik dalam kegiatan sosial. Peran atau aktivitas warga yang berpendidikan sering menjadi ukuran tingkat kemajuan suatu masyarakat. Orang-orang berpendidikan mudah untuk berperan dalam masyarakat.
5. Menentukan tujuan pendidikan. Sejumlah pakar berpendapat bahwa tujuan pendidikan nasional harus bertolak dan dipulangkan pada filsafat hidup bangsa tersebut.
6. Memberikan latihan-latihan yang efektif dalam bidang sosiologi kepada guru atau orang yang terlibat dalam pendidikan sehingga memberikan kontribusi yang tepat terhadap proses pendidikan.

Konsep tentang tujuan sosiologi pendidikan di atas menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam pendidikan merupakan sebuah proses sehingga pendidikan dapat dijadikan instrument oleh individu untuk dapat berintraksi secara tepat di komunitas dan masyarakatnya. Pada sisi yang lain, sosiologi pendidikan akan memberikan penjelasan yang relevan dengan kondisi kekinian masyarakat, sehingga setiap individu sebagai anggota masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan berbagai fenomena yang muncul dalam masyarakatnya. Namun demikian, pertumbuhan dan perkembangan masyarakat merupakan bentuk lain dari pola budaya yang dibentuk oleh suatu masyarakat. Pendidikan tugasnya tentu saja memberi penjelasan mengapa suatu fenomena terjadi, apakah fenomena tersebut merupakan sesuatu yang harus terjadi, dan bagaimana mengatasi segala implikasi yang bersifat buruk dari berkembangnya fenomena tersebut, sekaligus memelihara implikasi dari berbagai fenomena yang ada.

3. Obyek Sosiologi Pendidikan

Obyek sosiologi pendidikan dapat dibagi menjadi dua, yakni obyek material dan obyek formal.

1. Obyek Material

Obyek material sosiologi pendidikan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah, segala sesuatu yang dimasalahkan sosiologi pendidikan. Yang dipermasalahkan sosiologi pendidikan adalah masyarakat, tingkah laku manusia, dan institusi pendidikan. Ketiga masalah pokok sosiologi pendidikan ini apabila dijabarkan lebih detail menyangkut persoalan seputar kelompok sosial, struktur sosial, kelas, sekolah, guru, anak didik,

keluarga, stratifikasi sosial, perubahan sosial, dan sebagainya, masing-masing terangkum dalam wilayah suatu sistem sosial. Tiap-tiap sistem sosial merupakan kesatuan integral yang mendapat pengaruh dari: (1) sistem sosial yang lain; (2) lingkungan alam; (3) sifat-sifat fisik manusia, dan (4) karakter mental penghuninya.

2. Obyek formal

Obyek formal sosiologi pendidikan adalah sudut pandang untuk mendapatkan penjelasan dari perspektif sosiologi dan ilmu pendidikan tentang segala sesuatu yang dipermasalahkan obyek material, yakni masyarakat, tingkah laku manusia, dan institusi pendidikan. Sehingga obyek formal sosiologi pendidikan adalah bagaimana hubungan perilaku manusia dan institusi pendidikan serta proses yang timbul dari hubungan antara kedua masalah tersebut dalam membentuk perilaku manusia di dalam masyarakat.

Perspektif sosiologi pendidikan mempersoalkan pertemuan dan percampuran dari lingkungan sekitar kebudayaan secara totalitas sedemikian rupa sehingga terbentuknya tingkah laku tertentudan sekolah atau lingkungan pendidikan dianggap sebagai bagian dari total cultural milieu. Oleh karena itu, sudut pandang sosiologi pendidikan memberikan penekanan bahwa dalam lembaga- lembaga, kelompok-kelompok sosial dan proses sosial terdapat hubungan yang saling terjalin, di mana di dalam interaksi sosial itu individu memperoleh dan mengorganisasikan pengalamannya. Penjelasan tersebut melekat kuat aspek sosiologisnya. Sementara dari segi paedagogisnya, bahwa seluruh individu dan masyarakat dari anak-anak sampai orang dewasa, kelompok-kelompok sosial dan proses-proses sosialnya, berlangsung di seputar sistem pendidikan yang selalu bergerak dinamis.

4. Ruang Lingkup Sosiologi

Pendidikan Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi pendidikan mengkaji lebih mendalam pada bidangnya dengan cara bervariasi. Antara ahli sosiologi pendidikan yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Pokok bahasan utama dalam sosiologi pendidikan adalah institusi pendidikan formal, dan institusi pendidikan formal terpenting dalam masyarakat adalah sekolah yang menawarkan pendidikan formal mulai jenjang prasekolah sampai dengan jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Di samping pendidikan formal yang menjadi pokok bahasan utama sosiologi pendidikan, pendidikan non formal dan informal pun tidak luput dari perhatian para ahli sosiologi. Menurut Katamto Sunarto, Guru Besar pada FISIP Universitas Indonesia, para ahli sosiologi pendidikan membagi tiga pokok bahasan sosiologi pendidikan, yaitu:

1. Sosiologi pendidikan makro, yang mempelajari hubungan antara pendidikan dan institusi lain dalam masyarakat: misalnya hubungan pendidikan dengan agama, sampai sejauh mana lembaga pendidikan dapat memberikan pengaruh terhadap anak didik dalam



menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Hubungan pendidikan dan politik; sampai sejauh manasekolah menjalankan perannya dalam proses sosialisai politik. Hubungan antara pendidikan dan ekonomi; sampai sejauh mana sistem pendidikan formal berperan dalam mempersiapkan tenaga kerja di sektor formal yang telah siap pakai, atau sejauh mana orang yang menikmati fasilitas pendidikan formal yang dibiayai negara memang merupakan orang yang membayarpajak secara setara.

2. Sosiologi pendidikan meso, yang mempelajari hubunganhubungan dalam suatu organisasi pendidikan. Pada sosiologi pendidikan meso ini sekalah dipandang sebagai suatu organisasi yang menjalankan aturan-aturan tertentu sehingga dapat mencapai suatu tujuan. Di sini dibahas tentang struktur organisasi sekolah, peran dan fungsinya dalam organisasi sekolah, serta hubungan organisasi sekolah dengan strukrur organisasi masyarakat yang lain.
 1. Sosiologi pendidikan mikro, yang membahas interaksi sosial yang berlangsung dalam institusi pendidikan, misalnya pengelompokkan yang terbentuk di kalangan mereka, sistim status, interaksi di dalam kelas, baik sesama siswa maupun siswa dengan guru. Sementara itu ruang lingkup sosiologi pendidikan yang lebih lengkap di kemukakan oleh Sanapiah Faisal dan Nur Yasik. Mereka memandang ruang lingkup sosiologi pendidikan itu haruslah membahas masalah-masalah: Analilis terhadap pendidikan selaku alat kemajuan sosial.
 2. Sosiologi pendidikan sebagai pemberi tujuan bagi pendidikan.
 3. Aplikasi pendidikan bagi pendidikan.
 4. Proses pendidikan merupakan proses sosialisasi.
 5. Peranan pendidikan dalam masyarakat.
 6. Pola interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat.
 7. Ikhtisar mengenai berbagai pendekatan terhadap sosiologi pendidikan.

Dari beberapa pendapat di atas, secara umum, inti dari persoalan sosiologi pendidikan membahas seputar konsep-konsep antara lain, mencakup; (1) masyarakat; (2) institusi sosial; (3) peran; (4) norma; (5) interaksi sosial ; (6) konflik sosial; (7) perubahan sosial; (8) permasalahan sosial; (9) penyimpangan, (10) globalisasi, dan (11) kelompok.

5. Pentingnya Mempelajari Sosiologi Pendidikan

Aktivitas pendidikan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Sementara masyarakat senantiasa berubah sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi. Agar pendidikan tidak kehilangan arah dalam menghadapi masyarakat yang terus berubah, maka dunia pendidikan perlu terus mengkaji dan menganalisis aspek-aspek perubahan, baik dari perspektif positif maupun negatifnya. Setelah itu dunia



pendidikan perlu mengembangkan aspek positifnya dan meminimalisasi aspek negatifnya. Calon guru, guru, dosen, dan siapa saja yang berkecimpung di dunia pendidikan, perlu mempelajari sosiologi pendidikan, karena beberapa alasan:

Pertama, pendidikan mau tidak mau harus bisa menyiapkan sebuah generasi yang siap memasuki masyarakat yang berubah menuju masyarakat berbasis pengetahuan. Jika pendidikan tidak menghasilkan manusia yang siap memasuki masyarakat dengan segala bentuk tuntutan dan karakternya, maka pendidikan dianggap gagal memberikan bekal dan prasyarat masuk perubahan dan masa depan. Pendidikan, sekolah dan guru, harus bisa membekali siswanya kemampuan kreatif dengan memberi pengetahuan dan pengalaman hidup secara profesional di tengah masyarakat ekonomi dan masyarakat pengetahuan. Beri pengetahuan profesional kepada siswa, kreatifitas dan kapabilitas memahami dunia yang berubah, dengan segala dampaknya, tempat mereka akan bekerja dan menjalani hidupnya. Di sinilah pentingnya dunia pendidikan memanfaatkan jasa pemikiran sosiologis.

Kedua, praktisi pendidikan dapat merumuskan cara menetapkan orientasi yang relevan dengan dunia yang berubah di satu pihak, namun di lain pihak dunia pendidikan tidak mengalami distorsi dan disorientasi. Pendidikan bagaimanapun merupakan tempat yang bertanggung jawab dalam menumbuhkan tata nilai kemanusiaan, tata masyarakat yang disemangati oleh prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Masyarakat ekonomi apalagi dalam mode produksi ekonomi tingkat lanjut dapat menggiring siapa saja menjadi komunitas yang terdistorsi, termasuk masyarakat kependidikan menjadi institusi ekonomi yang hanya mengabdikan kepada kepentingan kapitalis. Pendidikan harus tetap mampu menjadi institusi penyembuhan di tengah masyarakat yang tidak menentu, yang terbelah, masyarakat yang sakit.

Ketiga, pendidikan memerlukan perangkat pisau analisa sosiologis, karena ia bukan sekedar mesin atau teknologi pembelajaran saja. Sekolah dan guru tidak lagi bisa berkacamata kuda. Dalam hal ini hanya mempertinggi kapabilitas mereka dalam mengejar target kurikulum, memperbaiki test score para siswanya dan hanya fokus kepada keberhasilan dalam ujian akhir nasional. Pendidikan harus dikaitkan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan masyarakat berada. Pendidikan harus memberikan pencerahan kepada siswanya untuk memahami dunia yang selalu berubah cepat. Dunia yang tidak lagi memiliki batas teritorial, lokal, regional, dan bahkan nasional. Manusia sekarang hidup di zaman global, yang tidak ada sekat-sekat lagi antara satu negara dengan negara lain. Dalam menghadapi dunia yang setiap saat berubah tersebut, pendidikan harus membekali kepada anak didiknya untuk selalu siap berubah (ready to change) dan siap belajar (ready to learn).

Keempat, pendidikan sebagai “agent of social change”, di satu sisi, dituntut mempunyai fungsi transformatif, yakni pendidikan menjadi jembatan untuk memajukan masyarakat agar tidak ketinggalan dalam dinamika perubahan. Lembaga-lembaga pendidikan dituntut



memberikan berbagai pengalaman kepada peserta didik dan masyarakatnya, baik ilmu, teknologi maupun keterampilan untuk menghadapi masa depan. Sementara di sisi lain, pendidikan tetap dituntut mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Nilai-nilai budaya bangsa seperti struktur keluarga, agama, norma sosial, dan filsafat hidup berbangsa perlu dipertahankan untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bernegara.

Pengertian Sosiologi Menurut Para Ahli

1. Auguste Comte

Sebagai pencetus konsep sosiologi, Comte mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu positif. Artinya sosiologi bekerja mempelajari gejala-gejala sosial dalam masyarakat berlandaskan pada logika rasional dan ilmiah.

2. Émile Durkheim Sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji fakta dan institusi sosial dalam berbagai tatanan masyarakat. Dari kumpulan fakta terkait cara berpikir dan bertindak tersebut, Durkheim meyakini adanya kekuatan untuk mengendalikan individu.

3. Karl Marx Marx tidak secara eksplisit mendefinisikan sosiologi, tetapi dalam *The Communist Manifesto* dirinya meyakini bahwa masyarakat (proletar) perlu dibebaskan dari sistem kapitalis. Sosiologi dipercaya dapat melawan penindasan dan melahirkan masyarakat tanpa kelas.

4. Max Weber Menurut Weber, sosiologi berlaku sebagai studi yang meninjau tindakan sosial guna menjelaskan hubungan sebab-akibat dari fenomena sosial tertentu.

5. Herbert Spencer Dalam sudut pandang Spencer, sosiologi merupakan ilmu yang mengamatisusunan dan proses sosial sebagai sebuah sistem.

Ciri-ciri Utama Sosiologi

Sebagai ilmu pengetahuan murni sosiologi memiliki ciri utama, yaitu:

1. Empiris.

Sebagai ilmu pengetahuan sosiologi didasarkan pada realitas sosial yang terjadi di lapangan dan tidak bersifat spekulatif.

2. Teoritis

Selalu berusaha menyusun abstraksi berupa kesimpulan mengenai hubungan sebab-akibat dari gejala sosial yang diteliti berdasarkan hasil pengamatan empiris.

3. Kumulatif

Dalam membangun argumen terkait suatu fenomena tertentu harus dilandaskan pada kumpulan teori yang sudah tercipta sebelumnya.

4. Non-etis

Sosiologi ada tidak untuk menilai baik dan buruk suatu permasalahan, melainkan padapenjelasan logis terkait latar belakang terjadinya suatu fenomena tertentu.

Selain keempat ciri utama di atas, sosiologi memiliki sejumlah teori yang berbeda dengan teori sosial lainnya. Hal yang membedakan adalah teori sosial berfokus pada komentar masyarakat serta memiliki tujuan yang secara intensif ke arah politik. Teori sosial terbentuk dari seperangkat gagasan, hipotesis, argumen atau paradigma yang menganalisis fenomena sosial. Hal ini berbanding terbalik dengan teori sosiologi yang berupaya memahami masyarakat tanpa mengacu pada konsep baik atau benar. Tersusun dari proposisi abstrak dan dapat diuji tentang masyarakat. Bila keduanya dibandingkan, teori sosial kurang memperhatikan sisi objektivitasnya.

Teori Dasar Sosiologi

1. Teori Fungsionalisme Struktural

Muncul dari sosok Émile Durkheim yang mengimajinasikan masyarakat sebagai suatu organisme yang tersusun dari berbagai komponen dan saling mempengaruhi untuk dapat berfungsi. Teori fungsionalisme mengajarkan bahwa masyarakat terdiri dari sistem yang tersusun secara struktural dengan perannya masing-masing. Sehingga hasil dari berjalannya sistem secara keseluruhan dapat menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Durkheim yang menaruh perhatian pada tatanan sosial membawa perspektif fungsionalisme ini pada struktur sosial level makro sebagai fokusnya dengan institusi sosial sebagai komponen dari sistem sosial tersebut. Dalam kacamata teori ini, lembaga sosial akan bertahan ketika fungsinya dijalankan dengan baik. Ketika terjadi malfungsi, maka perlahan lembaga sosial ini akan perlahan menghilang. Antar institusi sosial ini pun harus terjalin kerja sama yang baik, jika tidak sistem sosial akan kacau. Institusi sosial yang dimaksud di sini ialah keluarga, pendidikan, pemerintah, ekonomi, agama, media, dan lain-lain.

2. Teori Konflik

Teori yang digagas Marx ini berasumsi pada perbedaan kepentingan antarkelas dapat menghasilkan relasi sosial yang bersifat konfliktual. Pendistribusian kekayaan yang tidak merata menciptakan jurang kesenjangan sosial, di mana semakin parah kesenjangan yang ada membesar pula potensi timbulnya konflik sosial. Kelas sosial ini terbagi dalam dua kelompok, yakni borjuis dan proletar. Borjuis sebagai pemilik modal mayoritas sehingga memegang kontrol atas sumber daya yang ada. Sedangkan kelompok proletar adalah mereka kelas pekerja yang tidak memiliki kontrol. Dari masing-masing kelas yang ada jelas tujuan dan kepentingan keduanya saling bertolak belakang, lantaran keinginan kaum borjuis untuk mempertahankan atau menambah kekuasaan sama besarnya dengan keinginan proletar dalam mendistribusikan kekayaan secara merata. Ketika kedua kelompok ini terus mengalami gesekan



lama-kelamaan akan pecah dan memicu revolusi. Terlebih dengan adanya kesadaran kelas ketika kaum proletar sadar bahwasanya mereka telah dieksploitasi.

3. Teori Interaksionisme Simbolik

Lahir dari perpaduan pemikiran antara Herbert Blumer, George Herbert Mead dan Max Weber, teori ini menganalisa masyarakat berdasar makna subjektif yang diciptakan oleh individu dalam proses interaksi sosial. Interaksionisme simbolik mengasumsikan landasan individu bertindak cenderung pada hal yang diyakini bukan yang secara objektif benar. Keyakinan terhadap suatu hal inilah yang dinamakan sebagai produk konstruksi sosial yang telah direpresentasikan. Hasil interpretasi tersebut merupakan definisi situasi. Dengan basis analisisnya adalah aspek individu maka teori ini tergolong dalam teori mikro sosiologi. Konsep dari teori interaksionisme simbolik ini juga memiliki tendensi dengan urusan identitas seseorang.

Sosiologi pendidikan merupakan suatu studi yang mempelajari tentang perkembangan kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial dapat terpengaruh oleh cara pendidikan yang pernah atau sedang dijalankan. Pendidikan sendiri merupakan hal yang diperlukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam pengembangan ini, pendidikan berguna untuk memberi penilaian logika, etika, serta estetika yang terdapat pada diri manusia itu sendiri. Lebih lanjut, melalui pentingnya pendidikan tersebut, sosiologi pendidikan hadir menawarkan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang tercipta dari pengaruh pendidikan terhadap kehidupan sosial dan sebaliknya.

Dalam buku Sosiologi Pendidikan (1982), Abu Ahmadi menjelaskan bahwa sosiologi pendidikan adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses belajar dan juga mempelajari antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dengan kata lain, sosiologi pendidikan bisa disebut sebagai hubungan individu dengan lingkungan sekitarnya, sebab antara seorang individu tidak dapat berdiri sendiri di lingkungan sosial mereka. Fungsi dan Tujuan Sosiologi Pendidikan. Sebagaimana sebuah ilmu pengetahuan, sosiologi pendidikan dituntut melakukan tiga fungsi pokok. Berikut ini tiga fungsi pokok sosiologi pendidikan menurut buku Fungsi Sosiologi (2012): Fungsi eksplanasi, yaitu dalam menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk kedalam ruang lingkup pembahasannya. Fungsi prediksi, yaitu meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Fungsi utilisasi, yaitu menangani permasalahan-permasalahan yang dialami dalam kehidupan masyarakat seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan, dan masalah penyelenggaraan pendidikannya sendiri. Jadi, secara umum, sosiologi pendidikan bertujuan untuk mengembangkan fungsi-



fungsinya selaku ilmu pengetahuan (pemahaman eksplanasi, prediksi, dan utilisasi) melalui pengkajian tentang keterkaitan fenomena-fenomena sosial dan pendidikan, dalam rangka mencari model-model pendidikan yang lebih fungsional dalam kehidupan masyarakat. Sementara secara lebih khusus, dalam Pengantar Sosiologi Pendidikan (2011), Zainuddin Maliki menyebut sosiologi pendidikan bertujuan untuk: Menganalisis proses sosialisasi; Menganalisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat; Menganalisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat; Membantu memecahkan masalah-masalah sosial pendidikan; Menganalisis tujuan pendidikan secara obyektif; serta Menpelajari kelakukansosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya.

Sejak awal perkembangan sosiologi sebagai ilmu sosiologi hanya merupakan ontologi dari cabang filsafat, di mana ilmu sosiologi hanya membicarakan tentang berbagai kenyataan (riil) yang terjadi di masyarakat. Sosiologi kurang begitu dikenal dikalangan masyarakat, karena pada umumnya masyarakat hanya tertarik pada masalah-masalah yang umum dikenal kala itu, seperti kejahatan, perang, kekuasaan, golongan yang berkuasa, keagamaan. Sosiologi baru dikenal di kalangan masyarakat, manakala terjadinya perubahan-perubahan dikalangan masyarakat Eropa pada abad pertengahan sampai abad ke 18. Perubahan yang begitu panjang diidentifikasi oleh Laeyendecker meliputi :

1. Tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad kepertengahan (abad 15).
2. Perubahan di bidang sosial dan politik di berbagaikawasan di Eropa
3. Perubahan pandangan keagamaan (revormasi) yang dimotori oleh Martin Luther
4. Meningkatkan individualism
5. Lahirnya berbagai ilmu pengetahuan modern
6. Berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri

Di samping itu Laeyendecker juga menyebutkan beberapa peristiwa besar sebagai awal lahirnya ilmu Sosiologi, yaitu: (1) Revolusi industri dan (2) Revolusi perancis. Pada abad ke 19 barulah muncul ilmu psykologi dan ilmu sosiologi. Namun sosiologi belum dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu yang berdirisendiri. ia masih mencari bentuk sebagai ilmu yang berdiri sendiri, hal inidilakukan oleh berbagai ilmuan dengan melakukan berbagai tulisan atau penelitian yang bersifat ilmiah maupun non-ilmiah. Soekanto (2001;3) menyatakan bahwa ada beberapa factor yang mendorong sosiologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri, yaitu meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Di Amerika, sosiologi dihubungkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan keadaan-keadaan sosial manusia dan sebagai suatu pendorong untuk menyelesaikan persoalan yang ditimbulkan oleh kejahatan, pelanggaran, pelacuran, pengangguran, kemiskinan, konflik, peperangan dan masalah-masalah sosial lainnya. Konsep dasar sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu Sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu memiliki



beberapa term. Secara harfiah atau etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin: Socius dan Logos. Socius berarti teman, atau sahabat. Sedangkan Logos berarti ilmu pengetahuan. Sedangkan secara terminologi, beberapa ahli memberi batasan pengertian:

- a. Alvin Bertrand Sosiologi adalah studi tentang hubungan antara manusia (human relationship)
- b. Mayor Polak Sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis.
- c. Selo Soemartjan dan Soelaiman Soemardi Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan sosial.
- d. P.J. Bouwman Sosiologi adalah ilmu masyarakat umum.
- e. Pitirin Sorokin Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi; gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya
- f. Roucek dan Warren Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok
- g. William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial.

Sosiologi merupakan ilmu sosial yang obyeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur ilmu pengetahuan. Disebut ilmu pengetahuan karena pengetahuan yang diperoleh dengan penelitian yang mendalam, menggunakan metode-metode ilmiah. Sedangkan metode ilmiah ialah segala cara yang dipergunakan oleh sesuatu ilmu untuk sampai kepada pembentukan ilmu menjadi suatu kesatuan yang sistematis, organis, dan logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Agar suatu pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat antara lain:

1. Jelas obyek yang dibahas sehingga berbeda dengan ilmu lain
2. Menggunakan metode-metode ilmiah
3. Tersusun secara sistematis

Sosiologi dapat memenuhi syarat disebut sebagai ilmu karena:

1. Memiliki obyek yang jelas, yakni masyarakat struktur, unsur, proses dan perubahan sosial
2. Menggunakan metode-metode ilmiah
3. Merupakan hasil penelitian/penelaahan sosiologi yang tersusun menjadi satu kesatuan yang bulat, sistematis, logis, saling berhubungan, sehingga membedakannya dengan ilmu-ilmu lainnya.

Sejak awal perkembangannya, pada awal abad ke-19 hingga dewasa ini, ilmu sosiologi telah mengalami perubahan yang terus menerus, ilmu yang oleh Auguste Comte disebut dengan *sociophysics* yang kemudian dikenal dengan sosiologi (*Sociology*). Sosiologi terus berkembang seiring dengan perubahan yang timbul di masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu murni (*pure science*) yakni ilmu yang dimaksud penelitiannya semata-mata untuk kepentingan ilmu itu sendiri, tidak dimaksudkan untuk keperluan kehidupan sehari-hari, misalnya ilmu pasti, ilmu kimia, ilmu ekonomi, ilmu alam, antropologi, astronomi, ilmu faal dan lain sebagainya.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana untuk membedakan sosiologi dengan ilmu pengetahuan lainnya yang tergabung pula dalam ilmu-ilmu sosial. Mengenai persoalan tersebut masih banyak kesimpangsiuran karena perbedaannya tidak tegas dan bukan hanya menyangkut perbedaan dalam isi atau obyek penyelidikannya, akan tetapi juga menyangkut perbedaan tekanan pada unsur-unsur obyek yang sama. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa sosiologi mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat tadi. Untuk lebih jelasnya, sebaiknya setiap ilmu pengetahuan yang merupakan bagian dari ilmu sosial, dibandingkan dengan sosiologi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh, tetapi singkat. Masyarakat yang menjadi obyek ilmu-ilmu sosial dapat dilihat sebagai sesuatu yang terdiri dari beberapa segi; ada segi ekonomi yang antara lain bersangkut paut dengan produksi, distribusi dan penggunaan barang-barang dan jasa-jasa; ada pula segi kehidupan politik yang antara lain berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat; dan lain-lain segi kehidupan. Segi ekonomi mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan materiilnya dari bahan-bahan yang terbatas persediaan pangan dibandingkan dengan jumlah penduduk; ilmu ekonomi juga mempelajari usaha-usaha apa yang harus dilakukan menaikkan produksi bahan sandang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan lain-lainnya.

Sedangkan sosiologi mempelajari unsur-unsur kemasyarakatan secara keseluruhan. Sosiologi memusatkan perhatiannya pada segi-segi masyarakat yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum daripadanya. Misalnya daya-daya untuk mendapatkan kekuasaan digambarkan oleh sosiologi sebagai salah satu bentuk persaingan (*competition*) atau bahkan pertikaian (*conflict*).

Demikian juga dengan cabang ilmu sosial lainnya. Sosiologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sosiologi termasuk kelompok ilmu sosial Maksudnya adalah sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala sosial (kemasyarakatan), dan bukan mempelajari gejala-gejala alam. Sosiologi merupakan ilmu sosial sepenuhnya.
- b. Sosiologi bersifat kategoris Sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif akan tetapi adalah sesuatu disiplin kategoris, artinya sosiologi membicarakan obyeknya secara apa adanya, dan bukan bagaimana seharusnya. Misalnya sosiologi mengatakan bahwa

struktur masyarakat suatu daerah berbentuk demikian (apa adanya), dan tidak mengatakan bahwa struktur masyarakat di daerah tersebut seharusnya begini atau begitu. Hal ini bukan berarti pandangan-pandangan sosiologi tidak akan berguna bagi kebijaksanaan kemasyarakatan dan politik, akan tetapi pandangan-pandangan sosiologis tak dapat menilai apa yang buruk dan apa yang baik segala sesuatu yang bersangkutan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sosiologi dapat menetapkan bahwa masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai yang tertentu, akan tetapi selanjutnya tidak dapat ditentukan bagaimana nilai-nilai tersebut seharusnya.

- c. Sosiologi termasuk ilmu murni (pure science) Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni (pure science) dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai (applied science). Perlu dicatat bahwa dari sudut ilmu penerapannya ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua bagian ilmu tersebut. Ilmu pengetahuan murni adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak hanya untuk mempertinggi mutunya, tanpa menggunakannya dalam masyarakat. Sedangkan ilmu pengetahuan terapan bertujuan untuk mempergunakan dan menerapkan ilmu pengetahuan tersebut dalam masyarakat dengan maksud membantu kehidupan masyarakat.
- d. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang konkrit. Artinya, bahwa yang diperhatikannya adalah bentuk dan pola-pola peristiwa dalam masyarakat tetapi bukan wujudnya yang konkrit.
- e. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi antar manusia dan juga perihal sifat hakiki, bentuk, isi, dan struktur masyarakat manusia.
- f. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Ciri tersebut menyangkut soal metode yang dipergunakannya
- g. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Artinya, sosiologi mempelajari gejala yang umum ada pada setiap interaksi antar manusia.

Berdasarkan pada dimensi-dimensi dewasa sebagaimana telah dipaparkan dalam uraian di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah dan jenis dimensi yang telah dibahas itu masih mungkin untuk ditambah, diperluas, atau dikurangi sesuai dengan perkembangan diri dan kondisi lingkungan. Namun, kelima belas dimensi itu dapat dijadikan kriteria untuknya mengidentifikasi perubahan setiap orang yang belum dewasa menjadi orang yang dewasa, sebelum adanya hasil-hasil penelitian baru mengenai dimensi dewasa tersebut.
2. Dimensi dewasa dapat dijadikan masukan untuk dipertimbangkan juga dalam merencanakan program-program pendidikan yang bertujuan untuk membantu peserta



didik dan anggota masyarakat agar mereka mengembangkan kemampuan dirinya untuk mendewasa. Pada dimensi-

dimensi di atas dapat dijadikan indikator dalam memprediksi perkembangan orang yang pendewasa, serta perlu diwujudkan dalam proses pembelajaran secara bertahap, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip pendidikan sepanjang hayat.

3. Penerapan dimensi-dimensi dewasa dalam pendidikan dapat dilakukan melalui prinsip-prinsip di bawah ini:
 - a. Program pembelajaran hendaknya memberikan kesempatan peserta didik agar mereka mampu mengembangkan diri dalam berbagai dimensi dewasa. Sebagai misal, walaupun suatu program kegiatan pembelajaran sedang menitikberatkan pada sikap dan perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME. serta kedisiplinan;
 - b. Program pembelajaran hendaknya berpusat pada peserta didik. Di samping program itu dirancang dengan memperhatikan kebutuhan belajar, potensi mendewasa, dan latar belakang pengalaman para peserta didik maka mereka pun dilibatkan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.

Dengan demikian, pada program pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan belajar yang didasarkan atas kebutuhan belajar, pengalaman pada belajar, berpusat pada peserta didik. dan potensi-potensi mendewasa para peserta didik itu sendiri.



BAB 9

LANDASAN YURIDIS, EKONOMIS DAN RELIGIS DALAM PENDIDIKAN

A. Landasan Yuridis Dalam Pendidikan

1. Pengaturan Mengenai Pendidikan Dalam Konstitusi Di Indonesia

Pendidikan mempunyai peranan strategis dalam percaturan hidup suatu bangsa. Melalui Pendidikan, suatu bangsa bisa menatap masa depannya, “berdiri sama tinggi, duduk sama rendah” dengan bangsa-bangsa lain. Dengan SDM berkualitas, suatu bangsa bisa berbicara banyak dalam percaturan global. Kualitas bangsa itu hanya diperoleh melalui Pendidikan yang berkualitas. (Muchsin, 2007:1).

Pada dasarnya Pendidikan sangat diperlukan oleh setiap manusia, karena dengan Pendidikan manusia dapat menggali, memanfaatkan serta mengembangkan potensi dirinya sendiri melalui proses atau tahapan-tahapan pembelajaran, baik dari Pendidikan formal maupun Pendidikan non formal.

Sejak menyatakan dirinya menjadi bangsa yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam perjalanannya, konstitusi sempat mengalami perubahan dengan berlakunya Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Hal tersebut karena terjadi perubahan bentuk Negara sampai akhirnya UUD 1945 diberlakukan kembali pada tanggal 5 Juli 1959. Sejak kembali kepada UUD 1945, UUD 1945 tersebut telah mengalami perubahan empat tahap, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002.

Seiring dengan beberapa kali pergantian dan perubahan Undang-Undang Dasar tersebut, ketentuan tentang pendidikan juga mengalami perubahan. Perkembangan tema pendidikan dalam konstitusi telah mengalami beberapa kali fase sejak masa pra kemerdekaan, kemerdekaan, orde lama, orde baru hingga masa reformasi :

1) Pembahasan Pendidikan Pada Sidang BPUPKI

Masuknya gagasan pendidikan ke dalam UUD 1945 tidak terjadi begitu saja. Terdapat proses dan kondisi yang menjadi pertimbangan penting bagi para pendiri negara untuk memasukan pendidikan dalam dasar negara. Gagasan Pendidikan untuk dimasukan dalam konstitusi dimulai ketika Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) bersidang pada hari pertama, 29 Mei 1945.

Selama masa sidang yang berlangsung hingga tanggal 2 Juni termasuk masa reses hingga tanggal 9 Juli 1945, ada hal-hal yang menarik dalam rapat tersebut mengenai Pendidikan yang disampaikan oleh Para Pembicara saat itu antara lain :

a) Soerio



Ia memberikan informasi penting tentang gagasan pentingnya pendidikan bagi Bangsa Indonesia kedepan, yaitu terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi untuk menuju kepada dasar kemerdekaan Indonesia, yaitu: Kuat, Subur dan Makmur, dan Suci abadi.

Lebih lanjut menurut Soerio, syarat ketiga suci abadi merupakan ungkapan yang memberikan penting bagi pendidikan bangsa Indonesia. Menurut Soerio, suci abadi berarti harus berdasarkan persatuan lahir dan batin yang harus timbul dan tumbuh. Proses perubahan harus dimulai dari anak-anak. Dengan usaha-usaha yaitu semua sekolah, mulai rendah hingga tinggi harus dipersatukan dijadikan sekolah Indonesia sehingga tidak ada lagi sekolah Jawa, Tionghoa, Arab dsbnya.

b) Soesanto Tirtoprodjo.

Ia menyatakan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari sokoguru bagi Negara Indonesia.

c) Soepomo.

Menekankan pentingnya Pasal Pengajaran, menurutnya pasal pengajaran dalam UUD tujuannya adalah untuk menyelenggarakan sistem pengajaran dan untuk memajukan negara dan masyarakat, sehingga setiap warga negara hendaknya mendapatkan pengajaran sebab pendidikan merupakan hak-hak dasar seseorang (*grondsrechts*).

Pendapat lain yang menarik apa yang disampaikan oleh Soesanto Tirtoprodjo yang menyatakan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari *sokoguru* bagi negara Indonesia merdeka. Menurut Soesanto, *sokoguru* negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut salah satunya adalah Pendidikan rohani dan jasmani seluas-luasnya dengan menjauhkan sifat-sifat *intellectualisme* dan *materialism*.

Namun demikian, para pembicara lain yang hadir dalam rapat tersebut juga menyuarakan pendidikan sebagai hal yang penting sebagaimana yang disampaikan oleh Rooseno, Abdul Kadir dan A. Ranchim Pratalykarma.

Kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPK) melaksanakan sidangnya yang pertama pada 18 Agustus 1945. Pada sidang pertama ini, PPK mengesahkan UUD 1945 dengan cara penetapan pasal per pasal bersama para anggota sidang. Pada saat Soekarno, sebagai ketua, membaca "Bab XIII Pendidikan, Pasal 31, ayat 1: "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran." terdapat ungkapan "konsekuensinya '*leerplicht*'." Tafsir ungkapan *leerplicht* : Para Pendiri Negara memberi amanat kepada penyelenggara negara untuk melaksanakan wajib belajar (*leerplicht*), artinya hak belajar di Pasal 31 harus dipandang sebagai kewajiban konstitusional pemerintah.

2) Masa Kontitusi Republik Indonesia Serikat 1949-1950.

Berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) terjadi karena terjadi perubahan bentuk negara di masa tahun 1949 sampai dengan 1950. Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini terjadi perubahan konstitusi. Perubahan itu bermula dari UUD 1945 yang diganti menjadi Konstitusi RIS dari tahun 1949-1950, kemudian berganti lagi menjadi UUDS pada tahun 1950-1959, lalu kembali lagi diberlakukannya UUD 1945. Perubahan pertama



terkait dengan perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).

Dalam UUD 1945 pasal mengenai pendidikan merupakan bab tersendiri, sedangkan dalam Konstitusi RIS, pasal pendidikan dimasukkan dalam "**Hak-Hak Kebebasan Dasar Manusia**". Bunyi Konstitusi RIS tentang Pendidikan yang diatur dalam Bab I tentang Negara Indonesia Serikat pada bagian V mengenai Hak-Hak Kebebasan Dasar Manusia Pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) **Mengadjar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa jang** diberlakukan terhadap itu menurut peraturan-peraturan undang-undang.
- (2) Memilih pengadjaran jang akan diikuti adalah bebas.

3) **Masa Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950.**

Konstitusi RIS dalam pelaksanaannya tidak bertahan lama karena adanya pergerakan dari rakyat sehingga pada tanggal 15 Februari 1950 untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akhirnya, pada 19 Mei 1950 tercapai persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tanggal 15 Agustus 1950, Senat dan DPR di Jakarta menyatakan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Sementara (UUDS) 1950. Adapun bunyi UUDS 1950 tentang pendidikan diatur dalam Pasal 30 Bagian V mengenai Hak-Hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia adalah sebagai berikut :

- (1) Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran.
- (2) Memilih pengadjaran jang akan diikuti adalah bebas.
- (3) Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut peraturan perundang-undangan

Pada masa berlakunya UUDS 1950, persoalan pendidikan diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550). Kemudian di tahun 1954 ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550).

Pada masa berlakunya UUDS 1950, kondisi Pendidikan dan pengajaran mengalami peningkatan dengan kondisi di lapangan yaitu meningkatnya jumlah sekolah serta segala persoalan pendidikan dan pengajaran disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pokok kecuali masalah dana dan sarana yang menjadi kendala.



4) Masa Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dekrit Presiden lahir dipicu kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan UUDS 1950 disamping faktor seringnya pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian politik, sehingga Presiden Sukarno memutuskan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mengatasi masalah ini Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang memutuskan kembali berlakunya UUD 1945. Dekrit Presiden ini membubarkan Konstituante, merubah bentuk pemerintahan Indonesia menjadi republik dengan Sistem Presidensial, dengan kekuasaan pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan dipegang oleh Presiden secara langsung dan menghapuskan posisi perdana menteri.

Dengan dekrit ini, mulailah masa Demokrasi Terpimpin dan berakhirilah masa Demokrasi Liberal, dimana sebelumnya pemerintahan Indonesia berbentuk republik dengan Sistem Parlemen dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Dengan kembalinya kepada UUD 1945, peraturan perundang-undangan tentang Pendidikan sebelumnya masih tetap berjalan. 2 tahun kemudian terbit peraturan terkait pendidikan yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Undang-Undang ini mengamanatkan Perguruan Tinggi untuk memiliki tujuan membentuk manusia yang berjiwa Pancasila dan bertanggung-jawab dalam terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, materiil dan spirituil.
- b. Undang-Undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini mengamanatkan untuk pimpinan majelis pendidikan nasional terdiri dari pengayom agung yakni Presiden sebagai pimpinan besar revolusi Indonesia.
- c. Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Dalam Perpres ini dijelaskan bahwa pendidikan nasional merupakan unsur mutlak dalam *nation and character building*.

5) Masa Orde Baru (1966-1998).

Masa orde baru merupakan babak baru bagi Bangsa Indonesia setelah melewati jalan terjal dan masa ini di mulai Ketika pemberontakan G30S PKI dapat ditumpas serta lahirnya supersemar. Masa orde baru dimulai sejak tahun 1966 dan dipimpin oleh Presiden Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia.

Dalam kurun waktu itu, UUD 1945 tidak mengalami perubahan meskipun ada peluang ketentuan terhadap adanya perubahan pada UUD 1945. Pada saat itu, slogan yang dipakai adalah “melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen”. Dengan demikian pasal pendidikan juga



tidak mengalami perubahan sama sekali. Namun, pendidikan terus berjalan berdasarkan hukum yang berlaku yang diwarisi dari pemerintahan Soekarno.

Sistem Pendidikan pada masa orde baru dirancang agar setiap warga negara mengetahui hak dan kewajiban pokoknya sebagai warga negara serta memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri, ikut serta dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperkuat persatuan dan kesatuan serta upaya pembelaan negara. Oleh karena itu maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pertimbangan lain diberlakukannya undang-undang tersebut adalah:

1. Pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya serta mampu dan mandiri;
2. Memberi dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

6) Masa Reformasi 1999 - 2002.

Masa reformasi dimulai setelah turunnya Presiden Soeharto atas desakan mahasiswa yang saat itu melakukan demo besar-besaran yang terjadi di daerah-daerah yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh reformasi diantaranya Bapak Amien Rais.

Pucuk pimpinan nomor satu di Indonesia saat itu dipercayakan kepada BJ Habibie yang merupakan wakil Presiden Soeharto. Pada masa ini, pengembangan kebijakan Pendidikan didasarkan pada proses globalisasi yang membuat dunia semakin terasa kecil dan sempit karena perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat. Menghadapi arus globalisasi maka Negara Indonesia membutuhkan sumber daya yang cukup untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain. Oleh karena itu pada masa BJ. Habibie lahir dua peraturan pemerintah mengenai Pendidikan yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.

Pada masa reformasi ini, setelah melewati pemilihan umum yang dipercepat, pada tahun 1999 Sidang Umum MPR RI melakukan perubahan UUD 1945 yang pertama. Dalam Perubahan UUD 1945 tersebut terdapat lima butir kesepakatan dasar, yaitu:

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial;
4. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 diadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal;



5. Perubahan dilakukan dengan cara “addendum”.

MPR RI berhasil mengubah beberapa pasal UUD 1945 pada Perubahan Pertama. Pada perubahan selanjutnya, yaitu kedua sampai keempat, rancangan perubahan telah dipersiapkan secara lebih matang dan mendalam oleh Badan Pekerja MPR RI melalui Panitia Ad Hoc I. Salah satu pasal yang menjadi obyek perubahan adalah Pasal 31 tentang Pendidikan.

Pembahasan Pasal Pendidikan dibahas pada masa perubahan kedua UUD 1945 oleh Panitia Ad Hoc I BP MPR pada Rapat Pleno 29 November 1999. Pada pembahasan ini terdapat tanggapan dari Universitas Jember yang menyampaikan bahwa kata “pengajaran” perlu dirubah menjadi “Pendidikan” pada Bab XIII Pendidikan.

Tekait dengan hal itu, Ismail Hasan dari F-PPP menyatakan tidak keberatan mengingat Pendidikan itu mengajar manusia berkarakter, berahlak, sehingga bisa menjadi panutan. Sedangkan pengajaran mendidik manusia, mengajar manusia untuk bisa mengetahui bahwa 2x2 itu 4.

Dalam seluruh pembahasan perubahan UUD 1945 termasuk Pasal mengenai Pendidikan, diikuti oleh seluruh Fraksi yaitu : Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Reformasi (PAN dan Partai Keadilan), Fraksi PBB, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (PDI, IPKI, PNI-MM, PKPP, PP dan PKD), Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (Partai NU, Partai Kebangkitan Umat, Partai Masyumi, Partai Daulat Rakyat, dan Partai Syarikat Islam Indonesia), Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Fraksi Utusan Golongan, Fraksi TNI/Polri, dan Fraksi Utusan Daerah (dibentuk pada sidang tahunan 2001 dan baru terlibat pembahasan pada Perubahan Keempat tahun 2002).

Selain diikuti dengan fraksi-fraksi tersebut juga dilakukan hearing atau dengar pendapat antara lain dengan Menteri Pendidikan, Lemhanas, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Perwakilan Organisasi Rohani (PGI, KWI, MUI, NU, dan Muhammadiyah), ISEI, PBHI, YLBHI, Ikadin termasuk para pakar Pendidikan yaitu H. Roeslan Abdul Gani, Pranarka, Dahlan Ranumihardja, Prof. Dr. Ichlasul Amal dan Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja.

Perubahan ketentuan tentang pendidikan dalam UUD 1945 dalam pembahasan pada masa perubahan kedua dan ketiga telah disepakati alternatif perumusan namun belum dapat diputuskan dan disahkan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 sehingga pembahasan dilanjutkan pada masa Perubahan Keempat UUD 1945 tahun 2002.

Pembahasan Pasal Pendidikan pada masa perubahan keempat UUD 1945 dilakukan kurang selama 7 bulan yang dimulai sejak tanggal 28 Januari 2002 dan telah memperoleh perumusan pada tanggal 8 Agustus 2002 yaitu :



Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 31

Ayat (1) : “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”

Ayat (2) : “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Ayat (3) : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.”

Ayat (4) : “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Ayat (5) : “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Perumusan mengenai perubahan Pasal tentang Pendidikan baru terselesaikan pada Perubahan Keempat Tahun 2002 dengan ditutup pernyataan Ketua MPR RI, Amin Rais yang menyatakan :

“Perubahan Keempat juga menetapkan sistem Pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Rumusan ini sangatlah sesuai dengan jati diri kita sebagai bangsa yang religious yang menghendaki Pendidikan tidak hanya mempunyai sisi material belaka tetapi lebih dari itu yang mengandung napas keagamaan dan nilai spiritual. Selain itu, amandemen konstitusi itu juga memuat keharusan akan jumlah anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah. Ketentuan itu kita harapkan mampu mendorong peningkatan kualitas SDM kita yang secara umum sampai saat ini masih jauh dari yang kita harapkan.”



Tabel 9.1 : Pasal Pendidikan sebelum dan sesudah amademen UUD 1945

UUD 1945 SEBELUM PERUBAHAN	UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat Tahun 2002
<p>Bab XIII Pendidik Pasal 31</p> <p>(1) Tiap-Tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.</p> <p>(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang</p>	<p>Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31</p> <p>(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.</p> <p>(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.</p> <p>(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.</p> <p>(4) Negara memprioritaskan pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.</p> <p>(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia</p>

2. Ketentuan Hukum Pendidikan Di Indonesia Dan Penerapannya Bagi Pendidikan Di Indonesia

Pada dasarnya yang dimaksud ketentuan hukum dalam suatu negara adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang mengikat atau mengatur cara manusia berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketentuan hukum yang sedang berlaku di lingkungan suatu bangsa dinamakan Hukum Positif.

Bidang Pendidikan di Indonesia dalam pelaksanaannya memerlukan sebuah peraturan yang tegas sebagai dasar dan pedoman dalam perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan itu sendiri. Jika tidak ada perundang-undangan yang mengikat pelaksanaan pendidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu di dalam perundangan-undangan terdapat tujuan



yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri.

Bidang Pendidikan di Indonesia, norma-norma atau kaidah-kaidah hukum tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen sebagai hukum dasar yang kemudian dituangkan secara operasional melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, peraturan pemerintah dan berbagai peraturan lainnya.

Terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang tersebut mengatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR).
3. Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
4. Peraturan Pemerintah (PP).
5. Peraturan Presiden (Perpres).
6. Peraturan Daerah (Perda) dan
7. Provinsi Peraturan Kabupaten atau Kota.

Sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang menjadi titik tolak dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia yakni :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Yuridis Pendidikan Indonesia;
- 2) Pancasila sebagai Landasan Idiil Sistem Pendidikan Indonesia;
- 3) Ketetapan MPR sebagai landasan yuridis pendidikan nasional;
- 4) Undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai landasan yuridis pendidikan nasional;
- 5) Keputusan presiden sebagai landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional; dan
- 6) Instruksi menteri sebagai landasan yuridis pelaksanaan pendidikan Nasional.

Pasca perubahan mengenai Pasal Pendidikan dalam UUD 1945 perubahan keempat maka landasan yuridis pendidikan di Indonesia diatur dalam UUD RI Tahun 1945 tentang hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia khususnya dalam memperoleh pendidikan. Pasal 31 ayat 1 sampai ayat 5 menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah serta negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi semua hal yang berhubungan dengan Pendidikan (Bagus; 2020) - Urgensi Landasan Yuridis-Politis dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia – Jurnal Ilmu Pendidikan, November 2020).

Salah satu amanat dari UUD 1945, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”), yang memiliki visi terwujudnya sistem Pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk



memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (Muchsin; 2007 – Politik Hukum dalam Pendidikan Nasional (Surabaya : Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya).

UU Sisdiknas terbit untuk menggantikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan dasar pertimbangan adalah sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa pendidikan adalah proses sepanjang hayat dan perwujudan pembentukan diri secara utuh dalam pengembangan segenap potensi dalam rangka pemenuhan semua komitmen manusia sebagai individu, makhluk sosial dan sebagai makhluk Tuhan. Mendidik diartikan sebagai memberi nasihat, petunjuk, mendorong agar rajin belajar, memberi motivasi, menjelaskan sesuatu atau ceramah, melarang perilaku yang tidak baik, menganjurkan dan menguatkan perilaku yang baik, dan menilai apa yang telah dipelajari anak, itu bisa dilakukan oleh semua orang. Dan tidak perlu susah-susah membuat pendidik menjadi profesional. Namun mendidik seperti ini tidak dapat menjamin anak-anak akan berkembang sempurna secara batiniah dan lahiriah.

Pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Berdasarkan definisi di atas, 3 (tiga) pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, yaitu: 1) Usaha sadar dan terencana; 2) Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya; 3) Memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.



UU Sisdiknas sebagai operasional di bidang pendidikan menyebutkan bahwa pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. UU Sisdiknas 2003 merupakan kelanjutan dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kehadiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 (selanjutnya disebut UU Sisdiknas 1989) ini sangat ditunggu oleh masyarakat yang memiliki kepedulian tentang pendidikan di Indonesia, mengingat UU yang lahir sebelumnya belum mengatur masalah pendidikan secara komprehensif (Marzuki; 2012).

UU Sisdiknas 2003 mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut :

1) **Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan.**

Pasal 1 menyatakan *"Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*. Secara konseptual, dasar pendidikan nasional ini mengandung nilai-nilai yang tidak diragukan lagi keahliannya, amat ideal dan luhur, dan secara konsensus seluruh bangsa Indonesia sudah menerimanya.

Hakekat fungsi pendidikan nasional yang ditetapkan dalam Pasal 2, : *"mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa"*. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dibangun atas tiga pilar : **(i)**. Memiliki kemampuan dalam menguasai berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun aspek agama; **(ii)**. Memiliki watak kepribadian yang luhur dan anggun, patriotis dan nasionalis, serta watak bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup dan **(iii)**. Memiliki peradaban yang humanis religius, serta kewibawaan yang tinggi, sehingga bangsa-bangsa lain tidak memperlakukan dan mengintervensi bangsa Indonesia sekehendaknya.

Tujuan pendidikan yang ditetapkan dalam pasal tersebut adalah *"Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab"*. Konsep ini diharapkan akan mencetak insan yang sempurna untuk mewujudkan seluruh potensi yang dimiliki baik jasmani, intelektual, emosional, sosial, agama dan sebagainya.



2) **Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan**

Pasal 4 menyebutkan *"Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip demokratis, berkeadilan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; prinsip satu kesatuan yang sistemik; prinsip pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik; prinsip keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik; prinsip pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung; prinsip pemberdayaan semua komponen masyarakat"*.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud pasal tersebut menunjukkan prinsip yang holistik (menyeluruh), terbuka dari berbagai aspirasi atau tuntutan masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak bangsa.

3) **Hak dan Kewajiban**

Pasal 5 menyebutkan *"Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", dan "Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan"*. Konsep ini lebih menekankan pada pemerataan pendidikan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

4) **Peserta Didik**

Pasal 12 bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak *"mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama", dan "mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya"*. Pasal tersebut memberikan penekanan arti pentingnya pendidikan agama bagi peserta didik yang sesuai dengan agama yang dianutnya, karena bertujuan untuk melindungi akidah agama dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai dengan agama yang dianutnya.

5) **Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan**

Pada pasal 13 disebutkan *"Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya", dan "diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh"*. Dalam praktiknya tumbuh subur pendidikan non formal dan informal mengingat biaya sekolah formal masih cukup tinggi.

6) **Standar Nasional Pendidikan**

Pasal 35 menyebutkan *"Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan,*



pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala". Pasal ini merupakan bahan acuan dalam penyelenggaraan satuan pendidikan termasuk acuan pengembangan program-programnya.

7) **Kurikulum**

Pasal 36, 37, 38 menyebutkan *"Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik".* Pengembangan kurikulum yang ditetapkan ini, dalam rangka membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan tuntutan zaman.

8) **Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kunci utama dalam peningkatan mutu pendidikan dan mereka berada di titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan yang diarahkan pada perubahan-perubahan kualitatif. Setiap usaha peningkatan mutu pendidikan seperti pembaharuan kurikulum, pengembangan metode-metode mengajar, penyediaan sarana dan prasarana hanya akan berarti manakala melibatkan tenaga pendidik (guru/dosen) dan tenaga kependidikan.

Untuk mencapai tujuan pendidikan, dibutuhkan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi. Berikut akan diuraikan kompetensi dan dimensi-dimensi kompetensi guru. Kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. McAhsan (Mulyasa, 2003:38) mengemukakan bahwa kompetensi: *"is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, wich become part office or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviours"*. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Sejalan dengan itu, Finch dan Crunkilton (Mulyasa, 2003: 38) mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Kompetensi tidak hanya mengandung pengetahuan, keterampilan dan sikap, namun yang penting adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan tersebut dalam pekerjaan. Kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan kinerja berkriteria efektif dan atau unggul dalam suatu pekerjaan dan situasi tertentu. Sifat intelegen harus ditunjukkan sebagai kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan



bertindak. Sifat tanggung jawab harus ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika. Depdiknas (2004: 7) merumuskan definisi kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Guru yang kompeten dan profesional adalah guru yang piawai dalam melaksanakan profesinya. Dengan demikian Kompetensi guru dapat diartikan sebagai penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai guru.

A. Kompetensi Kepribadian Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut “digugu” (ditaati nasehat/ucapan/perintahnya) dan “ditiru” (dicontoh sikap dan perilakunya). Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik. Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didiknya terutama bagi anak didik yang masih kecil (tingkat dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah). Karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya adalah meliputi fleksibilitas kognitif dan keterbukaan psikologis. Fleksibilitas kognitif atau keluwesan ranah cipta merupakan kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tertentu. Guru yang fleksibel pada umumnya ditandai dengan adanya keterbukaan berpikir dan beradaptasi. Selain itu, ia memiliki resistensi atau daya tahan terhadap ketertutupan ranah cipta yang premature dalam pengamatan dan pengenalan. Dalam UU guru dan dosen dikemukakan kompetensi kepribadian adalah “kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik”.²

B. Kompetensi Pedagogik Merencanakan program belajar mengajar merupakan proyeksi guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung, yang mencakup : merumuskan tujuan, menguraikan deskripsi satuan bahasan, merancang kegiatan belajar mengajar, memilih berbagai media dan sumber belajar, dan merencanakan penilaian penguasaan tujuan. Kompetensi pedagogic ini mencakup pemahaman dan pengembangan potensi peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan



pembelajaran, serta system evaluasi pembelajaran, juga harus menguasai “ilmu pendidikan”. Kompetensi ini diukur dengan performance test atau episodes terstruktur dalam praktek pengalaman lapangan (PPL), dan tase based test yang dilakukan secara tertulis

9) **Saran dan Prasarana Pendidikan**

Pasal 45 ayat (1) menyatakan *"Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik"*. Pasal ini menekankan pentingnya sarana dan prasarana dalam satuan pendidikan, sebab tanpa didukung adanya sarana dan prasarana yang relevan, maka pendidikan tidak akan berjalan secara efektif.

Pada perkembangannya UU Sisdiknas telah mengalami beberapa pembatalan pasal oleh Mahkamah Konstitusi yaitu :

1. Pasal 6 ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang frasa, “...bertanggungjawab” adalah konstitusional sepanjang dimaknai “...ikut bertanggungjawab”, sehingga pasal tersebut selengkapny menjadi: “Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”.
2. Pasal 12 ayat (1) huruf c UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang frasa, “..yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya,” bertentangan dengan UUD 1945 sehingga Pasal 12 ayat (1) huruf c menjadi, “Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi”.
3. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang mengenai frasa “gaji pendidik dan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas diputuskan bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 49 (1) menyatakan : “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.
4. Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas menyebutkan, “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan



sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.

5. Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu.

Selain UU Sisdiknas juga lahir undang-undang yang mendukung pendidikan nasional di Indonesia yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang ini lahir didasari tiga pertimbangan pokok, yaitu: 1) Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan; dan 3) Bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada nomor 1) sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. (Marzuki; 2012).

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP).

Undang-undang ini pada perjalanannya tidak bertahan lama karena pada tanggal 31 Maret 2010, Mahkamah Konstitusi resmi membatalkan undang-undang tersebut dengan dasar pertimbangan:

- a. UU BHP mempunyai banyak kelemahan baik secara yuridis, kejelasan maksud dan keselarasan dengan UU lain;
- b. UU BHP mempunyai asumsi penyelenggara pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan sama. Tapi, realitasnya kesamaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tak berarti semua PTN mempunyai kesamaan yang sama;
- c. Pemberian otonomi kepada PTN akan berakibat beragam. Karena lebih banyak PTN yang tidak mampu menghimpun dana karena terbatasnya pasar usaha di tiap daerah. Hal ini akan menyebabkan terganggunya penyelenggaraan Pendidikan;
- d. UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan kepastian hukum. UU BHP bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1, dan Pasal 31 UUD 1945; dan



- e. Prinsip nirlaba tak hanya bisa diterapkan dalam Badan Hukum Pendidikan tapi juga dalam bentuk badan hukum lainnya.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT).

Undang-undang ini terbit karena pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis untuk :

- mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa;
- Untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis.

UU Sisdiknas 2003 secara umum sudah memberikan garis-garis besar atau prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Hampir semua kebijakan pokok pendidikan nasional sudah termuat dalam undang-undang tersebut. (Marzuki;2012). Namun, sudah pasti karena undang-undang tersebut merupakan undang-undang induk tentang sistem pendidikan nasional, maka sudah pasti ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut masih sangat umum sehingga diperlukan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci yang sekaligus merupakan aturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Aturan pelaksanaan dari UU Sisdiknas 2003 ada yang berupa undang-undang seperti undang-undang guru dan dosen dan ada juga yang berupa Peraturan Pemerintah (PP).

Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan dari UU Sisdiknas 2003 antara lain adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- f. Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru.
- g. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen.



- h. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diamandemn dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Di samping Peraturan Pemerintah, aturan pelaksanaan dari berbagai kebijakan pendidikan yang tertuang dalam UU Sisdiknas 2003 juga diatur dalam bentuk peraturan menteri pendidikan nasional (Permendiknas). Beberapa Permendiknas yang mengatur masalah kebijakan pendidikan antara lain adalah :

- (i). Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- (ii). Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- (iii). Permendiknas No. 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- (iv). Permendiknas No. 10 tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
- (v). Permendiknas No. 47 tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidikan untuk Dosen.

Dalam rentang tahun 2003 hingga 2010 sudah banyak kebijakan pendidikan yang muncul mewarnai pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Pelaksanaan berbagai kebijakan pendidikan yang sekaligus merupakan politik pendidikan nasional masih menyisakan berbagai problem antara lain sebagai berikut (Marzuki; 2012):

1. Wajib belajar dan pendanaan pendidikan yang praktiknya masih beragam;
2. Sertifikasi guru dan dosen yang juga memunculkan berbagai problem seperti kesenjangan dan praktik-praktik yang merugikan lembaga pendidikan;
3. Standardisasi pendidikan juga berakibat adanya kesenjangan antar sekolah yang satu dengan yang lain;
4. Ujian nasional yang masih terus menyisakan permasalahan;
5. Pelaksanaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang belum tertata dengan baik.

Peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan diharapkan akan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan pendidikan di Indonesia yaitu :

1. Kewajiban Konstitusional Negara terhadap warga negara terkait hak atas Pendidikan.
2. Penyediaan program Pendidikan yang berkualitas.
3. Penyediaan dan penyaluran dana pendidikan yang transparan serta sesuai peruntukannya.
4. Perlindungan hukum terhadap Guru dan Dosen khususnya mengenai tingkat kesejahteraan dan kesempatan peningkatan Pendidikan.
5. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan.

3. Pendidikan Nasional pasca adanya Undang-Undang Pemerintah Daerah

Otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah otonom untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut kebijakan sendiri yang pelaksanaan dan penyelenggaraannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menjadi sangat penting, karena merupakan wujud dari desentralisasi, dimana terdapat sebuah tuntutan bahwa tujuan suatu negara secara keseluruhan harus dapat tercapai walaupun keseluruhan urusan tersebut tidak diselenggarakan oleh pemerintahan pusat secara langsung. (Danneta; 2020).

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (“UU Pemda”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan tentang Pembagian Urusan Pendidikan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah bahwa : “*Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum*”. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah.

Sementara, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pada Pasal 12 ayat (1) UU Pemda disebutkan pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan Pelayanan Dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Otonomi daerah merupakan wadah untuk berkembangnya penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Pasca berlaku UU Pemda maka pada era otonomi daerah kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing pemerintah daerah, dikarenakan urusan administrasi oleh pemerintah pusat sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan sangat bergantung kepada program dari masing-masing pemerintah daerah.

Sebelum lahirnya UU Pemda, UU Sisdiknas telah memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk wajib menyediakan dan menyelenggarakan Pendidikan. Tidak hanya itu namun memiliki kewajiban untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan. Berikut diuraikan bunyi Pasal 10 dan Pasal 11 UU Sisdiknas (UU Sisdiknas; 2003) yaitu:

a. Pasal 10 berbunyi :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pasal 11 ayat (1) berbunyi : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.



- c. Pasal 11 ayat (2) berbunyi : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai dengan 15 belas tahun.

Lampiran UU Pemda tentang bidang pendidikan termasuk di dalam urusan pemerintahan yang konkuren. Hal tersebut berarti bahwa, kewenangan mengenai urusan di bidang pendidikan dibagi antara kewenangan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, adanya ketentuan tersebut tentunya harus diselenggarakan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta kepentingan nasional. Dalam hal ini, bidang pendidikan termasuk kedalam salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, yang kemudian diperjelas didalam lampiran pembagian urusan tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.

Mengenai hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dalam bidang pendidikan berdasarkan UU Pemda, maka dapat dilihat dari beberapa hal yakni dalam (Danneta; 2020):

1. Manajemen pendidikan.

Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam hal menetapkan standar pendidikan secara nasional yang meliputi seluruh wilayah di Indonesia. Tujuannya agar setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki standar pendidikan yang sama. Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan adanya hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan di daerah, dimana dalam penyelenggaraannya daerah provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap pendidikan menengah. Berdasarkan UU Pemda 2014, pengelolaan pendidikan menengah tersebut menjadi kewenangan dari pemerintahan daerah provinsi.

Pemerintahan daerah provinsi juga memiliki kewenangan dalam mengelola pendidikan khusus dimana merupakan pendidikan yang dilakukan terhadap peserta didik yang memiliki kelainan fisik maupun psikis atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa (Pasal 32 ayat 1 UU Pemda 2014). Sedangkan daerah kabupaten atau kota diberikan kewenangan atas pengelolaan terhadap pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan nonformal yang berada di masing-masing daerah. Pendidikan formal dapat berupa pelatihan dan kursus yang menjadi penunjang pendidikan formal.

2. Kurikulum.

Dalam hal ini pemerintahan pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan kurikulum pendidikan secara nasional yang meliputi kurikulum pendidikan menengah, dasar, PAUD dan nonformal (UU Pemda; 2014). Misalnya, dalam hal ini diketahui bahwa saat ini sistem pendidikan nasional menggunakan kurikulum tahun 2013 untuk pendidikan formal.

Adanya penetapan kurikulum yang menjadi kewenangan pusat adalah bertujuan agar penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung di setiap daerah dapat berjalan secara merata dan seragam.

Berdasarkan UU Pemda, pemerintahan daerah provinsi diberikan kewenangan dalam hal menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Sedangkan



daerah kabupaten atau kota diberikan kewenangan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan nonformal.

3. Akreditasi.

Hal ini berkaitan dengan penetapan standar pendidikan secara nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dimana akreditasi yang dilakukan terhadap setiap lembaga pendidikan oleh pemerintah pusat, merupakan dasar dari penetapan standar pendidikan secara nasional.

Hal tersebut meliputi penilaian terhadap kelayakan dari suatu lembaga pendidikan yang telah didasarkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, yang memiliki kewenangan untuk melakukan akreditasi adalah pemerintahan pusat. Hal tersebut, dilakukan oleh pemerintah pusat supaya terdapat keseragaman terhadap indikator penilaian kelayakan suatu lembaga pendidikan.

4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pemerintahan pusat memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian terhadap tenaga kependidikan yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, lintas Daerah provinsi yang meliputi pemindahan dan pengubahan formasi. Dalam hal ini, berbeda dengan kewenangan pemerintahan pusat, maka pemerintahan daerah provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pemindahan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten atau kota yang berada dalam satu daerah provinsi. Serta, kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam hal ini adalah Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten atau kota.

5. Perizinan Pendidikan.

Mengingat bahwa pengelolaan pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintahan pusat, maka yang memiliki wewenang untuk melakukan penerbitan izin perguruan tinggi swasta juga dimiliki oleh pemerintahan pusat, selain itu dalam pemerintahan pusat juga berkewenangan dalam penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing, dalam urusan pemerintahan yang konkuren, akan menjadi kewenangan pemerintahan pusat apabila berhubungan dengan lintas negara. Agar birokrasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, maka dalam hal penerbitan izin terhadap pendidikan khusus dan pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, mengingat pula kewenangan pengelolaannya berada pada pemerintahan daerah provinsi.

6. Bahasa dan Sastra.

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap Bahasa Indonesia. Hal tersebut dilakukan oleh pusat sebab Bahasa Indonesia merupakan Bahasa Nasional sebagai bahasa persatuan seluruh Rakyat Indonesia, sehingga pusat memiliki kewajiban untuk dapat mempertahankan serta melestarikan Bahasa Indonesia, melalui pembinaan dan penerapannya didalam proses belajar dan mengajar yang dilaksanakan oleh setiap lembaga pendidikan, contoh hal nyata yaitu adanya mata pelajaran Bahasa Indonesia pada setiap jenjang pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penting pula untuk mempertahankan kearifan lokal daerah setempat, salah satunya yaitu dengan melestarikan bahasa dan sastra daerah setempat yang dilakukan dengan pendidikan bahasa daerah. Adanya hal tersebut dapat dijadikan salah satu muatan dalam kurikulum muatan lokal.



Dalam hal ini, pemerintah daerah provinsi memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan tersebut dalam hal penuturnya lintas daerah kabupaten atau kota dalam satu daerah provinsi, serta kewenangan yang dimiliki oleh daerah kabupaten atau kota yakni menyelenggarakan pembinaan dalam hal penuturnya berada didalam satu daerah kabupaten atau kota.

4. Sistem Pendidikan di Masa Pandemi Covid 19

Akhir tahun 2019, muncul virus Covid 19 di Kota Wuhan, China yang meluluhlantahkan kota tersebut dan China yang membuat seluruh aktifitas manusia dihentikan dan pemerintah China menetapkan kebijakan lockdown untuk menghentikan penyebaran virus tersebut. Hal tersebut membuat seluruh aktivitas manusia berubah 100 % dan pada masa pandemic seluruh kegiatan yang dilakukan secara virtual termasuk dunia Pendidikan.

Pandemi Covid 19 kemudian melanda dunia dan seluruh aktifitas manusia kemudian dilakukan secara online atau virtual termasuk bidang Pendidikan. Pandemi Covid 19 masuk ke Indonesia pada tanggal 3 Maret 2020. Kasus positif di Indonesia semakin hari semakin meningkat sehingga seluruh kegiatan di seluruh bidang yang melibatkan pengumpulan masa dihentikan.

Pandemi Virsu Covid 19 telah mendorong terjadinya perubahan structural yang sangat cepat antara lain :

a. Dunia Usaha

- Kegiatan usaha dibatasi dan seluruh aktivitas dilakukan melalui daring dan WFH (Work From Home) kecuali untuk kegiatan usaha yang tidak bias dilakukan secara daring misalnya Rumah Sakit, Pom Bensin, dll.
- Tekanan lebih besar untuk memperbaharui keterampilan (misalnya: *cyber security*) misalnya Para pekerja dari berbagai industri perlu dengan cepat menyesuaikan diri dengan cara kerja barudan memperbaiki keterampilan mereka untuk tetap kompetitif;
- Lokalisasi peluang kewirausahaan. Para pelaku wirausaha akan menjadi pendorong penting pemulihan ekonomidalam menciptakan cara-cara yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Bidang Pendidikan

- *Pembelajaran dilakukan dengan online atau virtual baik tingkat sekolah maupun perguruan tinggi*
- Institusi banyak mendapat tekanan finansial karena banyak sekolah dan universitas mendapatkan tekanan finansial – salah satunya karena orang tua dan siswa meminta rabat dan mendorong institusi untuk menurunkan biaya kuliah

Di Indonesia, kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 diatur dengan Surat Edaran, yakni Surat Edaran Mendikbud Nomor 4, tanggal 24 Maret 2020 (SE Mendikbud 4/2020) tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Surat Edaran tersebut, salah satunya diatur proses belajar dari rumah. Selain itu ada beberapa ketentuan yang diatur, antara



lain :

- semangat dasar pembelajaran daring, fokus belajar dari rumah,
- aktivitas dan tugas pembelajaran selama belajar dari rumah, serta
- peran guru dalam memberikan umpan balik.

Belajar dari rumah dilaksanakan dengan dua cara, yakni pembelajaran jarak jauh daring dan luring sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana. Pembelajaran jarak jauh secara daring dapat menggunakan sumber yang diambil dari Rumah Belajar dari Pusdatin Kemendikbud, TV edukasi Kemendikbud, Pembelajaran Digital oleh Pusdatin dan SEAMOLEC Kemendikbud, hingga mengambil dari berbagai buku digital yang tersedia di internet. Bagi sekolah yang menerapkan pembelajaran jarak jauh luring, media dan sumber belajar dapat diambil dari televisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, dan alat peraga dari lingkungan sekitar.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait proses pembelajaran di masa pandemic secara prinsip lebih mengutamakan akan dua hal yaitu :

1. *Prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.*
2. *Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi Covid-19.*

B. Landasan Ekonomi Pendidikan

Ekonomi sebagai sumber pembiayaan pendidikan sangat penting karena hal ini akan mendorong, meningkatkan kualitas bangsa yang lebih baik. Ekonomi juga menentukan keberhasilan pendidikan, dengan ekonomi yang baik maka prasarana, sarana, media, alat belajar, dan sebagainya dapat dipenuhi. Proses pembelajaran jadi lebih intensif, motivasi, dan kegairahan kerja akan meningkat. Ekonomi dijadikan landasan pendidikan, karena dalam bidang pendidikan, perkembangan ekonomi adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas daripendidikan.

Ekonomi merupakan salah satu landasan yang memiliki peran utama dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan. Adapun peran ekonomi sebagai landasan dalam dunia pendidikan dibagi menjadi dua yaitu peran prinsipil dan peran material. Secara prinsipil peran tersebut meliputi prinsip-prinsip ekonomi yang dapat diaplikasikan dalam implementasi pendidikan, sementara itu secara material peran ekonomi berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan proses pendidikan.

Pendidikan dapat berjalan dengan lancar salah satu faktornya adalah perekonomian. Dengan ekonomi, sekolah dapat memberikan sarana dan prasaran yang lengkap sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga tujuan pemerintah untuk memajukan generasi muda dapat tercapai. Selain itu, pertumbuhan ekonomi banyak membantu orang-orang kurang mampu untuk bersekolah. Ekonomi merupakan salah satu bagian sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan afeksi,



kognisi, dan keterampilan. Termasuk memiliki keterampilan tertentu untuk bisa menjadi tenaga kerja yang andal atau mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Akan tetapi dalam menggunakan dana pendidikan harus efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan efisiensi dalam menggunakan dana pendidikan adalah penggunaan dana yang harganya sesuai atau lebih kecil daripada produksi dan layanan pendidikan yang telah direncanakan. Sementara itu yang dimaksud dengan penggunaan dana pendidikan secara efektif adalah bila dengan dana tersebut tujuan pendidikan dapat dicapai.

Ekonomi mampu mendorong pendidikan berjalan secara efektif dan efisien Pendidikan akan menciptakan manusia yang memiliki kualitas sehingga mampu menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi, sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik.

Menurut Pidarta (2000, 247), kegunaan ekonomi dalam pendidikan sebagai berikut :

- a. Untuk membeli keperluan pendidikan yang tidak dapat dibuat sendiri atau bersama para siswa, orang tua, masyarakat, atau yang tidak bisa dipinjam dan ditemukan di lapangan, seperti prasarana, sarana, media, alat belajar/peraga, barang habis pakai, materi pelajaran.
- b. Membiayai segala perlengkapan gedung seperti air, listrik, telepon, televisi dan radio.
- c. Membayar jasa segala kegiatan pendidikan seperti pertemuan-pertemuan, perayaan-perayaan, panitia-panitia, darmawisata, pertemuan ilmiah dan sebagainya.
- d. Untuk materi pelajaran pendidikan ekonomi sederhana, agar bisa mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi, seperti hidup hemat, bersikap efisien, memiliki keterampilan produktif, memiliki etos kerja, mengerti prinsip-prinsip ekonomi.
- e. Untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan para personalia pendidikan
- f. Meningkatkan motivasi kerja
- g. Membuat para personalia pendidikan lebih bergairah bekerja.

Menurut Suryadi (2002) investasi di bidang pembangunan pendidikan bernilai sangat strategis dalam jangka panjang, sebab manusia-manusia terdidik akan memberikan kontribusi yang amat besar terhadap kemajuan pembangunan, termasuk untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Di era global sekarang ini, berbagai bangsa di dunia telah mengembangkan *knowledge-based economy* (KBE), yang mensyaratkan dukungan SDM berkualitas. Karena itu, pendidikan mutlak diperlukan guna menopang pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan-*education for the knowledge economy* (EKE).

Pendidikan harus pula berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan yang menghasilkan produk-produk riset unggulan Pengembangan ekonomi nasional berbasis pada keunggulan sumber daya alam dan sosial yang tersedia, ditambah dengan ketersediaan SDM bermutu sangat menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi dunia serta berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu melahirkan lulusan-lulusan bermutu yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, dan mempunyai keterampilan teknis yang mumpuni. Pendidikan juga harus dapat menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang memiliki kemampuan kewirausahaan, yang menjadi salah satu pilar utama aktivitas perekonomian nasional. Keunggulan suatu bangsa tidak



lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia, yaitu tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang sangat cepat. Pendidikan sangat berperan dalam pembangunan, baik itu dalam pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, sosial, dan bahkan masih lebih banyak lagi peranan pendidikan dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan Negara. Sumanto (2008, hlm. 134) menjelaskan bahwa sumber daya manusia yang dilengkapi dengan keterampilan serta kemampuan untuk berusaha sendiri merupakan modal utama bagi terciptanya pembangunan..

Dalam dunia pendidikan, faktor ekonomi sebagai pemeran yang cukup menentukan keberhasilan Pendidikan. Proses belajar mengajar bisa dilaksanakan secara lebih intensif, sehingga para pendidik lebih dapat memusatkan perhatiannya terhadap pengajaran, motivasi dan kegairahan kerja pendidik meningkat. Mencermati hal tersebut maka yang perlu untuk diperhatikan adalah :

1. Tiap-tiap lembaga pendidikan diupayakan agar mampu mandiri baik dari segi kualitas sumber daya manusia maupun anggaran.
2. Dana pendidikan perlu dikelola secara profesional.
3. Semua penggunaan dana pada setiap kegiatan perlu dilakukan secara efisien dan efektif.

Faktor ekonomi yang sangat berkesesuaian dengan pendidikan adalah sumber daya manusia (Mudyahardjo dalam Yatimah, 2017, hlm. 133). Oleh karena itu, ditinjau dari sudut pandang ekonomi, pendidikan adalah *human investment* atau upaya penanaman modal pada diri manusia (Muchtar dalam Yatimah, 2017, hlm. 134)

Menurut Pidarta (2007) perkembangan ekonomi secara makro yang berpengaruh dalam bidang pendidikan, antara lain:

1. Banyaknya orang kaya yang mau secara sukarela menjadi orang tua asuh/bapak angkat (dorongan hati atau himbauan pemerintah) untuk mensukseskan wajib belajar 9 tahun.
2. Terlaksananya sistem ganda dalam pendidikan yaitu kerja sama antara sekolah dengan pihak usahawan dalam proses belajar mengajar para siswa, dalam rangka mengembangkan keterampilan siswa.

Munculnya sekolah-sekolah unggul yang memiliki sarana dan prasarana, penggajian guru, program yang beragam, proses belajar lebih baik.

Pendidikan diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Terdapat hubungan antara pendidikan dan ekonomi, antara lain melalui pendidikan tenaga kerja produktif dapat dihasilkan. Sebaliknya, pelaksanaan pendidikan memerlukan sejumlah dana yang harus dimanfaatkan secara efisien dan efektif.

Ekonomi sebagai sebuah cabang ilmu yang mengkhususkan kajian tentang pengelolaan pendapatan dan pengeluaran memiliki implikasi terhadap implementasi proses pendidikan. Pendidikan yang berkualitas hendaknya dapat dilaksanakan walaupun fasilitas yang minim sedangkan modern belum tersedia, guru dan kepala sekolah dituntut untuk kreatif menciptakan sarana dan



prasarana pembelajaran. Implikasi dari prinsip ini tentunya akan menjadikan proses pendidikan dapat dilaksanakan dengan biaya minimal dengan kualitas hasil didik tetap terjaga.

Dukungan ekonomi sebagai sebuah landasan dalam proses pendidikan memiliki implikasi yang pada akhirnya antara pendidikan dan ekonomi menjadi hubungan yang erat. Ekonomi mampu mendorong pendidikan berjalan secara efektif dan efisien sementara hasil pendidikan akan menciptakan manusia yang memiliki kualitas sehingga mampu menggali dan mengoptimalkan sumber sumber ekonomi, dengan sendirinya maka pertumbuhan ekonomi menjadi semakin meningkat.

Landasan ekonomi dalam pendidikan juga memberi perspektif tentang potensi-potensi manusia, keuangan, materi, persiapan yang mengatur sumber keuangan dan bertanggung jawab terhadap anggaran pembelajaran (Mujib, 2006: 46). Masa saat ini ekonomi merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam penentuan maju dan mundurnya pendidikan di suatu lembaga dapat berjalan dengan baik.

Dunia pendidikan adalah lembaga yang berkewajiban mengembangkan individu manusia, sudah tentu pendidikan itu akan membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Artinya dunia pendidikan bukan dunia bisnis tempat berlatih mencari uang, melainkan dunia pembinaan tempat peserta didik belajar agar bisa hidup wajar dan damai. Ada hal lain yang lebih menentukan hidup matinya dan maju mundurnya suatu lembaga pendidikan dibandingkan dengan ekonomi yaitu dedikasi, keahlian dan keterampilan pengelola dan guru

Dampak lain dari keberhasilan pembangunan ekonomi secara makro adalah munculnya sejumlah sekolah unggul. Sekolah ini lebih unggul dalam prasarana dan sarana pendidikan, lebih baik dalam menggaji gurunya.

Untuk dapat meningkatkan nilai keekonomian dalam pendidikan maka APBN dan APBD harus ditingkatkan semaksimal mungkin dengan syarat penggunaannya harus dipergunakan secara efektif dan efisien sehingga tepat sasaran. Intensitas kerjasama dengan pihak swasta harus ditingkatkan agar penyerapan hasil pendidikan dapat terserap dan memberikann feedback kembali pada nilai pendidikan itu sendiri.

C. Landasan Religius Dalam Pendidikan

Landasan religius dalam pendidikan yaitu suatu dasar yang bersumber dari agama. Tujuan dari landasan religius dalam pendidikan adalah seluruh proses dan hasil dari pendidikan dapat mempunyai manfaat dan makna hakiki. Agama memberikan dan mengarahkan fitrah manusia memenuhi kebutuhan batin, menuntun kepada kebahagiaan dan menunjukkan kebenaran.

Menurut Jalaluddin (2002) kata *religi* berasal dari bahasa latin *religio* yang akar katanya adalah *religare* yang berarti mengikat. Maksudnya *religi* atau agama pada umumnya terdapat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan yang semua itu berfungsi untuk mengikat dan mengutuhkan diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan sesama



manusia dan alam sekitarnya.

Ilmu pendidikan berlandaskan agama mengandung bahwa agama itu menjadi sumber inspirasi untuk menyusun ilmu atau konsep-konsep pendidikan dan melaksanakan pendidikan dan melahirkan berbagai istilah yang dapat diartikan pendidikan, pembelajaran serta pengadaban. Terdapat beberapa karakteristik tujuan pendidikan berdasarkan agama, yaitu bahwa tujuan itu harmonis, realistis, idealitis, pasti dan tidak menerima perubahan dari waktu ke waktu (Abdullah 1982, 149).

Menurut Gloc dan Stark (dalam Hood, 1996; dalam Rakhmat, 2003; Ancok & Nashori, 1994) ada lima aspek religiusitas yaitu:

- (1) Aspek ideologi (*the ideological dimension*) berkaitan dengan tingkatan seseorang dalam menyakini kebenaran ajaran agamanya (*religious belief*). Tiap-tiap agama memiliki seperangkat keyakinan yang harus dipatuhi oleh penganutnya, misalnya kepercayaan adanya Tuhan,
- (2) Aspek ritualistik (*the ritulistic dimension*) yaitu tingkat kepatuhan seseorang mengerjakan kewajiban ritual sebagaimana yang diperintahkan dalam agamanya (*religious practice*), misalnya kewajiban bagi orang Islam seperti; sholat, zakat, puasa, pergi haji bila mampu,
- (3) Aspek eksperiensial (*the experiential dimension*) yaitu tingkatan seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan-perasaan atau pengalaman-pengalaman keagamaan (*religious feeling*). Semua agama memiliki harapan bagi individu penghayatannya akan mencapai suatu pengetahuan yang langsung mengenai realitas yang paling sejati atau mengalami emosi-emosi religius misalnya; merasa doanya dikabulkan, merasa diselamatkan Tuhan,
- (4) Aspek intelektual (*the intelectual dimension*) berkaitan dengan tingkatan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya (*religious knowledge*), dan (5) Aspek konsekuensial (*the consequential dimension*) yaitu aspek yang mengukur sejauhmana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya dalam kehidupan sosial, yakni bagaimana individu berhubungan dengan dunia terutama dengan sesama manusia (*religious effect*).

Menurut Darajat (1997) bahwa religiusitas dapat memberikan jalan keluar kepada individu untuk mendapatkan rasa aman, berani, dan tidak cemas dalam menghadapi permasalahan yang melingkupi kehidupannya. Agama Islam sendiri mengajarkan bahwa dengan mendekatkan diri kepada Allah maka seseorang akan mendapatkan ketenangan hidup lahir dan batin serta dapat mengontrol perilakunya. Pendidikan agama melalui berbagai institusi dan media belum mampu mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Agama dengan ajaran dan nilai-nilainya masih menjadi sesuatu yang formal. Tegasnya, bagi banyak pihak, keberagamaan belum berkorelasi dengan perilaku sosialnya (Departemen Agama RI, 2004).

Konstitusi negara memandang bahwa agama merupakan elemen yang penting dalam pendidikan. Ketuhanan Yang Maha Esa disebut dalam falsafah dan pandangan hidup bangsa, yakni Pancasila. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tetap mempertahankan dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal



tersebut termaktub dalam Bab II pasal 2 yang bunyi lengkapnya adalah “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sedangkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Bab II pasal 3 yang berbunyi “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menjelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional mempunyai dua butir utama, yaitu:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa

Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berilmu pengetahuan. Seseorang yang berilmu (berpengetahuan) memiliki kedudukan yang tinggi, sekalipun ia berasal dari golongan rendah, karena agama tidak memandang dari kepada darah dan keturunan, tetapi menggaris bawahi ilmu, amal, takwa, kejujuran, dan kesucian.

2. Mengembangkan Manusia Indonesia Seutuhnya

Manusia Indonesia seutuhnya yang dimaksud adalah manusia-manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantab dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan pendidikan nasional “Mengembangkan manusia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”, sangat relevan dengan konsep tujuan pendidikan dalam beragama di mana pandangan tersebut mengajak kita mengembalikan semua kepada tujuan terakhir, yaitu Persiapan Kehidupan Dunia dan Akhirat. Dan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat tersebut tentu harus dilandasi iman kepada Tuhan.

Pendidikan menurut pandangan agama lebih dominan kepada pembentukan akhlak, akidah dan iman. Sedangkan secara umum landasan religi dalam pendidikan adalah proses perubahan sikap dan pengembangan kemampuan yang dimiliki. Apabila kedua hal ini digabungkan maka hasil dari pendidikan akan sangat maksimal dan menghasilkan peserta didik yang memiliki intelektual dan akhlak yang mulia.

Sejalan dengan teori dalam isi dan tujuan pendidikan pada dasarnya pendidikan dalam semua agama adalah sama yaitu kewajiban seorang hamba untuk meraihnya. Dalam meningkatkan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setiap agama menginginkan manusia terlahir adalah manusia yang berilmu dan beradab sesuai dengan akidahnya.

Betapa pentingnya pendidikan, karena hanya dengan proses pendidikanlah manusia dapat mempertahankan eksistensinya sebagai manusia yang mulia, melalui pemberdayaan potensi dasar dan



karunia yang telah diberikan Tuhan. Apabila semua itu dilupakan dengan mengabaikan pendidikan, manusia akan kehilangan jati dirinya. Secara garis besar, konsep religi dalam pendidikan adalah mempertemukan pengaruh dasar dengan pengaruh ajar. Pengaruh pembawaan dan pengaruh pendidikan diharapkan akan menjadi satu kekuatan yang terpadu yang berproses ke arah pembentukan kepribadian yang sempurna.

Oleh karena itu, landasan religi dalam pendidikan tidak hanya menekankan kepada pengajaran yang berorientasi kepada intelektualitas penalaran, melainkan lebih menekankan kepada pendidikan yang mengarah kepada pembentukan kepribadian yang utuh dan bulat.

Bagi manusia, pendidikan penting sebagai upaya menanamkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai agama pada kehidupan nyata melalui pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, sesuai dengan harkat dan derajat kemanusiaannya.

Mengingat bahwa keberadaan manusia di dunia ini mengemban tugas dan tanggung jawab yang berat sebagai makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi. Dengan demikian, pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk manusia yang bersedia mengabdikan kepada Tuhan, dengan menyelaraskan aktivitas peribadatan dalam konteks agama Islam di sebut dengan *hablum minallah, hablum minannaas, dan hablum minal 'alam*. Dengan demikian, pendidikan bagi manusia memiliki dasar yang kuat dan sangat penting, agar manusia dapat memenuhi janjinya kepada Tuhan semesta alam serta dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Selain itu, pentingnya landasan religi dalam pendidikan tidak semata-mata mementingkan individu, melainkan erat kaitannya dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu penting sekali di cermati bahwa Pendidikan bagi kemaslahatan umat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam proses pendidikan senantiasa dikorelasikan dengan kebutuhan lingkungan dan kemasyarakatan, serta lingkungan dan kehidupan bermasyarakat dijadikan sebagai sumber belajar. Seorang peserta didik yang diberi kesempatan untuk belajar yang berwawasan lingkungan dan kemasyarakatan akan menumbuhkembangkan potensi manusia sebagai pemimpin. Peserta didik sebagai calon pemimpin perlu dikembangkan sifat kepemimpinannya, sekaligus diperkenalkan dengan konsekuensi yang akan ia terima, yakni tanggungjawab. Karena setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.



BAB 10

KONSEP PENGEMBANGAN KARIR TENAGA PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Konsep Pengembangan Karir

Dari awal seorang pegawai ketika memasuki masa dinas aktif di suatu instansi setelah selesai melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebelum menempati suatu jabatan maka pegawai tersebut tentunya sudah mampu merencanakan jenjang karirnya selama berdinas di instansi tempat bekerja. Sedangkan tugas seorang pimpinan atau atasan hanyalah memfasilitasi pegawai tersebut dan memberi informasi bagaimana seorang pegawai untuk dapat mengembangkan karirnya sehingga tujuan dan harapan yang ingin dicapai sebagai seorang pegawai dapat terwujud untuk dapat berkarir dan mencapai jenjang kepangkatan yang tertinggi sesuai yang diharapkan.

Mengutip pendapat Omotayo., Esther dan Ibiyinka (2014) bahwa, “... *the company's job is simply to facilitate employees and provide information on how an employee reaches his career goals*”. Karir merupakan rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempati seseorang sepanjang hidupnya. Ismail., *et al* (2013) mengemukakan bahwa dalam pengembangan karir diperlukan untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Sedangkan Tricia Jackson (2000) mengemukakan pengembangan karir sebagai “*Career development has shifted from assessing employees potential for promotion towards realising their potential role adaptation and flexibility, projects and teamworking, development positions and lateral job movements*”. Pengembangan karir menurut Tricia telah mengalami pegeseran penilaian dari menilai potensi karyawan atau pegawai untuk dipromosikan kearah mewujudkan potensi adaptasi dan fleksibilitas peran karyawan atau pegawai, proyek dan kerjasama team, posisi pengembangan dan perpindahan pekerjaan ke posisi lain.

Dalam rangka pengembangan karir seorang pegawai, Hasibuan (2016) mendefinisikan “pengembangan karir merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoretis, konseptual, dan moral pegawai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan.” Sementara itu Hidayat (2018) menambahkan dalam kutipannya bahwa, “*a career is a job or position that is owned or held by a person during his life in working in certain institutions*”. Dalam hal ini karir atau “*career*” adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang dipunyai (atau dipegang) seseorang



selama kehidupannya dalam bekerja. Pendapat lain disampaikan oleh Arthur., *et al* (2013) menyampaikan bahwa karir sebagai pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang.

Pengembangan karir bagi seorang pegawai merupakan suatu proyeksi masa depan pegawai tersebut yang menunjukkan perkembangan seorang pegawai secara individual yang berhubungan dengan pekerjaan dan perilaku untuk maju dalam jenjang jabatan yang dapat dicapainya selama bekerja di suatu perusahaan atau instansi. Pendapat Brach (2015) tentang pengembangan karir menyatakan *“Career development supports and creates job satisfaction. Employees will feel satisfied at work if aspects of the job and themselves support.* Pentingnya pengembangan karir bagi seorang pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya, hal ini karena adanya kesempatan dan peluang yang diberikan oleh organisasi bagi setiap pegawai untuk dapat mengembangkan karirnya baik melalui pendidikan, latihan dan kursus yang dapat menunjang dalam berkarir.

Escoffery., *et al* (2018) dalam kutipannya, *“career development is the personal improvement of achieving career plans and improvement by the personnel department to achieve work targets”*. Pengembangan karir bagi pegawai sangat mendukung efektivitas individu, kelompok dan organisasi suatu perusahaan atau instansi dalam mencapai tujuan serta menciptakan kepuasan kerja bagi seorang pegawai yang akan merasa puas dalam bekerja apabila aspek-aspek pekerjaan dan dirinya mendukung sehingga mendorong seorang pegawai untuk dapat meningkatkan kemampuannya secara individu dan merencanakan karirnya.

Pengembangan karir merupakan hal yang penting dalam organisasi di suatu perusahaan atau instansi sehingga dapat mengembangkan dan memperhatikan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai atau karyawan. Muhall (2014) mendefinisikan pengembangan karir sebagai peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir dan peningkatan oleh departemen personalia untuk mencapai suatu rencana kerja sesuai dengan jalur atau jenjang organisasi. Dengan demikian, pengembangan karir adalah sebuah peningkatan status/pekerjaan seseorang di suatu organisasi untuk sesuai dengan jalur karir sesuai yang ingin dicapai.

Pengembangan karir sendiri merupakan proses yang dilalui seorang di suatu organisasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Viethzal dan Ella (2013) bahwa *“pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan.”* Pendapat lain oleh Dik *et al* (2017) menyatakan dalam kutipannya, *“Career development can increase in the status / employment*



of a person in an organization to match the career path according to what they want to achieve”. Pendapat tersebut menjadi salah satu indikator dari keberhasilan seseorang di dalam pencapaian karir.

Karir sebagai sarana untuk membentuk seseorang menemukan secara jelas keahlian, nilai, tujuan karir dan kebutuhan untuk pengembangan, merencanakan tujuan karir, secara kontinyu mengevaluasi, merevisi dan meningkatkan rancangannya. Adapun pengembangan karir (*career development*) yang disampaikan oleh Mondy meliputi aktifitas-aktifitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Beberapa prinsip pengembangan karir (Nurmasari, 2015), sebagai berikut:

1. Pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Bila setiap hari pekerjaan menyajikan suatu tantangan yang berbeda, apa yang dipelajari di pekerjaan jauh lebih penting daripada aktivitas rencana pengembangan formal.
2. Bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Skill yang dibutuhkan untuk menjadi supervisor akan berbeda dengan skill yang dibutuhkan untuk menjadi middle manager.
3. Pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Jika tujuan tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh seorang individu maka individu yang telah memiliki skill yang dituntut pekerjaan akan menempati pekerjaan yang baru.
4. Waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat direduksi/dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. Pengembangan karir (*career development*) meliputi perencanaan karir (*career planning*) dan manajemen karir (*career management*).

Pengembangan karir seharusnya tidak hanya tergantung pada usaha-usaha individu saja, karena tidak selalu sesuai dengan kepentingan organisasi. Maka pihak bagian yang berwenang untuk itu, yakni departemen personalia, dapat mengatur perkembangan karier para karyawan/ anggota organisasi.



B. Konsep Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Pengertian Tenaga Pendidik

Pada era globalisasi, profesi guru bermakna strategis, karena penyandanganya mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun karakter bangsa. Esensi dan eksistensi makna strategis profesi guru diakui dalam realitas sejarah pendidikan di Indonesia. Pengakuan itu memiliki kekuatan formal tatkala tanggal 2 Desember 2004 Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebagai dasar legal pengakuan atas profesi guru dengan segala dimensinya. Tenaga Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi menjadi guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, pelatih, fasilitator serta sebutan lain yg sinkron menggunakan kekhususannya, dan berpartisipasi pada penyelenggaraan pendidikan. Pendidik adalah energi profesional yg bertugas merencanakan serta melaksanakan proses pembelajaran, menilai dampak pembelajaran, melakukan pembimbingan serta pembinaan, dan melakukan penelitian serta pengabdian di rakyat terutama bagi pendidik di perguruan tinggi.

Guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. UU RI. Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab I pasal 1 dinyatakan bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah” (Djollong, 2017)

Dalam era Revolusi Industri 4.0, guru memegang peranan strategis oleh karena itu guru harus selalu berupaya meningkatkan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan, maka pengembanaan profesionalisasi guru merupakan kebutuhan. Guru profesional harus mempunyai komitmen pada proses belajar siswa, menguasai secara mendalam materi pelajaran dan cara mengajarkannya, mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, dan guru merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya yang memungkinkan mereka untuk selalu meningkatkan profesionalismenya.

Guru dituntut untuk tanggap terhadap perubahan yang terjadi pada masyarakat, sebagai akibat dari kemajuan arus informasi dan perkembangan Iptek. Pengembangan profesi dapat dilakukan oleh diri sendiri, melalui kegigihan dalam melaksanakan tugasnya. Di pihak lain guru sebagai personil di sekolah, merupakan bawahan kepala sekolah. Secara langsung



kepala sekolah berkewajiban mengembangkan kemampuan professional guru. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan pembinaan, yaitu pembinaan yang berkaitan dengan fungsi dan usaha untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna manusia dalam suatu proses kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pembinaan professional merupakan usaha memberi bantuan kepada guru untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan mengajar, dan menumbuhkan sikap professional sehingga para guru lebih ahli dalam mengelola KBM dalam membelajarkan anak didik. (Supriadi, 2009)

Tugas utama guru sebagai pendidik profesional adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik (Susiloningsih, 2020). Tugas tersebut akan efektif apabila seorang guru memiliki derajat profesionalitas yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar diatas. Secara formal, guru profesional harus memenuhi kualitas akademik minimal S-1/D-IV bersertifikat pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Guru-guru yang memenuhi kriteria professional inilah yang akan mampu menjalankan fungsi utramanya secara efektif dan efesien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan untuk menjaga agar kompetensi profesinya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan olah raga (PP Nomor 74 Tahun 2008).

2. **Pengertian Tenaga Kependidikan**

Komponen pendukung keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan adalah Tenaga Kependidikan. Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), pengertian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Tenaga kependidikan terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan sekolah. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan (UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003).

Tenaga kependidikan pada pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi harus memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sesuai bidang tugasnya. Tenaga



kependidikan ini merupakan tenaga/pegawai yang bekerja dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, diantaranya wakil kepala sekolah, tata usaha, laboran, pustakawan, pelatih ekstrakurikuler, petugas keamanan (penjaga sekolah), dan petugas kebersihan.

Tenaga Kependidikan adalah semua anggota organisasi yang bekerja untuk kepentingan organisasi yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Tenaga Kependidikan organisasi pendidikan mencakup para guru, para pegawai, dan para wakil siswa. Tenaga dan kependidikan yang profesional harus memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi yang jelas dari kegiatan profesinya di sekolah. Tenaga pendidik dan kependidikan merupakan faktor penentu keberhasilan pendidikan. Karena penilaian kesuksesan pendidikan harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Mulai dari pengaturan jadwal pembelajaran yang teratur, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah yang memadai dan memenuhi standar, kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah yang harus terjaga, manajemen sekolah yang tegas serta supervisi yang ketat, dan tentunya proses pembelajaran yang berkualitas. Semua faktor tersebut adalah peran strategis tenaga pendidik dan kependidikan, apakah itu guru, staf TU, pustakawan, laboran, pesuruh/penjaga sekolah, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

Keberhasilan pengelolaan pendidikan bergantung pada kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga untuk mencapai keberhasilan kualitas tersebut perlu dilakukan pengembangan profesionalisme. Hal ini didasarkan pada perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh guru. (Nurdin and Sibaweh, 2019).

C. Pengembangan Karir bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Pengembangan Karir bagi Tenaga Pendidik

Saat ini, pengakuan guru sebagai profesi dan tenaga profesional makin nyata. Pengakuan atas kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi mengangkat martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Aktualitas tugas dan fungsi penyangga profesi guru berbasis pada prinsip-prinsip: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan



secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru (Rattu, 2017).

Pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru dan akan berlanjut dengan perolehan jabatan fungsional. Kegiatan pengembangan dan peningkatan profesional guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dapat berupa: kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi atau keprofesian, pendidik, dan pelatihan. Pada sisi lain, PP No. 74 Tahun 2005 tentang Guru mengamanatkan bahwa terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu: pembinaan dan pengembangan profesi, dan pembinaan dan pengembangan karir.

Pembinaan dan pengembangan keprofesian guru meliputi pembinaan kompetensi-kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sementara itu, pembinaan dan pengembangan karir meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Upaya pembinaan dan pengembangan karir guru ini harus sejalan dengan jenjang jabatan fungsional mereka. Pengembangan profesi dan karir diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Inisiatif meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ini harus sejalan dengan upaya untuk memberikan penghargaan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru.

2. Kenaikan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit

Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pegawai negeri sipil.

Jenjang pangkat guru untuk setiap jenjang jabatan, yaitu:

- a. Guru pertama : Penata Muda, golongan ruang III/a ; dan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- b. Guru Muda : Penata, golongan ruang III/c; dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
- c. Guru Madya: Pembina, golongan ruang IV/a; Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;



- d. Guru Utama : Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e;
- e. Penetapan jenjang jabatan fungsional guru untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah 10 ditetapkan oleh jabatan yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan (Alfiantyi, 2021).

3. Program dan Pelaksanaan Pengembangan Karir Guru

Program pembinaan dan pengembangan karir guru mencakup tiga ranah yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Penugasan

Dalam program ini, para guru menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan beban mengajar yang telah ditentukan berkisar 24 jam – 40 jam tatap muka/minggu atau khusus guru BK dapat membimbing 150 konseli/tahun yang diawali dengan melakukan perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan, evaluasi, bimbingan terhadap peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.

b. Promosi

Kegiatan kedua dalam pengembangan dan pembinaan karir guru adalah promosi. Kegiatan ini harus didasarkan atas pertimbangan prestasi, kompetensi, kinerja, serta dedikasi yang telah guru berikan terhadap lembaga pendidikan. Dalam kegiatan promosi ini, seorang guru memiliki hak untuk mendapatkan promosi sesuai dengan kualitas dan prestasi kerja yang dimilikinya. Kegiatan promosi dilakukan secara berjenjang, bisa sebagai guru Pembina, guru utama, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, pengawas sekolah, dsb.

c. Kenaikan Pangkat

Dalam rangka pengembangan karir guru, terdapat program kenaikan pangkat dan jabatan fungsional. Program ini berdasarkan pada kegiatan promosi sebelumnya. Dalam program ini, seorang guru harus memenuhi angka kredit yang mencakup unsur utama yang telah ditetapkan sesuai dengan Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009. Angka kredit guru merupakan poin yang dinilai dari hasil kinerja selama kegiatan dilaksanakan. Angka kredit ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru untuk kenaikan pangkat atau jabatannya (Munawir, Aliya and Bella, 2022).

Unsur dan sub unsur utama yang dinilai sebagai angka kredit dalam peningkatan karir guru yang berupa kenaikan pangkat atau jabatannya berdasarkan Permeneg PAN dan RB (2009) sebagai berikut:

a. Pendidikan

Pendidikan guru minimal berlatar belakang pendidikan S1/D4 dibuktikan dengan perolehan gelar/ijazah. Selain itu, dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) prajabatan atau sertifikat pendidik dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat).

b. Pembelajaran

Proses pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh guru kelas dan guru mata pelajaran, serta kegiatan konseling bagi guru BK. Selain itu juga mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lainnya yang relevan.

c. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) merupakan usaha dalam meningkatkan kompetensi dan pembaruan akan pengetahuan guru selama kegiatan kerjanya. PKB dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan guru yang profesional, dalam arti guru yang dapat membimbing para peserta didiknya, unggul dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi, serta memiliki kepribadian yang luhur. PKB bertujuan untuk memberikan fasilitas bagi para pendidik dalam memenuhi standar profesi yang telah ditetapkan, mengembangkan dan menyesuaikan kompetensi yang dimiliki dengan tuntutan keprofesiannya serta memotivasi para pendidik untuk selalu memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas pokoknya (Subarkah, 2020).

Kemendiknas (2012) menyampaikan bahwa Program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) bagi guru adalah suatu proses kegiatan guru secara sistematis dengan memeriksa dan menilai atau refleksi guru setelah berlangsungnya kegiatan belajar mengajar untuk membenahi segala kekurangan yang berfungsi untuk meningkatkan keprofesionalannya (Apiyani *et al.*, 2022).



Unsur kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 meliputi :

1) Pengembangan diri

Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Diklat fungsional sendiri merupakan aktivitas guru yang dalam mengikuti pendidikan atau pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan keprofesiannya. Kegiatan diklat dapat berupa pelatihan, kursus, dsb. Sedangkan kegiatan kolektif guru merupakan aktivitas para pendidik dalam mengikuti berbagai kegiatan, seperti pertemuan ilmiah ataupun kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kecakapan dan keprofesiannya. Kegiatan kolektif guru dapat berupa musyawarah kerja guru, seminar pendidikan, dsb (Kemendikbud, 2012).

2) Publikasi ilmiah

Pada kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui 3 kegiatan yaitu: a) Menjadi narasumber di berbagai forum ilmiah, diantaranya seperti seminar pendidikan ataupun diskusi ilmiah pada umumnya. Baik yang diselenggarakan pada tingkat sekolah, organisasi keprofesian, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. b) Publikasi ilmiah, kegiatan ini mengarah pada publiksi karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian dan gagasan ilmu pengetahuan para guru. Publikasi dapat berupa makalah, artikel, jurnal penelitian ilmiah, dsb. c) Publikasi buku, baik itu buku pelajaran, buku pengayaan, serta buku pedoman guru.

3) Karya inovatif

Karya inovatif menjadi salah satu unsur utama dalam PKB yang harus dimiliki oleh seorang guru diantaranya, yaitu seperti penemuan teknologi tepat guna dalam proses pembelajaran, dapat menemukan dan menciptakan sebuah karya seni, membuat atau memodifikasi media pembelajaran, serta berpartisipasi dalam pelatihan dan pengembangan penyusunan perangkat, seperti pedoman, soal, dan sejenisnya. Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) yang meliputi ketiga unsur tersebut diatas harus direalisasikan secara berkelanjutan agar para pendidik dapat terus menjaga dan meningkatkan profesionalismenya dalam mengajar. Peningkatan profesionalisme guru juga harus dilaksanakan secara sistematis dan terarah dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan secara taat asas, dan evaluasi yang dilakukan secara objektif dan otentik (Ibrahim, 2013).



4. Pengembangan Karir bagi Tenaga Kependidikan

Pengembangan karir sangat penting bagi suatu organisasi, karena karir merupakan kebutuhan yang harus terus dikembangkan dalam diri seorang pegawai sehingga mampu memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. Mengingat perkembangan pada berbagai aspek kehidupan yang terus terjadi secara dinamis, maka setiap tenaga kependidikan harus melakukan pengembangan diri secara berkesinambungan. Pengembangan tenaga kependidikan dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya yakni: penentuan kebutuhan, penentuan sasaran, penetapan isi program, prinsip-prinsip belajar, pelaksanaan program, dan penilaian pelaksanaan program.

Pembinaan karier tenaga kependidikan meliputi kenaikan pangkat dan jabatan berdasarkan prestasi kerja dan peningkatan disiplin. Pembinaan disini adalah segala usaha untuk memajukan dan meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan, demi kelancaran pelaksanaan tugas pendidikan. Adapun alasan diadakannya pengembangan teknologi diantaranya yaitu: 1. Perkembangan ilmu dan teknologi. 2. Menutup kelemahan dari seleksi. 3. Menumbuhkan ikatan batin (Pratiwi, 2020).

Adapun Tujuan pengembangan tenaga kependidikan yang efektif secara umum ialah untuk: a) menambah pengetahuan; b) menambah keterampilan; dan c) mengubah sikap. Sedangkan tujuan pengembangan tenaga kependidikan menurut para sarjana seperti Dale Yoder, Alfred Lateiner dan Joseph Triffin ialah: a) supaya tenaga kependidikan dapat melakukan pekerjaan lebih baik; b) supaya pengawasan lebih sedikit terhadap bawahan c) supaya bawahan lebih cepat berkembang; dan d) menstabilisasi tenaga. Secara lebih khusus tujuan pengembangan karier tenaga kependidikan adalah supaya : a) melaksanakan sistem pendidikan modern; b) meningkatkan kualitas/bobot karier tenaga kependidikan c) melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien; dan d) menstabilisasi/ menstandarisasi tenaga kependidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 24 ayat (7) menyebutkan guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, wakil kepala satuan pendidikan, ketua program keahlian satuan pendidikan, pengawas satuan pendidikan, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi. Pada jalur karier secara struktural inilah tenaga pendidik dapat mengembangkan kariernya.

Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi tenaga struktural, tenaga fungsional dan tenaga teknis penyelenggara pendidikan. Tenaga struktural merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum (pimpinan) yang



bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Sedangkan tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif.



BAB 11

PROBLEMATIKA TUNJANGAN SERTIFIKASI PROFESI BAGI GURU PNS DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK

A. Definisi dan Hakikat Sertifikasi Guru

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan Mulyasa (2007:33) berpendapat bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Menurut Suyatno (2008:2) bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar profesi guru.

Sertifikat kompetensi untuk guru diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi (Mulyasa, 2007: 39). Kemudian, guru yang lulus sertifikasi diberikan tunjangan sertifikasi dalam konteks layanan prima sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu kompetensi guru sehingga mampu memberikan pelayanan pendidikan yang optimal di sekolah. Sedangkan pemberian tunjangan sertifikasi kepada tenaga pendidik, baik yang berstatus PNS maupun honorer dimulai sejak tahun 2008, setelah melalui berbagai tahapan seleksi dan pemberkasan hingga pemenuhan kewajiban portofolio serta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) sehingga kemudian dikeluarkannya sertifikasi dan Nomor Registrasi Guru (NRG) sebagai syarat utama dalam pencairan tunjangan sertifikasi tersebut.

Menurut Shoimin (2013), peningkatan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan guru dalam bentuk tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru, dan meningkatkan profesionalisme guru.

Kondisi kualitas guru di tanah air tentunya satu hal vital yang mempengaruhi hasil proses pembelajaran yang benar-benar perlu diperhatikan. Adapun aspek-aspek lain yang menentukan kualitas pendidikan sebuah negara ialah fasilitas sekolah, kemampuan keluarga, gender, disparitas mutu dan sebagainya. Kompetensi profesional seorang guru



adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat melaksanakan tugasnya dengan berhasil. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keberhasilan guru dalam menjalankan profesinya sangat ditentukan oleh ketiganya selain kemampuannya mengajar (Triwinarti, 2017).

Tujuan dan manfaat sertifikasi guru seperti yang dijelaskan dalam Suyatno (2007: 2-3) bertujuan sebagai berikut.

- a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas guru sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Agen pembelajaran berarti pelaku proses pembelajaran, bukan broker pembelajaran. Bila belum layak, guru perlu mengikuti pendidikan formal tambahan atau pelatihan profesional tertentu.
- b. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Mutu siswa sebagai hasil proses pendidikan akan sangat ditentukan oleh kecerdasan, minat, dan upaya siswa bersangkutan. Mutu siswa juga ditentukan oleh mutu guru dan mutu proses pembelajaran.
- c. Meningkatkan martabat guru. Dengan segala pendidikan formal dan pelatihan yang diikuti, diharapkan guru mampu memberi lebih banyak kepada kemajuan siswa.
- d. Meningkatkan profesionalitas guru. Mutu profesional guru ditentukan salah satunya dengan jalan sertifikasi guru.

Sedangkan manfaat sertifikasi guru sendiri yakni:

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak melalui tunjangan profesi sertifikat guru tersebut.



B. Problematika Sertifikasi Guru

Saat ini sertifikasi guru dirasa belum mampu memberikan peningkatan layanan profesi keguruan dengan optimal disebabkan, yakni; *Pertama*, prosedur rekrutmen kandidat peserta sertifikasi guru yang belum konsisten. *Kedua*, lemahnya implementasi peraturan pemerintah tentang disiplin PNS. Dan *keempat*, belum ditemukannya regulasi yang mengikat guru bersertifikasi, dan belum optimalnya aktualisasi guru bersertifikasi. Sedangkan untuk efektifitas sertifikasi guru dirasa belum dapat terimplementasikan dengan sempurna disebabkan juklak dan juknis sertifikasi guru yang hanya mengarah pada pemenuhan kewajiban administratif dan belum menyentuh pada dampak serta hasil dari pemberian tunjangan profesi guru, (Alef Meichaty. 2019).

Kondisi menjadi dilematik, ketika terbitnya Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 6 tahun 2022 memuat tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan bagi guru bukan PNS, dimana pada pasal 6 ayat 1 berbunyi “Tunjangan profesi diberikan kepada Guru bukan PNS yang memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi”. Kemudian, bunyi pasal 6 ayat 3, yaitu “Pemberian Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi: 1) Guru pendidikan agama yang Tunjangan Profesi guru agama dibayarkan oleh Kementerian Agama; dan 2) Guru yang bertugas di satuan pendidikan Kerjasama.

Sehingga dengan demikian, Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 6 tahun 2022 dapat dikatakan sebagai dasar penghentian atau penghapusan pemberian tunjangan sertifikasi profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil. Di sisi lain, Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan jelas bahwa “Pemerintah akan memberikan tunjangan profesi kepada guru yang besarnya setara”.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), pada tahun 2022 jumlah guru pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 1.2954.416 atau sebesar 62% dari kategori jabatan fungsional dengan total keseluruhan pegawai negeri sipil 3.992.766 jiwa. Sedangkan jumlah PPPK tahun 2022 untuk guru sebanyak 321.265 jiwa (91%) dari total keseluruhan sebanyak 351.786 jiwa yang diisi oleh guru honorer, (BKN, 2022). Sedangkan menurut laporan organisasi profesi PGRI mengatakan, Indonesia mengalami darurat kekurangan guru. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang dirilis dalam RDP Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud Ristek RI tahun 2021 bahwa jumlah guru saat ini berjumlah 2.735.784 dengan persebaran 1.226.460 merupakan guru PNS dan 1.509.324 bukan merupakan guru PNS. Khusus untuk sekolah negeri jumlah guru adalah 2.063.230 terdiri dari 1.236.112 (60%) guru PNS, 742.459 (36%) guru Non PNS, 63.264 (3%) guru CPNS, dan 34.954 (1%) guru PPPK.



Jumlah ini masih kurang dari kebutuhan seharusnya jumlah guru di sekolah negeri yang seharusnya berjumlah 2.268.716. Artinya masih terjadi defisit guru sejumlah 947.945. Hal ini semakin diperparah jika memprediksi jumlah guru yang pensiun antara 2022 sampai 2024 ini diperkirakan mencapai 222.081 guru. Rata-rata 74.027 guru yang pensiun setiap tahunnya.

Adapun problematika sertifikasi guru lainnya yang sering menjadi kendala di samping peliknya administrasi yang sering dihadapi oleh para guru. Hal itu dipastikan menghambat proses berjalannya sertifikasi bagi guru. Misalnya, peserta yang bisa ikut seleksi administrasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan 2022. Dimana pendaftaran dan seleksi administrasi Pendidikan Profesi Guru atau PPG dalam jabatan 2022 Kemendikbudristek menunda setelah sebelumnya direncanakan dibuka kembali. Di samping itu, tidak semua guru juga mendapat undangan untuk mengikuti program ini. Sebagaimana diberitahukan berdasarkan Surat Edaran Ditjen GTK Kemendikbudristek Nomor 0248/B2/GT.00.03/2022. Disisi lain, syarat yang tidak memberikan kesempatan bagi setiap guru untuk bisa mendaftar karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah yang terdaftar di Dapodik, berusia maksimal 58 tahun per 31 Desember 2022, dan sejumlah kategori lainnya. Dikatakan dalam laman BAN-PT, PPG dalam jabatan diperuntukkan bagi lulusan S1 atau D4 jurusan kependidikan dan nonkependidikan yang telah berstatus guru disebuah satuan Pendidikan.

Akan tetapi, yang menjadi fokus penulisan ini ialah wacana penghapusan sertifikasi guru bagi guru PNS pasca terbitnya Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 6 tahun 2022 memuat tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan bagi guru bukan PNS. Hal ini mengindikasikan akan dihentikannya pemberian tunjangan sertifikasi profesi guru bagi guru PNS. Kondisi ini juga adanya persoalan karena selama ini dianggap sertifikasi bagi guru PNS tidak berbanding lurus dengan kualitas Pendidikan dan masih banyaknya tenaga pendidik honorer yang belum mendapatkan sertifikasi guru dalam meningkatkan kesejahteraan bagi guru non PNS. Disisi lain, persoalan makin klimaks ketika adanya wacana penghapusan formasi guru CPNS, menyusul kebijakan pemerintah yang tidak akan menerima guru sebagai PNS karena dialihkan menjadi PPPK atau kontrak. Problematika tersebut juga dapat menambah hambatan peningkatan profesionalitas dan mutu pendidikan.



C. Kebijakan Sertifikasi Guru PNS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan ditegaskan tentang hak guru, yakni:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- f. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- h. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- i. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- j. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru Dalam jabatan melalui pendidikan selama-lamanya 2 semester (Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam jabatan Melalui Jalur Pendidikan). Kemudian menjadi otomatis guru PNS pun bisa mengikuti sertifikasi guru Dalam jabatan, yang konsekuensinya ialah penghapusan penerimaan dari jalur portofolio. Oleh karena itu, organisasi profesi seperti PGRI meminta agar proses sertifikasi guru (Pendidikan Profesi Guru atau PPG) melalui jalur portofolio digunakan kembali seperti dulu untuk menuntaskan penyelesaian proses sertifikasi guru Dalam jabatan sebagaimana amanat UU No. 14 Tahun 2005. Selain itu, sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bisa diharapkan melibatkan organisasi profesi dalam proses PPG. Adapun, bagi guru-guru swasta yang telah tersertifikasi, diharapkan pemerintah kembali melakukan penyetaraan dengan guru ASN melalui proses inpassing.

Kemudian, pemerintah menjawabnya lagi dengan alasan dalam bentuk kurikulum



Merdeka, yang tidak membuat tunjangan sertifikasi guru dan tunjangan profesi guru dihapus. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan nomor 56/M/2022 yang mana ada dua solusi yang diberikan menjawab keresahan tersebut, yakni:

1. Ketika jam tatap muka berkurang dan tidak memenuhi 24 JP per minggu, ada tugas tambahan baru yaitu koordinator proyek yang setara 2 JP. Apabila setelah berlaku tambahan koordinator masih belum memenuhi 24 JP per minggu, maka ada solusi kedua.
2. Jika masih tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 JP per minggu karena perubahan struktur kurikulum, guru tetap diakui 24 JP apabila pada kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 JP.

Point penting yang perlu diperhatikan oleh pemangku kebijakan di Lembaga Pendidikan dalam sebuah kebijakan adalah spesifikasi prinsip dan tindakan terkait dengan masalah pendidikan yang harus diikuti, dirancang, dirumuskan dan diimplementasikan dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan, (Paul Rrowler. 2003). Jika gurunya berkualitas baik, maka pendidikan juga akan baik, jika tindakan para guru dari hari ke hari bertambah baik, maka akan menjadi lebih baik pulalah keadaan dunia pendidikan, khususnya dalam mencetak generasi yang terdidik (Farmawati, Ramli, & Rahmatullah, 2019).

D. Perspektif Pelayanan Publik

Pemerintah mempunyai peran yang cukup besar untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu wujud nyatanya adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Tyas (2014) bahwa rendahnya komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan rentan terhadap tindakan korupsi, menurunkan kepercayaan masyarakat kepada negara.

Terminologi pelayanan publik perlu yang diterjemahkan menurut Peraturan perundang-undangan bahwa menurut Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor:63/Kep/M.PAN/7/2003 Tanggal 10 Juli 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik disebutkan bahwa Pelayanan Publik adalah “segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan”.

Menurut Kotler dalam Sampara Lukman pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Sampara berpendapat, pelayanan adalah



suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan pelanggan. Sianipar, mengatakan bahwa pelayanan adalah cara melayani, membantu menyiapkan atau mengurus keperluan seseorang atau kelompok orang. Melayani adalah melayani/membantu mengurus keperluan atau kebutuhan seseorang sejak diajukan permintaan sampai penyampaian atau penyerahannya. Menurut Hassel Nogi S. Tangkuisan, Pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

Publik adalah sekelompok orang (atau satu orang) yang jelas, yang menjalin atau harus menjalin hubungan istimewa dengan perusahaan. Dalam definisi sederhana, publik juga bisa diartikan sebagai banyak orang atau juga umum. Seperti makna dari ruang publik, konsumsi publik, dan lain sebagainya. Menurut Pauline Pudjiastuti Publik adalah orang - orang yang ada di luar keanggotaan, yang juga sangat mungkin tertarik pada isu yang akan dinaikkan. Menurut Bambang Sugiharto & Agus Rachmat W., Publik adalah segala hal serentak bukan apapun juga, kekuatan yang paling berbahaya serentak sesuatu yang paling tak bermakna, orang bisa saja bicara atas nama publik, tetapi tetap publik itu bukan sosok nyata siapa pun. Karena itu, pelayanan dan publik adalah dua kata yang berbeda artinya. Karena Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Widodo, disebutkan bahwa; Pelayanan publik diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umumnya yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, BUMN dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik atau penyelenggara merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Menurut Moenir (2001), pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan



penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kata "barang, jasa dan pelayanan administratif" dalam bagian penjelasan dianggap sudah jelas, tetapi sebenarnya maksud "barang" bukanlah barang yang bisa diperdagangkan oleh manusia sehari-hari tetapi yang dimaksud adalah barang publik (*public goods*) yang penyediannya dilakukan oleh pemerintah.

Pada Pasal 4 UU tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan : kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik pihak penyedia jasa tersebut berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan. Pada Pasal 8 Ayat 2 dan Ayat 3 UU tersebut dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi : pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara harus bertanggungjawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

Berdasarkan pengertian Keputusan Pemerintah dan Lembaga Administrasi Negara serta para pakar tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya tiga unsur penting dalam pelayanan publik yaitu:

1. Penyelenggara pelayanan adalah instansi pemerintah yang meliputi satuan kerja/ satuan organisasi kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara dan Tinggi Negara, dan instansi Pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2. Pemberi Pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum.



Adapun hal-hal yang harus diatur dalam standarisasi pelayanan publik minimal mencakup :

1. prosedur pelayanan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan;
2. waktu penyelesaian sejak saat pengajuan permohonan sampai penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan;
3. biaya pelayanan termasuk rinciannya;
4. produk pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
5. penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam pemberian pelayanan; dan
6. kompetensi petugas pemberi pelayanan yang didasarkan atas keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Untuk menunjang profesionalitas pelaksanaan tugas bagi seorang guru Pegawai Negeri Sipil yang efektif dalam menghindari problematika yang dapat menghambat pencapaian Pendidikan yang berkualitas. Secara manajemen diperlukan pengelolaan profesionalitas guru dengan diperlukan beberapa tehnik untuk mengatasinya antara:

1. Memperkaya pekerjaan, yaitu penyesuaian tuntutan pekerjaan dengan kemampuan guru dari segi kuantitas jam mengajar hingga beban administrasi Pendidikan dan adaptasi perkembangan kebijakan Pendidikan. Seperti saat ini dengan adanya pelibatan sebagai guru penggerak maupun program merdeka belajar.
2. Manajemen partisipatif, penggunaan berbagai cara untuk melibatkan guru dalam pengambilan keputusan (decision making) yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Sehingga guru terutama guru PNS dapat berpartisipasi dalam merumuskan keputusan kebijakan pengajaran di satuan Pendidikan sebagaimana program merdeka belajar.
3. Mengalihkan perhatian para guru dari pekerjaan yang membosankan kepada instrumen (alat) waktu luang untuk istirahat atau sarana lain yang lebih bermanfaat.
4. Keterbukaan informasi pelayanan publik, guru diberikan penyuluhan informasi kebijakan secara berkelanjutan. Sehingga terbangunnya kesadaran dan kepedulian dalam meningkatkan mutu Pendidikan.
5. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi tumpang tindih dan adanya kepastian hukum. Sebab, Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 6 tahun 2022 dapat dikatakan sebagai dasar penghentian atau penghapusan pemberian tunjangan sertifikasi profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan jelas bahwa “Pemerintah akan memberikan tunjangan profesi kepada guru yang besarnya setara”.



BAB 12

PENDIDIKAN INKLUSIF

A. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat, di dalam kelas umum bersama teman-teman seusianya. Inklusi merupakan suatu proses merespon keragaman kebutuhan semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi pembelajaran, budaya, dan masyarakat, serta mengurangi pengecualian dalam dan dari pendidikan. Hal ini melibatkan perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan, struktur, dan strategi, dengan visi bersama yang mencakup semua anak dari rentang usia yang tepat dan pentingnya tanggung jawab dan pengaturan untuk mendidik semua anak.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif berarti menciptakan sebuah lingkungan agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat belajar, bermain dan berinteraksi dengan semua anak. Setiap peserta didik berkebutuhan khusus memiliki program belajar secara individu yang memungkinkan dia mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki sesuai dengan kemampuan.

Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya untuk belajar. Menurut Hildegun Olsen (Tarmansyah, 2007:82), pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat, berbakat. Anak-anak jalanan dan pekerja anak berasal dari populasi terpencil atau berpindah-pindah. Anak yang berasal dari populasi etnis minoritas, linguistik, atau budaya dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau termajinalisasi.

Pendidikan inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler (SD, SMP, SMU, dan SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya. (Lay Kekeh Marthan, 2007:145). Sedangkan menurut Staub dan Peck (Tarmansyah, 2007:83), pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas. Hal ini menunjukkan kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak-anak berkelainan, apapun jenis kelainannya. Dari beberapa pendapat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler (SD, SMP, SMU, maupun SMK).



1. Landasan Pendidikan inklusi

Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 secara jelas dan tegas menjamin bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan. UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maupun dalam Peraturan Mendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Secara khusus perhatian terhadap penyandang disabilitas juga dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perhatian terhadap pendidikan Anak didukung dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adanya jaminan dari berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Deklarasi HAM (1948), Konvensi Hak Anak (1989), Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990), Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Cacat (1993), Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi UNESCO (1994), Konferensi/Komitmen Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua (2000), Deklarasi Bangkok tentang Pendidikan (2004), Simposium Internasional tentang Inklusi dan Penghapusan Hambatan Belajar, Partisipasi dan Perkembangan (2006). Semua instrumen hukum tersebut ingin memastikan bahwa semua anak, tanpa kecuali, memperoleh pendidikan.

Pendidikan yang inklusif diatur dalam kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 4 Ayat 1 tersebut, tertulis bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Pasal 11 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara, tanpa diskriminasi”. Hak ini juga dinyatakan dalam Pasal 12 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya”.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Secara umum pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU No 20 tahun 2003, Pasal 1 ayat 1). Oleh sebab itu inti dari pendidikan inklusi adalah hak azasi manusia atas pendidikan.



Suatu konsekuensi logis dari hak ini adalah semua anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang tidak mendiskriminasikan dengan kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan dan lain-lain.

2. Tujuan Pendidikan Inklusif

Secara umum pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No 20 tahun 2003, Pasal 1 ayat 1). Oleh sebab itu inti dari pendidikan inklusif adalah hak azasi manusia atas pendidikan. Suatu konsekuensi logis dari hak ini adalah semua anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang tidak mendiskriminasikan dengan kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan dan lain-lain.

Tujuan praktis yang ingin dicapai dalam pendidikan inklusif meliputi tujuan langsung oleh anak, oleh guru, oleh orang tua dan oleh masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh anak dalam mengikuti kegiatan belajar dalam inklusif antara lain adalah berkembangnya kepercayaan pada diri anak, merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya. Anak dapat belajar secara mandiri, dengan mencoba memahami dan menerapkan pelajaran yang diperolehnya di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari. Anak mampu berinteraksi secara aktif bersama teman-temannya, guru, sekolah dan masyarakat. Anak dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan, dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut.

Bagi guru, melaksanakan pendidikan inklusif akan memperoleh kesempatan belajar dari cara mengajar dengan setting inklusi. Dengan demikian terampil dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki latar belakang beragam. Begitu juga guru mampu mengatasi berbagai tantangan dalam memberikan layanan kepada semua anak serta bersikap positif terhadap orang tua, masyarakat, dan anak dalam situasi beragam. Hal ini akan mempunyai peluang untuk menggali dan mengembangkan serta mengaplikasikan berbagai gagasan baru melalui komunikasi dengan anak di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Bagi orang tua, melaksanakan pendidikan inklusif membantu untuk dapat belajar lebih banyak tentang cara mendidik dan membimbing anaknya lebih baik di rumah, dengan menggunakan teknik yang digunakan guru di sekolah. Orang tua secara pribadi terlibat, dan akan merasakan keberadaannya menjadi lebih penting dalam membantu anak untuk belajar. Selain itu orang tua akan merasa dihargai, merasa dirinya sebagai mitra sejajar dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas kepada anaknya. Yang pada akhirnya orang tua mengetahui bahwa anaknya dan semua anak yang di sekolah, menerima pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kemampuan masing-masing individu anak.

Dalam kehidupan bermasyarakat, pelaksanaan pendidikan inklusif akan berdampak pada keterlibatan masyarakat dalam memberikan kesempatan lebih banyak anak mengikuti pendidikan di sekolah yang ada di lingkungannya. Dengan demikian semua anak yang ada di masyarakat akan



terangkat dan menjadi sumber daya yang potensial, yang akan lebih penting adalah bahwa masyarakat akan lebih terlibat di sekolah dalam rangka menciptakan hubungan yang lebih baik antara sekolah dan masyarakat.

Selanjutnya tujuan pendidikan inklusif menurut Raschake dan Bronson (Lay Kekeh Marthan, 2007: 189-190), adalah sebagai berikut:

- a. Bagi anak berkebutuhan khusus, akan merasa menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya serta akan memperoleh bermacam-macam sumber untuk belajar dan bertumbuh. Hal ini akan meningkatkan harga diri anak, anak memperoleh kesempatan untuk belajar dan menjalin persahabatan bersama teman yang sebaya.
- b. Bagi pihak sekolah, akan memperoleh pengalaman untuk mengelola berbagai perbedaan dalam satu kelas serta mengembangkan apresiasi bahwa setiap orang memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda satu dengan lainnya. Seiring dengan itu meningkatkan kepekaan terhadap keterbatasan orang lain dan rasa empati pada keterbatasan anak serta meningkatkan kemampuan untuk menolong dan mengajar semua anak dalam kelas.
- c. Bagi guru, akan membantu untuk menghargai perbedaan pada setiap anak dan mengakui bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki kemampuan. Hal ini akan menciptakan kepedulian bagi setiap guru terhadap pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus serta guru akan tertantang untuk menciptakan metode-metode baru dalam pembelajaran dan mengembangkan kerjasama dalam memecahkan masalah. meredakan kejenuhan guru dalam mengajar.
- d. Bagi masyarakat, akan meningkatkan kesetaraan sosial dan kedamaian dalam masyarakat serta mengajarkan kerjasama dalam masyarakat dan mengajarkan setiap anggota masyarakat tentang proses demokrasi. Hal ini akan membangun rasa saling mendukung dan saling membutuhkan antar anggota masyarakat.

3. Definisi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjabarkan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Dan Klasifikasinya. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 2, 3, dan 4 mendefinisikan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagai :

- a. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/ atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- b. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- c. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. sehingga mereka semua berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Lebih lanjut ditegaskan pada Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan setiap warga negara mempunyai



hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sedangkan Pasal 5 ayat 5 menyatakan, Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

UU Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi, (a) disabilitas fisik, (b) disabilitas intelektual, (c) disabilitas mental, dan/atau (d) disabilitas sensorik. Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus selanjutnya diperinci dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan pada Pasal 129 Ayat 3 yang menyebutkan 12 (dua belas) jenis kelainan peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang a. tunanetra; b. tunarungu; c. tunawicara; d. tunagrahita; e. tunadaksa; f. tunalaras; g. berkesulitan belajar; h. lamban belajar; i. autisme; j. memiliki gangguan motorik; k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan l. memiliki kelainan lain.

4. Tanggung Jawab Pendidikan Inklusif

Pelaksanaan pendidikan inklusif membutuhkan peran dan tanggung jawab berbagai stakeholder yang terlibat baik secara langsung maupun tidak. Stakeholder yang dimaksud tersebut antara lain pemerintah, masyarakat, guru, dan orang tua. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif sangat tergantung dari kesungguhan seluruh komponen untuk melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan pendidikan inklusif, termasuk juga dukungan dari masyarakat dan pemerintah.

a. Peran Sekolah

Peran terpenting dalam keberhasilan penyelenggaraan sekolah yang inklusif ada pada kepala sekolah. Partisipasi aktif kepala sekolah dibutuhkan dalam menerapkan perubahan, meningkatkan layanan, atau menetapkan kebijakan pelaksanaan akomodasi yang layak (fleksibilitas kurikulum maupun sarana/ prasarana). Kepala sekolah berperan penting dalam memfasilitasi perubahan sistemik dan memimpin sekolah untuk mengadopsi sikap dan praktik baru.

Komunitas sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah lingkungan pendidikan di mana peserta didik berkebutuhan khusus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan menerima dukungan pada semua aspek kehidupan sekolah bersama teman sebayanya yang bukan penyandang disabilitas. Dalam sistem inklusif, guru pendidikan luar biasa, guru pendidikan umum, dan tenaga kependidikan lainnya bekerja sama dan berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, mendukung pembelajaran maupun partisipasi semua peserta didik.

Hasil penelitian Salim A (2010), menunjukkan bahwa pemahaman guru dan kepala sekolah terhadap panduan modifikasi kurikulum menunjukkan sangat baik 46,93%, baik 32,65%, kurang baik 16,32%, dan tidak baik 4%. Ketersediaan buku panduan bagi guru dan kepala sekolah menunjukkan bahwa menyatakan buku panduan telah menggunakan bahasa yang baik, gaya penulisan yang singkat, padat dan baik (88,2%).

b. Peran Keluarga

Peran keluarga, dalam hal ini orang tua merupakan kunci keberhasilan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hal terpenting yang dapat dilakukan orang tua adalah memastikan mereka terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai anggota tim Program Pendidikan Individual (PPI). Tim PPI bertugas membuat keputusan pendidikan bagi siswa, dan menangani masalah seperti kelayakan, evaluasi, pengembangan program, dan penempatan anak dalam pendidikan inklusif.

Orang tua harus berusaha untuk menghadiri pertemuan untuk memastikan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan masukan tentang semua aspek program anak-anak mereka. Penting juga bagi orang tua untuk memahami kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah sehingga mereka yakin bahwa sekolah mengikuti kebijakan tersebut.

c. Peran Masyarakat

Peran masyarakat sangat penting mengingat keberhasilan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ditentukan juga oleh keterlibatan dan tingkat partisipasi dari mereka. Jalinan kerja sama antara sekolah penyelenggara dengan pihak lain yang terkait harus dikembangkan. Hal ini sangat penting untuk saling berbagi pengalaman, mengembangkan keterampilan, saling memberikan informasi yang berguna bagi keberhasilan siswa berkebutuhan khusus.

Anggun Dyah Anjarsari dkk (2015) dalam penelitian mengenai Pendidikan Inklusif di Sidoarjo di tingkat SD, SMP dan SMA, menemukan bahwa sebanyak 86,65% faktor pendukung pendidikan inklusif di SD adalah dukungan dari Masyarakat. Banyak masyarakat yang sudah dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Sementara itu, sebanyak 80% tenaga pendidik dan sikap positif warga sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, staf dan orang tua sudah menunjukkan memiliki keyakinan dan komitmen yang tinggi untuk mendukung keberhasilan Pendidikan Inklusif.

d. Peran Pemerintah

Ada tiga pilar yang merupakan fondasi utama dari pendidikan, yaitu: pemerintah, sekolah dan masyarakat (termasuk di dalamnya Keluarga). Odom dan McEvoy (1988) mengatakan bahwa ada tiga landasan utama pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu: moral/etik, pendidikan, dan kebijakan pemerintah. Terkait peran dan tanggungjawab masing-masing pemerintah, berikut adalah peran dan tanggungjawab pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Amka (2019), dalam penelitiannya mengenai pendidikan inklusif di sekolah-sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah telah menghasilkan pengembangan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah di Kalimantan Selatan. Sebagian besar kepala sekolah (63,6%) mendukung penerapan kelas inklusif dengan melakukan berbagai upaya pengembangan, sebagian besar guru (90%) bersedia bekerja dengan siswa berkebutuhan khusus, dan orang tua siswa reguler menerima konsep inklusif. Sebagian besar orang tua siswa reguler (81,1%) menyatakan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, dan 68,6% berpikir bahwa ruang kelas inklusif



memberikan lingkungan yang baik bagi siswa untuk memahami diri mereka sendiri dan perbedaan individu. Dalam praktiknya, pelaksanaan pendidikan inklusif bervariasi dari satu sekolah ke sekolah lain tergantung pada persepsi kepala sekolah dan kemauan guru dalam menerapkan pendidikan inklusif. Penelitian menggunakan data primer diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 100 kepala sekolah, 500 guru, dan 45 orang tua siswa berkebutuhan khusus serta wawancara dengan sejumlah pemangku kepentingan.

Dalam konsep pendidikan inklusif, diperlukan kerja sama antar pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat yang dimulai dengan komunikasi. Komunikasi interaktif memerlukan inisiatif dari kedua belah pihak. Komunikasi interaktif menempatkan semua pihak sama pentingnya. Pemerintah, sekolah, masyarakat dan orang tua dapat memulai dan diharapkan mampu menyampaikan pesan yang berhubungan dengan kebutuhan belajar anak. Komunikasi yang interaktif perlu dilanjutkan dengan tindakan partisipatif, berupa hubungan kerja sama dengan masyarakat dalam mengembangkan sekolah.

5. Prinsip Pendidikan Inklusif

Setiap anak berbeda dan perbedaan tersebut menjadi kekuatan untuk mengembangkan potensinya. Kunci utama yang prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah bahwa semua anak tanpa terkecuali dapat belajar. Belajar merupakan kerja sama antara guru, orang tua, dan masyarakat. Untuk itu, dalam melaksanakan pendidikan

inklusif diperlukan perubahan pola pikir, penataan secara teknis, kebijakan, budaya, pengelolaan kelas, dan dilakukannya prinsip adaptasi.

Prinsip adaptasi dalam pendidikan inklusif membuat sekolah harus memperhatikan 3 (tiga) dimensi, yang meliputi: kurikuler, instruksional, dan lingkungan belajar (ekologis). Adaptasi kurikuler terkait dengan penyesuaian isi, materi, atau kompetensi yang dipelajari peserta didik. Adaptasi instruksional mengacu pada cara, metode, dan strategi yang dapat digunakan peserta didik untuk menguasai materi atau kompetensi yang ditargetkan. Adaptasi lingkungan belajar berkaitan dengan setting pembelajaran (di mana, kapan, dan bersama siapa pembelajaran dilakukan), termasuk ketersediaan alat bantu dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Pada adaptasi kurikuler, guru dapat melakukan penambahan keterampilan agar dapat menguasai kompetensi yang diharapkan atau mengganti keterampilan dengan kompetensi lain yang setara. Adaptasi lain yang dapat dilakukan guru adalah dengan melakukan penyederhanaan kompetensi yang ditargetkan. Proses penyederhanaan tergantung pada kemampuan awal, kondisi, dan modalitas belajar peserta didik berdasarkan hasil asesmen.

Menurut Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif (2021), ada 5 prinsip dalam Pendidikan Inklusif.

- a. Prinsip Satu: Keragaman di kelas memperkaya dan memperkuat pendidikan. Setiap anak unik dan setiap kelompok peserta didik berbeda. Keragaman di sekolah merupakan hal yang alami.



Setiap peserta didik memiliki pengalaman, budaya, kepercayaan dan nilai yang berbeda. Keragaman merupakan tantangan, baik bagi guru, peserta didik, maupun orang tua mereka. Ini merupakan peluang untuk menciptakan hubungan yang lebih baik untuk mengembangkan kemampuan pribadi, sosial, dan akademis. Guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus memahami keragaman yang ada di kelas dapat dan memanfaatkan keberagaman pengetahuan dan pengalaman peserta didik sehingga mereka siap menghadapi tantangan.

- b. Prinsip Dua: Kurikulum berbasis kekuatan dan individualisasi. Pendekatan berbasis kekuatan adalah prinsip utama pendidikan inklusif karena setiap anak memiliki kekuatan dan bakat yang melekat. Kekuatan dan kebutuhan khusus peserta didik harus ditempatkan dalam perencanaan dan implementasi kurikulum, terutama dalam proses pembelajaran. Kurikulum berbasis kekuatan dan individualisasi akan meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan prestasi akademik peserta didik. Pendekatan kurikulum berbasis kekuatan menerima keragaman dan perbedaan, serta memfasilitasi peluang untuk pembelajaran secara individu.
- c. Prinsip Tiga: Keterlibatan peserta didik dan organisasi siswa. Peran peserta didik mempengaruhi keberhasilan pendidikan inklusif di sekolah. Oleh sebab itu, guru harus mencari perspektif peserta didik sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang berarti di kelas. Guru juga dapat memanfaatkan organisasi siswa yang ada di sekolah.
- d. Prinsip Empat: Terlibat dengan Keterlibatan semua pemangku kepentingan. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik dengan berbagai kemampuan untuk tumbuh dan belajar. Orang tua dan peserta didik mendapatkan akses informasi yang akurat terkait perkembangan pembelajaran melalui penilaian formatif dan sumatif setiap peserta didik yang berkelanjutan. Pendekatan menggunakan umpan balik positif digunakan sekolah pada laporan perkembangan peserta didik untuk menciptakan persepsi positif masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang budaya sekolah yang positif.
- e. Prinsip Lima: Guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif membutuhkan komitmen, pengetahuan dan keterampilan praktis. Proses pembelajaran yang baik dilakukan untuk semua peserta didik. Guru harus melaksanakan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan 3-H: heart (komitmen), head (pengetahuan kritis), dan hand (strategi praktis). Guru harus berkomitmen untuk mengajar semua peserta didik dan menggunakan strategi yang efektif untuk membuat ruang kelas lebih menarik. Guru juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan kritis untuk mengajar peserta didik yang berbeda dalam kemampuan dan gaya belajar mereka.

6. Kurikulum Pendidikan Inklusif

Karakteristik dalam pendidikan inklusif tergabung dalam beberapa hal seperti hubungan, kemampuan, pengaturan tempat duduk, materi belajar, sumber belajar dan evaluasi. Sebagai contoh hubungan yang ramah dan hangat bagi anak tuna rungu dengan guru selalu berada di



dekatnya dengan wajah terarah pada anak dan tersenyum. Pendamping kelas dapat dilakukan dengan memuji anak tuna rungu. Guru memberikan bimbingan kepada peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbedaserta orang tua sebagai pendamping. Pengaturan tempat duduk yang bervariasi seperti, duduk berkelompok di lantai membentuk lingkaran atau duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka dapat melihat satu sama lain.

Berbagai bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran, contoh pembelajarn matematika disampaikan melalui kegiatan yang lebih menarik, menantang dan menyenangkan melalui bermain peran menggunakan poster dan wayang untuk pelajaran bahasa. Guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak, contoh meminta anak membawa media belajar yang murah dan mudah didapat ke dalam kelas untuk dimanfaatkan dalam pelajaran tertentu. Penilaian, observasi, portofolio yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu dikumpulkan dan dinilai (Lay Kekeh Marthan, 2007:152).

Dalam pendidikan inklusif terdapat siswa normal dan berkebutuhan khusus, dalam rangka untuk menciptakan manusia yang berkembang seutuhnya, maka diperlukan adanya pembinaan peserta didik. Melalui pembinaan ini, maka diharapkan peserta didik mampu berkembang dan memiliki keterampilan secara optimal.

Kurikulum hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan anak, yang selama ini anak dipaksakan mengikuti kurikulum. Oleh sebab itu hendaknya memberikan kesempatan untuk menyesuaikan kurikulum dengan anak. Menurut Tarmansyah (2007:154) untukmodifikasi kurikulum merupakan model kurikulum dalam sekolah inklusi. Modifikasi pertama adalah mengenai pemahaman bahwa teori model itu selalu merupakanrepresentasi yang disederhanakan dari realitas yang kompleks. Modifikasi kedua adalah mengenai aspek kurikulum yang secara khusus difokuskan dalam pembelajaran yang akandibahas lebih banyak dalam praktek pembelajaran.

Kurikulum yang digunakan di sekolah inklusif adalah kurikulum yang disesuaikan atau dimodifikasi sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa. Lebih lanjut, berdasarkan buku panduan Pendidikan Inklusif, modifikasi kurikulum dapat dilakukan dengan Modifikasi dapat dilakukan pada aspek tujuan, isi, proses, dan evaluasi denganmodel sebagai berikut.

- a. Eskalasi yaitu program percepatan dan perluasan dalam hal waktu danpenguasaan materi.
- b. Duplikasi yaitu suatu penggandaan materi dalam kurikulum yang disusun sama dengan program regular.
- c. Simplikasi yaitu menyederhanakan dan menyesuaikan kurikulum umum dengan kebutuhan dan kemampuan siswa Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK).
- d. Substitusi yaitu mengganti beberapa bagian dari kurikulum umum dengansesuatu yang kurang lebih setara.
- e. Omisi yaitu meniadakan beberapa bagian dari kurikulum umum yang tidak memungkinkan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK).



Studi yang dilakukan oleh Yusuf dan Indianto (2010) tentang profil sekolah inklusif di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, menemukan bahwa dari 74 SD inklusif yang diteliti, dalam hal implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif, termasuk kategori baik (24,18%), dan sisanya (74,82%) masuk kategori sedang dan kurang baik. Penelitian serupa dilakukan oleh Sunardi, dkk (2010) telah mengkaji 184 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di beberapa provinsi di Indonesia. Berdasarkan kajian tersebut, tingkat kinerja sekolah inklusif sebagai berikut: 1) skor aspek manajemen dan kelembagaan 61%; 2) skor aspek kesiswaan 38%; 3) skor aspek identifikasi dan asesmen 46,6%; 4) skor aspek kurikulum 34,6%; 5) aspek pembelajaran 63,6%; 6) aspek penilaian 69,4%; dan 7) aspek dukungan 67,9%. Temuan ini menunjukkan bahwa di lapangan masih banyak permasalahan dalam implementasi pendidikan inklusif.

M. Yusuf (2012) dalam penelitian survei ke SD penyelenggara pendidikan inklusif di 4 (empat) wilayah kabupaten/kota, yaitu Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kinerja kepala sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif berada dalam kategori sedang; 2) kinerja guru kelas dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif berada dalam kategori sedang; dan 3) skor kinerja kepala sekolah rata-rata (65,45%), lebih tinggi dibanding skor rata-rata yang dicapai guru (62,3%). Jumlah sampel dalam penelitian ini 51 SD Inklusi, 51 kepala sekolah, dan 103 guru kelas.

7. Model Pendidikan Inklusif

Menurut Irdamurni (2019:9), Pendidikan inklusif hanya merupakan salah satu model penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. Model yang lain, diantaranya sekolah segregasi dan pendidikan terpadu. Perbedaan ketiga model tersebut dapat diringkas sebagai berikut :

- a. Pendidikan Segregasi, yaitu menyelenggarakan satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa sesuai jenis kelainan siswa, seperti SLB/A tunanetra, SLB/B tunarungu, SLB/C tunagrahita, SLB/D tunadaksa, dan SLB/E tunalaras.
- b. Pendidikan Terpadu, yaitu mengikuti pendidikan regular tanpa perlakuan khusus.
- c. Pendidikan Inklusif, yaitu menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individual peserta didik.

Melihat kondisi dan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia, model pendidikan inklusif yang sesuai adalah model yang mengasumsikan bahwa inklusif sama dengan mainstreaming, Menurut Vaughn, Bos & Schumn (2000:54) dan Lerner (1988), Model Pendidikan Inklusif di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Kelas Regular (inklusif penuh), yang memberikan kesempatan ABK belajar bersama anak lain dengan menggunakan kurikulum normal.
- b. Kelas Regular dengan cluster (kelompok khusus), yang memberikan kesempatan ABK



belajar bersama anak lain dengan kelompok khusus.

- c. Kelas Regular dengan pull out (pembimbing khusus), yang memberikan kesempatan ABK belajar bersama anak lain dengan guru pembimbing khusus pada waktu tertentu.
- d. Kelas Regular dengan cluster dan pull out, yang memberikan kesempatan ABK belajar bersama anak lain dengan kelompok khusus dan guru pembimbing khusus pada waktu tertentu.
- e. Kelas khusus dengan pengintegrasian, yang menempatkan ABK dalam kelompok khusus, namun dalam kegiatan tertentu mengikuti kelas regular bersama anak lain.
- f. Kelas khusus penuh, yang menempatkan ABK dalam kelompok khusus.

Pemilihan Model Pendidikan Inklusif yang dapat menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individual peserta didik adalah sebagai berikut :

- a. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang akan dilayani.
- b. Jenis kelainan masing-masing anak.
- c. Gradasi (tingkat) kelainan anak.
- d. Ketersediaan dan kesiapan tenaga kependidikan.
- e. Sarana-prasarana yang tersedia.

Sekolah inklusif perlu melakukan usaha-usaha yang berhubungan dengan kerjasama antara orang tua dan guru atau sekolah yaitu dengan menciptakan iklim sekolah yang nyaman, melakukan komunikasi awal dengan orang tua, dan menyediakan kesempatan bagi orang tua untuk terlibat di dalam banyak kegiatan di sekolah. Kemudian, bentuk kerja sama guru/sekolah dengan orang tua siswa diantaranya adalah: parenting, komunikasi, volunteer, dan keterlibatan orang tua pada pembelajaran anak di rumah. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan Pendidikan Inklusif adalah sebagai berikut :

- a. Keterlibatan semua staf sekolah dalam pengembangan rasional penyelenggaraan pendidikan Inklusif dan manfaatnya bagi siswa terkomunikasikan.
- b. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif diawali dari lingkup yang kecil dan terus ditingkatkan.
- c. Kecepatan implementasi Pendidikan Inklusif bervariasi.
- d. Penyediaan Sumber daya yang memadai.

Pelaksanaan pendidikan inklusif memberikan dampak positif untuk semua peserta didik termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Dengan pendidikan inklusi, peserta didik difabel diuntungkan dengan lingkungan belajar yang luas, mempunyai kesempatan berinteraksi sosial dengan siswa yang normal, dan siswa yang normal mampu belajar bahwa tidak semua orang memiliki kemauan yang sama. Keberhasilan proses pembelajaran pada Pendidikan Inklusif dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu menerapkan strategi tertentu yang memungkinkan



proses belajar dan mengajar berjalan dengan baik. Strategi yang dapat diterapkan pada pelaksanaan Pendidikan Inklusif adalah sebagai berikut :

- a. Menerima dan menghormati keanekaragaman latar belakang kondisi dan potensi setiap individu peserta didik.
- b. Membentuk kemandirian peserta.
- c. Memberikan aksesibilitas fisik, psikologis dan sosial kepada setiap peserta didik.
- d. Memberikan peran penuh kepada peserta didik sesuai dengan potensi dan kondisinya.
- e. Menumbuhkan perilaku Gotong royong dan menjauhi praktek tindakan kompetitif.
- f. Lebih menerapkan pembelajaran kontekstual yang berorientasi pada tantangan dalam dan peradaban.
- g. Bekerja sama dengan berbagai pihak sebagai pendukung untuk mencapai tujuan pendidikan.

Strategi pembelajaran yang efektif dan dapat diterapkan pada pelaksanaan Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah sebagai berikut :

- a. Menggunakan metode interaktif.
- b. Melakukan observasi komunikasi.
- c. Lingkungan belajar yang aman.
- d. Metode belajar yang fleksibel.
- e. Konsisten dalam menerapkan aturan.
- f. Guru menjadi pengajar yang positif.
- g. Menggunakan isyarat visual, auditori atau sentuhan.

B. Pendidikan Multikultural

Pendidikan Multikultural adalah pendidikan yang menanamkan pentingnya menghargai heterogenitas, baik suku, budaya, etnis, dan sebagainya. Pendidikan ini termasuk pendidikan yang penting untuk diterapkan sejak dini pada anak-anak agar mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang toleransi terhadap keberagaman. Pendidikan Multikultural bisa diberikan secara langsung oleh sekolah melalui guru maupun diterapkan oleh orang tua di rumah.

Menurut Paul C. Gorski (2010), Pendidikan Multikultural adalah pendekatan progresif untuk mentransformasi pendidikan yang secara holistik mengkritik dan merespons kebijakan dan praktik diskriminatif dalam pendidikan. Hal ini didasarkan pada cita-cita keadilan sosial, pemerataan pendidikan, pedagogi kritis, dan dedikasi untuk memberikan pengalaman pendidikan di mana semua siswa mencapai potensi penuh mereka sebagai pembelajar dan sebagai makhluk yang sadar dan aktif secara sosial, secara lokal, nasional, dan global. Pendidikan Multikultural mengakui bahwa sekolah sangat penting untuk meletakkan dasar bagi transformasi masyarakat dan penghapusan ketidakadilan.

Secara umum pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar



dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU No 20 tahun 2003, Pasal 1 ayat 1). Oleh sebab itu inti dari Pendidikan Multikultural adalah hak azasi manusia atas pendidikan. Suatu konsekuensi logis dari hak ini adalah semua anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang tidak mendiskriminasikan dengan kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan dan lain-lain.

1. Tujuan Pendidikan Multikultural

Setiap pendidikan tentu memiliki tujuan mulia yang diharapkan bisa memperbaiki kualitas hidup manusia, begitu juga dengan Pendidikan Multikultural. Adapun tujuan pendidikan ini adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan fungsi sekolah dalam menghadapi keberagaman peserta didiknya.
- b. Melatih peserta didik dalam bersikap positif terhadap keberagaman suku, etnis, budaya, dan kelompok yang berbeda dengan dirinya.
- c. Mengasah keterampilan sosial peserta didik dalam berinteraksi di lingkungan yang heterogen.
- d. Mengajarkan peserta didik akan pentingnya keberagaman dan cara menghargai perbedaan.
- e. Melatih peserta didik untuk menerapkan hidup damai dalam keberagaman.

Pendidikan Multikultural yang menanamkan pentingnya menghargai heterogenitas, maka berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai langkah penguatan karakter pada peserta didik.
- b. Sebagai upaya untuk mengajarkan pada peserta didik bahwa konflik itu selalu ada, sehingga mereka bisa mengedepankan perilaku positif di tengah keberagaman.
- c. Sebagai upaya pembinaan akan pentingnya menjaga keutuhan bangsa yang di dalamnya memuat keberagaman.

Melalui Pendidikan Multikultural bisa tumbuh menjadi generasi yang toleransi terhadap keberagaman. Untuk itu manfaatnya adalah sebagai berikut:

- a. Peserta didik bisa bebas mengekspresikan kreativitasnya tanpa khawatir mendapatkan perlakuan diskriminasi.
- b. Peserta didik terlatih untuk menyikapi berbagai keragaman di lingkungan sekitar.
- c. Peserta didik termotivasi untuk menjadi agen perubahan sosial yang nantinya bisa menghapuskan tindakan rasial maupun etnosentrisme.

Menurut pendiri Pusat Pendidikan Multikultural Universitas Washington, James Banks (2010),



konsep dasar Pendidikan Multikultural adalah setiap peserta didik harus diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan kondisi, baik suku, budaya, jenis kelamin, dan lainnya. Mereka berhak mendapatkan persamaan di semua aspek pendidikan. Misalnya, seorang guru harus memberikan perhatian, bimbingan, arahan yang sama pada semua peserta didiknya di kelas. Penerapan konsep tersebut di sekolah diharapkan mampu mencegah tindakan diskriminasi di masa mendatang. Semakin banyak generasi yang sadar akan pentingnya menjaga perdamaian, semakin kecil kemungkinan terjadi tindakan diskriminasi, baik rasial maupun etnosentrisme.

2. Dimensi Pendidikan Multikultural

Menurut James Banks (2010), ada lima dimensi pada Pendidikan Multikultural. Dimensi tersebut bisa membantu guru dalam menyikapi perbedaan peserta didiknya karena saling berkaitan. Adapun dimensi yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Dimensi integrasi yang memuat kecakapan guru dalam mengintegrasikan beberapa materi yang berbeda agar bisa mencapai satu kata kunci yang sama. Hasil integrasi tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam kurikulum dengan penambahan materi Multibudaya.
- b. Dimensi konstruksi yang lebih mengarah kepada peserta didik. Pemahaman peserta didik dipengaruhi oleh pengetahuan yang diterimanya.
- c. Dimensi pengurangan prasangka yang merupakan dimensi yang melibatkan peran guru dalam menghilangkan berbagai prasangka akan suatu ras, agama, maupun etnis. Hal ini berarti guru harus bisa membentuk perilaku positif peserta didiknya saat menghadapi heterogenitas di sekolah. Misalnya, seorang peserta didik rasis pada temannya yang berbeda suku. Dalam hal ini, guru harus bisa mengalihkan pandangan tersebut dengan cara membaurkan mereka disertai pembahasan tentang indahnya keberagaman dan perbedaan kelompok.
- d. Dimensi pendidikan yang sama diwujudkan dengan seringnya guru mengembangkan kerja sama antarpeserta didiknya. Dimensi ini sulit untuk dicapai jika guru masih membiasakan perilaku kompetitif.
- e. Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi mudah untuk dilakukan jika guru dan peserta didik selalu terlibat secara aktif. Guru harus bisa memberdayakan kembali di kelas setiap budaya peserta didik yang berbeda kelompok. Selanjutnya, budaya-budaya tersebut disusun menjadi struktur sosial yang identik dengan karakteristik sekolah tersebut.



3. Prinsip Pendidikan Multikultural

Pendidikan Multikultural Amerika Serikat bermula dari gerakan Multibudayaisme yang dimulai tahun 1950-an dalam bentuk gerakan civil rights. Persoalannya adalah persamaan kaum kulit hitam dan kaum kulit putih. Jadi, tuntutan rasial (diskriminasi) menjadi faktor pemicu Pendidikan Multikultural. Sementara itu, Inggris mengembangkan Pendidikan Multikultural karena migrasi penduduk Karibia dan Asia, serta Negara-Negara Persemakmuran. Tuntutannya adalah kesetaraan hak sosial, kesetaraan perlakuan di ruang publik dan pendidikan. Selanjutnya, Pendidikan Multikultural di Australia berlatar belakang diskriminasi suku Aborigin. Lain halnya latar belakang Pendidikan Multikultural di Kanada. Pendidikan Multikultural hadir bersamaan dengan perkembangan sosial dimana memang sejak awal terdiri dari budaya yang berasal dari imigran. Dari beberapa negara tersebut, terlihat bahwa Pendidikan Multikultural bisa mempunyai polanya sendiri-sendiri sesuai dengan kesadaran dan proses pengolahannya (Isnarmi Moeis, 2014: 8-10).

Ada tiga prinsip yang digunakan dalam menyusun program Pendidikan Multikultural, yaitu :

- a. Pendidikan Multikultural didasarkan kepada pedagogik baru yaitu pedagogik yang berdasarkan kesetaraan manusia (equity pedagogy). Pedagogik kesetaraan bukan hanya mengakui hak asasi manusia tetapi juga hak kelompok manusia, kelompok suku bangsa, kelompok bangsa untuk hidup berdasarkan kebudayaannya sendiri. Ada kesetaraan individu, antarindividu, antarbudaya, antarbangsa, antaragama. Pedagogik kesetaraan berpangkal kepada pandangan mengenai kesetaraan martabat manusia (dignity of human).
- b. Pendidikan Multikultural ditujukan pada terwujudnya manusia yang berbudaya. Hanya manusia yang melek budaya yang dapat membangun kehidupan bangsa yang berbudaya. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang membuka diri dari pemikirannya yang terbatas. Manusia yang berbudaya hanya dibentuk di dalam dunia yang terbuka. Manusia berbudaya juga manusia yang bermoral dan beriman yang dapat hidup bersama yang penuh toleransi yang bukan sekedar demokrasi prosedural tapi demokrasi substantif.
- c. Prinsip globalisasi budaya. Globalisasi kebudayaan ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, produk multinasional, perluasan budaya populer. Budaya handphone, internet dan e-commerce sudah menggejala secara global

4. Pengembangan Pendidikan Multikultural

Agar mudah diimplementasikan di kehidupan belajar peserta didik, pendidikan ini harus berpedoman pada prinsip berikut : (a) Memiliki desain kurikulum beragam di mana kurikulum tersebut mampu mewakili pandangan banyak orang. (b) Tidak adanya penafsiran tunggal pada suatu kebenaran dalam sejarah. (c) Pencapaian kurikulum harus mengacu pada analisis komparatif dari



berbagai sudut pandang berbeda. (d) Menjunjung tinggi pemberantasan pandangan tentang ras, suku, budaya, dan agama.

Indonesia merupakan bangsa dengan aneka suku, agama, golongan, ras, kelas sosial, dan sebagainya. Singkatnya, Multikultural sebagaimana Amerika, Australia, Inggris, dan negara maju lainnya. Walaupun tersusun atas berbagai keragaman, masing-masing bangsa mempunyai latar belakang (alasan historis) dalam mengembangkan Pendidikan Multikultural (Isnarmi Moeis, 2014:7).

Dalam konteks Indonesia, Pendidikan Multikultural merupakan keharusan, bukan pilihan lagi. Di dalamnya, pengelolaan keanekaragaman dan segala potensi positif dan negatif dilakukan sehingga keberbedaan bukanlah ancaman atau masalah, melainkan menjadi sumber atau daya dorong positif bagi perkembangan dan kebaikan bersama sebagai bangsa (Scholaria, Vol. 2, No. 1, Januari 2012: 116).

Upaya pengembangan kurikulum berbasis lokal, yang memasukkan muatan-muatan lokal, menjadi contoh upaya pengembangan Pendidikan Multikultural. Hanya saja, Pendidikan Multikultural tersebut hanya mempersiapkan anak didik dengan kesadaran budaya etnik mereka sendiri. Padahal tujuan pendidikan multikultur adalah untuk mempersiapkan anak didik dengan sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan budaya etnik mereka, budaya nasional, dan antar budaya etnik lainnya. Pendidikan sebagai pengembangan kesadaran budaya seperti ini masih berada dalam taraf soft Multibudayaisme atau kesadaran Multikultural yang hanya di permukaan saja. (Isnarmi Moeis 2014: 10-11).

Kenyataan bahwa Indonesia mempunyai keanekaragaman, tidak bisa dipungkiri. Harapan bahwa keanekaragaman menjadi kekayaan yang memajukan dan mengembangkan bangsa, juga selalu diimpikan. Tetapi, jurang antara kenyataan dan harapan memang mimpi yang belum tahu kapan akan terwujud. Situasi tersebut bisa dilihat dalam dua sisi. Dari sisi negatif, Pendidikan Multikultural penting tetapi terabaikan. Sedangkan sisi positif, masih terbentang luas pembentukan suatu model Pendidikan Multikultural Indonesia yang mampu mengolah kenyataan bangsa yang Multikultural ini sedemikian rupa, sehingga bukan hanya potensi kekayaan melainkan menjadi kekayaan yang dirasakan seluruh anggota masyarakat.

Sebagai gagasan, ada dua hal yang patut dicermati. Pertama, nilai inti Pendidikan Multikultural. Pendidikan Multikultural mengusung minimal tiga nilai penting, yaitu: a) apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya, b) pengakuan terhadap harkat dan hak asasi manusia, c) pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia, dan pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi. Kedua, tujuan Pendidikan Multikultural.

Dalam prosesnya, Pendidikan Multikultural bisa menysar beberapa capaian penting, yaitu: a) mengembangkan kesadaran diri dari kelompok-kelompok masyarakat; b) menumbuhkan kesadaran budaya masyarakat; c) memperkuat kompetensi interkultural budaya-budaya dalam masyarakat; d) menghilangkan rasisme dan berbagai prasangka buruk; e)

mengembangkan rasa memiliki terhadap bumi; f) mengembangkan kesediaan dan kemampuan dalam pengembangan sosial (Scholaria, Vol. 2, No. 1, Januari 2012: 125-126).

Dalam proses pengembangan pluralitas bangsa, Pendidikan Multikultural di Indonesia dapat memperhatikan beberapa hal, yaitu: a) Pendidikan Multikultural menghadirkan atau menyediakan tempat yang luas bagi pengolahan keberbedaan atau keragaman bangsa; b) Pendidikan Multikultural mendasarkan diri pada Pancasila sebagai pilihan terbaik dalam kemajemukan bangsa Indonesia; c) Pendidikan Multikultural mendasarkan diri pada sosio-politik, ekonomi, dan budaya Indonesia; d) Pendidikan Multikultural membutuhkan metode pembelajaran secara tepat sehingga internalisasi nilai dapat terwujud dengan baik (Scholaria, Vol. 2, No. 1, Januari 2012: 143-147).

Pemaknaan Pendidikan Multikultural yang dianut oleh suatu sekolah dapat berimplikasi terhadap pengembangan Pendidikan Multikultural. Berikut ini akan diuraikan makna Pendidikan Multikultural yang dapat berimplikasi terhadap pengembangan Pendidikan Multikultural.

1. Pendidikan Multikultural Sebagai Ide

Pendidikan Multikultural sebagai ide adalah suatu filsafat yang menekankan legitimasi, vitalitas dan pentingnya keragaman kelas sosial, etnis dan ras, gender, anak yang berkebutuhan khusus, agama, bahasa, dan usia dalam membentuk kehidupan individu, kelompok, dan bangsa. Sebagai sebuah ide, maka Pendidikan Multikultural ini harus mengenalkan pengetahuan tentang berbagai kelompok dan organisasi yang menentang penindasan dan eksploitasi dengan mempelajari hasil karya dan ide yang mendasari karyanya (Sizemore, 1981). Dengan mempelajari buku Habis Gelap terbitlah Terang (hasil karya) yang berasal dari surat-surat Kartini pada temannya Abendanon, kita mengetahui ide emansipasi wanita yang berasal dari generasi abad 18. Dengan membaca karya Wulangreh kita dapat mengetahui pemikiran pihak keraton dalam memahami dan menafsirkan serta dalam menjalankan ajaran agama Islam di kalangan keraton. Dengan mengkaji Serat Wirid Hidayat Jati kita mengetahui pemahaman para wali tentang ajaran esoterisme Islam beberapa abad lalu. Dengan memahami keris, kita mengetahui pola budaya dan keyakinan suku Jawa tentang kelengkapan hidup seorang lelaki Jawa yang utuh. Dalam budaya Jawa tradisional, keris tidak semata-mata dianggap sebagai senjata tikam yang memiliki keindahan dan keunikan bentuk, akan tetapi juga sebagai kelengkapan budaya spiritual.

2. Pendidikan Multikultural Sebagai Gerakan Reformasi Pendidikan.

Nilai-nilai yang mendasari, aturan prosedural, kurikulum, bahan ajar, struktur organisasi, dan pola kebijakani pendidikan tersebut perlu dirombak agar mencerminkan budaya Indonesia yang pluralistik. Hal ini tentunya merupakan pekerjaan yang besar dan membutuhkan pemikiran yang mendalam pula. Kurikulum kita masih belum mencerminkan semangat ini dan masih membutuhkan perencanaan yang matang dan waktu yang panjang. Beberapa konsep tentang muatan lokal nampaknya masih belum memenuhi harapan dari konsep ini.

Pendidikan Multikultural juga dipandang sebagai suatu pendekatan belajar dan mengajar



yang didasarkan pada nilai-nilai demokratis yang mengedepankan pluralisme budaya; dalam bentuknya yang paling komprehensif. Nilai-nilai demokratis sejajar dengan nilai pluralisme budaya karena atas dasar kesetaraan itu nilai-nilai budaya yang pluralistik itu bisa tumbuh berkembang secara wajar dan tanpa diskriminasi.

Bennett (1990) menyatakan bahwa Pendidikan Multikultural berkaitan dengan komitmen untuk menggapai kualitas pendidikan, mengembangkan kurikulum yang membangun pemahaman tentang kelompok etnis dan memerangi praktek penindasan. Perlu ada komitmen bersama di antara pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada seluruh warga yang berasal dari berbagai unsur pluralitas. Agar kualitas pendidikan itu bisa ditingkatkan perlu dikembangkan kurikulum (baru) yang membangun pemahaman tentang kelompok etnis dan memerangi segala praktek penindasan.

3. Pendidikan Multikultural Sebagai Proses

Pendidikan Multikultural bermaksud untuk mengubah struktur lembaga pendidikan sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan akademis. Pendidikan Multikultural merupakan suatu proses yang terus menerus yang membutuhkan investasi waktu jangka panjang di samping aksi yang terencana dan dimonitor secara hati-hati (Banks & Banks, 1993). Selain di lembaga pendidikan, siswa dapat pula mengalami proses pembelajaran yang diperoleh lewat perilaku yang terencana dan sistematis. Siswa dapat memperoleh pembelajaran lewat penyadaran dan penghormatan terhadap orang cacat dengan memberi jalur khusus.

Pendidikan Multikultural berhubungan dengan konsep humanistik yang didasarkan pada kekuatan dari keragaman, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan gaya hidup alternatif bagi semua orang, yang diperlukan untuk pendidikan yang berkualitas dan meliputi semua upaya untuk memenuhi seluruh budaya bagi siswa yang memandang masyarakat Multikultural pluralistik sebagai kekuatan positif dan menjadikan perbedaan sebagai wahana untuk lebih memahami masyarakat global (Grant, 1977).

Pendidikan Multikultural berhubungan dengan konsep humanistik. Konsep yang didasarkan pada kekuatan dari keragaman, HAM, keadilan sosial dan gaya hidup. Pendidikan Multikultural mengarah pada pencapaian pendidikan yang berkualitas. Melibatkan segala upaya untuk memenuhi seluruh budaya siswa. Memandang masyarakat pluralistik sebagai kekuatan positif. Perbedaan adalah wahana memahami masyarakat global.

Ada kaitan erat antara Pendidikan Multikultural dengan konsep humanisme. Keduanya memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki keunikan yang harus dihormati keberadaannya. Menghormati keragaman dan gaya hidup berarti juga menghormati hak asasi manusia yang dilandasi keadilan sosial. Semua hal di atas ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Pendidikan harus mencakup seluruh budaya siswa dan memandang bahwa masyarakat yang pluralistik itu sebagai kekuatan positif dan perlu disikapi secara positif



pula. Pemahaman perbedaan dan keragaman ini sangat diperlukan untuk lebih memahami fenomena keragaman masyarakat global. Apalagi dengan semakin pesatnya teknologi, komunikasi dan informasi saat ini, maka kejadian apa pun di seluruh pelosok dunia akan dapat diketahui oleh siapa pun, di manapun dan kapan pun juga. Inilah yang sering disebut sebagai “global village”.

Lebih lanjut Grant menekankan bahwa Pendidikan Multikultural terkait dengan kebijakan dan praktek yang menunjukkan penghormatan terhadap keragaman budaya melalui filsafat pendidikan, komposisi dan hierarki staff, materi pembelajaran dan prosedur evaluasi (Grant, 1977). Kebijakan pembatasan berupa persyaratan tertulis yang mencegah masuknya kelompok Multikultural dapat dipandang sebagai anti terhadap Pendidikan Multikultural. Misalnya hanya untuk laki-laki saja, perempuan saja, persyaratan tinggi tertentu, asal daerah tertentu dan sebagainya.

Nieto (1992) memandang Pendidikan Multikultural terkait dengan 1. reformasi sekolah dan pendidikan dasar yang komprehensif untuk semua siswa; 2. penentangan terhadap semua bentuk diskriminasi; 3. menyerapan pelajaran dan hubungan interpersonal di kelas, dan 4. penonjolan prinsip-prinsip demokratis dan keadilan sosial (Nieto, 1992).

Pendidikan Multikultural dilihat oleh Nieto sebagai reformasi sekolah dan reformasi pendidikan dasar yang komprehensif, bukan sekedar penambahan materi dan pemahaman sudut pandang dari budaya yang lain. Pendidikan Multikultural dapat berhasil bila terwujud dalam hubungan interpersonal yang menentang semua bentuk diskriminasi. Pendidikan Multikultural terwujud dalam bentuk penonjolan prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Ada suatu proses yang dijalani dalam hubungan interpersonal bukan sekedar segi kognitif semata.

Pendidikan Multikultural dapat dipandang sebagai suatu gerakan reformasi yang mengubah semua komponen kegiatan pendidikan. Komponen itu mencakup:

- a. Nilai-nilai yang mendasari, artinya nilai-nilai yang bersifat pluralisme harus mendasari seluruh komponen pendidikan. Keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat yang mendasarinya;
- b. Aturan prosedural, artinya aturan prosedural yang berlaku harus berpijak dan berpihak pada semua kelompok yang beragam itu.
- c. Kurikulum, artinya keragaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, bahan, proses, dan evaluasi. Artinya dibutuhkan penyusunan kurikulum baru yang di dalamnya mencerminkan nilai-nilai Multibudaya. Kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional.
- d. Bahan ajar, artinya materi Multikultural itu harus tercermin dalam materi pelajaran, pada semua bidang studi. Multikultural bukan hanya diajarkan satu bidang studi melainkan lebih merupakan materi pelajaran yang bisa disisipkan pada semua bidang studi.

- e. Struktur organisasi, artinya struktur organisasi sekolah itu perlu mencerminkan kondisi riil yang pluralistik. Budaya di lingkungan unit pendidikan yang pluralistik adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagiandari kegiatan belajar siswa
- f. Pola kebijakan artinya pola kebijakan yang diambil oleh pembuat keputusan itu merefleksikan pluralisme budaya.

5. Model Pendidikan Multikultural

Model pengembangan Pendidikan Multikultural di setiap negara dapat berbeda-bedasesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Pengembangan Pendidikan Multikultural di Indonesia dapat berbentuk, Pertama, berupa penambahanmateri Multikultural yang dalam aktualisasinya berupa pemberian materi tentang berbagaibudaya yang ada di tanah air dan budaya berbagai belahan dunia. Pesan Multikultural bisadititipkan pada semua bidang studi atau mata pelajaran yang memungkinkan untuk itu. Semua bidang studi bisa bermuatan Multibudaya. Namun disadari bahwa ada mata pelajaran yang lebih mungkin dibandingkan yang lain untuk mengajarkan Pendidikan Multikultural. Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial lebih mungkin mengajarkan Multikultural dibandingkan dengan matematika.

Kedua, berbentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Sekarang sudah ada perintisan yang dilakukan dalam bentuk satu mata pelajaran atau bidang studi yang berdiri sendiri. Hal ini dimaksudkan agar Pendidikan Multikultural sebagai ide, gerakan reformasi dan proses tidak dilakukan sambil lalu dan seingatnya, tetapi benar- benar direncanakan secara sistematis. Hal ini tidak akan dapat dicapai bila hanya dicantumkan sebagai satu pokok bahasan atau sub pokok bahasan dalam satu bidang studi.

Ketiga, berbentuk program dan praktek terencana dari lembaga pendidikan. Pendidikan Multikultural berkaitan dengan tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi dari kelompok yang berbeda. Konsekuensinya, Pendidikan Multikultural tidak dapat diidentifikasi sebagai praktek aktual satu bidang studi atau program pendidikan saja. Lebih dari itu, pendidik yang mempraktekkan makna Pendidikan Multikultural akan menggambarkan berbagai program dan praktek yang berkaitan dengan persamaan pendidikan, perempuan, kelompok etnis, minoritas bahasa, kelompok berpenghasilan rendah, dan orang-orang yang tidak mampu. Pada wilayah kerja sekolah, Pendidikan Multikultural dapat berarti suatu kurikulum yang berhubungan dengan pengalaman kelompok etnis, pengalaman Multibudaya, dan suatu reformasi total dengan upaya yang didesain untuk meningkatkan keadilan pendidikan bagi semua kelompok.

Keempat, Kelompok budaya, etnis, dan ekonomis. Ini lebih luas dan lebih komprehensif dan biasa disebut reformasi kurikulum. Sebagai proses Pendidikan Multikultural yang berasal keadilan sosial, persamaan, demokrasi, toleransi dan penghormatan hak asasi manusia tidak mudah tercapai. Perlu proses panjang dan berkelanjutan. Perlu ada pembudayaan di segenap sektor kehidupan.

Kelima, Gerakan persamaan ini lebih dilihat sebagai kegiatan nyata daripada sekedar



dibicarakan dalam forum-forum ilmiah. Gerakan persamaan dapat dilihat sebagai kegiatan nyata di beberapa daerah. Sebagai contoh di Kabupaten Nabire, Papua ada sebuah kampung yang mencerminkan gerakan kebhinekaan yang bernama Kampung Bhineka Tunggal Ika. Penduduk Kampung Bhineka Tunggal Ika ini terdiri dari orang Papua, Timor, Jawa dan Bugis. Mereka yang tinggal di sana mendapat tanah seluas 2 hektar tiap kepala keluarga untuk ditanami dengan tanaman coklat dan tanaman produktif lainnya. Mereka hanya boleh menggarap tanah itu dan tidak boleh menjualnya. Mereka harus menunjukkan kemampuan bertani yang baik lebih dahulu sebelum diterima menjadi warga Kampung Bhineka Tunggal Ika. Kini kampung itu telah menjadi besar dan di Kabupaten Nabire, Papua ini direncanakan akan membentuk Kampung Nusantara yang terdiri dari generasi muda berusia 27 tahun hingga 35 tahun. Ada kesadaran akan keberagaman budaya yang menghilangkan sekat-sekat agama dan adat. Mereka saling mengunjungi saat orang dari agama lain merayakan hari besarnya. Mereka harus menghormati hukum nasional dan hukum adat setempat. Misalnya, buah pohon tetangga yang masuk ke pekarangan tetangga menjadi milik tetangga itu. Orang yang melanggar akan ditindak tegas. Bahkan menurut adat di sana, orang yang mengambil milik tetangganya boleh dibunuh.

Di Manado, Sulawesi Utara, ada juga gerakan semacam ini. Mereka akan dengan suka rela membantu tetangga dan masyarakat yang berlainan agama bila tetangganya itu membutuhkan. Misalnya membangun masjid atau gereja. Sebagai sebuah gerakan, maka Pendidikan Multikultural perlu dimasyarakatkan dalam karya nyata di samping lokakarya. Tidak kalah pentingnya adalah adanya program pendidikan yang ditayangkan berbagai siaran televisi, radio atau pun internet. Perlu dihindari, kalau tidak mungkin dihindarkan, untuk menayangkan program yang bernuansa budaya dalam siaran mereka. Sekarang ini sudah ada beberapa stasiun yang mencoba menayangkan program semacam itu dan hasilnya bagus. Diharapkan hal ini bisa lebih ditingkatkan lagi untuk mengurangi acara-acara yang justru menimbulkan hasutan dan pertikaian.

6. Tantangan Pendidikan Multikultural

Tantangan Pendidikan Multikultural, baik dalam teori maupun dalam praktek, adalah meningkatkan keadilan bagi kelompok korban tertentu tanpa membatasi kelompok dan kesempatan yang lain. Sekalipun berbagai kelompok dijadikan sasaran untuk penguatan dan keadilan dalam Pendidikan Multikultural sesuai kebutuhan dan tujuan, kadang mereka menerima kebutuhannya sebagai beragam, bertentangan, dan tidak konsisten sebagaimana halnya pernah terjadi pada beberapa kelompok feminis dan etnis dimasa lampau.

Penyebab utama dari ketegangan antara berbagai kelompok korban mungkin dilembagakan oleh praktek di dalam masyarakat yang meningkat ketegangan, konflik dan keberagaman di antara mereka. Dalam hal ini, mungkin tujuan penting dari Pendidikan Multikultural adalah membantu anggota kelompok yang menjadi korban agar lebih bersatu dan mendapatkan keuntungan yang signifikan dari koalisi itu. Koalisi ini dapat menjadi wahana untuk perubahan sosial dan reformasi.



Upaya Jesse Jackson untuk membentuk “*Rainbow Coalition*” pada level nasional pada tahun 1980-an merupakan salah satu dari tujuan utama rumusan koalisi politik yang efektif yang terdiri dari orang-orang dari kelompok gender, ras, budaya, dan kelompok kelas sosial yang berbeda.

Problema Pendidikan Multikultural di Indonesia memiliki keunikan yang tidak sama dengan problema yang dihadapi oleh negara lain. Keunikan faktor-faktor geografis, demografi, sejarah dan kemajuan sosial ekonomi.

a. Keragaman Identitas Budaya Daerah

Keragaman ini menjadi modal sekaligus potensi konflik. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang Multibudaya. Namun kondisi jika budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Masalah itu muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok budaya lain ini justru dapat menjadi konflik. Sebab dari konflik-konflik yang terjadi selama ini di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya keragaman identitas etnis, agama dan ras.

b. Pergeseran Kekuasaan dari Pusat ke Daerah

Sejak dilanda arus reformasi dan demokratisasi, Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan baru yang sangat kompleks. Satu di antaranya yang paling menonjol adalah persoalan budaya. Dalam arena budaya, terjadinya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Bila pada masa Orba, kebijakan yang terkait dengan kebudayaan masih tersentralisasi, maka kini tidak lagi. Kebudayaan, sebagai sebuah kekayaan bangsa, tidak dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Ketika sesuatu bersentuhan dengan kekuasaan maka berbagai hal dapat dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan ataupun melanggengkan kekuasaan itu, termasuk di dalamnya isu kedaerahan.

c. Kurang Kokohnya Nasionalisme

Keragaman budaya ini membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan seluruh pluralitas negeri ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional dan ideologi negara merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi dan berfungsi sebagai penyatu. Saat ini Pancasila kurang mendapat perhatian dan kedudukan yang semestinya sejak isu kedaerahan semakin semarak. Persepsi sederhana dan keliru banyak dilakukan orang dengan menyamakan antara Pancasila itu dengan ideologi Orde Baru yang harus ditinggalkan. Pada masa Orde Baru kebijakan dirasakan terlalu tersentralisasi. Sehingga ketika Orde Baru tumbang, maka segala hal yang menjadi dasar dari Orde Baru dianggap jelek, perlu ditinggalkan dan diperbarui, termasuk Pancasila. Tidak semua hal yang ada pada Orde Baru jelek, sebagaimana halnya tidak semuanya baik. Ada hal-hal yang tetap perlu dikembangkan. Nasionalisme perlu ditegakkan, tetapi dengan cara-cara yang edukatif, persuasif dan manusiawi bukan dengan pengerahan kekuatan. Sejarah telah menunjukkan peranan Pancasila yang kokoh untuk menyatukan kedaerahan ini. Kita sangat membutuhkan semangat



nasionalisme yang kokoh untuk meredam dan menghilangkan isu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa ini.

d. Fanatisme Sempit

Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan. Namun yang salah adalah fanatisme sempit, yang menganggap menganggap bahwa kelompoknyalah yang paling benar, paling baik dan kelompok lain harus dimusuhi. Gejala fanatisme sempit yang banyak menimbulkan korban ini banyak terjadi di tanah air ini. Gejala Bonek (bondo nekat) di kalangan suporter sepak bola nampak menggejala di tanah air. Kecintaan pada klub sepak bola daerah memang baik, tetapi kecintaan yang berlebihan terhadap kelompoknya dan memusuhi kelompok lain secara membabi buta maka hal ini justru tidak sehat.

e. Konflik Kesatuan Nasional dan Multibudaya

Ada tarik menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan Multibudaya. Di satu sisi ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun dalam penerapannya, kita pernah mengalami konsep stabilitas nasional ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik tertentu. Adanya Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dapat menjadi contoh ketika kebijakan penjagaan stabilitas nasional ini berubah menjadi tekanan dan pengerah kekuatan bersenjata. Hal ini justru menimbulkan perasaan anti pati terhadap kekuasaan pusat yang tentunya hal ini bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Untunglah perbedaan pendapat ini dapat diselesaikan dengan damai dan beradab. Kini, semua pihak yang bertikai sudah bisa didamaikan dan diajak bersama-sama membangun daerah yang porak poranda akibat peperangan yang berkepanjangan dan terjangan Tsunami ini.

f. Kesejahteraan Ekonomi yang Tidak Merata di antara Kelompok Budaya

Kejadian yang nampak bernuansa SARA seringkali berangkat dari kecemburuan sosial. Utamanya daerah dengan warga pendatang yang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari warga asli. Beberapa peristiwa di tanah air yang bernuansa konflik budaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi.

g. Keberpihakan Media Massa.

Di antara media massa tentu ada ideologi yang sangat dijunjung tinggi dan dihormati. Persoalan kebebasan pers, otonomi, hak publik untuk mengetahui hendaknya diimbangi dengan tanggung jawab terhadap dampak pemberitaan. Mereka juga perlu mewaspadaikan adanya pihak-pihak tertentu yang pandai memanfaatkan media itu untuk kepentingan tertentu, yang justru dapat merusak budaya Indonesia.



BAB 13
PENDIDIKAN KARAKTER DAN PENDIDIKAN
BERBASIS MASYARAKAT

A. Konsep Pendidikan, Karakter Dan Masyarakat Secara Umum

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada juga para beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya.

Seperti yang tertera didalam UU No.20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara.

Menurut UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Menurut Prof. H. Mahmud Yunus dan Martinus Jan Langeveld mengatakan pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Agar anak tersebut memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukannya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya. Selain dari itu Pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri dan bertanggung jawab dan pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan.

Menurut H. Horne, pendidikan adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi (terwujud) dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia. Setiap negara maju tidak akan pernah terlepas dengan dunia pendidikan. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya



manusia yang dapat memajukan dan mengharumkan negaranya. Pendidikan merupakan faktor penting bagi masyarakat, demi maju mundurnya kualitas masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada pendidikan yang ada pada rakyat bangsa tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh harahap dan poerkatja, pendidikan adalah usaha yang secara sengaja dari orang tua yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya. Yang dimaksud orang tua tersebut adalah orang tua anak itu atau orang yang mempunyai kewajiban untuk mendidik tersebut seperti guru, pendeta, dan seorang kiai.

Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan Nasional Indonesia mengatakan pendidikan tersebut adalah merupakan tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan.

Menurut Heidjrachman dan Husnah (1997:77) pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalam peningkatan penguasaan teori dan keterampilan, memutuskan dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan di dalam mencapai tujuannya, baik itu persoalan dalam dunia pendidikan ataupun kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Notoadmodjo (2003:77), kalau pendidikan formal dalam suatu organisasi merupakan suatu proses pengembangan kemampuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan.

Para masyarakat mengartikan pendidikan adalah pengajaran yang di lakukan disekolah yang mana sekolah tersebut sebagai tempat terjadinya pengajaran atau pendidikan formal. Jadi pendidikan tidak seluruhnya terjadi disekolah tetapi pendidikan bisa jadi di rumah yang mana orang tua yang menjadi gurunya. Pendidikan adalah sebuah program yang mengandung komponen tujuan, proses belajar mengajar antara murid dan gurunya sehingga, akan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) menjadi lebih baik.

Pangertian mengenai pendidikan tersebut, dapat dilihat dari sisi beberapa titik sudut pandang yang berbeda-beda antara dari titik sudut psikologis maupun titik sudut pandang sosiologis. Terdapat banyak pengertian maupun definisi yang membahas mengenai pendidikan, tergantung dalam melihat pendidikan melalui titik sudut manapun.

Akan tetapi dalam inti sari mengenai pemaknaan konsep pendidikan mengarah pada satu tujuan yaitu suatu upaya yang dijadikan proses dalam membina diri seseorang maupun masyarakat secara umum supaya dapat menjembatani langkah-langkah dalam menjalani kehidupan sehingga bisa meraih hidup yang diimpikan oleh semua orang yaitu menikmati kehidupan yang serba dilandasi pengetahuan dan hidup sejahtera, semua kebutuhan terpenuhinya dengan munculnya ide kreatif dan inovatif yang hanya bisa didapat dengan proses mengenyam pendidikan.

Pendidikan merupakan modal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dalam pendidikan di Indonesia kita dapat memperoleh banyak pengetahuan seperti pengetahuan tentang moral, agama, kedisiplinan dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam



pendidikan Indonesia pengembangan pikiran sebagian besar dilakukan di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi melalui bidang studi yang dipelajaridengan cara pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu serta menyimpulkannya.

2. Pengertian Karakter

- a. Salahudin dan Alkrienciehie (2013:42) memaparkan bahwa karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan.
- b. Kurniawan (2017:29) mengungkapkan karakter seseorang terbentuk dari kebiasaan yang dia lakukan, baik sikap dan perkataan yang sering ia lakukan kepada orang lain.
- c. Sedangkan menurut Wibowo (2013:12) karakter merupakan sifat yang alami dari jiwa manusia yang menjadi ciri khas seseorang dalam bertindak dan berinteraksi dikeluarga dan dimasyarakat.
- d. Pengertian karakter juga diungkapkan oleh Samani dan Hariyanto (2013:41) sebagai sesuatu yang khas dari seseorang sebagai cara berfikir dan perilaku untuk hidup dan bekerjasama dalam hubungannya dengan sesama yang dapat membuat keputusan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari pemaparan dari berbagai pendapat ahli tentang karakter, maka dapat disimpulkan bahwa karakter adalah suatu sifat yang khas dimiliki oleh seseorang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral dalam berfikir dan bertindak yang terbentuk dari kebiasaan yang dia lakukan saat berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sehari-hari keluarga dan masyarakat.

a) Sistem Karakter

Menurut Lickona dalam Amirulloh (2015:14-18) bahwa sistem karakter itu terdiri dari tiga ranah yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Tiga ranah tersebut ialah:

1. Pengetahuan Moral (*Moral Knowing*) adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui, memahami, mempertimbangkan, membedakan, menginterpretasiakan jenis-jenis moral yang perlu dilakukan dan yang harus ditinggalkan. Pengetahuan moral ini memiliki enam komponen yaitu:
 - Kesadaran Moral (*Moral Awareness*) adalah kesadaran untuk melihat moral yang ada disekitarnya dan melaksanakanya.
 - Pengetahuan Nilai Moral (*Knowing Moral Values*) adalah kemampuan memahami nilai moral dalam berbagai situasi.
 - Memahami Sudut Pandang Lain (*Perspective Taking*) adalah kemampuan untuk menghargai pendapat dari sudut pandang orang lain.



- Penalaran Moral (*Moral Reasoning*) kemampuan untuk mengetahui dan memahami makna dari bermoral.
 - Keberanian Mengambil Keputusan (*Decision Making*) adalah wujud tindakan keberanian dalam mengambil keputusan yang tepat saat mengalami dilema moral.
 - Pengenalan Diri (*Self Knowledge*) adalah kemampuan mengenali perilaku kitadan mengevaluasinya secara jujur.
2. Perasaan Moral (*Moral Feeling*) adalah kemampuan merasa merasa wajib untuk melakukan tindakan moral dan merasa bersalah jika melakukan perbuatan jahat. Perasaan moral ini memiliki enam komponen yaitu:
- Mendengarkan Hati Nurani (*conscience*) adalah perasaan moral yang mendorong seseorang dalam melakukan tindakan sesuai hati nurani baik hati nurani dalam sisi kognitif maupun sisi emosional.
 - Harga diri (*self esteem*) adalah kemampuan merasa bermartabat karena seseorang memilki kebaikan atau nilai luhur.
 - Empati (*empathy*) adalah memiliki kepekaan terhadap keadaan atau penderitaanorang lain.
 - Cinta Kebaikan (*loving the good*) adalah kemampuan untuk merasa senang ketika melakukan kebaikan.
 - Kontrol Diri (*self kontrol*) adalah kemampuan mengendalikan diri sendiri emosidatang dengan berlebih seperti ketika sedang marah.
 - Rendah Hati (*humility*) adalah keterbukaan sejati pada kebenaran dan kemauan untuk bertindak memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dan membantu kita mengatasi rasa sombong.
3. Tindakan Moral (*Moral Acting*)

Tindakan Moral adalah kemampuan untuk menggerakkan seseorang dalam melakukan tindakan moral ataupun mencegah seseorang untuk tidak melakukannya. Tindakan moral ini memiliki tiga komponen yaitu:

- Kompetisi (*competence*) adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah perasaan moral menjadi tindakan moral yang efektif.
- Keinginan (*will*) adalah kemampuan yang kuat untuk melakukan apa yang menurut kita harus lakukan.
- Kebiasaan (*habit*) adalah melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Berdasarkan pengertian pendidikan karakter dan sistem karakter maka yang

dimaksud pendidikan karakter adalah sistem pendidikan moral dan budi pekerti yang digunakan untuk mengembangkan nilai karakter melalui proses pembentukan moral, perasaan moral dan tindakan moral.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem karakter itu memiliki tiga unsur yang penting, yaitu Pengetahuan Moral (*Moral Knowing*), Perasaan Moral (*Moral Feeling*), dan Tindakan Moral (*Moral Acting*). Ketiga unsur tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, pendidikan yang baik tidak hanya mengedepankan Pengetahuan Moral (*Moral Knowing*) saja, tetapi juga mengembangkan Perasaan Moral (*Moral Feeling*), dan Tindakan Moral (*Moral Acting*) agar mereka mengetahui dan memiliki karakter yang luhur dan melakukan kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

b) Nilai-Nilai Karakter

Menurut Pedoman Sekolah (Kemendiknas 2010:9), nilai-nilai karakter terdiri dari 18 nilai karakter yaitu sebagai berikut:

Tabel 13.1 Nilai-Nilai Karakter

No.	Nilai	Deskripsi
1	Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3	Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4	Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan
5	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya
6	Kreatif	Berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7	Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8	Demokrasi	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9	Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10	Semangat Kebangsaan	Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

11	Cinta Tanah Air	Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan dan kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa
12	Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13	Bersahabat/Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14	Cinta Damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15	Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16	Peduli Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17	Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18	Tanggung Jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya ia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Sumber : Pedoman Sekolah dari Kemendiknas Tahun 2010

Dari pemaparan di atas kita dapat mengetahui penjelasan dari masing-masing nilai karakter yang ada 18 unsur tersebut. Setiap nilai memiliki penekanan yang berbeda-beda sebagai pedoman berperilaku seseorang. Dari 18 nilai karakter tersebut setiap nilai saling berhubungan dan saling mempengaruhi agar seseorang memiliki kemampuan untuk memiliki dan menerapkan nilai-nilai karakter itu tadi dengan baik.

3. Pengertian Masyarakat

Istilah "masyarakat" berasal dari bahasa Arab, yakni berakar dari kata "syaraka" yang berarti "ikut serta, berpartisipasi." Sementara di bahasa Inggris, istilah "masyarakat" disebut dengan "society" yang berasal dari kata latin "socius," berarti "kawan." Pengertian Masyarakat Salah satunya penjelasan ahli antropologi Indonesia, Koentjaraningrat. Dalam buku karyanya yang berjudul Pengantar Ilmu Antropologi (Cetakan Kedelapan, 2002: 150), Koentjaraningrat menyebut, definisi masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling "bergaul", atau dengan istilah ilmiah, saling "berinteraksi". "Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi," demikian tulis



Koentjaraningrat.

Sementara di buku Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi (2019: 46) karya Gunsu Nurmansyah dkk, dijelaskan bahwa definisi masyarakat adalah sejumlah manusia yang jadi satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Selain itu, Masyarakat bisa diartikan sebagai salah satu satuan sosial dalam sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia.

Buku yang sama juga mengutip penjelasan sejumlah ahli antropologi dan sosiologi soal pengertian masyarakat. Setidaknya, terdapat 6 definisi masyarakat menurut para ahli antropologi dan sosiologi yang dicatat oleh Gunsu Nurmansyah dkk (2019: 46-45), yakni sebagai berikut.

- a. Menurut ahli sosiologi Indonesia, Selo Sumarjan, definisi masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
 - b. Menurut ahli antropologi Indonesia, Koentjaraningrat, pengertian masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.
 - c. Menurut ahli antropologi AS Ralph Linton, pengertian masyarakat ialah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap kelompoknya sebagai satu kesatuan sosial.
 - d. Menurut ahli sosiologi modern paling berpengaruh, Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami suatu ketegangan organisasi ataupun perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang dibedakan kepentingannya secara ekonomi.
 - e. Menurut Emile Durkheim, salah satu ahli pencetus sosiologi modern, definisi masyarakat ialah suatu kenyataan objektif dari pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya.
 - f. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, yang juga ahli sosiologi, pengertian masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut.
 - g. Menurut Dannerius Sinaga, pengertian masyarakat adalah orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung yang saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan.
 - h. Phil Astrid S. Susanto menyatakan, masyarakat atau society merupakan manusia sebagai satu satuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang.
- Jenis Masyarakat, Modern dan Tradisional
- Masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah tidak terikat dengan adat istiadat.



Dalam masyarakat modern, adat istiadat dianggap dapat menghambat kemajuan. Oleh karena itu, masyarakat modern lebih memilih mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih rasional dalam membawa kemajuan. Masyarakat Tradisional Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat-istiadat yang telah turun temurun.

Dengan kata lain, kehidupan masyarakat tradisional belum dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya. Salah satu yang membedakan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern adalah ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan alam.

a) Unsur-unsur Masyarakat

Kesatuan hidup manusia di lingkup desa, kota, maupun negara merupakan konsep masyarakat. Di setiap kesatuan masyarakat, selalu ada unsur-unsur yang membentuk kesatuannya.

Menurut Soerjono Soekanto, yang dikutip di dalam buku Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi (2019: 52), sejumlah unsur masyarakat adalah sebagaimana perincian di bawah ini: Beranggotakan paling sedikit dua orang atau lebih. Seluruh anggota sadar sebagai satu kesatuan. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama, menghasilkan individu baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antaranggota masyarakat. Menjadi sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat. Berbagai pola tingkah laku yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia yang kemudian disebut masyarakat. Pola-pola tersebut harus bersifat tetap dan berkelanjutan agar menjadi kebudayaan. Kebudayaan dilahirkan dari proses berpikir manusia, yang kemudian diyakini sebagai nilai-nilai hidup. Dengan demikian, masyarakat dan kebudayaan tidak akan mungkin terpisahkan karena masyarakat adalah wadah kebudayaan itu sendiri.

b) Ciri-ciri Masyarakat

Untuk menentukan identitasnya, menurut Soerjono Soekanto, buku Sosiologi: Suatu Pengantar (2003), masyarakat mempunyai ciri-ciri yang khas. Adapun daftar ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut.

Hidup Berkelompok, sebagai makhluk sosial, manusia tidak mampu hidup sendiri. Ketidakmampuan itu mendorong manusia hidup berkelompok. Sebab, manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Konsep tersebut mengantarkan masing-masing individu hidup bermasyarakat.



Melahirkan Kebudayaan, ketika manusia membentuk kelompok, mereka selalu berusaha mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia akan berupaya menyatukan pikiran dan pengalaman bersama agar terbentuk suatu rumusan yang dapat menjadi pedoman tingkah laku mereka, yakni kebudayaan. Selanjutnya, budaya itu dipelihara dan diwariskan ke generasi-generasi berikutnya.

Mengalami Perubahan, beragam latar belakang yang menyatukan tiap-tiap individu menjadi suatu masyarakat, membuat manusia mengalami perubahan. Perubahan ini dianggap sebagai upaya masyarakat menyesuaikan diri dengan keadaan zaman. Sebagai contoh, masyarakat beralih menggunakan surat elektronik untuk menggantikan surat kertas, ketika menerima pengaruh perkembangan teknologi.

Berinteraksi, interaksi adalah hal yang mendasar dari terbentuknya masyarakat. Interaksi ditempuh untuk mencapai keinginan, baik pribadi maupun kolektif. Dengan berinteraksi, masyarakat membentuk suatu entitas sosial yang hidup. Terdapat Kepemimpinan, masyarakat cenderung mengikuti peraturan yang diberlakukan di wilayahnya. Contohnya, dalam lingkup keluarga, kepala keluarga mempunyai wewenang tertinggi untuk mengayomi keluarganya. Istri dan anak patuh kepada ayah atau suaminya. Hal itu menunjukkan bahwa dalam masyarakat, ada peran pemimpin yang membantu menyatukan individu-individu.

Stratifikasi Sosial, stratifikasi sosial menempatkan seseorang pada kedudukan dan perannya di dalam masyarakat. Ketidakeimbangan hak dan kewajiban masing-masing individu atau kelompok menimbulkan adanya penggolongan masyarakat dalam kelas-kelas tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat, stratifikasi sosial didasari atas kasta sosial, usia, suku, pendidikan, dan beberapa aspek lain yang memicu keberagaman.

B. Definisi Konseptual Tentang Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Berbasis Masyarakat

1. Definisi Konseptual Pendidikan Karakter

a. Pengertian Pendidikan Karakter Menurut Para Ahli

1. Samani dan Hariyanto (2013:45) dalam bukunya menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga serta rasa dan karsa.
2. Selanjutnya pendidikan karakter menurut Salahudin dan Alkrienciehie (2013:42) dapat dimaknai sebagai pendidikan moral atau budi pekerti untuk mengembangkan kemampuan seseorang untuk berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-harinya.



3. Dalam pandangan Muhamimin Azzet (2014:37) pendidikan karakter merupakan suatu sistem dalam penanaman nilai-nilai karakter yang baik kepada seluruh warga sekolah sehingga memiliki pengetahuan dan tindakan yang sesuai dengan nilai kebaikan.
4. Sedangkan pendidikan karakter menurut Zubaedi (2012:19) yaitu segala perencanaan usaha yang dilakukan oleh guru yang dapat mempengaruhi pembentukan karkater peserta didiknya, memahami, membentuk, dan memupuk nilai-nilai etika secara keseluruhan.
5. Bagi Wibowo (2013:40) pendidikan karakter adalah suatu pendidikan yang digunakan untuk menanamkan dan mengembangkan karakter kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki karakter yang luhur setelah memiliki maka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat.

Dari penjelasan berbagai pendapat para ahli tentang pengertian pendidikan karakter, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan moral atau budi pekerti yang digunakan untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter yang baik kepada seseorang, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan tindakan yang luhur setelah memiliki maka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat.

2. Fungsi Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama, hal ini di ungkapkan oleh Zubaedi (2012:18) yang penjelasannya sebagai berikut:

- 1 Fungsi untuk pembedakan dan pengembangan potensi Pendidikan karakter berfungsi agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk berfikir baik, berhati baik, dan berperilaku baik.
- 2 Fungsi untuk penguatan dan perbaikan Pendidikan karkater untuk memperbaiki dan menguatkan peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah untuk ikut bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam mengembangkan potensi warganya.
- 3 Fungsi penyaring Pendidikan karkater dapat digunakan agar masyarakat dapat memilah budaya bangsa sendiri dan dapat menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa sendiri. Pendidikan karakter memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi seseorang, seperti yang dipaparkan oleh Salahudin dan Alkrienciehie (2013:43) fungsi pendidikan karakter sebagai berikut: 1. Mengembangkan potensi dasar agar berperilaku baik. 2. Menguatkan perilaku yang sudah baik dan dapat memperbaiki perilaku yang kurang baik. 3. Membantu untuk dapat menyaring budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai pancasila. Berdasarkan penjelasan dari berbagai pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan karakter adalah



untuk pembentukan dan pengembangan potensi dasar perilaku baik seseorang, lalu potensi itu dikuatkan dan diperbaiki, selanjutnya agar tetap memiliki nilai karakter yang baik maka harus ada penyaringan terhadap perilaku yang menyimpang dari nilai karakter yang luhur.

3. Strategi Pelaksanaan Pendidikan Karakter

Menurut Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Kemendiknas:15-17) Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap satuan pendidikan. Agar pendidikan karakter dapat dilaksanakan secara optimal, pendidikan karakter diimplementasikan melalui langkah-langkah berikut:

- 1 Sosialisasi ke stakeholders (komite sekolah, masyarakat, lembaga lembaga).
- 2 Pengembangan dalam kegiatan sekolah.
- 3 Kegiatan Pembelajaran.
- 4 Pengembangan Budaya Sekolah dan Pusat Kegiatan Belajar, melalui:
 - a. Kegiatan rutin.
 - b. Kegiatan spontan.
 - c. Keteladanan.
 - d. Pengkondisian
- 5 Kegiatan ko-kurikuler dan atau kegiatan ekstra kurikuler.
- 6 Kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Karakter

Keberhasilan atau kegagalan dalam proses penerapan pendidikan karakter itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Zubaedi (2012:177-183) faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pendidikan karakter adalah sebagai berikut:

- 1 Faktor insting (naluri) Insting adalah sikap/ tabiat yang sudah ada sejak manusia dilahirkan.
- 2 Adat (kebiasaan) Kebiasaan adalah suatu perilaku yang sama yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.
- 3 Keturunan (*wirotsah/heredity*) Sifat-sifat anak sebagian besar merupakan pantulan dari sifat-sifat orang tua mereka, baik dalam sifat jasmaniah dan sifat rohaniyah.



- 4 Lingkungan (milieu) Lingkungan merupakan segala sesuatu yang melingkupi hidup manusia di sekitarnya/ yang mengelilinginya, bisa berupa lingkungan alam dan lingkungan pergaulan.

Seperti yang dijelaskan oleh Maharani dan Mustika (2016:25) melalui jurnal bimbingan dan konseling, faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter dapat berasal dari diri sendiri atau dari luar diri sendiri. Bisa dari lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan pergaulan seseorang di masyarakat. Dari hal tersebut terlihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi karakter bisa berasal dari mana saja. Termasuk berasal dari lingkungan sekolah. Sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar bagi para siswa. Tetapi lingkungan sekolah juga memberikan pengaruh disiplin dalam keseharian siswa. Selain itu dalam penelitian Hidayat (2013:95) melalui jurnal ilmiah Widya, faktor-faktor disiplin yang penting untuk diperhatikan yaitu kesadaran, keteladanan, dan penegakan peraturan.

Kesadaran menjadi faktor utama, sedangkan keteladanan dan penegakan peraturan menjadi pendukung dalam kesadaran. Tanpa adanya kesadaran, keteladanan dan penegakan peraturan tidak dapat bertahan lama pada diri seseorang. Berdasarkan pendapat di atas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam proses penerapan pendidikan karakter antara lain berupa insting/naluri manusia yang ada sejak ia dilahirkan, ada faktor kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, selanjutnya ada faktor keturunan yang mewarisi sifat dari orang tua kepada anaknya dan faktor lingkungan yang ada di alam maupun lingkungan pergaulan. Semua faktor tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam segala sifat dan tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pendidikan Berbasis Masyarakat

a. Pembelajaran Berbasis Masyarakat

Pembelajaran berbasis masyarakat (*Community Based Learning*) menurut Suharto (2012: 81) merupakan pembelajaran yang dirancang, dilaksanakan, dinilai, dan dikembangkan oleh sekolah dan masyarakat yang mengarah pada usaha untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada di lingkungan masyarakat dengan berorientasi pada masa depan. Adapun pembelajaran berbasis masyarakat menurut Tilaar (2000: 105) adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru bersama masyarakat dengan memusatkan diri pada kemampuan peserta didik untuk mengenali dan mendukung kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang melingkupinya.

b. Dasar Pembelajaran Berbasis Masyarakat (*Community Based Learning*)

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembelajaran berbasis masyarakat dalam pandangan Watson, mencakup tiga elemen dasar yang saling bersinergi bagi terwujudnya pembelajaran berbasis



masyarakat yaitu learning society, critical pedagogy, dan pendidikan berbasis lokal (Suharto, 2012: 98).

Learning society atau masyarakat belajar, merupakan landasan pertama bagi pembelajaran berbasis masyarakat. Asas adanya kepercayaan terhadap masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan menjadi acuan bahwa masyarakat memiliki kekuatan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimilikinya untuk menyelenggarakan pendidikan (Darling, 2009: 3). Landasan ini berdasar pada kenyataan bahwa setiap warga masyarakat secara sadar selalu menggali potensinya melalui kegiatan belajar sepanjang hayat (long life learning).

Masyarakat sesungguhnya punya potensi untuk berkembang, berubah, dan mengatasi masalah yang dihadapi dengan bekal akal pikiran dan sumber daya alam yang dimiliki. Studi perbandingan yang dilakukan Francis Fukuyama (1996) menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi yang menjadi basis kekuatan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan masih tetap menjadi bagian dari agenda mendasar dalam pembahasan/diskusi untuk meningkatkan taraf hidup dan kemajuan kebudayaan suatu masyarakat. Ketika manusia dilahirkan ke dunia dan berinteraksi dengan manusia yang lain sebenarnya manusia sudah menjadi makhluk yang mengetahui. Pengetahuan ini dijadikan sebagai bekal untuk bertahan dan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan eksistensial manusia, inilah esensi dari masyarakat belajar.

Masyarakat belajar adalah masyarakat yang menjadikan segala aktivitas hidupnya sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara sadar sehingga membentuk budaya masyarakat belajar. Muara dari learning society ini selanjutnya membentuk kualitas jaringan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai timbal balik dan kepercayaan yang menjadi modal masyarakat meningkatkan kualitas pendidikan melalui bentuk kerjasama dengan sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik (Abu Bakar, 2008: 266).

Solusi yang ditawarkan dari paradigma pendidikan di atas menjadi mendukung pembelajaran berbasis masyarakat (community base learning), karena asas pendidikan di atas pada intinya adalah menghendaki perubahan struktur dalam masyarakat di mana pendidikan berada. Sejalan dengan konsep pendidikan kritis tersebut, Zamroni (2007: 352-353) mengungkapkan rasa optimisnya bahwa jalan menuju masyarakat yang maju, modern, dan sejahtera lewat pendidikan dan demokratisasi sangat kompleks dan rumit. Masa depan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. Seberapa jauh masyarakat terutama yang berprofesi sebagai pengambil keputusan dan praktisi pendidikan mampu memanfaatkan peluang yang ada, berani mengambil resiko dan konsisten dengan apa yang ditetapkan. Pendidikan berbasis lokal menjadi landasan filosofis ketiga bagi terselenggaranya pembelajaran berbasis masyarakat. Asas ini berangkat dari kenyataan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang berlokasi di masyarakat, diharapkan masyarakat turut ambil bagian dalam merancang, memutuskan, serta mengatur pendidikan dan model



pembelajarannya sendiri sesuai dengan kebutuhannya (Suharto, 2012: 99-102).

2. Landasan Konseptual

Landasan konseptual pembelajaran berbasis masyarakat merupakan bagian dari demokratisasi pendidikan yaitu merancang program pendidikan “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat” (Zubaedi 2005: 8). Konsep ini menunjukkan masyarakat yang menginisiasi, menyelenggarakan, dan mendapat manfaat dari proses pendidikan. Karena inisiatornya adalah masyarakat maka proses paedagogis yang berlangsung tidak mengabaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Teks normatif yang dipelajari di ruang kelas harus dikaitkan dengan konteks sosial yang terjadi di masyarakat. Persoalan-persoalan sosial harus dibawa ke ruang kelas untuk dipahami, dipelajari, dan dikritisi sebagai pembentukan media pembentukan critical subjectivity. Dialektika antara teks dan konteks akan membuat proses pembelajaran lebih berarti. Hasil penelitian Munandar (2002: 188) menunjukkan bahwa masyarakat merupakan sumber penunjang utama, atau setidaknya salah satu dari sumber utama untuk memberikan program pembelajaran dan pengayaan bagi peserta didik, terutama yang memiliki kreativitas dan keberbakatan.

Formulasi konsep pembelajaran berbasis masyarakat yang bertumpu pada tiga pilar utama yaitu “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat” menunjukkan bahwa pembelajaran dari masyarakat artinya pendidikan merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat. Pembelajaran oleh masyarakat artinya masyarakat merupakan subjek pendidikan yang aktif membantu, bukan sekedar sebagai objek pendidikan sehingga masyarakat betul-betul memiliki, bertanggungjawab dan terlibat dalam proses pembelajaran (Owens, 1996: 4). Pembelajaran untuk masyarakat artinya masyarakat secara aktif terlibat dalam program pembelajaran seperti perencanaan, implementasi, pengelolaan, pemecahan masalah, dan evaluasi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat (Yarbrough, 2014: 31)

3. Landasan Hukum dan Operasionalnya

Rintisan awal pencerahan bagi program pembelajaran berbasis masyarakat yang sebelumnya dirasakan gelap-gulita adalah sejak bergulirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak tahun 2001, berdasarkan aturan tersebut secara resmi telah diberlakukan otonomi daerah bidang pendidikan dan kebudayaan. Visi pokok dari otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan bermuara pada upaya pemberdayaan terhadap masyarakat setempat untuk menentukan sendiri jenis dan muatan kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem penilaian hasil belajar, guru dan kepala sekolah/madrasah, fasilitas dan sarana belajar untuk peserta didik (Muhaimin, dkk., 2009: 1).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, selanjutnya peran pemerintah dalam hal ini hanya memberikan dukungan dana, fasilitas, dan ekspertis. Hal ini dimaksudkan agar terselenggaranya pelayanan pendidikan



yang bermanfaat bagi pembangunan kehidupan yang riil di masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat sendiri mengacu pada standar mutu akademik secara nasional atau internasional. Peran pemerintah dalam membantu penyelenggaraan pendidikan tersebut diwakili oleh Departemen Teknis atau pemerintah daerah (pemda) di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi setempat.

Sejalan dengan pemerintah daerah memberlakukan otonomi pendidikan, pada gilirannya berimplikasi kepada perubahan sistem manajemen pendidikan dari pola sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan. Selanjutnya pergeseran pola sentralisasi kedesentralisasi berimplikasi dikembangkannya pendidikan demokratis dan non-monopolistik dalam menentukan jenis dan muatan kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem penilaian hasil belajar, fasilitas dan sarana belajar, danlain-lainnya. Negara-negara di benua Afrika menurut Banoobhai, (2012: 175-179) juga mengembangkan pendidikan demokratis dengan mengembangkan kurikulum inovatif dan kemudian menetapkan sebagai kurikulum nasional sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan di daerah dalam menyusun kurikulumnya sendiri dalam rangka mengatasi berbagai persoalan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Bersamaan dengan otonomi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, manajemen yang dikembangkan lebih mengarah pada manajemen berbasis sekolah atau madrasah yakni model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepadasekolah atau madrasah. Manajemen tersebut juga mendorong pengambilan keputusanpartisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah atau madrasah seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, karyawan, dan tokoh agama ataumasyarakat untuk meningkatkan mutu madrasah (Muhaimin, dkk., 2010: 2). Selanjutnya melalui implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) inilah pembelajaran berbasis masyarakat dilaksanakan di beberapa sekolah/madrasah di Indonesia.

Landasan hukum pembelajaran berbasis masyarakat terdapat dalam Undang- undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 yaitu:

- a. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya dari oleh dan untuk kepentingan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pandangannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- c. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat (community based education)dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, danatau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku
- d. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi



dana, dan sumber lain secara adil dan merata dari pemerintah dan atau pemerintah daerah (Arifin, 2003: 57-58).

Berdasar landasan hukum pada Undang-Undang Sisdiknas di atas, pembelajaran berbasis masyarakat di Indonesia diterjemahkan secara variatif sehingga diselenggarakan dalam berbagai bentuk seperti :

- a. Pembelajaran yang diselenggarakan oleh pendidikan luar sekolah seperti di pesantren atau LSM.
- b. Pembelajaran yang diberikan oleh pusat pendidikan dan pelatihan milik swasta.
- c. Pembelajaran yang diselenggarakan oleh pusat pendidikan luar sekolah yang disediakan oleh pemerintah.
- d. Pembelajaran yang diselenggarakan pada pusat kegiatan belajar yang ada di masyarakat.
- e. Pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah/madrasah swasta/yayasan.

Menurut Miarso, (2007: 631) program pendidikan berbasis masyarakat dapat berbentuk pembelajaran di sekolah menggunakan pendekatan kemasyarakatan (community based approach) atau kerjasama dengan tokoh masyarakat sesuai bidang kompetensinya, dengan dasar pertimbangan dan materi pelajaran harus mengikuti aturan baku persekolahan, termasuk kewajiban mengikuti ujian seperti Ujian Akhir Semester, Evaluasi Belajar Tahap Akhir atau Ujian Nasional untuk memperoleh raport atau ijazah.

Berdasarkan konsep tersebut pembelajaran berbasis masyarakat memberikan peluang dan kebebasan yang terkendali kepada masyarakat untuk mendesain, merancang, merencanakan, dan mengelola pembelajaran, serta melakukan evaluasi pendidikan. Jadi perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di dalamnya dilaksanakan oleh masyarakat bekerja sama dengan guru bidang studi di sekolah. Dengan proses seperti ini, pendidikan dan pembelajaran diharapkan lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan situasi masyarakat setempat (Chudolinska, 2014: 1).

c. Tujuan Pembelajaran Berbasis Masyarakat

Setiap kegiatan pembelajaran tentu memiliki tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan pembelajaran berbasis masyarakat yaitu :

1. Membantu pemerintah dalam mobilisasi sumber daya manusia setempat dan dari luar serta meningkatkan peranan masyarakat untuk mengambil bagian lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan di semua jenjang, jenis dan jalur



- pendidikan.
2. Mendorong perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab dan kepemilikan madrasah atau sekolah, seperti tanggung jawab kemitraan, toleransi, dan kesediaan menerima sosial budaya.
 3. Mendukung inisiatif negara atau pemerintah dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sekolah atau madrasah, khususnya orang tua dan anggota masyarakat lainnya melalui kebijakan desentralisasi.
 4. Mendukung peranan masyarakat dalam mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, meningkatkan, dan mensinergikan dengan peran sekolah atau madrasah dan untuk meningkatkan mutu dan relevansi, membuka kesempatan yang lebih besar dalam memperoleh pendidikan dan peningkatan efisiensi manajemen pendidikan (Nuryanto, 2008: 316).

Formulasi tujuan pembelajaran berbasis masyarakat sebagaimana dikemukakan di atas memberikan ciri-ciri khusus pembelajaran berbasis masyarakat. Pembelajaran berbasis masyarakat diarahkan tidak semata-mata memintarkan peserta didik, tetapi juga mencerdaskan. Oleh karena itu pembelajaran berbasis masyarakat memberikan pelayanan proses pembelajaran atau pendidikan kepada masyarakat tidak sebatas padapengetahuan yang bersifat kognitif saja, akan tetapi melakukan pembelajaran terhadap masyarakat tentang segala aspek kehidupan yang sesuai dengan watak, nilai-nilai agama, dan kebudayaan masyarakat yang melingkupinya.

Pembelajaran berbasis masyarakat mengharuskan pelaksanaan pendidikan tidak jauh dari realitas yang dialami masyarakat, sehingga program pendidikan disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil di masyarakat mulai dari tingkat perencanaan hingga evaluasi. Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan untuk menampung aspirasi yang menjadi kebutuhan dalam menyusun tujuan pendidikan dan pembelajaran yang diinginkan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembelajaran berbasis masyarakat secara umum ditujukan untuk :

1. Terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab bersama dalam pendidikan.
2. Terselenggaranya kerja sama yang saling menguntungkan (saling memberi dan menerima) antara semua pihak yang bekepentingan dengan pendidikan.
3. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam (lingkungan), dan sumber daya buatan, seperti dana, fasilitas, dan peraturan-peraturan termasuk perundangan.
4. Meningkatkan kinerja sekolah/madrasah, yang berarti pula meningkatnya

produktivitas, kesempatan memperoleh pendidikan, keserasian proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan, serta komitmen dari pelaksana pendidikan (Miarso, 2007: 709).

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa inti tujuan pembelajaran berbasis masyarakat ialah proses kesadaran dari hubungan masyarakat yang diarahkan untuk pengembangan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan faktor lainnya. Melaksanakan program pembelajaran berbasis masyarakat perlu kesadaran, kepercayaan dan keterlibatan penuh anggota dengan memperhatikan kebebasan, kemampuan dana, dan kesediaan mengambil peranan.

4. Prinsip-prinsip Pembelajaran Berbasis Masyarakat

Pembelajaran berbasis masyarakat pada hakikatnya merupakan pengejawantah dari prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini dimaksudkan bagaimana materi pelajaran disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat (Gofur, 2008: 16). Prinsip relevansi ini penting pada pembelajaran berbasis masyarakat, sebab sekolah/madrasah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar yaitu masyarakat. Oleh karena itu, sekolah atau madrasah dalam menerapkan pembelajaran berbasis masyarakat harus memahami kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat.

Menurut Galbraith, prinsip pembelajaran berbasis masyarakat yaitu:

1. Self determination (menentukan sendiri), setiap anggota masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengenali sumberdaya masyarakat yang dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan.
2. Self help (menolong diri sendiri), anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan untuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian lebih baik dari pada menggantungkan diri, karena mereka beranggapan kesejahteraan adalah tanggungjawab jawab mereka sendiri.
3. Leadership development (pengembangan kepemimpinan), pemimpin lokal harus mendapat pelatihan keahlian seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan memandirikan kelompok untuk mengembangkan masyarakat secara berkesinambungan.
4. Localization (lokalitas), potensi terbesar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan untuk terlibat dalam kehidupan di masyarakatnya.
5. Integrated delivery of service (keterpaduan pemberian pelayanan), setiap organisasi dalam masyarakat secara bersama-sama melayani masyarakat untuk mencapai tujuan



pendidikan yang diinginkan.

6. Reduce duplication of service (mengurangi duplikasi jasa), masyarakat mengkoordinasikan bentuk pelayanan, keuangan, dan sumber daya manusia untuk menghindari duplikasi jasa.
7. Accept diversity (menerima keanekaragaman), menghindari pemisahan orang disebabkan perbedaan usia, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnik, agama, dan ekonomi, yang menyebabkan terhalangnya pengembangan masyarakat secara optimal. Termasuk perwakilan warga masyarakat seluas mungkin agar terlibat dalam pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan program pelayanan dan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan lainnya.
8. Institutional responsiveness (tanggungjawab kelembagaan), pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah secara terus-menerus adalah sebuah kewajiban dari lembaga publik, karena mereka ada untuk melayani orang banyak (masyarakat).
9. Lifelong learning (pembelajaran seumur hidup) atau dalam istilah yang lebih populer disebut Life Long Education (pendidikan seumur hidup), peluang belajar secara informal atau formal harus tersedia untuk anggota masyarakat dari berbagai jenis latar belakang (Galbraith, 1995: 5).

Berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis masyarakat sebagaimana telah dijelaskan di atas untuk melaksanakannya dalam dunia pendidikan atau pembelajaran sebagai berikut :

1. Teknologi pembelajaran yang digunakan hendaknya sesuai dengan kondisi dan situasi nyata yang ada di masyarakat. Teknologi yang canggih yang diperkenalkan dan adakalanya dipaksakan sering berubah menjadi pengabdian masyarakat yang akibatnya tidak digunakan, sebab kehadiran teknologi ini bukan karena dibutuhkan, melainkan karena dipaksakan. Hal ini membuat masyarakat menjadi rapuh.
2. Ada lembaga instansi yang statusnya jelas dimiliki atau dipinjam, dikelola, dan dikembangkan oleh masyarakat. Di sini dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan.
3. Program belajar yang akan dilakukan harus dinilai sosial atau harus bermakna bagi kehidupan peserta didik atau warga belajar. Oleh karena itu perencanaannya harus didasarkan pada potensi lingkungan atau berorientasi pasar, bukan berorientasi akademik semata.
4. Program belajar harus menjadi milik masyarakat, dan bukan menjadi milik pemerintah. Hal ini perlu ditekankan karena tercermin pada pengalaman selama ini bahwa lembaga pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat memiliki program

berdasarkan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat, dan bukan pemaksaan program dari pemerintah.

5. Aparat pelaksana program pembelajaran berbasis masyarakat tidak menangani sendiri programnya, namun bermitra dengan organisasi/organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan ini yang menjadi pelaksana dan mitra masyarakat dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka dari berbagai jenis latar belakang masyarakat yang ada, dan dalam berhubungan dengan sumber-sumber pendukung program pembelajaran berbasis masyarakat (Zubaedi, 2006: 139-140).

5. Kendala Pembelajaran Berbasis Masyarakat

Prinsip-prinsip yang perlu disadari dari pelaksanaan pembelajaran berbasis masyarakat di tingkat normatif tidak selalu sama dengan kenyataan di tingkat empiris. Sagala, dikutip Nuryatno (2008: 316-317), mencatat beberapa kendala dalam mengimplementasi pembelajaran berbasis masyarakat.

1. Kendala Eksternal

Kendala eksternal pelaksanaan pembelajaran berbasis masyarakat dapat berasal dari masyarakat, pemerintah, dan para tokoh agama, pemerintahan atau masyarakat.

a. Masyarakat

Kendala pelaksanaan pembelajaran berbasis masyarakat yang bersumber dari masyarakat ialah adanya sikap dan pola pikir masyarakat yang masih tertuju pada hal-hal bersifat kebutuhan fisik, adanya budaya menunggu dari masyarakat, dan rendahnya peran dan tanggung jawab masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah.

Selama ini yang tertanam dalam anggapan masyarakat sebagai bentuk kepemilikan dan bantuan masyarakat terhadap sekolah terbatas hanya membantu belajar peserta didik, memenuhi kebutuhan belajarnya, membayar administrasi sekolah, mendatangi rapat, atau ikut serta mencari dana bagi kebutuhan pendidikan sekolah/madrasah. Seharusnya masyarakat menyadari sebagai bentuk kepemilikan terhadap sekolah diperlukan partisipasi nyata dalam pelibatan menyusun kurikulum, membantu pendanaan sekolah, dan melayani pendidikan sesuai kebutuhan masyarakatnya (Suharto, 2012).

b. Pemerintah

Kendala pelaksanaan pembelajaran berbasis masyarakat dari pemerintah adalah adanya sistem top down dalam perencanaan, penganggaran, dan pertanggung jawaban keuangan yang dianut pemerintah, yang berakibat pertanggung jawaban keuangan lebih bersifat teknis daripada substantif. Sistem top down menunjukkan masih rendahnya kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan masyarakat, yang berakibat pada kurangnya inisiatif dalam merencanakan dan melaksanakan program dari bawah.

Sistem perencanaan di atas tidak sesuai dengan karakteristik kebutuhan belajar



masyarakat yang sangat beragam. Kendala ini ditambah oleh sikap birokrat yang belum mampu membiasakan diri bertindak untuk melayani kebutuhan masyarakat, tetapi justru bertindak seperti tuan yang berusaha mengatur, memonopoli, dan mendominasi lembaga pendidikan yang aslinya memang milik masyarakat.

Pembelajaran berbasis masyarakat pada hakikatnya merupakan salah satu agenda implementasi demokratisasi pendidikan. Peran pemerintah dalam hal ini sebagai pelayan, fasilitator, pendamping, mitra, dan penyandang dana bagi pendidikan atau pembelajaran berbasis masyarakat. Berdasarkan peran pemerintah ini, hubungan pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembelajaran berbasis masyarakat merupakan hubungan kemitraan, dengan maksud transformasi masyarakat itu sendiri (Suharto, 2012: 142).

c. Para Tokoh agama/masyarakat

Kendala pembelajaran berbasis masyarakat dari para tokoh adalah adanya tokoh-tokoh masyarakat yang seyogyanya berperan sebagai panutan atau contoh teladan namun justru berperilaku seperti tuan yang berusaha mengatur, memonopoli, dan mendominasi lembaga pendidikan. Kendala tersebut ditambah dengan kurangnya kepedulian tokoh masyarakat terhadap pentingnya pembelajaran berbasis masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mengatasi masalah pendidikan dari masyarakatnya.

Kompleksitas permasalahan yang muncul di masyarakat terkait dengan realitas dan permasalahan hidup dari waktu ke waktu hendaknya menyadarkan para tokoh agama dan masyarakat bahwa dirinya merupakan personel yang memiliki potensi dan dianggap sebagai tokoh yang dapat memberikan arahan dan kebijakan dalam mengatasi persoalan yang menghimpit masyarakat. Sekolah/lembaga pendidikan merupakan cermin masyarakat, prinsip ini seharusnya menyadarkan tokoh agama/masyarakat bahwa sekolah/lembaga pendidikan harus ikut berperan aktif dalam memecahkan problem sosial. Sebagai konsekuensinya, tokoh agama/masyarakat dituntut untuk lebih berpartisipasi aktif melipatgandakan komitmen sosiologisnya dalam dunia pendidikan (Zubaedi, 2012).

2. Kendala Internal

Kendala internal pelaksanaan pembelajaran berbasis masyarakat dapat berasal dari guru, peserta didik, dan sekolah.

a. Guru

Kendala yang berasal dari guru terkait pembelajaran berbasis masyarakat adalah berkembangnya filosofi bekerja sebagai guru yang hanya selesai setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Tugas guru bukan selesai pada saat guru telah memenuhi tugas dan jam wajib masuk kelas, tetapi ada tugas lain seperti keterlibatan guru dalam evaluasi kurikulum, bahkan perumusan kurikulum operasional setelah mengakses permintaan-permintaan dari masyarakat terkait kebutuhan dan masalah pendidikan yang



muncul di masyarakat, atau mengakses permintaan dari stakeholder dan user dari pendidikan tersebut (Rosyada, 2007: 14).

Kendala lainnya adalah terkait kompetensi profesional yang harus dimiliki guru untuk menyelenggarakan pembelajaran juga mewarnai fenomena pembelajaran berbasis masyarakat. Menjadi guru profesional diperlukan empat kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai yaitu kompetensi profesional, pedagogik, personal dan sosial (Mulyasa, 2007: 5). Terkait persyaratan menjadi guru tersebut, tentunya pihak madrasah sulit mencari tokoh agama/masyarakat dengan empat kompetensi tersebut untuk menyelenggarakan pembelajaran berbasis masyarakat. Persyaratan ini tentunya dapat menghambat pembelajaran berbasis masyarakat, karena pada realitasnya mencari standar persyaratan tersebut terutama faktor ijazah masih menjadi masalah tersendiri bagi sekolah dan masyarakat. Hal ini disebabkan tokoh agama/masyarakat dalam lingkup madrasah masih didominasi pendidikan dari pesantren, seperti pengasuh pondok pesantren, modin, dan mubaligh yang tidak memiliki kualifikasi sertifikat pendidik dari perguruan tinggi berbasis pendidikan.

b. Peserta Didik

Kendala internal terkait pelaksanaan pembelajaran berbasis masyarakat juga berasal dari peserta didik. Peserta didik yang sudah terbiasa dalam setting pembelajaran pada sekolah kurang demokratis, memiliki peran dan tugas-tugas belajar yang sedikit. Peserta didik hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran dan tugas-tugas belajar sesuai materi pada silabus yang terkesan lebih dominan pada aspek kognitif.

Melalui penerapan pembelajaran berbasis masyarakat yang memerlukan demokratisasi pembelajaran, peserta didik dituntut memiliki partisipasi yang lebih luas dalam lingkup materi sekolah dan masyarakat. Kreativitas dan keaktifan peserta didik mengaitkan materi pelajaran dengan dunia nyata melalui penelitian, pengalaman, pemecahan masalah, dan penemuan tentunya dirasa memberatkan peserta didik dalam belajar (Rosyada, 2007). Selain itu pelaksanaan dan metode pembelajaran berbasis masyarakat lebih banyak disetting di luar kelas sehingga kompetensi yang harus dikuasai peserta didik mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perubahan konsep belajar dan penerapan model pembelajaran tersebut tentunya menjadi kendala sendiri bagi peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis masyarakat.

c. Sekolah

Pembelajaran berbasis masyarakat merupakan wujud demokratisasi pendidikan yang di dalamnya juga menuntut demokratisasi manajerial, kurikulum, dan pengelolaan pembelajaran (Rosyada, 2007). Pada kasus sekolah yang umumnya dikelola secara otokratis atau dikelola secara sentralistik, dan kurang aspiratif atau kurang melibatkan mitra horizontal sekolah tentunya akan menjadi penghambat utama program pembelajaran berbasis



masyarakat (Community Based Learning). Usulan-usulan kreatif guru atau tokoh masyarakat, atau suara masyarakat terkait kebijakan dan masalah pendidikan akan selalu tersandung oleh aturan-aturan birokrasi sekolah dan kekuatan vertikal yang diberlakukan di sekolah tersebut.

Berdasarkan kendala yang telah diungkapkan di atas, diperlukan demokratisasi kurikulum dan pembelajaran yang dimbangi demokratisasi pengelolaan manajerial sekolah/madrasah. Dengan melibatkan seluruh unsurunsur dalam organisasi sekolah atau madrasah tersebut, bahkan dalam batas-batas tertentu juga harus melibatkan clientdan user sekolah atau madrasah, khususnya dalam evaluasi, pengembangan kurikulum,dan upaya-upaya mengimplementasikan berbagai program dan gagasan cerdas pengembangan sekolah/madrasah terutama dalam implementasi pembelajaran berbasis masyarakat. Berdasarkan identifikasi terhadap kemungkinan kendala-kendala internal dan eksternal yang muncul, menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran berbasis masyarakat di lapangan tidak selalu berjalan mulus, dan selalu ada kendala dan rintangan. Konsep implementasi pembelajaran berbasis masyarakat di sekolah/madrasah terkadang tidak berjalan beriringan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. I, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006.
- Ace Suryadi, 2002, *Pendidikan Investasi SDM, dan Pembangunan: Isu, Teori dan Aplikasi*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Adiwikarta, S. 1988. *Sosiologi Pendidikan : Isyu dan Hipotesis Tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat*. Jakarta : Ditjen Dikti.
- Agus Ali Suharto, 2012, *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Kediri*, *Jurnal Ilmu Manajemen REVITALISASI*, Vol 1, Nomor 3, Desember.
- Agus Wibowo. 2013. *Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Alfiantyi, A. C. (2021) 'Analisis Penetapan Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Sman/Smkn Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat', *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 3. Available
<https://ejournal.upi.edu/index.php/jtkp/article/view/40389%0Ahttps://ejournal.upi.edu/index.php/jtkp/article/viewFile/40389/16842>
- Amirulloh. 2015. *Teori Pendidikan Karakter Remaja dalam Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Amka, (2019). *Filsafat Pendidikan*. Sidorjo : Nizamia Learning Center.
- Amka. (2019). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus Di Kalimantan Selatan*. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4(1), 86 - 101. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v4i1.1234> diakses pada 9 Juli 2022.
- Amsal Bakhtiar, (2006). *Filsafat Ilmu*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Anas Salahudin, (2011) *Filsafat Pendidikan*. Bandung : Pustaka Setia..
- Anas Salahudin, Irwanto Alkrienciehie. 2013. *Pendidikan Karakter*, Bandung : CV PustakaSetia
- Anjarsari, A. D. (2018). *Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Jenjang SD, SMP, Dan SMA Di Kabupaten Sidoarjo*. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 1(2), 91–104. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v1n2.p91-104> diakses pada 22 Juli 2022.
- Apiyani, A. *et al.* (2022) 'Implementasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru Madrasah Dalam Meningkatkan Keprofesian', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), pp. 499–504. doi: 10.54371/jiip.v5i2.443
- Arif, S. (2013) 'Orientasi Pembinaan Dan Pengembangan Profesi Guru Di Madrasah', *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islams*, 8(1), pp. 142–156
- Arifin. 2003. *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang undang Sisdiknas*. Catatan ketiga. Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam
- Arifin. 2003. *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang undang Sisdiknas*. Catatan ketiga. Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam



- Asrori.(2020): Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner. Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah :CV. Pena Persada.
- Azra, Azumardi. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*.
- Azzet Akhmad Muhaimin. (2014). *Pendidikan Yang Membebaskan*. Jogjakarta: Ar RuzzMedia.
- Badan Kepegawaian Negara. (2022). *Buku Statistik Aparatur Sipil Negara*. BKN: Jakarta.
- Bafadhol, I. (2017). *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*.
- Bagus Rachmat, dkk. *Urgensi Landasan Yuridis-Politis dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jurnal Ilmu Pendidikan, November 2020).
- Brach, G. (2015) ‘Student perceptions of the value of career development learning to a work-’, *Integrated learning course in Exercise Science*, 3(5), pp. 1–2
- Chudolinska, Marta, (2014), *Community Based Learning Environment; Loking Back on Five Years in the OCAD University Learning Zone, The Canadian Partnership*, Journal of Library and Information Practice and Research, 9/2, 1-5.
- Danetta Leoni Andrea. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah* (Jurnal Ilmu Hukum Kydiren, April 2020).
- Daradjat, Z. (1997). *Peranan agama dalam kesehatan mental*. Jakarta : CV Haji Masagung.
- Depdikbud. (1999). *Perencanaan Pendidikan (Materi Pelatihan Calon Kepala. Sekolah)*.Dirjen Dikdasmen.
- Dik, B. J. *et al.* (2017) ‘Assessing Goals and Motivation in Career Decision-Making and Planning’, *Journal of Career Development*, 4(4), pp. 45–58. doi: 10.1177/0894845308317934
- Djollong, A. F. (2017) ‘Kedudukan Guru Sebagai pendidik’, *Istiqra` : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, IV(2), pp. 122–137. Available at: <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/27>
- E. Mulyasa, (2013): *Manajemen Pendidikan Karakter*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,), hlm 1-2
- Elizabeth B. Hurlock.(1980). Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Penerbit Erlangga. Jakarta..
- Farmawati, E., Ramli, A., & Rahmatullah, R. (2019). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Guru Ekonomi Pada SMA Negeri Di Kota Makassar*. JEKPEND: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan, 1(2), 23–29.
- George R. Knight. penerjemah : Dr. Mahmud Arif, M.Ag. (2007): *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta :Gama Media..
- H. Abdul Manan. (2005). *Aspek – Aspek Pengubah Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Grup,
- H.A.R. Tilaar. (2004). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Cet. Ke-2, hlm. 27
- Hasan., Harahap, & Inanna, (2013). *Landasan pendidikan*.Penerbit Tahta Media Group.
- Hasbullah. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*.Cet. Ke-3. Jakarta.Ikhsan,



- A. (2018). *Pengantar Pendidikan*. Universitas Muhan Madi.
- Hawton, Hector, (2003). *Filsafat yang Menghibur*, Terj. Supriyanto Abdullah, Yogyakarta: Ikon Teralitera.,
- Heny Perbowosari, (2020). *Pengantar Psikologi Pendidikan*. Pasuruan, JawaTimur : CV. Penerbit Qiara Media..
- Herman Harrell Horn. (2022). *Filsafat Pendidikan : The Philosophy of Education*. Babadan Baru, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta : Penerbit Indoliterasi.
- Hisarma Saragih, dkk.(2021). *Filsafat Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis, indonesia/ diakses pada 4 Agustus 2022.
- Irdamurni (2019), *Pendidikan Inklusif, Solusi Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta : Prenada Media.
- Iswadi,(2022). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Aceh : Bunda Ratu.
- Iswadi. (2019). *Pengelolaan Pendidikan*. CV.Bunda Ratu.
- Jalaluddin, R. (2002).*Psikologi Islam*.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Jalaludin, Abdullah. *Filsafat Pendidikan : Manusia, Filsafatdan Pendidikan*. Depok : Rajawali Pers. 2018.
- James E. Banks and Cherry McGee Banks (Eds) (2010), *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. New Jersey (USA): John & Wiley & Sons.
- Jiyoung Kim, Lani Florian & Nataša Pantić (2022). *The development of inclusive practice under a policy of integration*. International Journal of Inclusive Education, 26:10, 1068-1083, DOI: <https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1773946> diakses pada 22
- John W. Santrock. *Psikologi Pendidikan* (2014) : Educational Psychology. Edisi 5, Buku 2. Jakarta :Salemba Humanika..
- John W. Santrock. *Psikologi Pendidikan* (2014): Educational Psychology. Edisi 5, Buku 1. Jakarta :Salemba Humanika..
- Kartono, K. (1977). *Psycologi Wanita*. Alumni.
- Kemendiknas.2010. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*.Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional.
- Kurniawan, Syamsul. 2017. *Pendidikan Karakter Konsepsi dan Implementasi secara Terpadudi Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Latif, A. (2007). *No Title Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*. PT. Refika Aditama.
- Lay Kekeh Marthan. (2007). *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Made, Pidarta, (2013): *Landasan Kependidikan ; Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, ed. 3 cet. 3, Jakarta : Rineka Cipta ,.
- Mahkamah Konstitusi. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Latar Belakang, Proses dan Pembahasan (1999 – 2002) Buku IX*



- Pendidikan dan Kebudayaan (Edisi Revisi)*. (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
- Mahmud, Sosiologi Pendidikan. Bandung : CV. Pustaka Setia. 2012.
- Marzuki. *Politik Pendidikan Nasional Dalam Bingkai Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional*. (Jurnal Penelitian Humaniora Vol.17, 2012)
- Meichaty. A. (2019). *EFEKTIFITAS SERTIFIKASI GURU DALAM PENINGKATAN LAYANAN PROFESI KEGURUAN DI MADRASAH ALIYAH NEGERI PROVINSI JAMBI*.
- Miarso, Yusufhadi. (2007). *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta : Kencana.
- Misbah Ulmunir, “*Suplemen Mata Kuliah Sosiologi Pendidikan Islam*” Suplemen 1 Kependidikan Islam, 2006, hal 60.
- Moenir, H.A.S, (2001), *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 88
- Muchlas, Samani & Hariyanto. 2013. *Konsep dan Model : Pendidikan Karakter*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Muchsin. *Politik Hukum dalam Pendidikan Nasional* (Surabaya : Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya).
- Mudyahardjo Redja. (2002). *Filsafat Ilmu Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.
- Muhaimin, dkk. (2009). *Manajemen Pendidikan Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nanang Martono. *Sosiologi Pendidikan* (2014) : Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa..
- Nasution, (2016). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nasution,(2020): *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Jakarta : Bumi Aksara,).
- Nawafil, M. (2018). *Cornerstone Of Education (Landasan-Landasan Pendidikan)*. Absolute Media.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martimi. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum* (Yogyakarta ; Gajah Mada University Press, 1994).
- Nuryanto, dkk., (2015), *Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Dilengkapi Macromedia Flash untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Prestasi Belajar Siswa pada Materi Pokok Termokimia Kelas XI Siswa SMANegeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2014/2015*, Jurnal Pendidikan Kimia, 4(4) : 87-94.
- O. Kattsoff, Louis, (2004): *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana Yogya,.
- Paul C. Gorski (2010). *The Challenge of Defining "Multicultural Education"*. <http://www.edchange.org/multicultural/initial.html> diakses pada 23 Juli 2022.
- Paul R. Carr (2007). *Diversity, Equity and Multicultural Education*. https://www.academia.edu/8509507/Diversity_Equity_and_Multicultural_Education diakses pada 23 Juli 2022.
- Paul, T. (2003). *Education Policy*. London and New York: Routledge. hlm. 95.
- Pengelola Web Kemdikbud. (2019). *Panduan Pendataan Siswa Penyandang Disabilitas di Sekolah*



- Inklusif*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/11/panduan-pendataan-siswa-penyandang-disabilitas-di-sekolah-inklusif>, diakses pada 9 Juli 2022. Jakarta : Kemendikbudristek.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang *Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa*. Jakarta: Depdiknas.
- Pidarta Made. 1997. *Landasan Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pidarta, M. (1997). *Landasan Kependidikan*. Rineka Cipta.
- Pidarta, Made. 2007. *Landasan Kependidikan (Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Presiden Republik Indonesia. 2003. *Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Pusat Kurikulum Dan Perbukuan (2021), *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, Jakarta.
- Qomarudin, A. (2021). Aktivitas pendidikan Sebagai Suatu Sistem. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Rijal, Muhammad Fadli. *Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama*.
- Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*. (Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta: 1995).
- Robert E. Slavin. (2011): *Psikologi Pendidikan : Teori dan Praktek*. Edisi Sembilan, Jilid 2. Jakarta : PT. Indeks..
- Robert E. Slavin. (2011): *1Psikologi Pendidikan : Teori dan Praktek*. Edisi Sembilan, Jilid 1. Jakarta : PT. Indeks..
- Rosyada, Dede. 2007. *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- S. Praja, Juhaya, (2008): *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, Jakarta: Kencana,.
- S. Suriasumatri, J. (1998). *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sadulloh, Uyoh. 2006. *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Saduloh, Uyoh, (2017). *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung : Alfabeta..
- Salim, A. (2010). *Pengembangan Model Modifikasi Kurikulum Sekolah Inklusif Berbasis Kebutuhan Individu Peserta Didik*. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(7), 21-34. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i7.504> diakses pada 9 Juli 2022.
- Serevina, V. (2020). *Fundamentals of Education*. Gramedia.
- Setia Suci, Rahayu. *Sejarah Pendidikan Indonesia Dari Masa Ke Masa Membentuk Karakter Pribadi Pribumi Indonesia*.



- Seto Mulyadi, dkk. (2019). Psikologi Pendidikan : Dengan Pendekatan Teori-teori Baru dalam Psikologi. Jakarta : Raja Grafindo Persada..
- Sindhunata. (2001). *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman*. Kanisius.
- Siswantara, Yusuf (2017), *Pendidikan Multikultural: Sebuah Tantangan Pendidikan Di Indonesia*. Majalah Parahyangan, Edisi 2017 Kuartal II/ April-Juni Vol. IV Bagian
- Sudardja, Adiwikarta.,(1988) Sosiologi Pendidikan : Analisis Sosiologi Tentang Praksis Pendidikan. Bandung : Rosda..
- Sudirman. (1992). *Ilmu Pendidikan* (B. Pustaka (ed.)). Remaja Rosdakarya, tth. Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- Suhartono, Suparlan, Filsafat Pendidikan, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Sukarno., dkk. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGALJEMAN: *Journal of Islamic Educational Management* Vol. 3, No. 2, DOI: 10.35719/jieman.v3i2.93
- Sumadi Suryabrata, (2015). Psikologi Pendidikan. Jakarta : Raja GrafindoPersada..
- Sumanto, 2008.Pusat Perbukuan. (Sumber Tentang Metode- Metode Baru).Jakarta : UIP
- Sunaryo (2009), *Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, Dan Implementasinya Dalam Perspektif Pendidikan Luar Biasa)*. Jurusan PLB FIP UPI –Pebruari 2009: Manajemen Pendidikan Inklusif, <https://doi.org/10.17509/jassi.v1i1i2.3990> diakses pada 9 Juli 2022
- Supardi, U.S. *Arah Pendidikan Di Indonesai Dalam Takaran Kebijakan Dan Implementasi* (Jurnal Pendidikan).
- Suprihatiningrum, Jamil dkk., Makalah Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Ilmu, Prodi Pendidikan Sains Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2008.
- Supriyoko. (2007). *Hakikat Potitik Pendidikan Nasional dalam Ati Muhdi Amnur (Ed.), Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*. Pustaka Fahima.
- Supyarma. (2003): Manajemen Pendidikan. (Alfabeta, Bandung,).
- Susanto, A. 2010. *Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tarmansyah. (2007). *Inklusif Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Depdiknas.
- Teguh Wangsa Gandhi HW. Filsafat Pendidikan : Mazhab-Mazhab Filsafat Pendidikan. Maguwoharjo Depok, Sleman, Jogjakarta. 2020
- Tilaar, H. A. (2016). *Standarisasi Pendidikan Nasional. Suatu Tinjauan Kritis*. Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tirtarahardja, Umar dan Sulo, L. (2012). *Pengantar Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Tirtarahardja, U. (2005). *Pengantar Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Toto Suharto. “Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat,” Jurnal Cakrawala Pendidikan, November 2005, Th. XXIV, No. 3



- Triyanto, T. (2014). *Pengantar Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Tyas Dian Anggraeni. (2014). Menciptakan Sistem Pelayanan Publik yang baik: Strategi Reformasi Birokrasi dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 3, Nomor 3.
- Undang – Undang SISDIKNAS no 20 tahun 2003
- Utami Munandar. *Kreativitas dan Keberbakatan, Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif danbakat*. Jakarta : Gramedia, 2002.
- Uyoh Sadulloh, (2007). *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung : CV Alfabeta .
- Wahyudi dan Ratna Kristiawati (2016). *Gambaran Sekolah Inklusif di Indonesia, (Tinjauan Sekolah Menengah Pertama) Tahun 2016*. Disusun oleh: Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Widyastono, H. (2013). *Alternatif Program Pendidikan bagi Peserta Didik SMA yang Memiliki Kecerdasan Istimewa*. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 594-607. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.312> diakses pada 9 Juli 2022.
- Yatimah, D. (2017) . *Landasan Pendidikan* Jakarta : Alungdan Mandir.
- Yusuf, M. (2012). *Kinerja Kepala Sekolah dan Guru dalam Mengimplementasikan Pendidikan Inklusif*. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 18(4), 382-393. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v18i4.96> diakses pada 9 Juli 2022.
- Zaitun, (2016) *Sosiologi Pendidikan : Teori dan Aplikasinya*. Pekanbaru : Kreasi Edukasi Publishing and Consulting Company..
- Zamroni. (2007). *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi (Prakondisi menuju Era Globalisasi)*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Zayadi. (2005). *Desain Pendidikan Karakter*. Lencana Prenada media.
- Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm 1-2.
- Zubaedi. 2012. *Desain pendidikan karakter: konsepsi dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan*. Jakarta: Kencana